



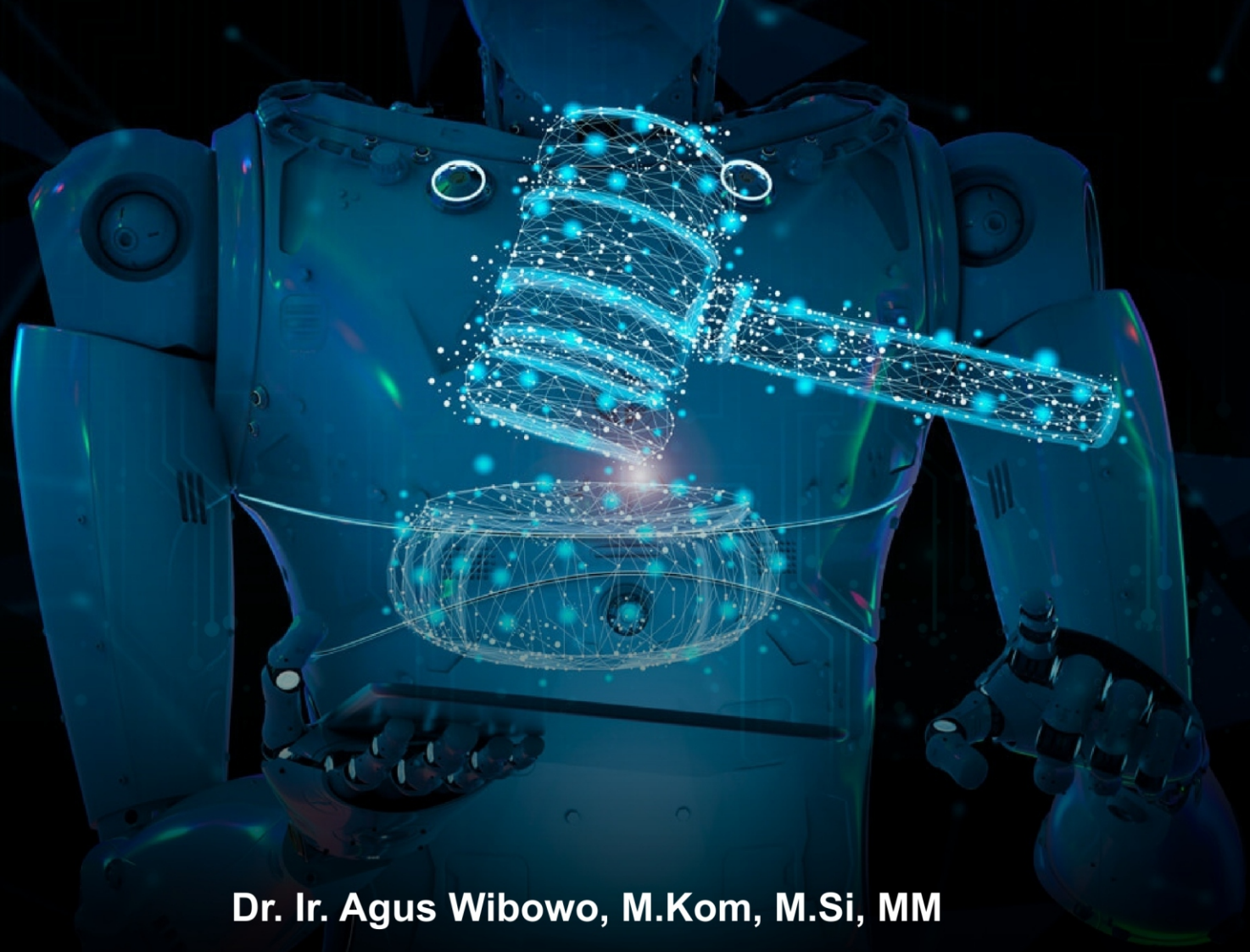
YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

Hakim, Teknologi dan Artificial Intelligence (AI)





Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

Hakim, Teknologi dan Artificial Intelligence (AI)



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Jl. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-32-4 (PDF)



9

786347

227324

Hakim, Teknologi dan Artificial Intelligence (AI)

Penulis :

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

ISBN : 978-634-7227-32-4

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Hakim, Teknologi dan Artificial Intelligence* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran hakim dalam era kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), serta implikasi hukum yang muncul di tengah perubahan tersebut.

Perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Hakim, sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum dan keadilan, tidak dapat lepas dari dampak inovasi teknologi yang disruptif ini. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk menyelami bagaimana hakim menghadapi, mengadopsi, dan beradaptasi dengan teknologi baru, serta tantangan dan peluang yang muncul, baik dari sisi yudisial, etika, maupun akses keadilan.

Melalui sepuluh bab yang tersusun sistematis, buku ini membahas berbagai aspek penting mulai dari evolusi teknologi pendukung hakim, respons pengadilan di masa krisis seperti pandemi Covid-19, hingga perdebatan mengenai batas-batas penggunaan AI dalam pengambilan keputusan yudisial. Selain itu, kajian mendalam tentang keadilan algoritmik, pengadilan online, independensi peradilan, dan tantangan etika dalam penggunaan AI juga diuraikan secara rinci untuk memberikan wawasan yang komprehensif bagi para akademisi, praktisi hukum, hakim, serta pembuat kebijakan.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam dunia peradilan dan teknologi, serta dapat mendorong pemikiran kritis dan inovatif dalam mengelola integrasi antara hukum dan teknologi. Kami menyadari, pembahasan ini masih terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut seiring pesatnya kemajuan teknologi dan dinamika hukum yang terus berubah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kemajuan peradilan dan penegakan hukum di masa depan.

Semarang, Agustus 2025

Penyusun

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 HAKIM DAN TEKNOLOGI.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Hakim Dan Perubahan Teknologi Pendukung	2
1.3 Hakim Dan Teknologi Pengganti	3
1.4 Perubahan Teknologi Yang Disruptif Dan Hakim	5
1.5 Pendahuluan Hakim AI	7
1.6 Evolusi Teknologi	9
1.7 Komentar Yudisial Tentang Perubahan Teknologi	10
1.8 Akses Terhadap Keadilan, Pengadilan, Dan Hakim.....	14
BAB 2 ADOPSI DAN ADAPTASI TEKNOLOGI OLEH HAKIM	17
2.1 Pendahuluan.....	17
2.2 Respons Pengadilan Terhadap Pandemi Covid-19	19
2.3 Responsivitas	26
2.4 Ideologi, Diskresi, Dan Pengalaman	30
2.5 Multi-Tugas	32
2.6 Kesimpulan	35
BAB 3 MENJELAJAHI KEADILAN ALGORITMIK	38
3.1 Pendahuluan.....	38
3.2 Permasalahan Bias Algoritmik	42
3.3 Bias Algoritmik dan Bias Manusia	46
3.4 Pengambilan Keputusan Administratif	50
3.5 Kesimpulan	54
BAB 4 PENGADILAN DAN TEKNOLOGI	57
4.1 Pendahuluan.....	57
4.2 Pengadilan Online.....	60
4.3 Odr Dan Pengadilan Online	66
4.4 Reformasi Sistem Manajemen Kasus	70
4.5 Alokasi Kerja Dan Manajemen Kasus Kehakiman.....	73
4.6 Kesimpulan	76
BAB 5 HAKIM VS. ROBOT ATAU HAKIM DAN COBOT?	79
5.1 Pendahuluan.....	79
5.2 Hakim Pendukung AI dan Hakim AI	81
5.3 Masalah Dengan Ai Hakim Yang Supportif	83
5.4 Evolusi Hakim Robot.....	84
5.5 Contoh Data, Kasus-Kasus Yang Menyimpang Dan Sulit	91

5.6	Kesimpulan	94
BAB 6	AKSES KEADILAN YANG LEBIH BAIK?	97
6.1	Pendahuluan.....	97
6.2	Mendefinisikan Keadilan	99
6.3	Akses Terhadap Keadilan: Potensi	106
6.4	Akses Terhadap Keadilan: Tantangan	110
6.5	Kesenjangan Digital	111
6.6	Kesimpulan	115
BAB 7	HAKIM, TEKNOLOGI, DAN INDEPENDENSI PERADILAN	117
7.1	Pendahuluan.....	117
7.2	Pengadilan Online Dan Hakim AI.....	119
7.3	Aktivisme Dan Responsivitas Peradilan	122
7.4	Hakim Dan Dampak Masyarakat	125
7.5	Penutupan Pengadilan Fisik Dan Keadilan Terbuka.....	126
7.6	Kesimpulan	128
BAB 8	HAKIM AI	131
8.1	Pendahuluan.....	131
8.2	Unsur Manusia	132
8.3	Transparensi	135
8.4	Transformasi Dan Perubahan Sistem.....	138
8.5	Permasalahan Dalam Hukum ‘Penkodean’	139
8.6	Bias	142
8.7	Diskresi Yudisial	143
8.8	Situasi Inovatif Dan Baru	145
8.9	Menciptakan Hukum ‘Baru’ – Sistem Berbasis Preseden.....	145
8.10	Kesimpulan	147
BAB 9	ISU ETIKA DALAM KECERDASAN BUATAN HAKIM	148
9.1	Pendahuluan.....	148
9.2	Hakim AI Dan Etika	151
9.3	Seberapa Banyak Penilaian Manusia Akan Dipertahankan?	154
9.4	Emosi Dan Penilaian	156
9.5	Kasus Apa Saja?	157
9.6	Triase Dan Hakim AI.....	160
9.7	Kerangka Etika	162
9.8	Kesimpulan	170
BAB 10	KEADILAN MASA DEPAN.....	172
10.1	Pendahuluan.....	172
10.2	Pendekatan Terhadap Reformasi Pengadilan Di Masa Depan	174
10.3	Reformasi Dan Hakim Online	178
10.4	Mengembangkan Hakim AI	179
10.5	Adaptabilitas Peradilan Dan Desain Yang Berpusat Pada Manusia.....	182

10.6 Membayangkan Keadilan Masa Depan	184
DAFTAR PUSTAKA	188

BAB 1

HAKIM DAN TEKNOLOGI

1.1 PENDAHULUAN

Pada tahun-tahun menjelang 2020, banyak proses yang digunakan oleh hakim di seluruh dunia mencerminkan proses yang telah digunakan selama beberapa dekade. Meskipun terdapat sejumlah anomali di tingkat peradilan dan pengadilan, hakim dan pengadilan seringkali mengandalkan pertukaran lisan berbasis kertas dan tatap muka dengan penggunaan teknologi yang terbatas. Jika mereka tidak mengandalkan mode operasional ini, kemajuan teknologi cenderung meniru atau mencerminkan pendekatan berbasis kertas dan tatap muka yang sudah ada. Namun, pada tahun 2020, beberapa pengadilan mulai beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dan telah mengintegrasikan fitur Penyelesaian Sengketa Daring (*Online Dispute Resolution*) ke dalam kegiatan mereka, mendigitalkan catatan, mengaktifkan sistem e-filing tanpa kertas, dan mulai mengembangkan cara-cara baru untuk berinteraksi dengan masyarakat yang didukung oleh teknologi. Pengadilan yang mengadopsi pendekatan semacam itu terkadang disebut sebagai 'pengadilan daring' atau 'e-court' untuk membedakannya dari pengadilan yang belum mengadopsi reformasi berbasis teknologi. Di beberapa sistem peradilan, perkembangan ini dipimpin oleh pengadilan dan Ketua Mahkamah Agung (terutama di Amerika Serikat), sementara di tempat lain, perkembangan ini didukung oleh organisasi-organisasi di luar pengadilan, oleh pemerintah atau gabungan pejabat pengadilan yang bekerja sama dengan pemerintah (misalnya di Inggris dan Tiongkok dengan inisiatif 'pengadilan pintar').

Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, semakin banyak pengadilan yang mulai mengubah cara operasionalnya atau meningkatkan dan mempercepat perubahan teknologi yang sudah berlangsung. Namun, beberapa pengadilan tidak dapat dengan cepat mengubah sistem pengadilan ke mode operasi jarak jauh dan, akibatnya, terjadi penundaan, penundaan, dan kebingungan dalam kegiatan pengadilan, dengan kebaruan yurisdiksi sebagai ciri respons tahun 2020 terhadap pandemi global. Dalam beberapa kasus, peralihan ke operasi pengadilan jarak jauh tidak dapat dilakukan karena masalah peradilan, pengadilan, atau masyarakat, termasuk kurangnya akses ke teknologi atau ketidakmampuan untuk menggunakan teknologi yang ada.

Buku ini ditujukan untuk memetakan perubahan-perubahan ini, dengan mempertimbangkan bagaimana hakim menggunakan teknologi yang ada dan bagaimana perubahan teknologi, yang seringkali disertai dengan bentuk-bentuk kecerdasan buatan (AI) yang canggih, dapat mengubah dan memengaruhi fungsi peradilan di masa depan. Dalam hal ini, perbedaan dapat ditarik mengenai jenis-jenis reformasi teknologi yang dapat membentuk kembali peran peradilan dan sistem peradilan, dan beberapa reformasi mungkin memiliki dampak yang lebih kecil daripada yang lain. Misalnya, sebagaimana dibahas di bawah ini, pertama dan pada tingkat yang paling mendasar, teknologi dapat membantu

menginformasikan, mendukung, dan menasihati orang-orang yang terlibat dalam kegiatan peradilan ('teknologi pendukung'). Kedua, teknologi dapat menggantikan kegiatan dan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh manusia ('teknologi pengganti'). Terakhir, pada tingkat ketiga, teknologi dapat menyediakan berbagai bentuk peradilan yang sangat berbeda, terutama ketika prosesnya berubah secara signifikan ('teknologi disruptif'). Banyak perubahan dalam sistem peradilan hingga saat ini berfokus pada pengembangan teknologi pendukung.

Pada setiap tingkat ini, peran peradilan dapat terdampak dan tingkat serta jenis keterlibatan peradilan dapat berbeda. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa hakim dan pengadilan sangat beragam, dengan fungsi, sistem, dan proses yang berbeda di berbagai pengadilan di seluruh dunia. Namun, isu-isu etika dan isu-isu lain yang lebih signifikan mungkin muncul terutama pada tingkat kedua (teknologi pengganti) dan pada tingkat ketiga (teknologi disruptif). Di ketiga tingkat tersebut, terdapat pertanyaan tentang kesiapan inovasi dan kesiapan pengadilan, hakim, praktisi hukum, dan sistem peradilan secara lebih luas untuk merangkul perubahan teknologi. Selain itu, masih terdapat pertanyaan tentang kesesuaian perubahan yang tidak hanya dapat mengubah kinerja masing-masing hakim, tetapi juga mengubah sistem peradilan dan posisi hakim dalam masyarakat.

1.2 HAKIM DAN PERUBAHAN TEKNOLOGI PENDUKUNG

Sejumlah pengadilan dan hakim telah memanfaatkan teknologi pendukung secara semakin luas dan ekstensif. Ini termasuk menggunakan situs web, 'aplikasi keadilan' dasar dan sistem informasi untuk menginformasikan dan mendukung pengguna pengadilan. Di masa lalu komentator telah mendesak pengadilan untuk meningkatkan inovasi dengan menyelesaikan perselisihan secara daring atau melalui telepon. Namun, baru-baru ini teknologi pendukung yang memungkinkan konferensi video berkembang pesat di pengadilan dalam konteks pandemi global. Misalnya, sidang pengadilan dan beberapa pekerjaan lain yang dilakukan oleh hakim sekarang dapat berlangsung di lingkungan yang sepenuhnya jarak jauh, dengan penggunaan teknologi konferensi video yang menghilangkan kebutuhan hakim, praktisi hukum, atau para pihak untuk hadir secara fisik di ruang sidang. Banyak pengadilan di seluruh dunia menanggapi akses ke keadilan dalam periode COVID-19 dengan mendukung sidang jarak jauh. Pengadilan Keluarga Inggris dan Divisi Keluarga Pengadilan Tinggi adalah salah satu contoh, yang mendirikan 'Pengadilan Keluarga Akses Jarak Jauh' yang memungkinkan perselisihan untuk didengar berdasarkan akses virtual.

Analisis respons pengadilan terhadap COVID-19 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sejumlah pengadilan menggunakan berbagai proses untuk beralih ke pendekatan sidang dan manajemen perkara daring sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Seringkali, kapasitas untuk mengubah cara beroperasi secara cepat bergantung pada keadaan para pihak yang berperkara dan sejauh mana pengadilan telah merangkul perubahan teknologi, serta sejauh mana terdapat pendanaan dan antusiasme peradilan yang memungkinkan pengadilan untuk melakukannya.

Tingkat pendanaan sangat relevan karena kurangnya dana pengadilan merupakan ciri kebijakan pemerintah awal abad ke-21 di banyak negara. Selain itu, di banyak yurisdiksi,

terdapat perpecahan: pengadilan sipil dapat terus beroperasi sementara pengadilan pidana tidak bisa. Misalnya, telah dicatat di Inggris bahwa 'teknologi digital telah memungkinkan yurisdiksi sipil tertentu untuk beroperasi mendekati tingkat normal pra-COVID-19'.

Pada saat yang sama, bukti dari penelitian selama beberapa dekade menunjukkan bahwa klien antusias dengan pendekatan daring yang suportif terhadap keadilan, dengan banyak yang menganggap pendekatan daring memungkinkan akses terhadap keadilan. Misalnya, pada tahun 2020, tinjauan terhadap pengaturan di pengadilan Inggris yang merupakan hasil dari perubahan COVID-19 menemukan bukti tingkat 'kepuasan' yang tinggi terhadap sidang jarak jauh di antara banyak pengguna. Namun, terlepas dari antusiasme terhadap opsi daring selama hampir dua dekade, di banyak yurisdiksi, reformasi di pengadilan dan bidang peradilan berjalan lambat.

Dalam hal ini, banyak teknologi pendukung yang saat ini digunakan di luar sistem pengadilan yang menampilkan aplikasi dan bot pendukung, sejauh ini penggunaannya terbatas di pengadilan. Namun, penulis mencatat bahwa telah terjadi beberapa perkembangan canggih dari teknologi-teknologi ini di sektor peradilan yang lebih luas.

Seringkali, teknologi pendukung yang mengandalkan dan dapat mendorong digitalisasi dapat memberikan banyak manfaat dan membuka jalan bagi pengembangan teknologi tambahan. Selain itu, banyak komentator berpendapat bahwa digitalisasi proses pengadilan adalah kunci untuk memastikan prinsip-prinsip akses terhadap keadilan tetap terjaga. Namun, sejauh mana digitalisasi tersebut bersifat mendukung dapat bervariasi. Misalnya, dalam pidato tahun 2019 berjudul 'Teknologi dan Masa Depan Pengadilan', Ketua Mahkamah Agung Allsop dari Pengadilan Federal Australia membedakan antara proses digitalisasi 'internal' dan 'eksternal'. Yang pertama menggambarkan perkembangan standar, seperti pengarsipan dokumen secara elektronik dan basis data daring. Yang terakhir berhadapan dengan klien dan mencakup proyek modernisasi digital eksternal dan berskala besar yang lebih ambisius.

1.3 HAKIM DAN TEKNOLOGI PENGGANTI

Pada tingkat teknologi pengganti, pengembangan sistem manajemen perkara, sistem pengajuan daring, dan sistem yang lebih canggih dan mudah diakses yang dapat mencakup aplikasi, serta obrolan dasar atau bot suara telah menjadi fitur di beberapa pengadilan yang lebih berkembang. Susskind telah mengidentifikasi sistem tersebut sebagai sesuatu yang digunakan untuk 'meningkatkan, menyempurnakan, merampingkan, mengoptimalkan, dan meningkatkan cara kerja tradisional kita'. Susskind menyebut pendekatan terhadap teknologi pengadilan ini sebagai 'otomatisasi', atau 'mencangkokkan teknologi baru ke praktik kerja lama'. Meskipun pendekatan ini dapat mengubah cara kerja pengadilan dan hakim, perubahan tersebut mengasumsikan bahwa operasi pengadilan akan terus berlanjut dengan cara yang mirip dengan masa lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, juga terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa daring (ODR) yang dapat dimungkinkan oleh teknologi pendukung dan pengganti. Sebagaimana diuraikan oleh Legg, ODR adalah istilah luas yang mencakup penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang dilakukan secara daring, dan sistem pengadilan

daring. Lebih spesifik lagi, penulis, bersama Liyanage, telah mencatat bahwa ODR dapat mencakup proses fasilitatif seperti mediasi daring, proses konsultasi seperti penilaian kasus daring, dan proses determinatif seperti arbitrase atau adjudikasi daring.

Perkembangan ODR juga memiliki kapasitas untuk membentuk kembali kegiatan pengadilan dan berdampak pada peran yudisial. Dampaknya muncul sebagian karena sistem ODR dapat memungkinkan akses yang lebih besar terhadap keadilan dengan menyediakan opsi penyelesaian sengketa tambahan dan dengan menginformasikan serta mendukung para pihak yang bersengketa sehingga penyelesaian yang lebih dini dapat dimungkinkan. Selain itu, karena sistem yang dikembangkan dapat digunakan untuk mengumpulkan data, sistem tersebut dapat menyediakan platform untuk pengembangan bentuk-bentuk AI yang berpotensi berdampak langsung pada hakim dan bahkan dapat menyebabkan penggantian hakim.

Proses konsultasi dan penentuan ODR dapat menggunakan berbagai proses AI yang sederhana maupun yang lebih canggih. Sistem semacam itu mungkin lebih dari sekadar menyediakan informasi, melainkan mengambil peran yang lebih aktif dalam penyelesaian sengketa. Mungkin format penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan di dunia ditetapkan di luar sistem pengadilan melalui sistem ODR eBay dan Paypal, yang menangani sekitar 60 juta sengketa per tahun. Di Amerika Serikat, operator ODR komersial Modria (sekarang bagian dari Tyler Technology) diperkirakan telah menyelesaikan lebih dari 1 miliar sengketa di area ini dan sehubungan dengan klaim sederhana yang lebih luas. ODR juga telah dianut dalam skala yang jauh lebih besar oleh Uni Eropa (UE). Peraturan UE 524/2013 menciptakan alat ODR untuk membantu konsumen dan pengecer dalam sengketa konsumen. Sejak dimulai pada Januari 2016, telah ada lebih dari 8,5 juta pengunjung ke layanan ini dan 120.000 klaim yang diajukan melalui sistem tersebut. Proses ODR dapat dianggap mengganggu jika mencakup proses AI yang mungkin tidak melibatkan praktisi 'manusia'.

Sejumlah proyek ODR internasional bertindak sebagai sistem 'tambahan' untuk sistem peradilan tradisional dan beberapa sistem ODR ada di dalam pengadilan. Misalnya, di Pengadilan Gugatan Kecil Utah, sistem ODR yang diadopsi pada September 2018 mampu mengelola seluruh sengketa secara daring. Pengadilan Resolusi Sipil (CRT), didirikan di British Columbia pada tahun 2012, adalah Pengadilan yang sepenuhnya daring yang menangani gugatan kecil dan sengketa kondominium, serta klaim kecelakaan dan cedera kendaraan bermotor. CRT menyediakan informasi hukum, perangkat, dan sumber daya yang disesuaikan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka. Hingga Juli 2020, CRT melaporkan 16.194 sengketa yang telah selesai. Khususnya, sifat digital CRT memungkinkannya untuk 'tetap beroperasi penuh' selama pandemi global 2020.

Ada beberapa perkembangan teknologi yang awalnya dapat melibatkan penggantian manusia yang juga dapat mengganggu operasi sistem peradilan. Misalnya, dalam lima tahun dari 2015 hingga 2020, juga terjadi pertumbuhan signifikan dalam 'aplikasi keadilan' atau 'aplikasi hukum', aplikasi berbasis seluler dan web yang dimaksudkan untuk membantu individu dengan tugas-tugas hukum. Aplikasi 'robotlawyer' yang lebih canggih dapat menawarkan rekomendasi atau solusi berdasarkan pohon logika keputusan kondisional dan

kausal, dan dalam beberapa kasus, teknik AI yang lebih canggih. Selain itu, baik bot maupun aplikasi semakin banyak digunakan di sektor peradilan untuk membantu merujuk sengketa kepada manusia (pengacara, mediator, dan ahli) dan untuk memberikan nasihat dan dukungan kepada orang-orang yang mungkin terlibat dalam proses pengadilan dan semakin mengandalkan AI untuk membantu mereka melakukannya.

Teknologi pengganti semacam itu dapat digunakan di pengadilan daring yang, seperti yang dikemukakan Susskind, merupakan ilustrasi transformasi yang jelas, dengan teknologi semacam itu melampaui sekadar mempertahankan atau menyederhanakan sistem pengadilan yang ada. Khususnya, tingkat perubahan teknologi ini dapat melibatkan perubahan yang lebih signifikan dan luas. perubahan yang dapat membentuk kembali cara pengadilan beroperasi.

1.4 PERUBAHAN TEKNOLOGI YANG DISRUPTIF DAN HAKIM

Ini adalah pada tingkat 'disruptif' ketiga di mana teknologi dapat 'menggantikan dan merevolusi kebiasaan kerja konvensional dan membawa perubahan radikal'. Seringkali, perubahan semacam itu terkait dengan pengembangan AI. AI digunakan dalam buku ini sebagai istilah umum yang mencakup cabang-cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan sering kali melibatkan pembuatan algoritma kompleks untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Pembelajaran mesin saat ini merupakan salah satu mode dominan AI yang sedang berkembang. Alat pembelajaran mesin menawarkan potensi untuk membuat keputusan yang lebih akurat, berdasarkan data dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dapat diproses oleh manusia. Menurut Coglianese dan Lehr, hal ini disebabkan oleh dua hal utama: algoritma pembelajaran mesin berbeda dari teknik statistik tradisional. Pertama, algoritma pembelajaran mesin mampu membuat prediksi. Dalam hal ini, algoritma pembelajaran mesin memungkinkan data aktual untuk 'menentukan bagaimana informasi yang terkandung dalam variabel input disatukan untuk memperkirakan nilai variabel output'. Hal ini berbeda dengan metode AI yang lebih tradisional, yang lebih berfokus pada tinjauan seberapa baik data tersebut sesuai dengan pilihan-pilihan tertentu yang telah dipilih sebelumnya dalam hal hasil.

Cara kedua di mana pembelajaran mesin berbeda dari teknik tradisional adalah melalui kemampuan untuk belajar. Saat data dikumpulkan dan dianalisis, algoritma terus memperbarui dan memodifikasi perhitungannya untuk pada akhirnya memungkinkan prediksi yang lebih akurat dibuat. Dengan demikian, jika bekerja dengan baik, algoritma pembelajaran mesin dapat menghasilkan hasil atau keputusan otomatis yang lebih akurat mendekati hasil yang akan dibuat oleh manusia dalam situasi yang sama. Dalam konteks sektor peradilan, pembelajaran mesin dapat memiliki dampak yang signifikan pada prediksi hasil litigasi, pemeriksaan dokumen hukum secara otomatis, dan analisis masalah faktual dalam konteks hukum.

Proses yang dilakukan melalui AI dapat menggunakan logika atau algoritma berkode untuk membuat keputusan, bagian dari keputusan, atau rekomendasi. Sebagaimana diuraikan oleh Parasuraman dan Riley, proses otomatisasi 'dikarakterisasi oleh serangkaian tingkatan, bukan sebagai konsep semua atau tidak sama sekali'. Ini berarti keputusan dapat diotomatisasi seluruhnya atau sebagian, dengan beberapa memerlukan keterlibatan manusia pada tahap

pengambilan keputusan, dan yang lainnya beroperasi secara otonom tanpa pengambil keputusan manusia. Proses-proses ini juga dapat diintegrasikan pada berbagai tahap pengambilan keputusan. proses dan melibatkan tingkat pengawasan dan verifikasi manusia yang berbeda-beda.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, algoritma pembelajaran mesin terus memperbarui perhitungannya dan karenanya dapat ‘mempelajari’ cara membuat prediksi yang lebih akurat seiring dengan semakin banyaknya data yang melewati programnya. Dalam hal ini, pengetahuan atau pengalaman yang dipelajari yang biasanya akan menginformasikan prediksi hasil seseorang kini menjadi elemen yang tidak lagi unik bagi pengambilan keputusan manusia. Contoh yang baik dari hal ini diberikan oleh sebuah studi tahun 2016 yang dilakukan oleh para peneliti DeepMind Google. Dalam studi tersebut, para peneliti berhasil menggunakan teknik pembelajaran terawasi dan penguatan untuk melatih program AI, AlphaGo, untuk memainkan permainan Go yang terkenal menantang. Dalam melakukannya, para peneliti melaporkan bahwa program AlphaGo ‘mengalahkan juara Go Eropa manusia dengan 5 permainan berbanding 0’.

Ada juga sejumlah upaya untuk memprediksi hasil kasus pengadilan secara algoritmik. Misalnya, sebuah algoritma pembelajaran mesin yang dikembangkan oleh ilmuwan komputer di University College London, mampu memprediksi keputusan ($n = 584$) dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dengan akurasi 79 persen dengan menerapkan pemrosesan bahasa alami dan algoritma pembelajaran mesin pada materi berbasis teks. Namun, sebagaimana dicatat oleh Margaret Beazley, mantan Presiden Pengadilan Banding New South Wales Australia, sistem Eropa mungkin tidak memiliki tradisi lisan yang merupakan bagian penting dari penentuan hakim dalam beberapa sistem hukum umum. Menurut Morison dan Harkens, model-model tersebut berpotensi digunakan sebagai metode triase kasus, untuk menangani peningkatan jumlah kasus. Morison dan Harken menjelaskan bahwa aplikasi pengadilan dapat dinilai secara algoritmik berdasarkan yurisprudensi sebelumnya untuk menentukan kemungkinan hasil kasus, sebelum disortir (yaitu, diterima atau ditolak) sebelum pemeriksaan manusia.

Pengadilan Tiongkok telah mulai menggunakan teknik AI untuk membantu dan mengawasi hakim. Secara umum, teknik-teknik ini dapat mengambil salah satu dari dua bentuk. Di satu sisi, banyak pengadilan lokal di Tiongkok sedang mengembangkan sistem case pushing yang ‘mendorong’ putusan kasus serupa ke hakim untuk referensi mereka. Tujuan dari sistem case pushing AI adalah untuk memastikan bahwa kriteria putusan konsisten antara kasus analog. Di sisi lain, pengadilan lain di Tiongkok sedang mengembangkan sistem peringatan ‘putusan abnormal’. Sistem ini mengambil pendekatan manajemen risiko untuk pengawasan dan mengeluarkan peringatan kepada atasan hakim jika keputusan yang dibuat ‘sangat berbeda dari putusan kasus serupa’.

Salah satu contoh dari pendekatan ini disediakan oleh Pengadilan Menengah Rakyat Taizhou di Provinsi Zhejiang, yang telah mengembangkan sistem manajemen risiko yang bertujuan untuk meningkatkan integritas peradilan. Sistem ini bekerja dengan menetapkan 60 ‘indikator risiko’ di tujuh kategori yang berfungsi untuk mengevaluasi risiko peradilan yang

timbul dari kegiatan persidangan, penegakan hukum, dan administrasi menggunakan label berkode warna. Hingga April 2019, total 248 risiko telah terdeteksi dan peringatan telah dikirim oleh sistem.

Meskipun penerapan AI pada masalah hukum telah diselidiki sejak tahun 1970an, perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan peluang baru. Seperti yang dicatat oleh Donoghue, pengadilan dan profesi hukum merupakan salah satu domain profesional yang paling konservatif dalam hal adopsi teknologi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hal ini telah berubah secara dramatis, dan sementara proses AI telah muncul selama 50 tahun terakhir, sebagian besar hanya dalam dekade terakhir ini mereka diarahkan pada proses dalam sektor peradilan. Di luar sektor peradilan, perkembangan di bidang ini telah signifikan, dan pada tahun 2015 McKinsey Global Institute menyimpulkan bahwa, dibandingkan dengan Revolusi Industri, revolusi AI dan data besar 'terjadi sepuluh kali lebih cepat dan pada skala 300 kali lipat, atau sekitar 3.000 kali lipat dampaknya'. Sebuah survei tahun 2016 terhadap peneliti pembelajaran mesin ($n = 352$) menemukan bahwa 45 persen peneliti memandang kecerdasan mesin tingkat tinggi memiliki hasil yang 'baik' atau 'sangat baik' pada kemanusiaan dalam jangka panjang. Sebaliknya, hanya 10 persen yang menganggap AI akan memiliki 'hasil yang buruk', dan 5 persen menganggap AI akan memiliki hasil yang 'sangat buruk'.

Meskipun demikian, masih ada skeptisisme mengenai potensi AI untuk mengubah sistem peradilan dalam hal dampaknya terhadap kasus-kasus individual. Seperti yang dicatat oleh Morison dan Harkens, dalam sebagian besar kasus, teknologi bertindak terutama 'sebagai alat untuk membantu penyelesaian sengketa daripada sistem otonom yang benar-benar dapat memproses, mengadili, atau menyelesaikan sengketa secara independen'. Paliwala juga mencatat bahwa perubahan terutama disebabkan oleh metode teknologi informasi biasa seperti pemrosesan data, dan hasilnya tidak berhasil ketika teknologi informasi telah diterapkan pada proses hukum yang lebih dalam. Menurut Sunstein, ini karena teknik AI saat ini tidak mampu membuat penilaian nilai yang diperlukan oleh penalaran berbasis kasus. Ada juga masalah lain, seperti dampak yang lebih luas yang tidak diinginkan yang mungkin termasuk menghambat perkembangan hukum atau 'menghilangkan rasa manusiawi' pengalaman pengadilan, serta dampak negatif potensial yang lebih luas pada pemerintah dan masyarakat yang mungkin sebagian timbul sebagai akibat dari restrukturisasi pengaturan tata kelola dalam sistem peradilan dan pengadilan yang mungkin disertai dengan hilangnya status dan rasa hormat bagi hakim.

1.5 PENDAHULUAN HAKIM AI

Hakim AI mengacu pada perkembangan di berbagai cabang AI yang secara khusus berkaitan dengan kontribusi terhadap tugas peradilan, dan dapat menggabungkan berbagai teknologi disruptif. Ini mencakup berbagai kemungkinan, mulai dari meningkatnya penggunaan teknologi dalam proses peradilan sebelum persidangan, hingga memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan ('Hakim AI yang suportif') atau menggantikan hakim sepenuhnya ('Hakim AI'). Sebagaimana dicatat oleh penulis dan Cornes, bahkan

sebelum suatu kasus diajukan ke hadapan hakim, AI dapat berdampak pada tugas peradilan berdasarkan dampaknya terhadap profesi hukum dan bagaimana kasus dipersiapkan dan diajukan ke pengadilan. Penulis telah mencatat bahwa ini dapat mencakup perkembangan pengkodean prediktif yang dapat memengaruhi kasus mana yang akan diajukan ke hadapan hakim. Setelah kasus diajukan ke pengadilan, Hakim AI yang suportif juga dapat berperan dalam aspek pengambilan keputusan peradilan.

Salah satu cara sederhana dan bisa dibilang sering diabaikan di mana AI suportif dapat berkontribusi pada tugas peradilan adalah dengan menawarkan bantuan administratif. Misalnya, sebuah makalah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok menjelaskan bahwa pengadilan Tiongkok telah 'mengembangkan berbagai platform asisten pintar untuk pekerjaan administratif'. Contoh lain adalah sistem pengadilan pintar terintegrasi yang digunakan oleh Pengadilan Menengah Rakyat Suzhou di Provinsi Jiangsu. Sistem ini memungkinkan proses litigasi sepenuhnya bebas kertas dengan mendigitalkan berkas kasus dan menggunakan teknologi transkripsi suara-ke-teks untuk sidang pengadilan, navigasi perintah suara untuk bukti elektronik dan 'pembuatan satu klik' putusan untuk kasus-kasus sederhana. Sistem ini telah terbukti sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi peran peradilan, dengan beban kerja administratif hakim dilaporkan berkurang sekitar 40 persen. Namun, ada cara-cara tambahan di mana AI dapat memengaruhi fungsi peradilan yang dibahas di seluruh buku ini. Mengenai potensi AI untuk menggantikan hakim manusia, para peneliti pembelajaran mesin meyakini terdapat peluang 50 persen AI akan mengungguli manusia dalam semua tugas dalam 45 tahun, dan mengotomatiskan semua pekerjaan manusia dalam 120 tahun. Lebih spesifik lagi, sebuah studi tahun 2013 yang memeringkat 702 pekerjaan dari yang paling kecil kemungkinannya hingga yang paling mungkin digantikan oleh teknologi memperkirakan bahwa terdapat peluang 40 persen bagi 'Hakim, Hakim Magistat, dan Magistat', dan peluang 64 persen bagi 'Hakim Hukum Administrasi, Adjudikator, dan Petugas Sidang', untuk digantikan oleh robot. Sebaliknya, dalam studi tersebut, peluang pengacara digantikan oleh robot hanya 3,5 persen.

Hakim AI dapat berdampak pada aspek prosedural dan substantif dalam pengambilan keputusan peradilan. Seperti yang dicatat oleh Zalnieriute dan Bell, otomatisasi langkah-langkah prosedural sangat berbeda dengan otomatisasi keputusan substantif, sehingga menuntut 'pendekatan yang bernuansa' terhadap penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan peradilan. Tan menjelaskan bahwa tingkat otomatisasi yang digunakan dapat bervariasi dari proses 'dukungan keputusan' hingga proses 'manusia-dalam-lingkaran', dan bahkan hingga penghapusan total manusia dari proses pengambilan keputusan.

Zalnieriute dan Bell membedakan dua gelombang AI yang dapat diterapkan pada pengambilan keputusan peradilan. 'Gelombang pertama' AI adalah proses yang mengikuti serangkaian aturan terprogram untuk mencerminkan respons seorang pakar manusia. EXPERTIUS sebuah sistem pendukung keputusan yang digunakan di Meksiko untuk memberi nasihat kepada hakim dan panitera pengadilan mengenai apakah seorang penggugat memenuhi syarat untuk mendapatkan pensiun adalah salah satu contoh proses AI 'gelombang pertama'. 'Gelombang kedua' AI mencakup teknik-teknik seperti pembelajaran mesin terawasi

dan pembelajaran mendalam. Teknik-teknik ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, memungkinkan sistem untuk 'belajar' dari data guna menarik kesimpulan tentang situasi baru.

AI Hakim mau tidak mau menimbulkan pertanyaan terkait etika dan nilai-nilai inti yang relevan dalam hal makna keadilan. Merumuskan kerangka etika yang luas dan juga mengartikulasikan tujuan sistem peradilan dapat membantu dalam mengevaluasi dan menentukan sejauh mana perkembangan teknologi dapat atau harus dikejar. Dalam hal ini, ada beberapa karya yang dapat berguna yang telah dikembangkan pada tingkat yang lebih mikro serta pada tingkat yang lebih makro dengan munculnya kerangka etika yang berkaitan dengan penggunaan AI oleh peradilan.

1.6 EVOLUSI TEKNOLOGI

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tidak semua pengadilan atau, dalam hal ini, semua hakim berada pada tahap perkembangan atau pemahaman teknologi yang sama. Namun, penting untuk mempertimbangkan tahap perkembangan teknologi saat ini dalam konteks tren menyeluruh yang berdampak pada banyak masyarakat di seluruh dunia. Dalam hal ini, Susskind berpendapat bahwa kemajuan teknologi dapat dipahami dalam empat kategori. Pertama, teknologi maju pada 'tingkat eksponensial'. Kemajuan ini telah memicu tren kedua: sistem kita menjadi 'semakin mampu'. Tren utama ketiga telah melihat sistem kita menjadi 'semakin luas'. Akhirnya, manusia menjadi 'semakin terhubung'.

Tiga cara utama dan saling terkait di mana teknologi membentuk kembali sistem peradilan dalam hal teknologi pendukung, pengganti dan mengganggu yang dibahas sebelumnya juga dapat dipahami dalam konteks tren menyeluruh ini. Selain itu, ketiga tingkat ini, selaras dengan tiga tingkat inovasi yang dijelaskan oleh Katsh dan Rabinovich-Einy. Katsh dan Rabinovich-Einy mengidentifikasi tiga fase utama atau 'tingkat evolusi' dalam pengembangan ODR: (i) di mana elemen teknologi komunikasi informasi memungkinkan perselisihan untuk dikompilasi dan ditangani oleh para pihak secara daring; (ii) di mana algoritma langsung menerapkan berbagai aturan terkait dengan banyak faktor; dan (iii) dimana 'data dikumpulkan dalam jumlah besar dan diperiksa dan digunakan kembali oleh algoritma untuk menganalisis pola dan menghasilkan prediksi atau keputusan mengenai hasil dari kasus tertentu'.

Oleh karena itu, perubahan teknologi seringkali dibangun di atas perubahan teknologi yang telah mendahuluinya. Misalnya, perkembangan yang mencakup digitalisasi catatan pengadilan akan mendukung pengembangan sistem AI. Perkembangan dalam analisis data yang mengikuti digitalisasi akan memungkinkan pengadilan untuk memahami lebih jauh tentang siapa yang menggunakan pengadilan, bagaimana dan mengapa, yang pada gilirannya dapat mengarah pada pendekatan manajemen kasus yang direvisi yang bergantung pada AI. Hakim dapat membuat alasan tertulis mereka untuk suatu keputusan lebih 'dapat dibaca mesin', dan perubahan tersebut juga akan memfasilitasi pengembangan AI Hakim di kemudian hari. Meskipun banyak hakim mungkin tidak peduli dengan tahap awal dalam siklus evolusi teknologi, mereka mungkin lebih peduli tentang apa yang mungkin terjadi setelah

perkembangan awal, dan, seperti yang disebutkan di bawah ini, beberapa hakim lebih kritis daripada yang lain tentang potensi dampak jangka panjang.

1.7 KOMENTAR YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN TEKNOLOGI

Hingga saat ini, banyak hakim telah menulis dan/atau mempresentasikan topik perubahan teknologi dan sistem peradilan, dengan banyak yang menyadari potensi kapasitas disruptif serta kekhawatiran terkait kemampuan pengadilan, hakim, dan pihak lain untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Sundares Menon, Ketua Mahkamah Agung Singapura, misalnya, telah mencatat bahwa 'teknologi akan menjadi kekuatan tunggal paling ampuh untuk membentuk kembali profesi kita di tahun-tahun mendatang'. Dalam sebuah wawancara tahun 2017, John G Roberts Jr, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, ditanya 'bisakah Anda membayangkan suatu hari ketika mesin pintar, yang digerakkan oleh kecerdasan buatan, akan membantu pencarian fakta di ruang sidang atau, yang lebih kontroversial, pengambilan keputusan pengadilan?' Ketua Mahkamah Agung menjawab: 'saat ini telah tiba, dan hal ini memberikan tekanan yang signifikan pada cara peradilan menjalankan tugasnya'.

Meskipun banyak komentator pengadilan mungkin memiliki antusiasme Untuk teknologi pendukung yang memungkinkan sidang daring dan teknologi pengganti yang memungkinkan pengajuan daring, mereka belum tentu mempertimbangkan penggunaan teknologi yang lebih disruptif yang dapat, misalnya, mendorong Hakim AI. Sebagai contoh, dalam menanggapi pandemi COVID-19, sejumlah hakim telah menyatakan pandangan positif terkait penggunaan teknologi pendukung dan mengindikasikan bahwa beberapa pengaturan yang telah diperkenalkan kemungkinan akan tetap ada. Misalnya, Ketua Mahkamah Agung McCormack dari Mahkamah Agung Michigan, Amerika Serikat, telah mengindikasikan bahwa 'banyak penyesuaian "sementara" terkait pandemi kemungkinan besar merupakan perbaikan permanen: "Saya rasa keadaan tidak akan pernah kembali seperti semula, dan saya pikir itu hal yang baik". Pada saat yang sama, dalam merefleksikan perubahan tersebut, Yang Mulia mencatat bahwa:

'Sebagian besar [pengadilan] mempelajari pelajaran yang berharga berbulan-bulan dalam hitungan hari. Mereka mempelajari keterampilan karena mereka harus melakukannya. Begitu Anda harus melakukannya ... Anda mempertahankan bagian-bagian yang bermanfaat. Ini bukanlah gangguan yang kami inginkan, tetapi gangguan yang kami butuhkan'.

Namun, komentar yudisial yang terbatas tentang tingkat ketiga perubahan disruptif cukup terbagi dalam hal apakah perubahan teknologi yang lebih luas bermanfaat atau tidak. Hingga taraf tertentu, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para komentator peradilan masih berfokus pada tingkat perubahan teknologi yang lebih rendah, dengan banyak yang belum tentu memahami potensi implikasi dari perubahan tingkat ketiga atau, dalam hal apa pun, menganggap perubahan tersebut berdampak pada pengadilan, alih-alih pada hakim itu sendiri (atau mungkin pada generasi hakim berikutnya setelah mereka pensiun). Selain itu, hanya

sedikit hakim yang benar-benar memahami cara kerja AI dasar sekalipun. Hal ini mungkin tidak mengejutkan karena pendidikan peradilan dan, hingga taraf tertentu, pendidikan hukum seringkali cenderung lebih berfokus pada konten dan kurang pada proses. Memang, hanya sedikit mata kuliah yang memperkenalkan hakim pada pengodean atau konsep-konsep yang mungkin relevan dengan penggunaan AI yang lebih canggih.

Peluang

Marilyn Warren, mantan Ketua Mahkamah Agung Victoria di Australia, telah menguraikan sejumlah 'alasan kuat' untuk mendesak perubahan teknologi dalam sistem peradilan. Alasan-alasan ini meliputi: penghematan biaya; efisiensi/penghematan waktu; keterbukaan terhadap teknologi yang menyediakan 'kesempatan bagi dunia untuk masuk ke ruang sidang'; dan kualitas keadilan yang berpotensi lebih tinggi. Hakim Perry dari Pengadilan Federal Australia telah mengidentifikasi bahwa proses otomatis menawarkan 'manfaat besar' karena mampu 'memproses data dalam jumlah besar dengan lebih cepat, lebih andal, dan lebih murah daripada rekan manusia mereka'. Mantan Hakim Mahkamah Agung New South Wales di Australia, Robert McDougall, telah mengidentifikasi manfaat lebih lanjut: bagaimana teknologi ruang sidang dapat menyediakan alat yang sangat berharga bagi para advokat untuk 'secara persuasif dan ringkas' menyajikan kasus mereka. Lebih lanjut lagi, Ketua Mahkamah Agung Helen Murrell dari Mahkamah Agung Wilayah Ibu Kota Australia, Australia, telah mengakui potensi manfaat yang diberikan teknologi untuk 'meningkatkan supremasi hukum'.

Salah satu alasan utama perhatian peradilan terhadap inovasi teknologi dalam hukum dipandang diinginkan oleh peradilan adalah karena potensinya untuk memastikan sistem peradilan tidak keluar dari kontak dengan masyarakat yang seharusnya dilayaninya. Dalam hal ini, Marilyn Warren, mantan Ketua Mahkamah Agung Victoria, Australia, memperingatkan bahwa ada risiko hakim akan kehilangan relevansi di masyarakat jika mereka tidak beradaptasi dengan perubahan teknologi. Di Amerika Serikat, Hakim Deno Himonas dari Mahkamah Agung Utah juga mengamati potensi sistem ODR Utah di Pengadilan Gugatan Kecil untuk 'menjaga relevansi pengadilan'. Demikian pula, Ketua Mahkamah Federal Australia, James Allsop, telah mencatat bahwa 'AI telah menunjukkan nilainya' dalam membuat pengadilan lebih 'mudah diakses dan sejalan dengan penggunaan digital masyarakat sehari-hari'.

Mengingat manfaat di atas, beberapa hakim telah mendorong profesi hukum untuk menerima perubahan teknologi. Mantan Ketua Mahkamah Agung Kanada, Beverley McLachlin, telah mendesak para praktisi untuk menerima kenyataan bahwa beberapa tugas yang secara tradisional dilakukan oleh pengacara dapat dilaksanakan dengan lebih efisien melalui sarana teknologi. Menurut McLachlin, 'perubahan tidak boleh dipandang sebagai kejahatan, melainkan sebagai sumber peluang baru'. Dalam hal ini, Ketua Mahkamah Agung Allsop dari Pengadilan Federal Australia juga telah mengidentifikasi perlunya perubahan perilaku di seluruh profesi, dengan menyatakan bahwa 'hakim, pengacara, advokat, serta klien dan pihak yang berperkara harus bersedia merangkul teknologi di pengadilan'. Namun, sebagaimana disebutkan di atas, terdapat kekhawatiran tentang tingkat perubahan ketiga yang dapat menggantikan hakim atau berdampak lebih langsung pada peran peradilan. Pada tingkat ini, Geoffrey Vos, Kanselir Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales, telah mengambil sikap yang

lebih hati-hati, dengan berargumen 'tidak ada alasan apa pun mengapa pengambilan keputusan harus dilakukan oleh mesin'. Sebaliknya, Vos mengklaim bahwa pengambilan keputusan hanya akan dibantu dan diinformasikan oleh data yang diproses oleh mesin.

Tantangan

Hakim saat ini dan mantan hakim juga telah mengomentari keterbatasan dan tantangan yang terkait dengan perkembangan teknologi dalam proses hukum. Misalnya, Margaret Beazley, mantan Ketua Pengadilan Banding New South Wales di Australia, mengamati bahwa 'biaya dan efisiensi sistem yang pada dasarnya berbasis teknologi tidak dapat dipertimbangkan tanpa mempertimbangkan biaya malfungsi, yang mencakup biaya waktu henti, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya masalah keamanan siber yang terus meningkat'. Berbicara secara khusus tentang penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan pengadilan, Beazley juga berpendapat bahwa 'semakin berbasis fakta, kompleks, dan evaluatif suatu masalah hukum, semakin kecil kemungkinan penyelesaian sengketa daring akan menjadi forum yang tepat'. Demikian pula, menurut Marilyn Warren (mantan Ketua Mahkamah Agung Victoria di Australia), tugas demokratis pengadilan untuk menyeimbangkan efisiensi, menghemat biaya, dan menyediakan keadilan yang terbuka dan imparial, berarti tidak semua teknologi cocok untuk ruang sidang. Hal ini terutama berlaku jika kita mempertimbangkan adat istiadat yang kuat yang mendasari praktik hukum. Dalam hal ini, Margaret Beazley, mantan Presiden Pengadilan Banding New South Wales di Australia, berpendapat bahwa kita harus memastikan 'bahwa perubahan teknologi mendukung administrasi peradilan dan supremasi hukum dan tidak menggantikannya dengan konsep-konsep yang asing bagi tradisi hukum kita yang kaya'. Senada dengan itu, Beverley McLachlin dari Kanada berpendapat bahwa:

Integritas proses hukum dan kepentingan klien tidak boleh dikorbankan demi efisiensi pemeliharaan keduanya adalah esensi dari menjadi seorang pengacara yang melayani publik. Fleksibilitas dan inovasi, ya. Pengabaian nilai-nilai inti profesional, tidak boleh. Di situlah letak tantangan dan peluang masa depan.

Sejumlah hakim juga menekankan 'unsur manusia' dalam mengadili dan mencatat keterbatasan teknologi dalam hal ini. Hakim See Kee Oon dari Mahkamah Agung Singapura berpendapat bahwa 'meskipun teknologi dapat menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan meningkatkan penegakan keadilan, sentuhan manusia tetap penting. Dalam penegakan keadilan, pengalaman manusia, empati, dan penalaran akal sehat memainkan peran penting'. Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Australia, Michael Kirby, telah membuat pernyataan serupa mengenai penggunaan teknologi, dengan menyatakan bahwa mesin 'akan mengurangi risiko kesalahan manusia. Namun, akan tetap ada kebutuhan akan dukungan manusia'. Mengenai topik ini, Margaret Beazley dari Australia telah mengamati:

Satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam berfungsinya sistem hukum adalah faktor manusia. Masalah hukum muncul dari perilaku manusia dan putusan pengadilan berdampak pada individu yang terlibat di dalamnya. Individu perlu merasa diperlakukan

'adil' dalam interaksi mereka dengan sistem hukum. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya tentang hasil kasus atau penyelesaian masalah mereka. Keadilan merupakan kebutuhan manusia untuk didengarkan.

Selain kekhawatiran tentang sifat mesin yang impersonal dan tidak empati, para hakim juga telah membahas sejumlah isu lain terkait penggunaan teknologi dalam hukum. Isu-isu ini meliputi: isu-isu terkait hukum pengkodean; potensi bias yang menyusup ke dalam sistem AI; perlunya diskresi dalam pengambilan keputusan; bahaya pengadilan daring; dan dampak teknologi terhadap pengambilan keputusan administratif.

Secara khusus, Susskind telah menguraikan tiga alasan utama mengapa para hakim (dan, tentu saja, para pengacara) mungkin enggan mengadopsi teknologi baru. Yang pertama berkaitan dengan 'bias status quo', yang dijelaskan Susskind sebagai kecenderungan untuk menolak perubahan. Alasan kedua disebut 'penolakan irasional', yang didefinisikan sebagai penolakan terhadap sistem yang tidak memiliki pengalaman pribadi langsung dengan pengkritiknya. Alasan terakhir adalah ketidakmampuan untuk mengantisipasi bahwa sistem masa depan akan jauh lebih mumpuni daripada sistem saat ini. Ini disebut 'miopia teknologi'.

Dengan demikian, menurut Susskind, para hakim sangat menolak setiap pergeseran teknologi yang berdampak langsung dan transformatif terhadap peran peradilan. Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hingga saat ini sebagian besar komentator peradilan terutama berfokus pada dampak perubahan teknologi terhadap profesi atau hukum, alih-alih peradilan itu sendiri. Misalnya, Sundaresh Menon, Ketua Mahkamah Agung Singapura, telah menguraikan empat area utama di mana teknologi berdampak pada hukum:

- I. Pertama, Menon mencatat dampaknya terhadap pendidikan dan pelatihan hukum, dengan munculnya pertanyaan tentang cara terbaik untuk melatih generasi praktisi hukum berikutnya;
- II. Kedua, Menon berpendapat bahwa teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap organisasi profesi hukum. Di tingkat firma hukum, model piramida tradisional akan beralih ke model 'roket' yang lebih ramping karena pekerjaan rutin yang sebelumnya dilakukan oleh pengacara junior akan diotomatisasi. Di tingkat industri, Menon mencatat bahwa firma hukum tidak akan lagi mengklaim monopoli atas penyediaan layanan hukum karena teknologi memungkinkan sejumlah penyedia layanan hukum alternatif untuk memasuki pasar;
- III. Ketiga, teknologi menantang nilai-nilai fundamental dan etika profesi hukum. Seiring dengan semakin banyaknya aktor non-hukum yang berperan dalam industri hukum, muncul pertanyaan apakah aktor-aktor tersebut harus diwajibkan untuk mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai dan cita-cita yang mendasari profesi hukum; dan
- IV. Terakhir, Menon berpendapat bahwa teknologi menimbulkan pertanyaan dalam hal menjaga perkembangan hukum yang sehat. Yang Mulia mencatat bahwa 'sifat algoritma yang mendasarinya yang tidak dapat dipahami', potensi stereotip dan bias dalam hasil, dan tantangan yang ditimbulkan oleh mekanisme ODR yang mengalihkan

kasus dari pengadilan menimbulkan masalah bagi pengembangan hukum yang berkelanjutan.

1.8 AKSES TERHADAP KEADILAN, PENGADILAN, DAN HAKIM

Terdapat komentar yudisial lain yang ekstensif tentang penggunaan teknologi di bidang peradilan yang dibahas secara lebih rinci di seluruh buku ini. Namun, terlepas dari perdebatan yang ada di sini, terdapat kesepakatan luas di antara komunitas hukum bahwa teknologi dapat membantu menegakkan prinsip-prinsip inti akses terhadap keadilan. Bahkan, para hakim di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, telah merefleksikan manfaat akses terhadap keadilan yang terkait dengan digitalisasi proses pengadilan.

Pada tahun 2019, diperkirakan lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia tidak dapat mengakses sistem peradilan untuk membantu mereka menangani masalah hukum, dan seringkali mereka yang tidak dapat mengakses sistem peradilan adalah anggota masyarakat yang paling terpinggirkan. Dalam hal ini, isu akses terhadap keadilan bukanlah hal baru. Namun, isu-isu tersebut diperparah oleh dampak pandemi global 2020 dan pada akhirnya menyebabkan evaluasi ulang tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengatasi krisis akses terhadap keadilan. Steven dan rekan-rekan menjelaskan:

Baik sebelum pandemi maupun saat ini, komunitas terpinggirkan yang sudah kurang terlayani oleh sistem peradilan menghadapi risiko tertinggi, begitu pula kelompok rentan. Pandemi ini memperlebar kesenjangan keadilan, dengan peningkatan tajam dalam masalah yang dihadapi banyak orang dan menurunnya kemampuan para pelaku keadilan untuk merespons

Namun, dalam hal akses terhadap keadilan, akan terlalu sempit untuk mengatakan bahwa akses terhadap 'keadilan' setara dengan akses ke pengadilan dan proses peradilan. Seperti yang telah penulis catat sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan signifikan dalam hal seberapa luas keadilan didefinisikan. Galanter, misalnya, telah mencatat bahwa 'sebagaimana kesehatan tidak ditemukan terutama di rumah sakit atau pengetahuan di sekolah, maka keadilan tidak terutama ditemukan di lembaga-lembaga resmi yang memberikan keadilan'. Dengan kata lain, seperti yang telah penulis catat sebelumnya, 'keadilan berada di luar maupun di dalam pengadilan'. Dalam sebuah laporan tahun 2009, Gugus Tugas Akses terhadap Keadilan Australia menjelaskan bahwa pandangan keadilan yang lebih luas ini 'berarti memberi orang pilihan dan menyediakan forum yang tepat untuk setiap perselisihan, tetapi juga memfasilitasi budaya di mana lebih sedikit perselisihan perlu diselesaikan'.

Dalam banyak hal, pandangan keadilan yang lebih luas ini dan pengakuan bahwa pengadilan tidak selalu merupakan 'forum yang tepat' untuk penyelesaian sengketa telah membuka jalan bagi proses ODR yang ada di luar pengadilan yang terintegrasi dalam sistem peradilan. Seperti disebutkan di atas, yurisdiksi sekarang memasukkan proses ODR seperti mediasi daring, penilaian kasus daring, dan arbitrase atau adjudikasi daring ke dalam domain

penyelesaian sengketa mereka. Dengan menggabungkan ini dan juga perkembangan ODR berbasis AI yang lebih baru, sistem peradilan 'bergerak menuju dukungan penyelesaian melalui sarana teknologi' dan pada akhirnya memperkuat gagasan bahwa akses terhadap keadilan tidak bergantung pada lokasi fisik. Penghapusan kedekatan geografis ini sangat bermanfaat dalam konteks pandemi global 2020. Namun, ada masalah yang sedang berlangsung terkait dengan lokasi kegiatan ODR non-fisik. Di beberapa yurisdiksi, ini mungkin diawasi oleh hakim dan pengadilan dan di yurisdiksi lain, kegiatan tersebut mungkin sepenuhnya independen dari pengadilan. Pendekatan-pendekatan ini dibahas secara rinci dengan referensi khusus untuk portal e-justice dan juga pengadilan daring.

Jelas bahwa peningkatan akses ke internet telah memungkinkan proses ODR untuk dianut oleh yurisdiksi dalam upaya mereka untuk meningkatkan akses ke keadilan. Namun, ada literatur yang menunjukkan penyebaran keadilan melalui cara daring sebenarnya dapat menghambat akses ke keadilan bagi sebagian orang. Dalam hal ini, sering diasumsikan bahwa seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, individu akan dapat mengakses opsi penyelesaian sengketa secara daring. Namun, bagi banyak orang, ini tidak terjadi. Cashman dan Ginnivan menjelaskan bahwa efisiensi ODR 'bergantung pada pihak-pihak yang memiliki akses digital (akses ke koneksi internet yang berfungsi) dan kemampuan digital (kemampuan untuk menggunakan internet untuk menavigasi platform daring)'. Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan oleh penulis bersama dengan Li dan Burke, 'kesenjangan digital' ada di antara masyarakat. Cabral dan rekan-rekan lebih lanjut menyatakan bahwa, karena kesenjangan digital ini, sistem ODR mungkin 'tidak mampu memberikan keadilan yang tepat kepada orang-orang berpenghasilan rendah'. Salah satu solusi yang diajukan oleh Steven dan lainnya adalah mendorong para donor untuk mendanai dan bermitra dengan 'perantara yang mendukung pengembangan dan penyebaran aplikasi dan platform sumber terbuka yang dapat dengan cepat digunakan oleh para pelaku masyarakat sipil'. Ini adalah usulan menarik yang berkaitan dengan isu-isu seputar kesenjangan digital.

Cara-cara teknologi baru dapat meningkatkan akses terhadap keadilan memunculkan sejumlah isu yang relevan dengan peran peradilan di masa depan. Pertama, terdapat pertanyaan tentang bagaimana aktivitas penyelesaian sengketa berkaitan dengan pekerjaan pengadilan dan hakim. Artinya, struktur sistem peradilan di masa depan dapat dipahami secara 'sentralistik' di mana pengadilan menjadi pusat penting peradilan dan mendorong ODR serta aktivitas lainnya. Di sisi lain, pengadilan dan hakim dapat dianggap sebagai komponen penting dalam sistem peradilan dan 'e-justice' yang dimungkinkan oleh teknologi baru, dan ini dapat berarti bahwa pengadilan menjadi kurang relevan karena sistem ODR semakin banyak dibangun di luar pengadilan. Setiap opsi menghasilkan variasi yurisdiksi yang mencolok. Terdapat pertanyaan terkait tentang apa itu pengadilan dan sejauh mana independensinya yang dapat dikaitkan dengan perubahan teknologi, dengan beberapa komentator berpendapat bahwa aktivitas 'non-peradilan' dapat diawasi, dikelola, dan dikembangkan di 'pengadilan' oleh cabang eksekutif pemerintah.

Kedua, dampak dari 'Hakim AI yang suportif' atau 'Hakim AI' terhadap para pihak yang berperkara dapat sangat luas dalam hal akses terhadap keadilan. Beberapa komentator telah

merujuk pada hasil yang agak distopia yang mencakup hilangnya independensi peradilan dan dampak negatif terhadap masyarakat demokratis, promosi hasil yang tidak adil, dan dehumanisasi hukum. Yang lain telah menunjukkan manfaat pengambilan keputusan 'yudisial' artifisial dengan penentuan yang berpotensi lebih murah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Akses terhadap keadilan juga dipengaruhi oleh perkembangan 'akses terhadap data', dengan perbedaan yurisdiksi yang signifikan yang akan semakin besar di tahun-tahun mendatang seiring dengan semakin relevannya perkembangan Hakim AI yang suportif dan Hakim AI selama dekade berikutnya. Pengaturan 'akses terbuka' dapat misalnya, memungkinkan lebih banyak orang untuk lebih memahami proses dan hasil pengadilan, mengundang pengawasan publik yang lebih besar terhadap peran peradilan, dan juga menumbuhkan kekhawatiran peradilan tentang bagaimana data tersebut dapat ditafsirkan dan digunakan. Namun, terkait pengaturan ini, sering diasumsikan bahwa hakim hanya mengadili dan bahwa perkembangan dalam pembelajaran mesin dan teknologi prediktif yang dapat didukung oleh akses yang lebih besar ke data, akan mengakibatkan penurunan jumlah hakim. Banyak komentar tampaknya berasumsi bahwa ini adalah kasusnya dan menunjukkan bahwa AI yang mendukung dan Hakim akan mengakibatkan penggantian hakim manusia. Namun, terlepas dari banyak pertanyaan tentang sejauh mana hal ini saat ini layak atau diinginkan, seperti yang ditunjukkan bab berikutnya, adalah tidak benar untuk berasumsi bahwa fungsi pengambilan keputusan adalah satu-satunya fungsi yang dilakukan oleh hakim.

BAB 2

ADOPTI DAN ADAPTASI TEKNOLOGI OLEH HAKIM

2.1 PENDAHULUAN

Cara hakim memanfaatkan teknologi terkait dengan peran dan fungsi mereka, karakteristik individu yang mencakup literasi dan antusiasme teknologi mereka, serta faktor sistemik yang lebih luas di dalam dan di luar pengadilan yang memengaruhi ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baru. Sehubungan dengan peran dan fungsi hakim, hal ini dapat digambarkan sebagai multifaset, kompleks, dan rentan terhadap variasi yurisdiksi yang signifikan; namun, meskipun demikian, peran hakim seringkali dianggap terbatas pada penentuan keputusan pengadilan.

Di luar fungsi inti peradilan, peran peradilan dapat mencakup aktivisme, interaksi kompleks dengan masyarakat, penyelesaian sengketa, manajemen kasus, kegiatan pendidikan publik dan khusus, serta komentar sosial, serta fungsi peradilan yang mungkin dilakukan bersama hakim lain atau, yang lebih jarang, di beberapa yurisdiksi, dengan orang awam (juri). Mungkin agak mengejutkan, hanya ada sedikit informasi tentang peran luas yang dijalankan hakim. Namun, mungkin ada perhatian media yang luas jika seorang hakim dianggap bertindak tidak pantas baik di dalam maupun di luar ruang sidang mengingat hakim biasanya diharapkan berperilaku sebagai 'warga negara teladan'.

Konteks penunjukan hakim dan proses yang digunakan untuk menunjuk hakim juga sangat bervariasi. Beberapa hakim menerima pelatihan ekstensif dan memulai karier peradilan tidak lama setelah menyelesaikan pendidikan hukum awal, sementara yang lain mungkin ditunjuk di kemudian hari setelah berkarir sebagai advokat atau bahkan sebagai non-pengacara. Hakim dapat bekerja dalam sistem inquisitorial atau adversarial atau, yang lebih umum, dalam sistem yang merupakan perpaduan keduanya. Beberapa hakim bekerja dalam sistem di mana gagasan pemisahan kekuasaan yang jelas masih asing; beberapa ditunjuk secara independen; dan yang lainnya dipilih dengan indikasi yang jelas tentang kecenderungan politik mereka. Beberapa hakim mungkin ditunjuk untuk masa jabatan tetap dengan pendekatan retensi yang bervariasi secara signifikan, sementara yang lain mungkin memiliki masa jabatan yang diperpanjang hingga pensiun atau meninggal dunia (dengan usia pensiun yang juga bervariasi secara signifikan).

Peran dan pendekatan hakim dalam menangani sengketa juga dapat bervariasi secara signifikan, dengan beberapa tren modern dalam pendekatan peradilan yang mendorong beberapa hakim untuk lebih 'responsif' atau mengadopsi pendekatan terapeutik. Hakim-hakim tersebut menganut gagasan bahwa mengadili tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang hukum dan fakta-fakta permukaan suatu kasus, tetapi juga kemampuan empati untuk memahami emosi yang mendasari perkara yang diajukan di hadapan pengadilan mereka: 'emosi tidak hanya tetapi dikombinasikan dengan hukum, logika, dan akal sehat membantu para hakim mengambil keputusan yang tepat'.

Selain itu, beberapa hakim juga jauh lebih terlibat dalam 'menciptakan' hukum daripada sekadar menerapkannya. Sistem peradilan yang mendukung pengembangan hukum yang berkelanjutan melalui penciptaan preseden, yang tentu saja melibatkan kreativitas dan pemahaman tentang perubahan sosial, dapat menimbulkan isu yang sangat berbeda terkait penerapan teknologi dan AI pada peran peradilan. Hal ini dapat dibandingkan dengan sistem peradilan yang mungkin hanya mendukung kreativitas yang terbatas atau yang dibatasi oleh pertimbangan faktor kontekstual yang terbatas. Sebagaimana dicatat oleh mantan hakim Mahkamah Tinggi Australia, di beberapa negara inovasi hukum bukanlah prioritas utama parlemen, dan oleh karena itu, kemampuan hakim untuk memajukan hukum diperlukan dan harus dipertahankan. Bahkan, beberapa hakim berpendapat bahwa 'ada kebutuhan yang lebih besar sekarang daripada sebelumnya bagi hakim untuk mengisi kekosongan legislatif'.

Tingkat pengangkatan juga bervariasi, dengan banyak hakim diangkat di tingkat pengadilan yang lebih rendah dan yang lainnya diangkat ke pengadilan banding dan pengadilan yang lebih tinggi. Perbedaan ini dapat berdampak pada beban kerja, jenis pekerjaan, dan karakteristik pribadi hakim, yang dapat tercermin dalam kriteria pengangkatan yang pada gilirannya dapat berdampak pada peluang untuk menggunakan teknologi dan sistem AI. Misalnya, dapat disarankan bahwa hakim pengadilan yang lebih rendah mungkin tidak diharuskan untuk menjadi kolegal seperti mereka yang ditunjuk untuk pengadilan banding (yang mungkin diharuskan untuk 'bekerja sama'). Selain itu, tingkat pengangkatan dapat berdampak pada kapasitas hakim untuk berkontribusi pada langkah-langkah reformasi hukum yang lebih luas, revisi aturan prosedural serta keterlibatan dalam kegiatan pendidikan internal dan eksternal. Sementara beberapa hakim 'dievaluasi' secara berkelanjutan, banyak yang mungkin tidak memiliki kriteria kinerja yang jelas (atau insentif dalam hal beban kerja atau kinerja).

Faktor-faktor ini relevan ketika mempertimbangkan bagaimana teknologi akan berdampak pada peran hakim dalam masyarakat kita. Jelas, hakim tidak dapat dianggap sebagai satu kelompok yang homogen atau kohesif. Mereka sangat bervariasi dalam hal latar belakang, keterampilan, usia, fungsi, dan juga dalam hal 'kesiapan inovasi' atau kapasitas dan minat mereka terhadap teknologi. Ada faktor sistemik lain yang juga berperan dalam hal penerimaan dan minat yudisial terhadap teknologi. Banyak dari faktor-faktor ini dapat dikaitkan dengan budaya pengadilan, anggaran, dan pengaturan dukungan, serta ketersediaan teknologi yang lebih disruptif dan sejauh mana fungsi eksekutif dan yudisial saling terkait atau terkait. Faktor sistemik yang lebih luas, termasuk ketersediaan dan keandalan akses pita lebar dan akses ke teknologi berkualitas baik di negara-negara berkembang, juga dapat secara jelas memengaruhi penerimaan teknologi oleh yudisial.

Tanggapan terhadap COVID-19 menunjukkan bagaimana beberapa faktor ini memengaruhi tanggapan pengadilan terhadap pandemi. Sementara beberapa pengadilan, setidaknya pada awalnya, tutup atau secara signifikan mengurangi akses ke hakim, yang lain pindah untuk mengadopsi teknologi pendukung (khususnya, konferensi video). Selain itu, sejumlah pengadilan, sebagai hasil dari strategi digitalisasi, mampu memanfaatkan pengajuan daring dan pertukaran dokumen. Beberapa pengadilan dalam periode COVID-19 juga telah

mampu mempertimbangkan transparansi dan sidang pengadilan terbuka dengan melakukan streaming proses YouTube, atau, mempromosikan rekaman audio dan pengiriman putusan secara daring. Tanggapan peradilan sebagian bergantung pada kesiapan 'sistem' peradilan. Namun, faktor-faktor lain seperti preferensi hakim individu dan kesiapan pengacara telah memainkan peran integral dalam adopsi teknologi.

2.2 RESPONS PENGADILAN TERHADAP PANDEMI COVID-19

Sebagaimana telah disebutkan di atas, hingga taraf tertentu, variasi dalam peran peradilan diilustrasikan oleh variasi dalam tanggapan pengadilan dan peradilan terhadap pandemi COVID-19. Pada dasarnya, beberapa pengadilan terutama di negara-negara maju mampu mentransisikan beberapa kegiatan peradilan untuk mendukung pengaturan akses jarak jauh karena infrastruktur dasar yang memungkinkan transisi tersebut telah tersedia. Selain itu, kesiapan teknologi masyarakat dan profesi hukum secara umum memungkinkan pengaturan semacam itu layak dan dapat diadopsi relatif cepat. Namun, tingkat kenyamanan peradilan terhadap pengaturan semacam itu sangat bervariasi dan kurangnya penelitian tentang dampak teknologi pendukung seperti konferensi video terhadap peran peradilan dan persepsi keadilan menyebabkan pengaturan semacam itu seringkali tidak diperkenalkan atau dijalankan dari perspektif 'informasi'.

Sejauh mana hakim terlibat dalam pengambilan keputusan tentang adopsi teknologi yang lebih baru juga sangat bervariasi. Di beberapa pengadilan, keputusan dibuat oleh unit eksekutif administratif yang mungkin memiliki sedikit keterlibatan peradilan. Dalam kasus lain, komunikasi dengan antarmuka audio-visual dan keputusan untuk menggunakan platform berbasis web seperti Microsoft Teams, Skype, Zoom, Google Hangouts, dan WebEx telah mencakup masukan yudisial yang ekstensif. Dalam hal ini, keputusan di Australia, Inggris, Amerika, Kanada, Singapura, Peru, dan Tiongkok oleh hakim, staf pengadilan, kementerian kehakiman, atau badan lainnya semuanya telah mendorong penggunaan teknologi konferensi video untuk memungkinkan persidangan dan pekerjaan yudisial lainnya dilakukan secara virtual.

Dalam hal ini, jelas bahwa tanggapan pengadilan terhadap pandemi cenderung melibatkan adopsi teknologi yang 'mendukung' daripada teknologi yang dapat digambarkan sebagai 'pengganti' atau 'mengganggu'. Tabel 2.1 menggambarkan bahwa tanggapan pengadilan terhadap COVID-19 berkisar dari pengenalan konferensi video dan beberapa digitalisasi dasar sistem pengarsipan, hingga perluasan teknologi yang lebih maju yang dapat mendukung atau berpotensi mengganggu peran yudisial. Dalam hal ini, terdapat beberapa perbedaan mencolok antar pengadilan. Bagi sebagian orang, digitalisasi berarti dokumen yang dikirim melalui email dapat diterima oleh hakim sehingga kehadiran fisik di pengadilan tidak diperlukan. Bagi yang lain, di mana sistem manajemen dan pengajuan perkara elektronik sudah tersedia, responsnya lebih konsisten dengan perluasan atau kelanjutan dari apa yang sudah terjadi di yurisdiksi tersebut.

Tabel 2.1 Tanggapan Pengadilan terhadap COVID-19

Tanggapan	Yurisdiksi	Detail Respons
Teknologi Pendukung	Amerika Utara	
	Pengadilan Banding Sirkuit Federal Amerika Serikat ⁱ	Semua perkara yang dijadwalkan untuk disidangkan mulai April 2020 akan dilakukan secara jarak jauh, dan para pihak tidak lagi diwajibkan untuk menyerahkan dokumen cetak tambahan jika dokumen tersebut telah diajukan secara elektronik. Selain itu, untuk mendukung prinsip-prinsip pengadilan terbuka, Pengadilan juga menyediakan akses audio langsung untuk argumen-argumen, dengan informasi akses harian yang dipublikasikan di situs web Pengadilan. Teknologi konferensi yang digunakan oleh Pengadilan meliputi 'AT&T Conferencing, Court Call, Skype for Business, Cisco Jabber, dan Zoom'.
	Mahkamah Agung Amerika Serikat ⁱⁱ	Mulai Mei 2020, Mahkamah Agung mendengarkan semua argumen lisan dari jarak jauh melalui konferensi telepon. Mahkamah Agung juga menyediakan 'siaran audio langsung argumen-argumen tersebut kepada FOX News, Associated Press, dan C-SPAN', yang selanjutnya menyediakan 'siaran simultan bagi argumen lisan untuk disiarkan langsung di berbagai platform media'.
	Pengadilan Pidana Kota New York, AS ⁱⁱⁱ	Per 25 Maret 2020, Pengadilan melaksanakan semua dakwaan pidana melalui teknologi konferensi video. Model pengadilan virtual diterapkan di setiap wilayah pada 6 April 2020, memanfaatkan komunikasi audiovisual dan telepon serta pertukaran dokumen digital. Ketua Hakim DiFiore menyatakan bahwa operasi virtual akan tetap menjadi bagian integral dari sistem pengadilan meskipun pengadilan dibuka secara bertahap mulai Juli 2020 dan Dewan Juri Agung akan kembali menyidangkan kasus per 10 Agustus 2020.
	Negara Bagian New York, Pengadilan Banding ^{iv}	Pada 11 Mei 2020, Pengadilan mengeluarkan Pemberitahuan kepada Asosiasi Advokat (Advokat Advokat) yang mengubah Aturan Praktiknya untuk 'mewajibkan, untuk mosi dan tanggapan atas pertanyaan yurisdiksi, pengajuan

	dalam format digital melalui Portal Unggah Dokumen Pendamping'. Pengadilan Banding juga menerima pengajuan melalui pos dan elektronik. Argumen lisan disiarkan langsung melalui web. Khususnya, dalam pernyataan yang dibuat pada 31 Agustus 2020, Ketua Hakim DiFiore menyoroti bagaimana 'kios virtual' yang terletak di dekat Distrik Peradilan Keempat New York memungkinkan para pihak yang mewakili diri sendiri untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan dari jarak jauh, sambil menerima 'bantuan konferensi video langsung dari petugas pengadilan'.
Pengadilan Tinggi Ontario	Pada tanggal 2 April 2020, Mahkamah Agung menghapus kewajiban pengajuan dokumen dalam bentuk cetak; mengonfirmasi penerimaan dokumen yang ditandatangani secara elektronik; mengizinkan layanan dokumen elektronik jika layanan pribadi diperlukan; dan menyidangkan perkara secara virtual melalui telepon atau konferensi video. Mahkamah Agung juga menyediakan layanan mediasi keluarga yang didanai Kementerian Perhubungan secara virtual bagi para pihak. Selain itu, pada tanggal 2 September 2020, Mahkamah Agung mengumumkan telah menyediakan CaseLines (platform persiapan perkara dan berbagi bukti) untuk membantu para pihak dan lembaga peradilan dalam berpartisipasi dalam proses pengadilan jarak jauh.
Asia	
Mahkamah Agung Indiavi	‘Masalah-masalah penting’ didengarkan melalui konferensi video dan masa pembatasan waktu ditangguhkan sementara oleh Pengadilan.
Qatar ^{vii}	Sidangnya didengar dari jarak jauh menggunakan teknologi konferensi video.
Dubai ^{viii}	Per 19 April 2020, sidang dilakukan secara elektronik melalui Microsoft Teams, yang memungkinkan para pihak untuk didengar melalui konferensi video. Para pihak juga didorong untuk mengajukan kasus baru secara elektronik.

Oceania

Pengadilan Tinggi Australia ^{ix}	Para pihak yang memulai persidangan pada atau setelah 1 Januari 2020 wajib menyerahkan semua dokumen secara daring menggunakan Portal Sistem Penyerahan Digital. Layanan pendaftaran disediakan secara daring atau melalui telepon; dokumen harus diserahkan secara elektronik ke Pengadilan; dan Pengadilan untuk sementara waktu mengizinkan penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen. Pengadilan juga menggunakan teknologi konferensi video untuk menyelenggarakan sidang sambungan video ('sidang VC') dan menyiapkan ruang sidang sebagai 'pusat' sidang VC khusus.
Mahkamah Agung Wilayah Utara ^x	Semua sidang praperadilan, penyebutan, dan arahan dilakukan melalui tautan audio-visual atau konferensi telepon. Sistem Manajemen Perkara Terpadu Odyssey yang diterapkan pada Oktober 2020 akan semakin mendukung pengajuan perkara secara elektronik. Pada 22 Juni 2020, Pengadilan melanjutkan pelaksanaan persidangan juri.
Mahkamah Agung New South Wales ^{xi}	Dari 24 Maret 2020 hingga 2 Juni 2020, tidak ada kehadiran pribadi dalam perkara-perkara kecuali untuk 'keadaan luar biasa' dan semua dokumen harus disediakan melalui sarana elektronik. <i>Undang-Undang Bukti (Tautan Audio dan Audio Visual) 1998 (NSW)</i> telah diamandemen untuk mengizinkan saksi atau praktisi hukum hadir melalui teknologi audio-visual atau digital jika pengadilan memerintahkannya. Pengadilan telah melakukan 'pengembalian bertahap' untuk perkara-perkara perdata tertentu mulai 1 Juni 2020 dan persidangan juri mulai 29 Juni 2020. Namun, Pengadilan memperingatkan bahwa tidak semua perkara akan cocok untuk dihadiri secara langsung: beberapa perkara akan 'tetap berada di lingkungan ruang sidang virtual', sementara yang lain mungkin lebih cocok untuk 'model hibrida'.
Mahkamah Agung Queensland ^{xii}	Selama masa karantina wilayah akibat COVID-19, para pihak dan praktisi hanya boleh hadir secara fisik apabila masalahnya tidak dapat 'ditangani secara praktis melalui telepon atau video'.

Mahkamah Agung Victoria ^{xiii}	Sidang perdata disidangkan dari jarak jauh menggunakan WebEx, Skype, atau Zoom, sementara sidang pidana disidangkan melalui WebEx atau teknologi tautan video yang tersedia. Selain itu, dokumen-dokumen diajukan secara elektronik ke Pengadilan, dan untuk memfasilitasi akses jarak jauh, Pengadilan menerima affidavit tanpa sumpah, dengan syarat memenuhi persyaratan tertentu yang dipublikasikan di situs web Pengadilan.
Pengadilan Keluarga dan Pengadilan Sirkuit Federal Australia ^{xiv}	Sidang dilakukan secara virtual menggunakan Microsoft Teams dan/atau Telekonferensi AAPT. Selain itu, untuk memfasilitasi penyelesaian perkara secara elektronik, para pihak diwajibkan untuk melakukan "e-file", "e-lodge", atau mengirimkan semua dokumen melalui email. Pengadilan juga menerima affidavit (kecuali yang merupakan bagian dari permohonan cerai) dan laporan keuangan yang ditandatangani tanpa tanda tangan saksi yang memenuhi syarat, jika deponen dokumen dapat dihubungi melalui telepon, konferensi video, atau secara langsung di kemudian hari.
Pengadilan Distrik Selandia Baru ^{xv}	Sebuah Catatan Praktik dikeluarkan pada 23 April 2020 yang memungkinkan hakim Pengadilan untuk sementara memberikan arahan mengenai bentuk partisipasi setiap orang dalam sidang atau persidangan (baik melalui telepon maupun tautan audio-visual). Namun, Protokol selanjutnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan pada 12 Agustus 2020 menetapkan bahwa, terkait proses pidana, semua terdakwa yang ditahan harus hadir melalui tautan audio-visual 'kecuali jika hakim memerintahkan sebaliknya'.
Afrika Mahkamah Agung Uganda ^{xvi}	Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan arahan pada 19 Maret 2020 yang memungkinkan putusan dan penetapan disampaikan kepada para pihak melalui email atau WhatsApp. Pada 29 April 2020, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman terkait penggunaan sidang daring oleh lembaga peradilan.
Pengadilan Tinggi Afrika Selatan ^{xvii}	Pada 27 Januari 2020, Kantor Ketua Mahkamah Agung menerapkan solusi kolaboratif berbasis cloud daring yang memungkinkan sistem

	Manajemen Kasus Digital dan Manajemen Bukti untuk Pengadilan Tinggi. Pada 16 April 2020, dikeluarkan arahan yang mengizinkan 'permohonan tanpa perlawanan yang telah terdaftar untuk sidang' untuk disidangkan melalui konferensi video dan mengarahkan para pihak dalam permohonan yang ditentang untuk 'mengajukan pledoi mereka secara elektronik'.
Eropa Pengadilan Keluarga Inggris dan Divisi Keluarga Pengadilan Tinggi^{xviii}	Inggris menciptakan 'Pengadilan Keluarga Akses Jarak Jauh' yang memungkinkan persidangan dilakukan secara virtual, misalnya menggunakan Skype for Business. Sidang jarak jauh ini didukung oleh teknologi 'e-bundling' melalui implementasi Platform Video Cloud pada Juli 2020 di ruang sidang perdata, keluarga, dan pidana. Platform ini memungkinkan hakim dan para pihak untuk mengakses dokumen yang diajukan secara elektronik.
Mahkamah Agung Italia^{xix}	Awalnya, semua kegiatan pengadilan ditangguhkan dan pengadilan diberi 'wewenang diskresioner khusus' untuk menunda sidang. Namun, mulai 16 April 2020, 'langkah-langkah e-trial' diterapkan 'untuk semua jenis kegiatan pengadilan, baik perdata maupun pidana'. Akibatnya, perkara-perkara tersebut hanya dilakukan di 'platform daring yang aman', yang memungkinkan para pihak untuk hadir melalui teknologi konferensi video.
Pengadilan Pidana Republik Irlandia^{xx}	Para terdakwa yang ditahan hadir di Pengadilan Pidana Pusat dan Khusus melalui teknologi konferensi video. Sidang jarak jauh sebagian besar terbatas pada Mahkamah Agung, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tinggi hingga pengadilan dibuka kembali pada bulan September.
Pengadilan Sipil dan Administrasi Hongaria^{xxi}	Pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah Hongaria mengeluarkan dekrit yang memerintahkan agar persidangan dilakukan secara elektronik (yaitu melalui konferensi video) hingga pengadilan dibuka kembali.
Amerika Utara Pengadilan Resolusi Sipil British Columbia^{xxii}	Pengadilan Penyelesaian Perdata (CRT) adalah pengadilan penyelesaian sengketa daring yang

Asia

Pengadilan Internet Beijing^{xxiii}

menangani antara lain perkara cedera pribadi sederhana, ketenagakerjaan, konstruksi, dan properti.

Para pemohon mengajukan permohonan daring agar sengketa mereka diselesaikan oleh CRT.

Sistem kemudian secara otomatis mengklasifikasikan sengketa dan menyediakan dokumen yang diperlukan bagi para pemohon untuk mengajukan gugatan. Setelah itu, para pihak dapat mengajukan tanggapan dan bukti agar anggota pengadilan dapat menilai secara daring. Bahkan, jika sidang lisan diperlukan, sidang tersebut dilakukan melalui Skype.

Meskipun CRT telah beroperasi sebelum COVID-19, sifat digitalnya yang inheren telah memungkinkannya untuk 'tetap beroperasi penuh' sejak wabah.

Pengadilan Internet Beijing adalah salah satu dari tiga 'pengadilan virtual' di Tiongkok. Pengadilan-pengadilan ini menerapkan prosedur yang disebut 'e-litigasi', yang memungkinkan seluruh proses litigasi, mulai dari 'pengajuan hingga putusan dan mediasi', dilakukan secara daring. Sistem ini beroperasi 24 jam sehari dan, sejak pandemi, telah mengkaji prosedur untuk 'menetapkan protokol proses litigasi daring di dunia maya'. Pengadilan ini juga memiliki apa yang disebut 'pengadilan mikro bergerak'. Hal ini memungkinkan para pihak untuk hadir melalui WeChat platform media sosial terkemuka di Tiongkok dan sangat bermanfaat bagi individu yang tidak memiliki akses mudah ke komputer selama wabah COVID-19.

Teknologi 'case pushing', 'nudging', dan 'decision correction' telah diterapkan di beberapa pengadilan dan belum menjadi tambahan akibat COVID-19.

Variasi respons juga dapat dipertimbangkan dalam konteks peran hakim sebagai pemimpin dalam pengelolaan perubahan ini. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam banyak kasus, hakim memainkan peran sentral. Namun, di beberapa yurisdiksi, keputusan tentang penggunaan teknologi dapat dibuat oleh badan pemerintah atau oleh badan administratif

yang mungkin memiliki keterlibatan yudisial yang terbatas. Bahkan, di beberapa yurisdiksi, mungkin terdapat kurangnya minat yudisial dalam hal ini.

Tanggapan terhadap pandemi COVID-19 juga menunjukkan bahwa beberapa pengadilan telah lebih aktif terlibat dalam memastikan bahwa sidang virtual dan pengambilan keputusan yudisial dilakukan dalam semacam forum 'terbuka' seringkali dengan YouTube atau opsi publik lainnya. Sementara itu, di pengadilan lain, penggunaan konferensi video telah membatasi keterlibatan dengan publik dan pengaturan semacam itu secara efektif telah mengarah pada pengadilan 'tertutup'. Dalam kebanyakan kasus di mana persidangan juri telah dilaksanakan, terdapat pergeseran untuk membatasi jumlah juri atau melakukan sidang tersebut hanya dengan hakim. Meskipun berbagai komentator telah mengindikasikan bahwa keputusan tersebut bermasalah dari perspektif keadilan, dalam banyak kasus keputusan untuk mengubah pengaturan juri tidak melibatkan pertimbangan opsi teknologi 'kompleks' yang mungkin memungkinkan persidangan juri atau bahkan berpotensi meningkatkannya.

2.3 RESPONSIVITAS

Sampai batas tertentu, variasi respons pengadilan terhadap COVID-19 dapat dilihat dalam konteks bagaimana hakim menganggap seharusnya mereka responsif secara sosial. Artinya, terdapat variasi di antara hakim dalam cara mereka memandang kapasitas teknologi untuk mendukung dan meningkatkan fungsi peradilan, yang terkait dengan pertimbangan seberapa responsif hakim dalam kaitannya dengan perubahan budaya dan masyarakat. Dalam hal ini, penulis dan Zariski mencatat bahwa hakim selalu responsif dalam hal 'klasik' atau 'pasif'. Artinya, mereka: (i) menyelesaikan semua sengketa yang ada di hadapan mereka; (ii) mempertimbangkan pengajuan para pihak yang bersengketa; (iii) menggunakan pengajuan dalam pengambilan keputusan; dan (iv) menjelaskan dan membenarkan keputusan mereka. Model responsivitas yang lebih pasif yang sebelumnya mendominasi sistem hukum Barat dapat dikontraskan dengan model penghakiman yang lebih 'progresif' atau 'aktif'. Lebih lanjut, penulis dan Zariski menjelaskan bahwa model terakhir ini melibatkan setidaknya satu dari elemen tambahan berikut:

(i) responsivitas terhadap akuntabilitas investasi publik dalam sistem hukum dan tuntutan keadilan darinya; (ii) responsivitas terhadap permasalahan masyarakat yang saling bergantung dan berjejaring; (iii) responsivitas terhadap pengalaman para pihak yang bersengketa terhadap sistem hukum dan pengadilan; dan (iv) responsivitas interaktif dalam konteks perhatian publik.

Penulis dan Zariski lebih lanjut mencatat bahwa pergeseran dari model penghakiman pasif ke aktif ini pada saat ini telah berpuncak pada pendekatan penghakiman yang holistik atau lebih 'lengkap'. Dalam hal ini, penulis mencatat bahwa selain 'mematuhi prinsip-prinsip penting kesetiaan pada hukum, imparialitas, dan integritas', 'hakim yang sepenuhnya responsif' saat ini juga:

- seorang manajer litigasi yang sadar biaya dengan perhatian untuk memastikan akses terhadap keadilan;
- seorang pembelajar cepat dengan rasa ingin tahu dan kesabaran untuk menyelidiki konsekuensi yang dapat diperkirakan dari keputusannya;
- seorang pembelajar yang berwatak kemanusiaan yang menghargai dan berupaya membangun hubungan yang saling menghormati dengan para pihak yang bersengketa dan koleganya; dan
- seorang tokoh publik yang nyaman berperan sebagai duta keadilan dan pendidik hukum publik.

Responsivitas peradilan dalam hal ini mungkin memerlukan pemahaman tentang berbagai struktur pendukung dan peluang rujukan, serta pemahaman yang mendalam tentang proses Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) yang berpotensi memungkinkan para pihak yang bersengketa mencapai hasil yang lebih baik atau berkelanjutan. Dalam hal adopsi teknologi yang lebih baru, hakim yang lebih responsif (atau setidaknya mereka yang memandang peran mereka dengan cara ini) mungkin lebih cenderung mempertimbangkan dan menyambut perubahan teknologi. Namun, mungkin juga terdapat pengakuan dari mereka yang berkecimpung di bidang ini dan khususnya mereka yang lebih berfokus pada yurisprudensi terapeutik bahwa pengaturan semacam itu dapat berdampak buruk pada sisi 'manusiawi' dari peran peradilan dan berpotensi merusak persepsi keadilan.

Terkait dengan gagasan ini adalah sejauh mana keterampilan komunikasi dan interpersonal yang efektif dianggap perlu atau bahkan fundamental bagi peran yudisial. Jelas, jika keterampilan tersebut dianggap kurang relevan, terdapat isu tentang apakah dan bagaimana teknologi dapat mendukung atau menggantikan peran yudisial. Hal ini khususnya terjadi jika teknologi yang lebih disruptif dipertimbangkan di mana penggantian hakim manusia dengan bentuk AI (setidaknya di tingkat pengadilan yang lebih rendah) merupakan sebuah pilihan. Dalam hal ini, banyak penulis telah mengakui bahwa pekerjaan hakim mencakup lebih dari sekadar penilaian pasif dan mengidentifikasi pentingnya 'berbagai keterampilan interpersonal seputar bagaimana hakim mengatur pengadilan mereka dan mengelola kasus, serta bagaimana mereka berurusan dengan personel di ruang sidang dan publik'.

Sejumlah hakim saat ini dan mantan hakim di Australia telah mengakui pentingnya responsivitas yudisial. Ronald Sackville, mantan Hakim Mahkamah Agung New South Wales di Australia, mengomentari gagasan 'mengelola keadilan', dengan menyatakan bahwa konsep ini:

... merangkum gagasan bahwa pengadilan harus bertanggung jawab tidak hanya untuk mengelola pelaksanaan litigasi, tetapi juga untuk berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas sistem hukum terhadap masyarakat, tetapi dengan cara yang konsisten dengan independensi peradilan.

Sackville juga mencatat bahwa hakim harus berkontribusi secara aktif dalam debat publik mengenai peran dan fungsi pengadilan. John Middleton, seorang Hakim Pengadilan Federal

Australia, berpendapat serupa bahwa pengambilan keputusan melibatkan banyak aspek, termasuk kemampuan untuk menyadari dan menilai dampak sosial dari suatu keputusan. Sejauh mana hakim terlibat dalam debat semacam itu sangat bervariasi dan tentu saja terkait dengan sistem dan tradisi politik tempat hakim tersebut beroperasi. Selain itu, budaya pengadilan juga dapat berperan, dengan keterlibatan hakim yang lebih atau kurang, tergantung pada kepemimpinan yudisial di pengadilan dan sejauh mana komentar yudisial individu diizinkan, diterima, atau didorong. Memang, seringkali komentar semacam itu baru tersedia setelah seorang hakim mengundurkan diri dari jabatannya dan mulai menyuarakan keprihatinannya (meskipun jelas banyak hakim terkenal akan menggunakan opsi putusan berbeda, jika tersedia, serta pidato yudisial untuk berkontribusi pada wacana publik).

Gerard Brennan, mantan Ketua Mahkamah Agung Australia, juga mengomentari peran hakim. Brennan mencatat bahwa 'peran pertama' hakim adalah memimpin dan mendengarkan. Namun, yang lebih menarik adalah identifikasi Brennan tentang 'peran kedua' hakim. Berbicara terkait dengan persidangan pidana, ia mencatat bahwa hakim harus berhati-hati untuk memastikan bahwa tidak seorang pun di ruang sidang dipermalukan atau martabatnya direndahkan. Ini penting karena telah dicatat bahwa pengambilan keputusan algoritmik menimbulkan sejumlah kekhawatiran terkait dengan martabat manusia dan bisa dibilang 'martabat manusia' harus menjadi prinsip panduan ketika mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat digunakan oleh hakim. Menurut Kaminski, 'membiarkan keputusan tentang manusia dibuat oleh mesin secara inheren memperlakukan manusia sebagai objek, menunjukkan rasa tidak hormat yang mendalam dan inheren terhadap kemanusiaan manusia'. Lebih lanjut, Kaminski berpendapat bahwa pengambilan keputusan algoritmik 'tidak memungkinkan individu untuk menyatakan individualitas mereka, kemudian melanggar martabat mereka dan mengobjektifikasi individu sebagai sifat-sifat mereka, daripada memperlakukan individu sebagai pribadi yang utuh'. Masalah-masalah ini dibahas lebih lanjut secara rinci dalam konteks keadilan algoritmik secara umum dan pengembangan pedoman etika yang berkaitan dengan hakim dan teknologi.

Terkait dengan pihak yang bersengketa tanpa atau yang mewakili diri sendiri, Brennan juga mengamati bahwa hakim harus memastikan bahwa 'tidak ada poin-poin penting yang terkubur dalam apa yang seringkali merupakan kumpulan hal-hal yang tidak relevan dan mengganggu'. Pengamatan Brennan di sini mencerminkan salah satu karakteristik utama responsivitas yang telah diidentifikasi sebelumnya: responsivitas terhadap pengalaman pihak yang bersengketa terhadap sistem hukum dan pengadilan. Memang, hakim yang responsif mungkin mengakui bahwa 'martabat, partisipasi, dan suara' para peserta dalam sengketa hukum relevan dalam hal penyelesaian sengketa. Banyak penelitian di bidang keadilan prosedural menunjukkan bahwa prosedur, partisipasi, dan ketepatan waktu serta biaya pengaturan akan membantu dalam menentukan apakah suatu hasil adil dan tepat. Dalam konteks perubahan teknologi, mungkin ada kekhawatiran khusus terkait partisipasi serta pemahaman prosedural.

Di Amerika Serikat, Richard Posner juga telah membahas pentingnya model penjurian yang 'aktif'. 'Keinginan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik' diidentifikasi oleh Posner

sebagai salah satu dari dua tujuan utama yang memandu kinerja peradilan. Terkait perubahan teknologi, Posner mengidentifikasi hakim di banyak negara Barat sebagai pragmatis. Artinya, pada dasarnya, mereka membengkokkan dan membentuk sistem peradilan dengan pendekatan individualistis yang berbeda dari yang diadopsi di banyak sistem kontinental di mana hakim dianggap lebih 'patuh' atau dibatasi oleh mentalitas pelayanan publik. Karya Posner juga menimbulkan pertanyaan tentang insentif apa yang mungkin mendorong hakim untuk mempertimbangkan adopsi teknologi yang lebih baru. Dalam hal ini, insentif kemungkinan mencakup isu-isu penting terkait akses terhadap keadilan yang khususnya relevan dalam konteks pandemi COVID-19. Namun, terlepas dari tekanan yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap hakim dan sistem untuk merangkul perubahan teknologi, masih terdapat pertanyaan tentang sejauh mana insentif yang ada untuk mendorong hakim mengadopsi teknologi yang lebih baru secara berkelanjutan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi pendukung yang kecil kemungkinannya untuk mengganggu peran peradilan secara signifikan kemungkinan akan lebih mudah diterima.

Misalnya, beberapa diskusi tentang hakim dan teknologi terkait dengan bagaimana inovasi dapat mengubah proses persidangan atau persidangan, alih-alih pengambilan keputusan aktual yang mungkin mengikutinya. Pada dasarnya, pengadilan daring dianggap dapat mereplikasi pengadilan fisik dan, oleh karena itu, isu utama dalam adopsi teknologi yang lebih baru akan berkaitan dengan faktor keadilan prosedural dan penggunaan teknologi pendukung (kecuali jika persidangan direduksi menjadi pendekatan 'on the papers'). Misalnya, Marilyn Warren, mantan Ketua Mahkamah Agung Victoria di Australia, telah membayangkan 'ruang sidang terdistribusi' di mana para peserta ditempatkan secara virtual di ruang sidang fisik melalui layar seukuran manusia atau proyeksi holografik melalui penggunaan teknologi konferensi video daring. Model ini dengan demikian memungkinkan para pihak untuk memilih apakah mereka akan hadir secara fisik di pengadilan atau tidak. Pendekatan semacam itu dapat dikatakan memungkinkan para hakim untuk lebih responsif dengan memenuhi preferensi dan kebutuhan komunikasi semua pengguna pengadilan. Namun, dengan tidak adanya reformasi lain, perlu dicatat bahwa pendekatan pengadilan daring tidak mungkin mengubah persidangan secara signifikan.

Dalam hal ini, berbagai kritik terhadap penilaian responsif juga dapat diterapkan pada hakim yang beradaptasi dengan teknologi yang lebih baru:

- I. Kritik eksepsionalisme/personalisme, yang didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan dan kualitas yang diperlukan yang dimiliki oleh hakim yang responsif tidak dimiliki oleh semua hakim;
- II. Kritik fungsi yudisial, yang mengasumsikan penilaian responsif (dan, dengan perluasan, keterlibatan dalam perubahan teknologi) mengalihkan dan mengalihkan perhatian hakim dari fungsi inti yudisial mereka, yaitu mengadili;
- III. Kritik aktivisme yudisial, yang mengandaikan bahwa tidaklah pantas bagi hakim untuk bersikap 'aktif' dan 'inovatif'; dan
- IV. Kritik imparsialitas, yang mempertanyakan apakah imparsialitas yudisial sesuai dengan sidang non-publik atau dengan proses ADR dan/atau ODR seperti mediasi.

Masing-masing kritik, ketika diterapkan pada penilaian teknologi, menunjukkan bahwa untuk mendukung perubahan teknologi, diperlukan pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi yudisial, serta pengakuan bahwa fungsi tersebut tidak hanya multifaset tetapi juga responsif dalam arti definisi yang paling luas. Pendekatan ini menginformasikan analisis yang lebih efektif tentang peran AI dan penilaian, terutama ketika mempertimbangkan sejauh mana hakim dapat beradaptasi dengan pengenalan teknologi yang lebih disruptif.

2.4 IDEOLOGI, DISKRESI, DAN PENGALAMAN

Richard Posner mengamati bahwa mentalitas yudisial tidak akan menarik jika hakim hanya menerapkan aturan hukum yang jelas. Jika demikian, 'hakim akan berada di jalur yang tepat untuk digantikan oleh program kecerdasan buatan digital'. Namun, jelas dari analisis di atas bahwa banyak hakim bertanggung jawab atas lebih dari sekadar penerapan prinsip-prinsip hukum yang kaku.

Para komentator telah mengidentifikasi ideologi, pengalaman, dan pelaksanaan diskresi hakim sebagai hal yang krusial untuk memahami peran yudisial. Menurut Posner, konsepsi peran yudisial yang paling deskriptif tentang hakim banding Amerika adalah pragmatisme. Posner menjelaskan bahwa hampir selalu ada 'zona kewajaran' di mana keputusan apa pun masuk akal dan dapat dipertahankan. Di sini, pragmatisme merangkul 'attitudinalisme'. Artinya, ketika zona kewajaran luas, kecenderungan ideologis hakim mau tidak mau akan membentuk keputusannya. Posner mencatat bahwa zona kewajaran ini cenderung melebar seiring dengan pengalaman peradilan. Kewajaran ideologis hakim terutama didasarkan pada nilai-nilai moral dan agama yang merupakan produk dari 'pendidikan, pengalaman hidup yang menonjol, dan karakteristik pribadi hakim ... dan juga temperamen, yang membentuk tidak hanya nilai-nilai tetapi juga watak, seperti rasa malu dan keberanian, yang memengaruhi respons hakim terhadap kasus-kasus'.

Dalam konteks AI dan penjurian, ada banyak komentar yang dapat dibuat tentang kapasitas AI dan sistem terkait untuk mendorong hakim menuju 'zona kewajaran' sehingga masalah yang terkait dengan bias peradilan atau 'kewajaran ideologis' dapat sedikit diperbaiki. Memang, pendekatan ini telah diadopsi di Tiongkok, di mana beberapa Sistem AI telah dikembangkan untuk 'mendorong' atau 'memperingatkan' hakim akan kecenderungan tersebut:

Di satu sisi, banyak pengadilan lokal di Tiongkok sedang mengembangkan sistem 'mendorong kasus serupa' berdasarkan basis data ini, yang dapat mendorong putusan kasus serupa kepada hakim untuk referensi. Di sisi lain, beberapa pengadilan telah mencoba mengembangkan fungsi 'peringatan putusan abnormal' berdasarkan basis data ini yaitu, jika suatu putusan berbeda secara signifikan dari putusan kasus serupa, sistem akan secara otomatis mengirimkan peringatan kepada atasan hakim, yang mendorong mereka untuk memulai mekanisme pengawasan terhadap hakim yang bersangkutan. Saat ini, fungsi ini terutama digunakan dalam kasus pidana untuk memantau kewajaran putusan hakim.

Saat ini terdapat berbagai isu yang berkaitan dengan bias peradilan; sejauh mana isu-isu ini dapat dikurangi berkat sistem teknologi yang semakin canggih masih dipertanyakan (bersama dengan pertanyaan-pertanyaan terkait bias algoritmik). Namun, tidak diragukan lagi, kompas moral atau mungkin apa yang secara negatif dapat disebut sebagai 'bias orang kulit putih lama' dapat memengaruhi keputusan dan proses peradilan. Dalam hal ini, Volokh mencatat bahwa apakah seorang pengambil keputusan yakin atau tidak dengan suatu argumen bervariasi menurut pandangan pengambil keputusan tentang 'hasil mana yang baik atau prinsip moral mana yang seharusnya memengaruhi keputusan akhir tentang cara mengklarifikasi atau mengubah hukum'. Dalam menerjemahkan pendekatan ini kepada Hakim AI, yang penting, Volokh mencatat bahwa meskipun ini merupakan bagian dari alasan mengapa orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kualitas hakim manusia yang berbeda, kurangnya konsensus tentang pendekatan mana yang terbaik mungkin hanya berarti bahwa kemungkinan akan ada hakim AI saingan yang dirancang untuk mengambil pendekatan yang berbeda.

Peneliti sebelumnya dalam gerakan akses terhadap keadilan telah mencatat bahwa hasil putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk: 'kualitas representasi, sumber daya yang tersedia bagi pihak yang bersengketa, dan kualitas pengambilan keputusan serta kerangka kerja berbasis hak di sekitarnya'. Selain itu, penelitian juga mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan adjudikatif dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi keadilan substantif. Hal ini melibatkan berbagai dampak pada hakim, yang dapat mencakup:

- kapan dan apa yang dimakan seseorang;
- waktu dalam sehari;
- berapa banyak keputusan lain yang telah dibuat seseorang pada hari itu ('kelelahan dalam mengambil keputusan');
- nilai-nilai pribadi;
- asumsi bawah sadar;
- ketergantungan pada intuisi;
- daya tarik individu yang terlibat; dan
- emosi.

Sebagaimana dicatat dalam penelitian sebelumnya, sejauh mana faktor-faktor ini memengaruhi hakim tidak diketahui. Namun, kemungkinan besar meskipun seorang hakim menyadari faktor-faktor ini, mereka mungkin meremehkan dampaknya. Hal ini sebagian karena sebagai manusia, kita cenderung melebih-lebihkan informasi tentang kualitas pribadi kita yang kita anggap positif, dan cenderung tidak menerima informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang karakteristik positif kita. Faktor-faktor tersebut tidak hanya akan memengaruhi proses penilaian dan hasil yang dicapai, tetapi juga sejauh mana hakim siap menggunakan teknologi atau membuat keputusan tentang apakah teknologi dapat membantu 'mengoreksi' putusan yang mungkin terkontaminasi oleh bias. Ada juga isu-isu yang saling terkait yang muncul dalam konteks peradilan yang independen. Jelas, hakim di beberapa belahan dunia mungkin menganggap 'dorongan' atau 'koreksi' yang dibayangkan di pengadilan Tiongkok tepat dan bermanfaat. Namun hakim di yurisdiksi lain mungkin menganggap bahwa

pendekatan semacam itu berdampak negatif pada independensi peradilan dan dapat merupakan pelanggaran kewenangan eksekutif, sehingga mengancam pengaturan demokrasi di beberapa negara.

2.5 MULTI-TUGAS

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam bab ini, terdapat berbagai cara hakim melakukan banyak tugas. Sejauh mana seorang hakim melakukan banyak tugas dalam keseharian maupun secara umum dalam keseluruhan perannya akan memengaruhi bagaimana dan sejauh mana seorang hakim siap mengadopsi perubahan teknologi. Bagi sebagian orang, pertimbangan terhadap teknologi yang lebih baru dapat dipandang sebagai beban tambahan atau gangguan dari fungsi inti peradilan. Hal ini khususnya terjadi ketika teknologi telah dirancang untuk membantu manajemen perkara dengan mengalihkan tanggung jawab pemasukan data kepada hakim, alih-alih melalui retensi staf administrasi pendukung.

Dalam hal ini, hakim tidak hanya 'melakukan banyak tugas' sehubungan dengan peran multifaset yang mereka mainkan, tetapi juga, karena berbagai variasi beban kerja di mana mereka mungkin diminta untuk melakukan sejumlah kegiatan secara bersamaan dan dengan sedikit waktu yang dialokasikan untuk pengambilan keputusan. Pergeseran peran peradilan tersebut sebagian terjadi sebagai akibat dari inovasi teknologi dan masyarakat. Misalnya, fenomena 'persidangan dengan trolis' yang berkembang pada tahun 1980an merupakan respons terhadap ketersediaan mesin fotokopi dan pengolah kata. Demikian pula, kompleksitas dalam litigasi sebagian disebabkan oleh pengaturan yang jauh lebih kompleks yang berarti bahwa struktur perusahaan lebih mungkin melibatkan sejumlah entitas dengan kepentingan yang berbeda. Pergeseran semacam itu telah menambah beban kerja peradilan, menimbulkan pertanyaan tentang stres dan kesejahteraan peradilan.

Pergeseran dalam peran peradilan juga terjadi karena banyak hakim terutama yang berada di yurisdiksi hukum umum menjadi lebih manajerial dalam konteks kasus yang mereka tangani. Dapat dikatakan, pergeseran ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan sistem berkas perkara individual dan perkembangan kemajuan teknologi dalam hal sistem manajemen kasus yang mendukung.

Banyak komentator telah mengakui pergeseran modern dalam peran peradilan ini. Misalnya, James Spigelman, mantan Ketua Mahkamah Agung New South Wales di Australia, telah mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi 'modifikasi signifikan dari sistem adversarial', dengan cara hakim menjalankan fungsi mereka telah berubah secara radikal. Sehubungan dengan proses perdata, perubahan yang paling penting adalah bahwa masalah yang sebelumnya dikelola oleh para pihak dan perwakilan hukum mereka sekarang sering berada di bawah kendali hakim dan pengadilan. Sallman telah mencatat bahwa, di banyak yurisdiksi hukum umum, hal ini telah mengakibatkan pergeseran yang signifikan 'dalam budaya dan orientasi pengadilan'.

Mantan Hakim Pengadilan Federal Australia, Ronald Sackville, telah menyatakan bahwa 'pengadilan telah menanggapi tuntutan mendesak untuk "akses ke keadilan" yang lebih besar

dengan menerima tanggung jawab untuk tugas-tugas yang tampaknya asing bagi peran peradilan hanya dua atau tiga dekade lalu'. Dengan pergeseran ini ke peran yang semakin intervensionis dalam pengelolaan beban kerja peradilan, 'pengadilan telah menerima gagasan akuntabilitas yang baru dan diperluas'. Memang, lebih dari dua dekade lalu, Komite Penasihat Akses ke Keadilan Australia menyoroti 'revolusi yang tenang tetapi sangat signifikan' yang telah terjadi. Pemicu perubahan ini adalah masalah penundaan, biaya, dan kompleksitas yang tak henti-hentinya terkait dengan proses perdata, terutama menjelang akhir abad ke-20. Saat ini, manajemen kasus secara luas 'diterima sebagai sebuah pasal kepercayaan oleh semua pengadilan Australia'.

Salah satu strategi utama untuk mendukung penyelesaian sengketa tepat waktu di pengadilan berkaitan dengan perubahan cara pengadilan dan hakim mengelola litigasi. Studi internasional sebelumnya menunjukkan bahwa pengendalian dini dan berkelanjutan atas peristiwa perkara merupakan faktor yang paling erat kaitannya dengan waktu pemrosesan perkara yang lebih cepat. Akibatnya, inovasi di bidang ini telah mencakup penerimaan daftar berkas perkara, kombinasi daftar berkas perkara, dan proses pemanggilan dalam sistem 'roda' di berbagai pengadilan untuk mendukung penyelesaian sengketa tepat waktu. Selain itu, kerangka waktu kini digunakan di banyak yurisdiksi sebagai bagian dari manajemen alur perkara untuk memastikan ketepatan waktu proses peradilan. Perkembangan ini, sampai batas tertentu, dimungkinkan oleh pengembangan perangkat teknologi yang mendukung pelacakan dan manajemen perkara. Di beberapa pengadilan, perangkat ini dapat dikembangkan dengan baik, sementara di pengadilan lain, teknologi ini sering disebut sebagai teknologi 'warisan' dan melibatkan teknologi sistem yang sudah ketinggalan zaman. Artinya, teknologi manajemen perkara telah diadaptasi dari waktu ke waktu yang seringkali menghasilkan sistem yang mungkin tidak sesuai dengan tujuannya.

Dalam memungkinkan pengadilan untuk memiliki kontrol yang lebih besar dalam mengurangi penundaan, penelitian lain telah mengidentifikasi pentingnya melibatkan individu yang bertanggung jawab untuk penjadwalan. Misalnya, dalam konteks Inggris, Raine dan Willson menemukan bahwa pengadilan dengan penundaan yang lebih pendek telah mempekerjakan seorang individu yang bertanggung jawab untuk penjadwalan. Komentator telah mencatat pengadilan-pengadilan ini sebagai 'memiliki budaya yang terlihat, dipantau, dan bertanggung jawab', yang mereka sebut sebagai 'budaya akuntabilitas'. Memang, hakim juga mungkin memiliki peran khusus untuk dimainkan dalam mengelola dan mempercepat kasus-kasus dengan, misalnya, membatasi waktu dan ruang lingkup bukti dan argumen lisan. Dalam hal ini, 'budaya akuntabilitas' sering dipimpin oleh hakim yang memainkan peran kunci dalam reformasi prosedur perdata.

Untuk masalah-masalah kompleks yang dikelola kasusnya secara lebih lengkap, salah satu tren terkini adalah bagi hakim untuk mengharuskan rencana proyek digunakan. Contoh yang baik dari hal ini adalah pendekatan yang diambil oleh Mahkamah Agung Victoria di Australia dalam Daftar Teknologi, Rekayasa, dan Konstruksi (TEC). Daftar TEC menyediakan platform untuk penyelesaian sengketa yang sangat teknis. Karena kompleksitas yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut, Daftar TEC telah dirumuskan untuk memungkinkan

'hakim untuk mengambil pendekatan yang lebih intervensionis terhadap proses litigasi' dan untuk mengendalikan perilaku perwakilan hukum melalui serangkaian protokol. Protokol ini dirancang untuk memastikan bahwa para pihak mengambil pendekatan yang lebih 'proaktif' dan 'berfokus pada isu-isu nyata dalam kasus tersebut'.

Sistem 'RedCrest' yang digunakan dalam daftar TEC di Mahkamah Agung Victoria, Australia, telah dikembangkan untuk mendukung manajemen kasus peradilan dan mengandalkan teknologi baru untuk membantu hal ini. Teknologi ini dirancang untuk memastikan bahwa persyaratan manajemen kasus terpenuhi dan bahwa penundaan yang terkait dengan layanan fisik dokumen berkurang untuk firma yang berlangganan layanan elektronik. Sistem ini membutuhkan keterlibatan khusus dari seorang hakim serta staf administrasi untuk mendukung sistem. Dari perspektif peradilan, perubahan tersebut dapat memiliki sejumlah dampak. Yaitu, mereka dapat mengurangi waktu dan biaya para pihak yang bersengketa, tetapi mereka juga dapat: meningkatkan beban kerja peradilan; mengharuskan hakim untuk terbiasa dengan teknologi yang lebih baru; dan memerlukan anggaran yang memungkinkan peradilan untuk secara efektif memperkenalkan inovasi tersebut.

Di Amerika Serikat, Molot telah mencatat bahwa, secara tradisional, peran peradilan dicirikan oleh hakim yang mengandalkan para pihak untuk membingkai sengketa. Namun, di zaman modern, berkas perkara yang penuh sesak telah membuat hakim beralih dari peran pasif ini. Perlu dicatat bahwa banyak hakim sekarang mengambil 'pendekatan aktif, sebagian besar bersifat diskresioner terhadap manajemen kasus praperadilan'. Dalam pengertian ini, perubahan teknologi yang lebih mengganggu terutama yang didasarkan pada bentuk AI yang lebih canggih memiliki kapasitas untuk membentuk kembali pendekatan manajemen kasus tersebut dan memperkenalkan konsistensi yang lebih besar antara hakim, yang, pada gilirannya, dapat membantu dalam mendesain ulang persepsi keadilan prosedural. Masalah-masalah ini dieksplorasi lebih lengkap, yang mencatat bahwa satu pendekatan untuk reformasi teknologi yang luas di pengadilan adalah melalui perubahan sistem manajemen kasus yang mungkin berulang.

Bagaimanapun, multitasking yang kini harus dilakukan banyak hakim dapat berarti bahwa hanya ada sedikit waktu untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat membantu hakim dengan beban kerja mereka. Meskipun teknologi pendukung, pengganti, dan, sampai batas tertentu, teknologi disruptif tambahan yang berfungsi dengan baik dapat membantu hakim, banyak hakim mungkin tetap 'terlalu sibuk' atau 'terlalu kekurangan dana' untuk terlibat dalam wacana tentang bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan secara lebih efektif. Hakim lain, sebagaimana disebutkan sebelumnya, mungkin tidak tertarik atau memandang peran mereka dengan cara yang jauh lebih sempit.

2.6 KESIMPULAN

Jelas, selain waktu yang dihabiskan untuk mengelola kasus, beban kerja peradilan juga mencakup peningkatan jumlah aktivitas yang tidak terkait dengan kasus. Lienhard dan Kettiger telah mengidentifikasi empat bentuk pekerjaan yang tidak terkait dengan kasus yang biasanya dilakukan oleh hakim: (i) administrasi pengadilan umum (tidak terkait dengan kasus), termasuk urusan kantor dan rapat rutin; (ii) pendidikan dan pelatihan peradilan; (iii) kegiatan masyarakat dan penjangkauan publik; dan (iv) urusan pribadi termasuk komitmen pribadi atau waktu perjalanan yang tidak terkait dengan perkara.

Dalam sebuah studi tentang pekerjaan sehari-hari di pengadilan magistrat di Australia, Mack, Roach Anleu, dan Wallace menguraikan berbagai fungsi non-yudisial yang selalu mengurangi waktu yang tersedia bagi magistrat untuk mengadili sengketa. Mereka mencatat bahwa fungsi-fungsi tersebut biasanya mencakup tugas manajemen perkara, kerja komite, dan rapat umum. Selain itu, magistrat juga melaporkan menghabiskan banyak waktu untuk terlibat dalam administrasi umum, termasuk korespondensi, mengikuti perkembangan hukum, dan bepergian. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai bidang kerja yudisial ketika menentukan bagaimana perkembangan teknologi dapat memengaruhi peran yudisial.

Dengan mempertimbangkan bidang-bidang non-kerja kasus, baik teknologi pendukung maupun pengganti kemungkinan akan memainkan peran yang semakin meningkat dalam hal mengubah aspek-aspek kerja yudisial ini. Tentu saja, teknologi pendukung yang mencakup teknologi konferensi video dapat menghemat waktu peradilan dan juga dapat menghasilkan manfaat lain, seperti meningkatkan kapasitas hakim untuk terlibat dengan komunitas yang lebih luas melalui siaran langsung, media sosial, dan bahkan webinar yang dapat menarik bagi audiens internasional dan domestik. Kegiatan semacam itu berpotensi mengubah peran peradilan dan meningkatkan kegiatan pendidikan dengan mendorong hakim untuk lebih terlibat dalam debat sosial dan memperkenalkan lebih banyak anggota masyarakat pada kegiatan peradilan.

Pekerjaan non-kasus peradilan juga dapat ditingkatkan dengan tersedianya asisten virtual. Asisten ini dapat bekerja dengan staf pendukung peradilan dan memungkinkan area kerja yang terkait dengan manajemen dan administrasi berfungsi lebih lancar. Artinya, meskipun beberapa hakim mungkin sudah menggunakan perangkat lunak perencanaan proyek untuk membantu mereka mengelola kasus-kasus yang kompleks, banyak yang belum. Oleh karena itu, kemungkinan besar pengaturan perencanaan proyek bersama dengan asisten virtual kurang dimanfaatkan oleh hakim yang mungkin masih agak bergantung pada pendekatan berbasis kertas untuk mengelola pekerjaan mereka. Namun, terdapat isu-isu tentang dampak dari setiap peralihan ke bantuan virtual terhadap hakim. Saat ini, kurangnya keterkaitan dan koneksi dengan masyarakat telah dikaitkan dengan tingkat stres dan tekanan yang lebih tinggi pada hakim di beberapa pengadilan.

Jelas, ada beberapa aspek penting dari peran peradilan di luar pengambilan keputusan dan adjudikasi yang tidak dapat dengan mudah digantikan oleh AI, tetapi tetap dapat ditingkatkan oleh teknologi pendukung dan pengganti karena teknologi tersebut

memungkinkan mereka memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendidikan dan debat kewarganegaraan. Telah dicatat bahwa:

Selain peran adjudikatif mereka yang penting, hakim juga memainkan peran edukatif, menginformasikan para pihak yang berperkara dan pengacara tentang pendekatan yang harus diambil dan berkontribusi pada pendidikan kewarganegaraan di tingkat yang lebih luas. Meskipun hakim harus berhati-hati dalam mengekspresikan diri (jangan sampai, jika mengekspresikan diri terlalu kuat, mereka membuka diri terhadap tantangan bias yang tampak), kini diterima bahwa mereka memainkan peran penting dalam debat publik. Para pendukung pandangan bahwa hakim dapat digantikan oleh AI gagal mengakui sepenuhnya kontribusi hakim bagi masyarakat di luar proses peradilan, termasuk isu-isu penting yang seringkali tidak diteliti terkait kepatuhan dan penerimaan terhadap supremasi hukum.

Dalam hal perkembangan AI dan bagaimana hal ini dapat membentuk kembali peran peradilan, relevansinya adalah hakim melakukan lebih dari sekadar mengadili. Telah dikatakan bahwa mereka yang berpandangan bahwa hakim dapat digantikan oleh AI 'bisa dibuang kehilangan poin terkait kontribusi hakim terhadap masyarakat yang melampaui adjudikasi dan mencakup fungsi-fungsi penting dan seringkali tidak diteliti yang dapat mendukung supremasi hukum' serta cita-cita demokrasi yang mendasari banyak sistem peradilan.

Morison dan Harkens juga mencatat bahwa sebagian besar peneliti AI gagal mengenali apa yang sebenarnya dilakukan pengadilan dan hakim. Secara khusus, mereka mencatat bahwa penghakiman 'bukanlah aktivitas tunggal dengan metode fundamental yang tidak berubah dalam konteks apa pun ia digunakan'. Secara signifikan, Morison dan Harkens menyimpulkan bahwa 'aspek sosial' dari peran peradilan berarti bahwa meskipun teknologi baru dapat mengganggu pola kerja saat ini, teknologi tersebut tidak dapat menghasilkan sistem peradilan jenis baru sendirian. Agar sistem peradilan jenis baru dapat berkembang, masih banyak lagi yang diperlukan. Mengubah peran dan fungsi peradilan tidak akan, secara terpisah dari perubahan lain pada pengadilan dan budaya profesi hukum yang menyertainya, meningkatkan akses atau mendukung sistem peradilan yang lebih efektif. Selain itu, budaya peradilan yang beragam dan seringkali bersifat idiosinkratik perlu dipertimbangkan dalam konteks fungsi 'manusia' mana yang harus dipertahankan dalam konteks perkembangan teknologi, khususnya di bidang AI.

Dalam konteks kemanusiaan hakim, apa yang saat ini sangat buruk dalam direplikasi oleh teknologi (empati dan keterampilan sosial), meskipun beberapa hakim menghindari perilaku tersebut, justru merupakan hal yang dapat mendukung retensi hakim manusia dalam konteks perkembangan teknologi yang lebih disruptif dan substitusi yang seringkali digerakkan oleh AI. Perilaku tersebut berfokus pada kemampuan hakim manusia untuk lebih efektif memungkinkan para pihak yang berperkara menentukan hasil melalui hakim yang menunjukkan 'rasa ingin tahu, pemahaman emosional para pihak dan pengacara mereka, kelincahan mereka dalam mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi isu-isu'. Tentu saja, perilaku-perilaku ini melekat dalam aktivitas yang lebih luas yang terlibat dalam penjurian

responsif. Seiring berkembangnya AI untuk meniru beberapa pendekatan empati manusia, patut dipertanyakan apakah dalam beberapa dekade mendatang peniruan tersebut akan memungkinkan sistem AI untuk sepenuhnya menggantikan hakim yang lebih responsif.

BAB 3

MENJELAJAHI KEADILAN ALGORITMIK

3.1 PENDAHULUAN

Seringkali diskusi tentang hakim dan teknologi dikaitkan dengan kekhawatiran tentang 'keadilan algoritmik', sebuah konsep yang kurang terdefinisi dalam literatur dan oleh mereka yang bekerja di sektor peradilan. Di satu sisi, konsep ini dapat merujuk pada potensi algoritma untuk meningkatkan sistem dan proses peradilan. Namun, lebih umum, istilah keadilan algoritmik digunakan untuk mengenali potensi kekhawatiran tentang desain AI, termasuk potensi dampak negatif yang tidak diinginkan terhadap hak asasi manusia dan aktivitasnya, dan mungkin lebih tepat digambarkan sebagai ketidakadilan algoritmik. Dalam hal ini, diskusi tentang keadilan algoritmik seringkali lebih sering dikaitkan dengan pengenalan AI yang disruptif. Namun, hal ini juga dapat dikaitkan dengan penggunaan teknologi pendukung dan pengganti yang dianggap bermasalah.

Hal ini dapat dikontraskan dengan 'bias algoritmik': sebuah istilah yang dalam sektor peradilan berkaitan dengan gagasan bahwa penggunaan teknologi dapat menghasilkan luaran peradilan yang tidak adil, diskriminatif, atau tidak sehat. Pada dasarnya, terdapat kekhawatiran bahwa, sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang beroperasi menggunakan algoritma, beberapa luaran dan proses yang digunakan di sektor peradilan akan menjadi tidak adil, tidak adil secara prosedural, dan diterapkan tanpa mempertimbangkan isu-isu etika dan isu-isu yang lebih luas.

Seringkali, istilah keadilan algoritmik dan bias algoritmik masing-masing digunakan untuk merujuk pada pengaturan sistem peradilan yang lebih luas, alih-alih yang secara khusus berkaitan dengan hakim atau penjurian. Misalnya, bias algoritmik dan keadilan algoritmik telah digunakan untuk menggambarkan algoritma yang dapat dianggap tidak adil dan yang digunakan oleh polisi dan pihak lain ketika membuat keputusan tentang calon pelaku kejahatan atau mereka yang dijatuhi hukuman atau sedang mencari pembebasan bersyarat. Istilah-istilah ini juga telah digunakan dalam konteks pengambilan keputusan administratif yang mungkin diinformasikan atau bahkan dilakukan oleh bentuk-bentuk AI yang bergantung pada pencocokan data atau struktur pengambilan keputusan yang tidak transparan.

Konsep keadilan algoritmik lebih jarang digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan peradilan. Hal ini sebagian karena pengambilan keputusan peradilan di sebagian besar yurisdiksi, yang terkadang dapat diinformasikan oleh materi algoritmik, jarang melibatkan penggunaan perintah algoritmik dan karena Hakim AI masih dalam tahap pengembangan awal. Akibatnya, dalam bab ini, keadilan algoritmik dan bias dipertimbangkan dari dua perspektif: sejauh mana faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada masing-masing hakim yang mungkin mempertimbangkan bagaimana teknologi membentuk bukti atau interaksi orang-orang di lingkungan pengadilan; dan potensi risiko yang muncul ketika Hakim AI atau Hakim AI yang suportif diperkenalkan.

Keadilan algoritmik, bila dibingkai dalam cara yang positif, dapat merujuk pada sistem pendukung keputusan yang memungkinkan pihak yang bersengketa untuk lebih memahami kemungkinan hasil jika mereka melanjutkan ke litigasi. Selain itu, istilah ini juga dapat mencakup sistem atau aplikasi yang mempromosikan atau mendorong rujukan ke pakar manusia seperti mediator dan pengacara yang dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa jika diperlukan. Dalam konteks ini, keadilan algoritmik muncul di dalam dan di luar ranah peradilan sebuah penempatan yang sejalan dengan mekanisme peradilan saat ini dan pergeseran terkini ke pandangan keadilan yang jauh lebih luas.

Pendekatan pembelajaran mesin yang didasarkan pada bentuk AI yang lebih berkembang juga terkadang digambarkan sebagai bagian dari persamaan 'keadilan algoritmik'. Dalam arti praktis, Schatsky, Muraskin, dan Gurumurthy mendefinisikan AI sebagai 'teori dan pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia'. Namun, dalam arti teknis, AI dapat dikaitkan dengan pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, sistem pakar, penglihatan, ucapan, perencanaan, dan robotika.¹² Pendekatan-pendekatan ini dapat digabungkan ke dalam banyak teknologi pendukung dan pengganti dalam sektor peradilan yang dapat dianggap mendukung akses terhadap keadilan dan mungkin tidak menimbulkan kekhawatiran ketidakadilan algoritmik atau bias yang sama seperti penggunaan AI lainnya. Selain itu, harus diakui bahwa bentuk-bentuk AI mendasari sebagian besar pekerjaan operasional yang dilakukan di pengadilan. Dari printer hingga perangkat lain, algoritma membantu pekerjaan yang dilakukan di sektor peradilan. Namun, biasanya hanya bentuk AI yang lebih berkembang yang ditempatkan dalam kerangka keadilan algoritmik. Misalnya, hal ini dapat mencakup referensi ke chatbot canggih yang memberikan saran kepada pihak yang berperkara dan pihak lain tentang cara menyiapkan dan menyajikan informasi ke pengadilan.

Sebagaimana dicatat oleh Toohey dan rekan-rekan, menghindari ketidakadilan algoritmik merupakan tantangan. Selain masalah bias algoritmik, perhatian juga harus diberikan pada sifat teknologi yang tidak dapat diakses oleh sebagian besar non-ahli. Selain itu, alasan mengapa pendekatan algoritmik dapat mengakibatkan bias atau ketidakadilan harus dipertimbangkan. Faktor-faktor penting terkait dengan cara pendekatan tersebut direncanakan dan diperkenalkan serta sejauh mana hakim dan orang lain terlibat dalam perancangan sistem dan bagaimana pertanyaan etika telah ditangani. Terdapat kekhawatiran terkait bahwa sistem atau algoritma dapat dirancang oleh mereka yang sudah memiliki bias, yang dapat menyebabkan bias tersebut semakin meluas dan meluas.

Untuk memahami makna keadilan algoritmik, beberapa pemahaman tentang bagaimana algoritma dapat digunakan di sektor peradilan adalah penting. Seperti yang dicatat Zeleznikow, penalaran berbasis aturan (preskriptif) adalah penerapan serangkaian aturan yang telah ditentukan sebelumnya ke suatu algoritma. Penalaran berbasis kasus memerlukan analisis pengalaman sebelumnya untuk memastikan solusi untuk masalah baru. Pembelajaran mesin melibatkan algoritma yang belajar melalui pengalaman/pengumpulan data, yang pada gilirannya memungkinkannya untuk memprediksi hasil dengan cepat dan lebih akurat. Hingga saat ini, dalam kategori pertama (penalaran berbasis aturan) banyak perkembangan di sektor

pengadilan telah muncul, yang sering difokuskan pada manajemen kasus. Penalaran berbasis kasus yang menginformasikan pengembangan beberapa algoritma sering tidak digunakan dan pendekatan pembelajaran mesin, meskipun berkembang pesat di luar pengadilan (misalnya dalam perjalanan, medis dan bidang lainnya), sering tidak digunakan oleh hakim dan pengadilan. Pihak lain (misalnya, pihak yang berperkara dan pengacara) dapat menggunakan pendekatan tersebut ketika terlibat dalam perkara pengadilan, dan pendekatan tersebut dapat didukung dan diperluas dalam bidang 'aplikasi keadilan'.

Dalam mempertimbangkan penggunaan pembelajaran mesin di masa mendatang, penting untuk dicatat bahwa proses tersebut dipengaruhi oleh data yang digunakan untuk menginformasikan algoritma yang mendasarinya. Misalnya, jika sistem prediktif hanya menggunakan data dari kasus perdata yang telah diputuskan, masalah signifikan dapat muncul terkait keakuratan prediksi tersebut. Hal ini sebagian disebabkan oleh data tersebut yang mungkin menyimpang yaitu, ketika kasus perdata berlanjut ke sidang penuh di hadapan hakim, mungkin terdapat banyak fitur yang menjadikan sengketa tersebut bukan sengketa yang 'normal' atau 'tipikal'. Dengan demikian, ketidakadilan atau bias algoritmik dapat terjadi hanya karena pendekatan pembelajaran mesin menggunakan rentang data yang sempit yang tidak mencakup situasi atau hasil realistis yang normal. Oleh karena itu, jelas bahwa sumber data perlu ditentukan secara komprehensif. Dalam lingkungan pengadilan perdata, misalnya, hal ini dapat mencakup data tentang hasil yang dicapai sebagai hasil negosiasi atau penarikan klaim. Selain itu, data yang berkaitan dengan masalah yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif (ADR) atau proses lainnya juga dapat disertakan.

Satu kekhawatiran tentang bagaimana perkembangan akan berlangsung terkait dengan masalah siapa yang memiliki akses ke data di mana kasus telah ditentukan oleh hakim. Di beberapa yurisdiksi ada kurangnya kejelasan tentang hal ini dan, di AS, ada argumen yang berkaitan dengan perusahaan mana yang dapat mengendalikan data tersebut. Pendekatan semacam itu lebih mungkin terjadi di negara-negara di mana informasi tentang keputusan pengadilan tidak tersedia di basis data publik atau terbuka. Memang, masalah yang berkaitan dengan kepemilikan dan hak cipta data keputusan pengadilan telah menyebabkan tuntutan hukum di AS. Masalah data lainnya telah diangkat oleh hakim sendiri. Misalnya, pada tahun 2019, hakim di Prancis yang khawatir tentang penggunaan analitik data untuk mengeksplorasi keputusan pengadilan melobi dengan sukses untuk memperkenalkan undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah siapa pun menganalisis data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan dan perilaku peradilan. Dalam hal ini, hakim di Prancis mungkin khawatir bahwa ketidakadilan algoritmik dapat muncul dari akses ke sistem AI yang bersifat prediktif dan yang mungkin memungkinkan atau mendorong forum shopping. Di sisi lain, langkah-langkah tersebut dapat dipandang dari sudut pandang eksklusi digital, yang dapat menimbulkan masalah keadilan algoritmik serta masalah kesenjangan digital.

Saat ini, sebagian besar pengadilan dan pihak yang berperkara tidak memiliki kapasitas untuk memperkenalkan sistem pembelajaran mesin yang lebih canggih yang dapat menginformasikan operasi pengadilan dan peradilan karena mungkin hanya tersedia rentang data yang terbatas (yang mungkin hanya mencakup putusan pengadilan tertulis). Catatan

pengadilan lainnya seringkali tidak didigitalkan dan juga seringkali tidak lengkap dalam arti bahwa catatan tersebut mungkin hanya memuat sedikit informasi demografis, terutama yang berkaitan dengan sengketa perdata, dan mungkin hanya ada akses terbatas ke materi pembuktian apa pun. Bahkan ketika catatan pengadilan didigitalkan, terdapat banyak masalah tentang apakah catatan pengadilan berisi informasi yang cukup untuk menginformasikan pendekatan pembacaan mesin yang komprehensif (alih-alih terbatas dan berpotensi tidak akurat). Namun, pergeseran menuju pengadilan daring meningkatkan kemungkinan bahwa pendekatan pembelajaran mesin dapat diakomodasi di masa mendatang. Hal ini, pada gilirannya, membuat kekhawatiran tentang keadilan algoritmik menjadi lebih relevan sehubungan dengan AI Hakim yang suportif dan perkembangan AI Hakim.

Rentang fungsi peradilan yang kompleks juga harus dipertimbangkan dalam hal dampak potensial dari keadilan algoritmik. Misalnya, meskipun kemajuan algoritmik dapat membantu hakim dalam hal manajemen kasus, hanya ada sedikit eksplorasi tentang bagaimana hal ini dapat terjadi. Pendekatan pembelajaran mesin yang lebih maju dapat membantu dalam tugas ini. Mungkin juga bot yang lebih maju yang diinformasikan oleh sistem algoritmik ahli dapat digunakan untuk mendorong manajemen kasus 'berorientasi ke luar'. Namun, perlu dicatat bahwa pendekatan semacam itu yang mungkin menghilangkan hakim manusia dari fungsi manajemen kasus dapat mengakibatkan aktivitas hakim 'responsif' tidak terjadi dan ketidakadilan algoritmik dapat terjadi jika kualitas peradilan berkurang secara substansial. Patut dicatat, meningkatnya penggunaan AI untuk menjalankan fungsi-fungsi kompleks dapat mencakup perkembangan di masa mendatang dalam pemrosesan afektif yang dapat mendukung AI Hakim yang lebih responsif (setidaknya dalam pengaturan manajemen kasus). Namun, pergeseran tersebut tetap dapat menyebabkan ketidakadilan.

Dalam hal fungsi adjudikatif, sebagaimana telah disebutkan, sudah ada beberapa contoh AI yang menginformasikan pengambilan keputusan manusia di sektor peradilan. Di Amerika Serikat dan yurisdiksi lain AI telah mengubah pengambilan keputusan peradilan, dan di sektor hukum, terdapat banyak perkembangan analitik prediktif yang memungkinkan prakiraan hasil litigasi. Dampak dari teknologi ini saat ini mulai terlihat di beberapa bidang sengketa perdata dan diperkirakan akan memiliki dampak yang lebih signifikan di masa mendatang, terutama di bidang hukum pidana.

Kemungkinan besar Hakim AI juga akan diperluas ke beberapa kategori sengketa di masa mendatang, meskipun perancangan dan pengembangan sistem tersebut akan memerlukan perlindungan tambahan untuk memastikan tidak timbulnya masalah yang terkait dengan bias algoritmik. Masih banyak lagi masalah lain yang telah diangkat dalam konteks ini. Misalnya, terlepas dari sifat primitif dari banyak pendekatan algoritmik yang lebih sederhana (non-pembelajaran mesin), telah dikemukakan bahwa kurangnya kognisi manusia menimbulkan kekhawatiran khusus tentang penggunaan pembelajaran mesin dalam bidang pengambilan keputusan administratif:

Doktrin hukum publik fundamental berasumsi bahwa kewenangan hukum akan dijalankan oleh jenis agen pengambil keputusan tertentu: seseorang dengan kapasitas kognitif yang

memadai untuk memahami kompleksitas interpretatif instrumen hukum dan merespons lingkungan yang sangat dinamis.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dan, lebih jauh lagi, adjudikasi yudisial adalah sebuah 'seni' dan tidak dapat direduksi begitu saja menjadi persamaan numerik dan ilmiah. Hal ini sebagian disebabkan oleh kompleksitas yang terlihat dalam bidang hukum serta kesulitan dalam meniru perilaku yudisial, dan juga karena dikatakan ada sesuatu yang khas manusiawi tentang adjudikasi yudisial yang bahkan sistem Hakim AI yang lebih canggih pun mungkin tidak dapat mereplikasinya dan bahwa ketidakadilan algoritmik dapat diakibatkan oleh upaya semacam itu.

Isu terkait terkait penerapan AI pada situasi tertentu. Agar hal ini terjadi, tidak hanya data yang digunakan untuk menginformasikan pendekatan pembelajaran mesin harus memadai, tetapi situasi fakta yang diterapkan harus 'dapat dibaca mesin', yaitu dalam bentuk yang dapat dipahami dan dapat 'dikodekan'. Meskipun dalam jangka panjang, bagaimana materi disajikan kepada Hakim AI dapat dibantu oleh konversi suara ke teks, obrolan yang disempurnakan dan bot suara, serta 'aplikasi keadilan' yang membantu para pihak yang bersengketa untuk menyajikan 'kasus' mereka, saat ini, tampaknya diasumsikan bahwa pendekatan '*on the papers*' (alih-alih sidang lisan) akan diadopsi. Hal ini dibahas lebih lanjut di bawah ini karena asumsi ini dapat menyebabkan bias terhadap beberapa anggota masyarakat.

3.2 PERMASALAHAN BIAS ALGORITMIK

Pada tingkat yang paling sederhana, 'bias algoritmik' mengacu pada situasi di mana suatu kelompok atau individu diuntungkan atau didiskriminasi secara tidak adil. Meskipun paling sering dirujuk dalam ranah peradilan pidana, permasalahan bias algoritmik juga dapat muncul dalam ranah hukum administrasi, perdata, komersial, dan keluarga. Permasalahan tersebut perlu dipertimbangkan dalam konteks bias yudisial serta faktor-faktor tambahan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yudisial dan kenyataan bahwa manusia juga dapat memiliki bias. Namun, perlu dicatat juga bahwa terdapat kekhawatiran yang unik terkait konsep bias algoritmik. Kekhawatiran tersebut dapat mencakup isu-isu menyeluruh yang terkait dengan pemisahan antara lembaga yudikatif dan eksekutif. Misalnya, ketika pemerintah memainkan peran yang lebih substantif dalam membangun sistem AI yang menggantikan hakim, dapat dikatakan bahwa terdapat bias terhadap pemerintah. Permasalahan ini dapat dikaitkan dengan kekhawatiran terkait transparansi atau ketidakjelasan pengambilan keputusan algoritmik. Perlu dicatat juga bahwa 'bias algoritmik' adalah istilah yang dapat digunakan untuk merujuk pada bias terhadap algoritma. Hal ini dibahas di akhir bab ini.

Beberapa penulis telah menyoroti bagaimana algoritma yang seringkali sederhana dapat mereplikasi dan/atau memperburuk bias sosial sebagai akibat dari data yang mereka 'masukkan'. Sebaliknya, Završnik telah mempertimbangkan keadilan algoritmik dalam konteks proses hukum pidana, mengamati bahwa pengambilan keputusan manusia seringkali cacat karena argumen stereotip dan kriteria terlarang yang menyusup ke dalam putusan. Perlu dicatat bahwa algoritma juga dapat 'dimasukkan' dengan data yang tidak 'bersih' dari 'keadaan

sosial, budaya, dan ekonomi'. Crootoof juga mencatat bahwa AI 'menggabungkan bias manusia dan menambahkan jenis lainnya'. Secara khusus, Crootoof berpendapat bahwa sistem AI dapat menghasilkan hasil yang bias karena:

(1) bias yang sudah ada sebelumnya, yang ada dalam set data pelatihan dan dikodekan dalam desain sistem; (2) bias teknis, yang muncul dari keterbatasan sistem, seperti hilangnya konteks dan formulasi yang disederhanakan yang menyertai upaya menerjemahkan realitas ke dalam kode; dan (3) bias emergen, yang muncul dari interaksi pengguna dengan populasi tertentu.

Terdapat pula pertanyaan mengenai akurasi dan oleh karena itu kegunaan perangkat algoritmik yang terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan bias algoritmik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diperparah oleh beragam hasil studi yang berkaitan dengan akurasi perangkat algoritmik yang saat ini digunakan dalam bidang hukum pidana. Sebagai contoh, Dresel dan Farid menyelidiki *COMPAS*: sistem penilaian risiko jaminan Amerika Serikat yang umum digunakan dan menjadi subjek tindakan pengadilan di Amerika Serikat. Dressel dan Farid menemukan bahwa sistem tersebut (yang digunakan untuk memprediksi residivisme) sama akuratnya dengan jajak pendapat daring terhadap 400 orang acak tanpa pelatihan pidana atau hukum. Artinya, *COMPAS* memprediksi tingkat residivisme dengan tingkat akurasi 65 persen, dibandingkan dengan tingkat akurasi 67 persen untuk orang awam.

Namun, temuan tersebut mungkin berbeda dengan hasil studi selanjutnya oleh Lin dkk. Studi selanjutnya menemukan bahwa algoritma *COMPAS* sebenarnya dapat berkinerja lebih baik daripada manusia dalam beberapa keadaan. Secara khusus, studi tersebut menemukan bahwa relevan apakah umpan balik diberikan tentang apakah orang tersebut telah melakukan pelanggaran kembali atau tidak. Dalam mereplikasi studi di atas, Lin dan rekan-rekan menghapus umpan balik tentang apakah orang tersebut sebenarnya telah melakukan pelanggaran kembali karena 'dalam kehidupan nyata, perlu waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum profesional peradilan pidana menemukan orang mana yang telah melakukan pelanggaran kembali'. Jika umpan balik dipertahankan, hasilnya serupa dengan yang ada dalam studi Dresel dan Farid yang asli. Namun, setelah umpan balik dihapus, ditemukan bahwa kesenjangan dalam akurasi secara signifikan lebih menguntungkan algoritma tersebut.

Peneliti lain juga berpendapat bahwa kritik yang berkaitan dengan bias algoritmik terlalu dibesar-besarkan dan sangat bergantung pada desain algoritma itu sendiri. Secara khusus, beberapa pihak berpendapat bahwa algoritma yang dirancang dengan baik 'dapat mengurangi masalah berbahaya akibat keputusan manusia tanpa bantuan'. Jelas, perancangan dan pengembangan mekanisme untuk mencegah bias algoritmik dapat menjadi penting, dan sejauh mana manusia terlibat dalam peninjauan keputusan algoritmik dengan menggunakan 'sampler' atau supervisi yang lebih ekstensif relevan dalam hal mengurangi bias algoritmik, seperti halnya pertanyaan yang berkaitan dengan desain algoritmik asli.

Dalam hal ini, Coglianese dan Lehr berpendapat bahwa pendekatan algoritmik dapat bermanfaat dalam pengaturan pengambilan keputusan yudisial, dengan syarat memperhatikan: pertimbangan proses hukum; evaluasi algoritma (termasuk pengujian tingkat kesalahan dan sejauh mana tingkat kesalahan tersebut dapat diterima); dan hak untuk mempertahankan pemeriksaan silang algoritma adjudikatif. Kerangka kerja yang lebih jelas ini mungkin juga mencakup aspek-aspek perancangan dan supervisi, sebagaimana disebutkan di atas. Namun, untuk mengurangi bias, kembali ditekankan bahwa mereka yang terlibat dalam perancangan perlu melibatkan berbagai kelompok kepentingan bukan hanya pengacara dan hakim.

Di Britania Raya, Law Society of England and Wales telah membentuk Komisi Teknologi dan Kebijakan Hukum untuk mengkaji penggunaan algoritma dalam sistem peradilan pidana. Komisi tersebut telah melaporkan kurangnya standar yang eksplisit, praktik terbaik, dan keterbukaan atau transparansi tentang penggunaan sistem algoritmik. Secara khusus, mereka mencatat bahwa sistem semacam itu 'mengkodekan asumsi dan pola sistematis yang dapat menghasilkan keluaran diskriminatif atau efek hilir'. Selain itu, mereka telah menyatakan bahwa 'data yang digunakan sebagai masukan ke sistem diberi label, diukur, dan diklasifikasikan sehingga agak subjektif dan dapat menjadi sumber bias'. Namun, perlu juga disebutkan bahwa algoritma memiliki kapasitas untuk mengungkap bias. Data berkualitas lebih baik yang mencakup referensi ke berbagai faktor dan demografi dapat menunjukkan, misalnya, siapa yang tidak menggunakan sistem peradilan dan juga menunjukkan layanan mana yang tidak memadai atau memerlukan perbaikan. Secara lebih individual, algoritma dapat menyoroti di mana hakim dapat membuat keputusan yang 'bias'. Hal ini juga dapat mengakibatkan 'dorongan' atau 'koreksi' hakim yang agak kontroversial di yurisdiksi seperti Tiongkok.

Selain itu, penggunaan algoritma dapat dikaitkan dengan isu-isu signifikan terkait pengawasan sosial dan jenis data yang dapat digunakan oleh hakim dan pihak lain dalam membuat keputusan. Penggunaan data kredit sosial di Tiongkok, misalnya, telah menjadi subjek beberapa komentar. Sistem kredit sosial yang diperkenalkan di Tiongkok pada 2019–2020 menilai warga negara berdasarkan berbagai variabel dan telah digambarkan sebagai 'sistem pemeringkatan berbasis data'. Cara sistem tersebut dapat diandalkan oleh hakim dan pengadilan mengungkapkan pendekatan yang sangat berbeda yang mungkin dimiliki hakim dan pengadilan saat memutus kasus. Misalnya, di yurisdiksi seperti Tiongkok, skor kredit sosial mungkin menjadi hal yang relevan untuk dipertimbangkan sebelum proses pengadilan dimulai, setelah proses dimulai, dan dalam menentukan hasil.

Tampaknya sistem kredit sosial yang melibatkan pengembangan peringkat dan pemeringkatan untuk individu akan memainkan peran yang lebih signifikan di masa depan dan dapat menunjukkan beberapa masalah yang dibahas di atas (tentang siapa yang memiliki data, data apa yang digunakan dalam membuat algoritma, dan siapa atau entitas apa yang membuat algoritma). Selain itu, sistem semacam itu dapat relevan tidak hanya dengan masalah yang berkaitan dengan ketidakjelasan tetapi juga dengan pertanyaan tentang penggunaan materi

yang dihasilkan oleh algoritma oleh pengadilan dan hakim. Dalam hal ini, Backer mencatat bahwa sistem kredit sosial Tiongkok didasarkan pada hal-hal berikut:

Inisiatif kredit sosial berfokus pada penerapannya dalam tata kelola melalui pengembangan sistem reputasi nasional, dengan menetapkan nomor kredit sosial yang mencerminkan penilaian kualitatif atas data relevan yang dikumpulkan mengenai subjek tersebut. Reputasi di sini dipahami dalam dimensi ekonomi, politik, dan sosialnya semuanya dikelola melalui standar yang dikembangkan dan diawasi oleh Partai-Negara. Reputasi itu sendiri mencakup gagasan ketulusan, integritas, dan kepatuhan, sesuai dengan standar dan tujuan yang diawasi oleh negara. Empat area diidentifikasi: 'ketulusan dalam urusan pemerintahan' (政务诚信), 'ketulusan komersial' (商务诚信), 'ketulusan masyarakat' (社会诚信), dan 'kredibilitas yudisial' (司法公信).

Dimasukkannya komponen kredibilitas yudisial berarti bahwa hakim dan pengadilan di yurisdiksi tersebut tidak hanya dapat mengandalkan algoritma ini, tetapi mereka juga dapat bertanggung jawab atas kurasi data dan perumusan (hingga batas tertentu) peringkat itu sendiri.

Sistem semacam itu juga menimbulkan isu terkait penindasan digital dan otoritarianisme, serta kekhawatiran terkait bias etnis. Sistem kredit sosial juga terkait erat dengan sistem hukum, sistem pengadilan, dan hakim. Sebagaimana dicatat oleh Backer: 'hukum akan menjadi kerangka kerja yang di dalamnya metode baru regulasi sosial dapat dikembangkan ("sesuai dengan hukum")'. Dalam hal ini, dan dalam konteks bias algoritmik, perlu dicatat bahwa sistem semacam itu tidaklah 'bebas nilai'. Sistem ini justru merepresentasikan dimasukkannya sistem nilai yang jelas dan juga memungkinkan diskresi untuk beroperasi dalam hal bagaimana warga negara diperlakukan jika nilai-nilai tidak diadopsi. Dalam hal ini, Backer lebih lanjut mencatat:

Dengan demikian, kredit sosial melibatkan sistem analitik berbasis data di mana algoritma dapat menentukan konsekuensi dari peringkat berbasis nilai. Misalnya, kegagalan membayar jumlah minimum utang tepat waktu akan langsung memicu pencantuman nama debitur dalam daftar hitam yang menimbulkan konsekuensi: kenaikan suku bunga, larangan bepergian, dan sebagainya. Bergantung pada teknologi yang tersedia, kemungkinan analitik berbasis data dengan konsekuensi seluas imajinasi para pembuat peringkat.

Di banyak negara lain, algoritma risiko kredit dan sosial telah digunakan selama beberapa tahun oleh perusahaan swasta. Namun, penerapan algoritma tersebut ke sektor publik dan peradilan belum terjadi atau belum terlihat. Di era COVID-19, ada kemungkinan lebih banyak indikator risiko sosial akan digunakan oleh organisasi publik dan mungkin dapat digunakan oleh pengadilan dalam hal mempertimbangkan indikator tersebut dalam konteks pembuktian ketika mengambil keputusan. Misalnya, beberapa sistem risiko sosial (yang bergantung pada algoritma yang mendasarinya) telah diperluas sebagian melalui aplikasi pelacakan dan

pencatatan kehidupan, serta melalui pengembangan skor risiko pribadi. Memang, beberapa pengadilan telah bergulat dengan bagaimana dan sejauh mana data tersebut dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus pengadilan.

Peran hakim dan pengadilan dalam mempertimbangkan algoritma semacam itu mungkin lebih luas ketika dikaitkan dengan kontrol negara. Misalnya, pengadilan (dan, dengan demikian, hakim) mungkin memiliki tanggung jawab atas integritas sistem semacam itu yang mengharuskan hakim dan pihak lain untuk mengembangkan pemahaman tentang bias algoritmik, serta beberapa kerangka kerja yang dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang bagaimana data dapat dan harus digunakan oleh pengadilan dan pihak lain. Sebagaimana dicatat oleh Backer, pendekatan ini akan bervariasi sesuai dengan pengaturan tata kelola dan, dalam demokrasi non-liberal, perkembangan tersebut harus dipahami dalam konteks pandangan tentang tatanan sosial:

Tujuan kredit sosial adalah untuk melacak dan menilai tindakan setiap orang. Sistem semacam itu menimbulkan pertanyaan: Apa peran hukum tradisional yang tersisa dalam konteks di mana semua tindakan menghasilkan konsekuensi yang hampir seketika? Sistem ini juga menunjukkan peran hukum yang berbeda sebagai sarana untuk memantau integritas sistem itu sendiri.

Ada isu-isu lain yang muncul ketika sistem tidak dikendalikan oleh negara melainkan dikendalikan oleh swasta. Saat ini, misalnya, sistem AI yang dirancang oleh IBM Watson sudah digunakan untuk membuat keputusan tentang klaim asuransi. Perkembangan AI semacam itu dapat menimbulkan isu terkait keadilan dan bias, sebagian karena banyak inovasi AI dipimpin oleh proses penelitian dan pengembangan perusahaan. Selain itu, perkembangan di sektor ini mungkin kurang memperhatikan kebaikan masyarakat atau implikasi yang lebih mendalam dari inovasi AI. Pada tingkat yang luas ini, isu bias dapat muncul karena sistem yang digunakan tidak berorientasi untuk mempertahankan sistem peradilan, tetapi mungkin lebih berfokus pada 'throughput' kasus atau ukuran lain.

3.3 BIAS ALGORITMIK DAN BIAS MANUSIA

Potensi bias algoritmik dapat dipertimbangkan dari perspektif dampaknya terhadap peran yudisial (melalui Hakim AI yang suportif atau Hakim AI), serta materi yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh hakim. Namun, potensi bias algoritmik ini perlu dipertimbangkan terhadap risiko bias dan kelemahan lain dalam pengambilan keputusan manusia. Dalam pembahasan di bawah ini, terdapat fokus yang lebih spesifik pada bias dalam konteks peran yudisial dan bagaimana Hakim AI yang suportif atau Hakim AI dapat, di satu sisi, menyebabkan bias algoritmik dan di sisi lain, mengurangi bias manusia.

Sage, Wright, dan Morris telah mencatat bahwa gaya hakim yang berbeda dapat menyebabkan 'perlakuan kasus yang idiosinkratik'. Butler juga mengamati bahwa mengadili adalah 'usaha yang sangat manusiawi, yang mencerminkan semua variasi dalam pengalaman,

perspektif, kemanusiaan, akal sehat, dan pemahaman hukum para hakim itu sendiri'. Crotoft telah merangkum kekhawatiran ini:

Tentu saja, ada banyak hal yang perlu dikritik tentang keadilan hakim manusia. Mereka terkenal tidak konsisten, baik sebagai kelompok maupun individu. Keputusan hakim tidak hanya akan bervariasi dari satu hakim ke hakim lainnya, tetapi kepekaan setiap hakim terhadap konteks dan kecenderungannya untuk bersikap lunak dapat sangat bervariasi, tergantung pada apakah mereka lapar, lelah, bosan, terlalu banyak bekerja, kewalahan, atau terganggu oleh hal lain.

Penulis juga mencatat bahwa neurobiologi pembuat keputusan memengaruhi proses pengambilan keputusan, dan terdapat perbedaan utama dalam cara pembuat keputusan 'menyortir, menyimpan, menghilangkan, memberi peringkat, dan terkadang mendistorsi informasi'. Dalam sebuah kasus di Amerika Serikat yang menyangkut dugaan bias seorang pejabat pengadilan, Hakim Jerome Frank mengatakan:

Setiap hakim ... mau tidak mau memiliki banyak "kecenderungan pikiran" yang idiosinkratik, prasangka pribadi yang unik, yang dapat mengganggu keadilannya di persidangan. Ia mungkin terstimulasi oleh simpati bawah sadar, atau antipati, terhadap beberapa saksi, pengacara, atau pihak dalam kasus yang dihadapinya.

Berbagai dampak bias terhadap para pengambil keputusan manusia telah dibahas. Meskipun jelas bahwa hakim dapat bias dalam pengambilan keputusan mereka, banyak hakim akan menerima pelatihan yang berfokus pada mengesampingkan bias naluriah. Bias juga belum tentu menghasilkan hasil yang negatif. Menurut Damasio, tanpa unsur 'bias' (reaksi naluriah/naluri), orang tidak akan mampu membuat keputusan sama sekali. Untuk mengurangi atau menghilangkan bias dalam pengambilan keputusan, harus diakui bahwa terdapat berbagai tahapan dalam pengambilan keputusan yudisial. Tahapan ini dapat berkisar dari pengumpulan informasi, pemilihan dan analisis, hingga pengambilan keputusan itu sendiri. Dalam tahap pengumpulan informasi, Feigenson dan Park menyarankan proses empat langkah untuk mengurangi bias:

1. Waspada pengaruh yang tidak diinginkan.
2. Termotivasi untuk mengoreksi bias.
3. Waspada besarnya dan arah bias.
4. Mampu menyesuaikan respons yang sesuai.

Disarankan juga bahwa sekadar menyadari akuntabilitas seseorang atas suatu keputusan 'akan mengurangi efek pengaruh emosional insidental pada pengambilan keputusan'. Dalam sebagian besar pengambilan keputusan yudisial, mungkin terdapat faktor-faktor tambahan yang memengaruhi pemilihan dan pemilahan informasi. Misalnya, aturan yang berkaitan dengan keadilan alamiah dapat memengaruhi cara materi disajikan kepada pembuat keputusan dan juga pada sifat dan komunikasi keputusan itu sendiri. Isu-isu tentang netralitas dan bias juga relevan dengan tahap analisis dan pembuat keputusan harus menyadari taktik

dan faktor-faktor yang mungkin membatasi atau memengaruhi pemahaman mereka tentang isu-isu tersebut.

Sebagian besar pengadilan memiliki aturan dan persyaratan prosedural yang ekstensif yang harus dipatuhi oleh hakim untuk memastikan bahwa kekhawatiran bias tidak memengaruhi keputusan yang pada akhirnya dapat dibuat. Misalnya, di Australia, dalam proses pengadilan, komentar yudisial yang dibuat sebelum atau selama persidangan tentang perilaku dan kredibilitas saksi sering kali dapat menimbulkan kesimpulan bias, seperti halnya intervensi yang berlebihan dalam perilaku para pihak dalam litigasi. Namun, ini harus ditimbang terhadap preseden yang mendukung beberapa tingkat intervensi yudisial yang 'tepat'. Misalnya, Pengadilan Tinggi Australia telah memperjelas bahwa aturan bias tidak boleh mencegah terjadinya tingkat intervensi yang tepat. Juga telah dikatakan bahwa litigasi perdata kontemporer membutuhkan intervensi yudisial yang lebih besar dan bahwa ini tidak boleh dilihat sebagai pembuka bagi hakim terhadap tuduhan bias.

Ada juga masalah tentang bagaimana hakim terlibat dalam proses pengadilan. Misalnya, meskipun 'kekasaran' atau sikap singkat mungkin tidak merupakan bias, mungkin ada situasi yang lebih ekstrem di mana perilaku kasar dan tidak pantas dapat terjadi. Khususnya, Ashley JA, mantan Hakim Mahkamah Agung Victoria, di Australia, menyatakan dalam kasus *Young v Nixon*:

... dalam semua keadaan, saya pikir ketegasan itu dibenarkan, tetapi saya rasa ketegasan itu tidak pernah dikatakan sebagai sesuatu yang cukup untuk menunjukkan bias dalam hal apa pun, atau kekhawatiran yang wajar akan hal yang sama.

Jika Hakim AI yang suportif digunakan, ada kemungkinan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, diskusi tentang hasil yang 'diprediksi' dapat membuka potensi tuduhan bias jika nada dan konteks diskusi tidak tepat. Karena pendekatan algoritmik dapat memungkinkan hakim untuk mengungkapkan pandangan tentatif tentang potensi hasil litigasi yang didasarkan pada perangkat pendukung AI, hal ini mungkin juga bermasalah dan memerlukan langkah-langkah reformasi. Artinya, meskipun ada beberapa pergeseran pemikiran terkait formulasi 'pandangan tentatif' oleh hakim dan apakah hal ini dapat dianggap sebagai bias dari pihak pembuat keputusan, situasinya masih cukup tidak jelas dan mungkin saja hasil yang dikembangkan oleh algoritma, atau digunakan oleh hakim untuk menyarankan apa yang mungkin menjadi hasil, bisa jadi bermasalah. Di Australia, Pengadilan Tinggi telah mencatat bahwa:

Terkadang intervensi dan observasi yudisial dapat melampaui apa yang merupakan ekspresi pandangan tentatif yang wajar dan wajar. Apakah hal itu telah terjadi merupakan masalah penilaian dengan mempertimbangkan semua keadaan kasus tersebut. Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa ekspresi pandangan tentatif selama proses argumen mengenai hal-hal yang diizinkan oleh para pihak untuk memberikan pernyataan lengkap tidak menunjukkan keberpihakan atau bias.

Berbeda dengan persyaratan prosedural kompleks yang secara historis terkait dengan pengambilan keputusan dan proses peradilan manusia, AI hadir tanpa prosedur yang jelas atau matang terkait bias. Sebagaimana disebutkan di atas, hanya ada sedikit informasi tentang data apa yang dapat dikumpulkan, bagaimana masalah validitas atau kredibilitas data dapat dipertimbangkan dan diselesaikan, dan juga sejauh mana pandangan yudisial 'tentatif' dapat diungkapkan atau bagaimana keputusan akhir yang mengacu pada materi tersebut dengan cara tertentu dapat diajukan banding. Namun, terdapat banyak manfaat yang diakui dalam literatur terkait pengambilan keputusan oleh AI. Misalnya, Čapeta telah mencatat bahwa, berbeda dengan para pengambil keputusan manusia, AI tidak memiliki 'diri' dan keputusan-keputusannya 'tidak dipengaruhi oleh hal-hal biasa seperti apakah mereka bangun dengan sakit kepala atau apakah mereka menonton film sedih pada malam sebelumnya'. Mengingat faktor-faktor tersebut, Završnik menyarankan bahwa algoritma dapat membantu mencegah 'keputusan-keputusan pengadilan yang memalukan dan seringkali sewenang-wenang'.

Beberapa algoritma sudah ada di pengadilan Tiongkok dan digunakan untuk 'mendorong' atau 'mengoreksi' hakim dalam pengambilan keputusan mereka. Saat ini, masih minim penelitian yang mengkaji penggunaan sistem semacam itu. Namun, jelas bahwa platform semacam itu dapat memainkan peran penting dalam mengatur bias peradilan, mungkin dengan mengorbankan diskresi dan aktivisme peradilan. Selain itu, platform semacam itu mungkin jauh lebih relevan dalam sistem di mana hakim tidak terlalu terlibat dalam membantu mendukung evolusi konsep hukum melalui pengembangan preseden. Di Tiongkok, sistem ini telah dijelaskan sebagai berikut:

Misalnya, Mahkamah Agung Rakyat mengumumkan pada Mei 2019 bahwa mereka sedang mengembangkan platform data untuk membantu hakim menangani kasus-kasus kekayaan intelektual. Sistem semacam itu pada akhirnya dapat digunakan untuk mengevaluasi masing-masing hakim dengan membandingkan keputusan mereka dengan rata-rata. Seseorang hanya perlu memasukkan data yang relevan (ini adalah wilayah di mana analis data dan pembuat kode, bukan pengacara dan pakar kebijakan, yang memutuskan) dari kasus-kasus yang dikelompokkan ke dalam set data. Analisis prediktif dapat digunakan untuk menentukan rentang keputusan yang 'rata-rata' atau masuk akal (dikoreksi sendiri oleh sistem AI seiring bertambahnya kasus baru). Hakim yang keputusannya menyimpang dari hasil prediksi atau rata-rata, dengan mempertimbangkan fakta-fakta kunci yang relevan, harus membenarkan penyimpangan tersebut. Atau, hakim dapat dinilai untuk mengevaluasi kinerja mereka. Sebenarnya, sistem kepatuhan ini sudah cukup familiar bagi perusahaan-perusahaan Barat tetapi belum familiar bagi negara.

Masalah yang muncul dalam hal AI dan penjurian, serta potensi bias algoritmik, sangat banyak. Masalah-masalah tersebut mencakup masalah yang berkaitan dengan bagaimana informasi dikumpulkan, disortir, dan diprioritaskan, serta masalah yang berkaitan dengan analisis materi tersebut dan transparansi algoritma. Sampai batas tertentu, masalah-masalah ini juga muncul dalam pengambilan keputusan manusia. Namun, dalam bidang pengambilan keputusan yudisial seringkali terdapat aturan prosedural yang jelas dan dikembangkan dengan baik untuk

mengatasi masalah-masalah tersebut. Agar Hakim AI dapat berkembang, hal-hal ini perlu dipertimbangkan dan kerangka kerja logis dengan mekanisme pengawasan perlu dikembangkan. Namun, tampaknya ada kemungkinan bahwa beberapa jenis sistem hibrida akan beroperasi dan diperluas sehingga pengambilan keputusan peradilan didukung oleh AI dalam hal perumusan pandangan tentatif atau, pembentukan beberapa mekanisme 'korektif'.

Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, dan terlepas dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi para pengambil keputusan manusia, keputusan yang dibuat oleh hakim manusia saat ini mungkin memiliki persepsi legitimasi yang lebih tinggi daripada yang dibuat oleh para pengambil keputusan algoritmik. Sebuah studi empiris menemukan bahwa semakin banyak AI terlibat dalam suatu keputusan hukum, semakin rendah persepsi legitimasinya. Hal ini penting karena berarti bahwa, saat ini, keputusan oleh pengambil keputusan manusia mungkin lebih cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan mungkin akan dianggap lebih 'adil'.

3.4 PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADMINISTRATIF

Beberapa penulis menganggap bahwa pendekatan algoritmik memiliki potensi yang signifikan di bidang administrasi dan memandang perkembangan di bidang ini dengan optimisme. Dalam hal ini, Coglianese dan Lehr telah mencatat bagaimana algoritma pembelajaran mesin telah mengubah hampir setiap aspek masyarakat:

Algoritma bukanlah hal baru. Selama beberapa dekade, algoritma telah menjadi komponen integral dari setiap program komputer. Namun saat ini, algoritma pembelajaran mesin yang canggih menciptakan masyarakat yang sangat terotomatisasi, mengubah banyak aspek kehidupan. Banyak produk dan layanan, termasuk filter spam email, diagnosis medis, pemasaran produk, dan mobil tanpa pengemudi, kini bergantung pada algoritma pembelajaran mesin dan kemampuannya untuk memberikan daya dan kecepatan peramalan yang luar biasa. Algoritma masa kini adalah 'robot' digital yang memiliki kemampuan otonom yang efektif untuk beradaptasi dan belajar.

Pentingnya, para penulis selanjutnya menjelaskan bagaimana perkembangan semacam itu dapat memberikan manfaat khusus bagi bidang administrasi:

Banyak aspek administrasi publik tidak diragukan lagi dapat memperoleh manfaat dari penerapan algoritma pembelajaran mesin, baik saat ini maupun di tahun-tahun mendatang. Pekerjaan yang luas dari badan-badan administrasi, dengan banyaknya tanggung jawab regulasi rutin dan proses peradilan, tampaknya siap untuk mendapatkan manfaat dari otomatisasi semacam itu.

Namun, meskipun bidang administrasi bisa dibilang 'matang' untuk otomatisasi, muncul kekhawatiran tentang sejauh mana keadilan algoritmik melalui otomatisasi dimungkinkan atau diinginkan dalam hal pengadilan atau tribunal administrasi yang menyediakan peninjauan atau 'pemeriksaan' atas pengambilan keputusan administratif. Di satu sisi, pengambilan keputusan

otomatis di bidang pengadilan atau tribunal administrasi dapat dimungkinkan karena anggaran mungkin tersedia untuk memfasilitasi hal ini. Terdapat juga bukti bahwa di beberapa yurisdiksi, layanan pemerintah semakin banyak diakses melalui sarana digital. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa masyarakat lebih suka jika peninjauan pengambilan keputusan pemerintah juga dilakukan melalui mekanisme digital.

Penulis bersama Cornes juga telah memprediksi bahwa AI akan memainkan peran yang lebih menonjol dalam pengambilan keputusan administratif sebelum digunakan secara lebih luas oleh pengadilan dan tribunal administratif. Memang, pengambilan keputusan administratif telah diotomatisasi lebih luas daripada bidang lain. Zalnieriute dkk. telah mengidentifikasi sejumlah contoh pengambilan keputusan otomatis dalam konteks hukum administrasi. Ini termasuk sistem kesejahteraan mahasiswa otomatis di Swedia, sistem kredit sosial di Tiongkok, dan skema 'robodebt' kontroversial di Australia, yang terakhir dimaksudkan untuk menghitung dan menagih utang karena kelebihan pembayaran tunjangan kesejahteraan. Di Australia, undang-undang baru telah diusulkan di bidang jaminan sosial yang dimaksudkan untuk mendukung pengambilan keputusan otomatis. Namun, meskipun ada peningkatan penggunaan pengambilan keputusan otomatis di bidang administratif, terdapat tantangan sekaligus peluang potensial terkait perluasan ke bidang pengadilan dan tribunal administratif yang dirangkum di bawah ini.

Peluang

Secara umum, otomatisasi dalam pengambilan keputusan administratif, dan juga dalam pengadilan dan tribunal administratif, dapat memberikan sejumlah manfaat penting. Yang paling signifikan, otomatisasi berpotensi membuat pengambilan keputusan pemerintah lebih akurat, efisien, dan adil. Zalnieriute dan rekan-rekan mencatat bahwa otomatisasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah:

Sementara manusia mungkin memberikan justifikasi untuk suatu keputusan “ex post” yang tidak secara akurat mewakili alasan pengambilan keputusan, sistem berbasis aturan dapat menjelaskan secara tepat bagaimana setiap variabel ditetapkan dan mengapa setiap kesimpulan dicapai.

Dalam hal ini, pentingnya sistem yang memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana keputusannya dicapai sangatlah penting. Skema robodebt di Australia diidentifikasi sebagai contoh sistem yang gagal memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana utang dihitung. Sebaliknya, sistem kesejahteraan mahasiswa otomatis di Swedia disorot sebagai sistem yang keputusannya didasarkan pada aturan publik yang jelas dan manusia yang mengonfirmasi dan bertanggung jawab atas setiap keputusan.

Selain transparansi dan akuntabilitas, otomatisasi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan administratif. Dalam laporannya tahun 2007, Pemerintah Australia memasukkan sistem pemrosesan klaim kompensasi otomatis yang dibentuk oleh Departemen Urusan Veteran sebagai studi kasus. Dilaporkan bahwa sistem tersebut, yang

memandu para pengambil keputusan dalam menerapkan lebih dari 2.000 halaman undang-undang, telah menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar 80 persen, dengan Departemen memutuskan 30 persen lebih banyak klaim setiap tahunnya; menggunakan 30 persen lebih sedikit sumber daya manusia; dan mengalami pengurangan 60 persen dalam waktu yang dibutuhkan untuk memproses klaim. Manfaat efisiensi seperti ini juga dapat dikaitkan dengan peningkatan prediktabilitas dan konsistensi. Memang, seperti yang dicatat oleh Zalnieriute dkk., prediktabilitas merupakan aspek yang diterima secara luas dari negara hukum. Demikian pula, peningkatan kepastian dan efisiensi dapat memungkinkan individu untuk mengelola urusan mereka secara lebih efektif dan dapat memiliki 'makna moral bahwa kasus-kasus serupa harus diperlakukan sama'.

Akhirnya, Zalnieriute dan rekan-rekan. Perlu dicatat bahwa otomatisasi dapat meningkatkan kesetaraan di hadapan hukum dengan mengurangi kesewenang-wenangan, menghilangkan bias, dan menghilangkan korupsi dalam penerapan hukum. Coglianese dan Lehr sependapat, menyatakan bahwa penggunaan analisis pembelajaran mesin dalam negara regulasi akan membantu pemerintah untuk membuat keputusan yang memenuhi spesifikasi resmi.

Tantangan

Terdapat pula berbagai tantangan yang terkait dengan pengambilan keputusan otomatis dalam konteks hukum administrasi. Pertama, Zalnieriute dkk. mencatat bahwa meskipun otomatisasi dapat meningkatkan prediktabilitas dan konsistensi, otomatisasi juga menimbulkan tantangan bagi prinsip-prinsip yang sama, termasuk ketika penerapan aturan dalam konteks pengambilan keputusan otomatis tidak mematuhi persyaratan hukum perundang-undangan atau hukum umum. Di sini, Zalnieriute dkk. merujuk pada skema robodebt Australia, dengan mencatat bahwa rumus yang digunakan oleh sistem tersebut gagal menghasilkan hasil yang benar secara hukum dalam persentase kasus yang signifikan.

Tantangan kedua yang diidentifikasi oleh Zalnieriute dkk. berkaitan dengan hambatan transparansi otomatisasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Masalah dapat muncul ketika data berisi informasi pribadi yang tidak dapat dipublikasikan karena undang-undang privasi atau perlindungan data, atau ketika 'ketidakmampuan teknis' mencegah manusia menafsirkan data dan algoritma. Hal ini menjadi perhatian khusus karena prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan dapat tertanam dalam praktik hukum administrasi. Sejalan dengan hal ini, Coglianese dan Lehr telah membahas masalah 'kotak hitam' dari pembelajaran mesin. Ini mengacu pada sifat hasil pembelajaran mesin yang tidak dapat dijelaskan secara intuitif dan 'tidak dapat mendukung penjelasan kausal dari jenis yang mendasari alasan yang secara tradisional ditawarkan untuk membenarkan tindakan pemerintah'. Ini dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

Terkait dengan tantangan ini adalah kebutuhan para pengambil keputusan administratif untuk memberikan alasan atas keputusan mereka. Seperti yang dicatat oleh Coglianese dan Lehr, beberapa ketidakpastian mungkin selalu ada mengenai apakah pengadilan pada akhirnya akan menemukan penjelasan suatu lembaga memuaskan dalam situasi di mana pengambil keputusan perlu mengungkapkan spesifikasi algoritmik. Menurut

Zalnieriute dan rekan-rekan., memastikan keterlibatan manusia (baik dalam hal membenarkan keputusan secara independen dan memfasilitasi proses banding) adalah salah satu cara di mana akuntabilitas dapat dipertahankan, seperti yang terjadi dalam sistem kesejahteraan siswa otomatis Swedia. Dalam hal ini, Zalnieriute dan rekan-rekan. menyimpulkan bahwa:

Penyelarasan pengambilan keputusan pemerintah yang terotomatisasi dengan nilai-nilai supremasi hukum bergantung pada kesesuaian pilihan desain. Faktor yang paling signifikan adalah apakah sistem otomatis tersebut menggunakan aturan eksplisit yang ditulis oleh manusia (umumnya untuk menyelaraskan dengan persyaratan hukum untuk keputusan yang relevan) atau aturan yang diturunkan secara empiris dari data historis untuk membuat inferensi yang relevan dengan keputusan atau untuk memprediksi (dan dengan demikian meniru) keputusan. Aturan yang terakhir menimbulkan masalah yang lebih besar terkait transparansi dan akuntabilitas, terutama karena teknik yang lebih baru seringkali lebih kompleks dan oleh karena itu kurang rentan terhadap penjelasan manusia. Lebih lanjut, sistem semacam itu cenderung tidak konsisten dengan hukum dan lebih mungkin melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Tantangan lebih lanjut yang muncul berkaitan dengan legalitas keputusan AI. Seiring maraknya algoritma pembelajaran mesin di ranah hukum administrasi, 'pejabat publik, pengacara, dan akademisi akan dihadapkan pada pilihan untuk mendorong atau membatasi teknologi ini'. Bahkan, dalam konteks Australia, Dewan Peninjauan Administratif Australia telah mencatat pentingnya memastikan legalitas tindakan yang diklaim oleh badan publik. Menulis secara ekstra-kurikuler, Melissa Perry, Hakim Pengadilan Federal Australia, telah memperingatkan bahwa:

Tidak dapat diasumsikan bahwa kewenangan hukum yang dilimpahkan kepada pegawai negeri senior yang secara implisit meluas hingga pejabat yang berwenang, juga akan meluas ke sistem otomatis; atau bahwa kewenangan untuk mendelegasikan kepada pembuat keputusan manusia akan memungkinkan 'delegasi' ke sistem otomatis.

Mungkin terdapat ketidakjelasan seputar siapa yang membuat keputusan dalam konteks pengambilan keputusan otomatis, serta siapa yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya. Pilihan yang memungkinkan mencakup pembuat keputusan manusia, pembuat kebijakan, pemrogram komputer, atau sistem otomatis itu sendiri. Secara khusus, muncul pertanyaan dalam konteks Amerika, apakah pemberian wewenang kepada suatu badan untuk menggunakan algoritma pembelajaran mesin dalam membuat keputusan administratif akan melanggar prinsip nondelegasi.

Hakim Melissa Perry dari Australia telah mengidentifikasi tantangan lebih lanjut dengan pengambilan keputusan otomatis dalam konteks keputusan administratif: fakta bahwa banyak keputusan administratif memerlukan penerapan diskresi atau pembuatan penilaian evaluatif, setelah mempertimbangkan dan menyeimbangkan berbagai faktor. Hal ini berbeda dengan keputusan otomatis yang didasarkan pada logika dan aturan, menerapkan kriteria yang kaku,

dan membuat keputusan sesuai dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, poin yang diartikulasikan oleh Hakim Perry ini juga menimbulkan pertanyaan terkait pengodean dan kuantifikasi penilaian semacam itu yang biasanya dibuat secara evaluatif atau kualitatif.

Menurut Zalnieriute dan Bell, otomatisasi juga berpotensi merusak independensi peradilan, bahkan ketika otomatisasi dimaksudkan untuk membantu atau mendukung hakim. Independensi peradilan didefinisikan mencakup: (i) independensi hakim individu atau independensi putusan; (ii) independensi peradilan sebagai lembaga dari campur tangan atau perampasan oleh cabang pemerintahan lain; dan (iii) independensi yang diberikan oleh pengelolaan mandiri administratif dan fiskal. Zalnieriute dan Bell berpendapat bahwa independensi peradilan dapat dirusak jika perangkat otomatis yang diandalkan untuk membantu hakim menggunakan perangkat lunak berpemilik yang dikembangkan oleh perusahaan swasta yang dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual, sehingga mustahil untuk memahami bagaimana keluarannya dihasilkan.

Akhirnya, telah dicatat bahwa tidak semua keputusan administratif bersifat sedemikian rupa sehingga dapat dibuat dengan tepat atau adil oleh sistem otomatis. Coglianese dan Lehr telah mencatat bahwa warga cenderung memandang lembaga pemerintah lebih sah ketika mereka beroperasi dengan pemahaman dan empati. Mereka berpendapat bahwa gagasan pemerintah 'mereduksi individu menjadi titik data yang kemudian dimasukkan ke dalam algoritma akan tampak sangat impersonal meskipun pada akhirnya lebih akurat dan efisien'. Di sini, masalah bias algoritmik sangat relevan karena seringkali pengambilan keputusan administratif dapat berdampak pada anggota masyarakat yang paling rentan. Banyak keputusan administratif di negara-negara modern berkaitan dengan tunjangan jaminan sosial, masalah kewarganegaraan, dan hak-hak lainnya. Dengan mengalirkan masalah-masalah tersebut ke dalam sistem otomatis, dapat dikatakan ada bias terhadap anggota masyarakat yang lebih rentan.

Mempertimbangkan berbagai tantangan yang muncul, Zalnieriute dkk. pada akhirnya menyarankan bahwa kita mungkin perlu memodifikasi pemahaman kita tentang negara hukum untuk memastikan kesesuaiannya dengan otomatisasi pengambilan keputusan pemerintah:

Negara hukum bukanlah konsep yang statis. Ia berkembang sebagai respons terhadap perubahan nilai-nilai masyarakat dan operasional pemerintahan. Seiring teknologi membentuk kembali masyarakat, dan pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, pemahaman kita tentang negara hukum dapat diperkirakan akan bergeser. Nilai-nilai seperti transparansi dan akuntabilitas, prediktabilitas dan konsistensi, serta kesetaraan di depan hukum mungkin tetap menjadi inti konsepsi negara hukum, tetapi interpretasi dan penerapannya dapat berubah. Manfaat yang ditawarkan oleh teknologi tersebut, seperti kapasitasnya untuk mengurangi pengeluaran pemerintah, mungkin begitu signifikan sehingga menuntut akomodasi yang lebih besar dalam kerangka hukum.

3.5 KESIMPULAN

Kekhawatiran tentang bias algoritmik dan ketidakadilan algoritmik tidak mengherankan muncul di dua bidang di mana algoritma telah digunakan lebih luas di sektor peradilan di bidang hukum pidana dan dalam pengambilan keputusan administratif otomatis. Pengalaman di setiap bidang dapat digambarkan sebagai 'campuran' dengan sejumlah contoh hasil negatif dan beberapa manfaat positif. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa hakim mungkin berhati-hati tentang potensi masalah yang dapat muncul ketika pendekatan algoritmik diperluas di setiap bidang dan diterapkan ke lebih banyak bidang pengambilan keputusan manusia. Selain itu, perluasan pengambilan keputusan algoritmik ke ranah peradilan, baik melalui Hakim AI yang mendukung maupun Hakim AI akan menimbulkan kekhawatiran tambahan. Namun, sistem yang dikatakan menghasilkan bias algoritmik dapat disebabkan oleh data bias yang diambil dari sistem manusia, atau penerapan sistem yang kurang berfokus pada desain atau persyaratan etika, atau tanpa kapasitas manusia yang terlibat. Tidak dapat dihindari bahwa sistem AI yang lebih canggih akan berkembang di tahun-tahun mendatang, dan hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya dampak sistem tersebut terhadap kasus-kasus individual, tetapi juga sejauh mana sistem tersebut dapat diperluas, jika sesuai, ke ranah pengambilan keputusan yudisial.

Terdapat banyak hambatan dalam penerimaan pengambilan keputusan algoritmik yang akan menghambat atau mencegah integrasi pengaturan semacam itu dalam ranah yudisial. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu faktor utama yang menghambat integrasi tersebut adalah bias terhadap pengambilan keputusan algoritmik atau apa yang disebut sebagai 'keengganan algoritmik'. Istilah 'keengganan algoritmik' mengacu pada bias positif terhadap pengambilan keputusan berbasis manusia, bahkan ketika suatu algoritma terbukti lebih kompeten daripada manusianya. Serupa dengan itu, Burton, Stein, dan Jensen menggambarkan fenomena ini sebagai 'penolakan versus penerimaan wawasan yang dihasilkan secara algoritmik'. Dalam hal ini, mungkin juga terdapat ekspektasi bahwa meskipun manusia dapat membuat kesalahan, algoritma harus selalu menghasilkan hasil yang sempurna. Namun, banyak orang mungkin menganggap ekspektasi ini tidak realistis.

Faktor-faktor lain yang relevan dengan integrasi pendekatan algoritmik berkaitan dengan kesiapan pengadilan dalam hal kumpulan data dan ketersediaan teknologi. Di beberapa negara, kemungkinan besar beberapa pengadilan dan hakim akan siap mendukung beberapa tingkat pengambilan keputusan algoritmik. Selain kesiapan pengadilan atau peradilan masing-masing, pendekatan yang saat ini digunakan dalam pengambilan keputusan administratif, serta pengalaman di yurisdiksi yang telah menerapkan beberapa tingkat panduan peradilan algoritmik, juga kemungkinan akan relevan.

Saat ini, juga dicatat bahwa sebagian besar pendekatan AI otomatis mengandalkan materi tertulis, bukan lisan. Meskipun sistem suara ke teks terus meningkat, fakta bahwa sistem AI saat ini mendukung penentuan 'di atas kertas' alih-alih sidang lisan menimbulkan sejumlah masalah yang dapat dikaitkan dengan kesenjangan digital serta potensi munculnya bias algoritmik jika seseorang tidak dapat menghasilkan materi yang 'dapat dibaca mesin'. Hilangnya tradisi lisan, yang lebih relevan di beberapa yurisdiksi dibandingkan yurisdiksi lainnya, menimbulkan isu-isu seputar keadilan algoritmik, karena hasil yang dicapai mungkin

tidak 'adil' karena isu-isu tersebut mungkin tidak dieksplorasi atau direfleksikan secara memadai dalam hasil yang 'di atas kertas'.

Di banyak yurisdiksi, terdapat faktor-faktor internal yang dapat menyebabkan ketidakadilan algoritmik. Beberapa isu ini mencakup dampak terhadap orang-orang yang mungkin berbicara dan menulis dalam bahasa yang berbeda, serta mereka yang mungkin rentan karena faktor lain. Isu-isu lain berkaitan dengan anggaran dan struktur pengadilan, serta isu-isu kritis mengenai independensi peradilan yang terkait dengan pengaturan politik yang ada dalam yurisdiksi. Pada akhirnya, tanpa kerangka kerja keadilan yang jelas yang menggabungkan materi terkait nilai (seperti yang terkait dengan persyaratan martabat dan kesejahteraan manusia), perkembangan tersebut kemungkinan akan menghasilkan pengaturan yang tidak mendukung tujuan keadilan.

BAB 4

PENGADILAN DAN TEKNOLOGI

4.1 PENDAHULUAN

Pengadilan dan hakim dapat menggunakan teknologi untuk mendukung peran peradilan, untuk berinteraksi dengan publik dan pengguna, serta untuk mendukung fungsi triase, penyelesaian sengketa, swadaya, dan manajemen perkara. Selain itu, pengadilan dapat memanfaatkan peluang yang disediakan oleh teknologi untuk mereformasi cara pengadilan berfungsi. Namun, hingga saat ini, sebagian besar pengadilan telah menggunakan teknologi untuk mereplikasi sistem dan proses yang ada, alih-alih berfokus pada reformasi struktur dan proses pengadilan yang lebih ekstensif. Akibatnya, banyak pengadilan masih sangat mirip dengan pengadilan di abad yang lalu. Sebagaimana dicatat oleh seorang mantan Hakim Pengadilan Tinggi Australia yang terkemuka pada pergantian abad yang lalu:

Seorang pengacara dari zaman Dickens, yang berjalan keluar dari Bleak House ke pengadilan Australia modern pada hari biasa, akan melihat relatif sedikit perubahan. Wig dan jubah yang sama. Kursi Hakim dan waktu sidang yang sama tingginya. Prosedur dasar yang sangat mirip dalam memanggil bukti dan menyajikan argumen. Putusan yang lebih panjang: tetapi tetap memiliki struktur fakta, hukum, dan kesimpulan yang sama. Bandingkan, jika Anda mau, keheranan seorang dokter dari Rumah Sakit Guy di London, dari pertengahan abad lalu, yang menjelajahi dunia elektronik yang dipenuhi bleeper dan monitor, pemindaian CAT, tes genomik, dan diagnosis otomatis di rumah sakit Australia modern. Kita telah membuat kemajuan dalam hukum dan pengadilan, termasuk dalam dua puluh lima tahun terakhir. Namun, kemajuan tersebut tidak sebesar kemajuan yang dicapai profesi lain. Akankah tetap seperti ini?

Meskipun pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak perubahan dalam hal cara pengadilan beroperasi, komentar Kirby masih relevan dengan cara banyak pengadilan beroperasi di seluruh dunia. Artinya, proses yang ada sangat mirip dengan proses yang telah beroperasi selama beberapa dekade (atau bahkan berabad-abad). Terkadang, telah dicatat bahwa baik hakim maupun pengadilan enggan berinovasi dan mungkin secara inheren konservatif. Namun, terdapat perbedaan yang cukup besar antara hakim dan pengadilan dalam hal pendekatan yudisial terhadap teknologi. Selain itu, jika terdapat keengganan untuk berinovasi, hal ini mungkin mencerminkan sikap profesi hukum untuk berubah. Sebagaimana dicatat Donoghue:

Meskipun merupakan sine qua non bahwa pengadilan harus mencerminkan kemajuan dalam masyarakat, secara historis di Inggris Raya dan di tempat lain, pengadilan dan pada tingkat yang lebih rendah, profesi hukum, telah menjadi salah satu domain profesional yang paling konservatif dalam hal adopsi teknologi dan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan praktik.

Namun, keengganan untuk berinovasi juga dapat dikaitkan dengan infrastruktur yang tidak memadai, dengan teknologi pengadilan yang ketinggalan zaman sering digunakan untuk tujuan manajemen kasus yang terbatas. Seperti disebutkan, pandemi COVID-19 telah menyoroti variasi dalam kapasitas pengadilan untuk berinovasi dan menggunakan teknologi. Dalam banyak kasus, pengadilan telah dengan cepat mengadopsi teknologi pendukung yang memungkinkan konferensi video dan, terkadang, pertukaran dokumentasi menggunakan platform berbasis web seperti Teams, Skype, Zoom, Google Hangouts, dan WebEx. Beberapa pengadilan sudah memiliki sistem pengarsipan online dan oleh karena itu lebih siap untuk pengaturan kerja jarak jauh. Namun, banyak sistem manajemen kasus pengadilan tidak dapat berintegrasi atau beroperasi dengan teknologi 'tambahan' sebagian karena keterbatasan teknologi yang sudah ada.

Selain itu, banyak sistem manajemen kasus pengadilan dirancang sedemikian rupa sehingga pada dasarnya mereplikasi proses yang telah ada selama beberapa dekade. Sistem semacam itu dapat menjadi penting dalam mengurangi ketergantungan pada staf administrasi di pengadilan karena sistem tersebut mengotomatiskan beberapa fungsi pencatatan dan mendukung penyediaan informasi dan perintah pengadilan. Namun, sebagian besar sistem manajemen kasus dirancang untuk membantu pengadilan mengelola kasus dan biasanya tidak responsif terhadap masukan pengguna dari luar pengadilan, juga tidak berfokus untuk mendukung keterlibatan dengan pihak-pihak di luar pengadilan. Selain itu, sistem manajemen kasus yang dibangun menggunakan sistem teknologi lama mungkin tidak sesuai dengan tujuannya dalam konteks lingkungan pengadilan digital modern.

Berbagai negara telah menyadari masalah ini dan merespons dengan berbagai cara. Terkadang, untuk menghindari masalah replikasi apa yang mungkin sudah ada, pengadilan atau tribunal baru dibentuk. Misalnya, di British Columbia, Kanada, sebuah Tribunal baru yang telah mengadopsi pendekatan berbeda adalah *Civil Resolution Tribunal* (CRT). Didirikan pada tahun 2012, CRT sekarang dianggap sebagai tribunal yang progresif dan lebih matang secara teknologi. CRT menangani gugatan kecil dan sengketa kondominium, serta klaim kecelakaan dan cedera kendaraan bermotor. CRT menyediakan informasi hukum, perangkat, dan sumber daya yang dirancang khusus untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka, sengketa tersebut dirujuk kepada fasilitator dan, jika kesepakatan tidak tercapai, sengketa tersebut akan diproses melalui adjudikasi oleh anggota tribunal. Per Agustus 2020, CRT melaporkan total 16.609 sengketa yang telah selesai, dengan hanya 3.020 sengketa yang diproses hingga adjudikasi.

Berbeda dengan banyak pengadilan lainnya, CRT berfokus pada pengalaman pengguna. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna yang bersengketa menavigasi sistem dan mengisi formulir yang mudah digunakan, sekaligus memungkinkan triase yang canggih sehingga sengketa dapat diselesaikan pada tingkat serendah mungkin. Tingkat kepuasan yang tinggi telah tercatat, dengan 74 persen pengguna CRT melaporkan bahwa mereka cenderung merekomendasikannya kepada orang lain. Sistem manajemen kasus terintegrasi dengan sistem yang berfokus ke luar dan menjalankan berbagai fungsi. Dalam hal ini, perlu dicatat

bahwa sebagian besar pengadilan belum mempertimbangkan bagaimana chatbot dan aplikasi dapat mengubah cara pengguna mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan pengadilan.

Di Tiongkok, sebuah proyek 'pengadilan pintar' menghasilkan terciptanya 'pengadilan mini' daring baru yang akan dibahas secara rinci di bawah ini. Di Inggris, sebuah proyek ekstensif dimulai pada tahun 2016 yang diarahkan pada modernisasi pengadilan dengan menciptakan dan menguji berbagai jalur dan proses.

Di Amerika Serikat, pendekatannya agak berbeda lagi. Intinya, berbagai reformasi telah disarankan untuk mengembangkan pengadilan 'generasi mendatang'. Sebuah laporan terbaru oleh *Institute for the Advancement of the American Legal System* (IAALS), menyarankan bahwa 18 area komponen perlu dikembangkan untuk mendukung pengadilan generasi mendatang di Amerika Serikat dalam hal standar teknologi. IAALS menyarankan bahwa pendekatan ini didasarkan pada model teknologi 'berbasis komponen' dan:

Alih-alih sistem manajemen perkara pengadilan 'kesatuan' tradisional satu set kode perangkat lunak tunggal yang masif model komponen terdiri dari serangkaian modul berkode mandiri yang berkomunikasi satu sama lain menggunakan antarmuka standar. Model komponen ini memungkinkan komunitas vendor untuk mengembangkan dan memasarkan komponen 'terbaik di kelasnya', tanpa harus mengembangkan aplikasi manajemen perkara yang lengkap untuk memasuki pasar TI pengadilan.

Berbagai komponen tersebut didasarkan pada apa yang digambarkan IAALS sebagai kapabilitas esensial untuk pengadilan generasi mendatang dan 'berfokus secara eksternal' (dibandingkan dengan banyak sistem manajemen perkara pengadilan yang sebelumnya berfokus secara internal). Kemampuannya meliputi:

1. Memungkinkan pelanggan memperoleh informasi dan layanan pengadilan menggunakan ponsel pintar mereka;
2. Memungkinkan pelanggan menampilkan foto, video, dan informasi lainnya dari ponsel pintar mereka di ruang sidang;
3. Memungkinkan pelanggan hadir di pengadilan melalui telepon atau konferensi video;
4. Memungkinkan para pihak menjadwalkan sidang sesuai keinginan mereka;
5. Memungkinkan para pihak membayar biaya perkara, denda, dan kewajiban keuangan lainnya secara daring;
6. Memungkinkan penunjuk jalan;
7. Memungkinkan pelanggan memperoleh informasi dan formulir dari jarak jauh;
8. Menyederhanakan proses pengisian formulir;
9. Memungkinkan penggugat yang mewakili diri sendiri untuk mengajukan dokumen secara elektronik;
10. Memungkinkan pembuatan perintah atau putusan pada akhir sidang atau persidangan;
11. Membuat portal triase daring untuk setiap yurisdiksi;
12. Memungkinkan penyelesaian sengketa daring;
13. Memungkinkan pengiriman pesan pengadilan otomatis kepada pelanggan;
14. Menggunakan pesan untuk memandu klien melalui kasus pengadilan mereka;

15. Menggunakan teknologi untuk menyederhanakan layanan proses;
16. Menghilangkan persyaratan notaris untuk pengajuan pengadilan;
17. Menyimpan daftar kebutuhan pribadi setiap klien; dan
18. Implementasi sistem manajemen kasus model komponen.

Di Eropa, Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan juga telah menyiapkan materi terkait 'keadilan siber' yang merinci bagaimana teknologi dapat digunakan dan dikembangkan oleh pengadilan dengan fokus khusus pada peningkatan pendekatan manajemen kasus. Pendekatan Eropa mencakup strategi desain sistem yang selaras dengan berbagai kebutuhan yurisdiksi di Eropa dan mencakup tiga opsi, yaitu sistem terdesentralisasi (dalam hal hubungan dengan cabang eksekutif pemerintah), sebagian terpusat, atau terpusat.

Dalam bab ini, cara pengadilan mengadopsi teknologi baru dieksplorasi, bersama dengan pertimbangan opsi yang memungkinkan untuk masa depan. Awalnya, pengembangan pengadilan daring dipertimbangkan sebelum mengeksplorasi bagaimana pengadilan telah merancang ulang sistem manajemen perkara. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sistem manajemen perkara yang beroperasi pada sistem lama mungkin tidak memberikan fleksibilitas dan fungsionalitas yang memadai untuk kebutuhan modern. Selain itu, perkembangan penyelesaian sengketa daring (ODR) yang dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan juga dieksplorasi, dengan fokus pada bagaimana perkembangan tersebut akan membentuk kembali pengadilan di masa depan.

4.2 PENGADILAN ONLINE

Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pada pengadilan online semakin meningkat. Meskipun saat ini hanya ada sedikit contoh pengadilan yang beroperasi sepenuhnya online, pandemi COVID-19 telah mendorong banyak pengadilan untuk menjajaki kemungkinan sebagian atau seluruh fungsinya dapat dialihkan secara online. Meskipun beberapa pengadilan telah menjadi 'pengadilan online' setidaknya selama masa berlaku persyaratan jaga jarak sosial COVID-19, pengadilan lain mengindikasikan bahwa ada kemungkinan pengaturan yang diperkenalkan sebagai akibat pandemi akan dipertahankan. Bahkan, beberapa hakim antusias dengan apa yang telah diterapkan sebagai akibat pandemi dalam hal kapasitas untuk memperkenalkan proses pengadilan jarak jauh. Sebagaimana dicatat oleh seorang Hakim AS:

Sebagian besar [pengadilan] mempelajari pelajaran yang diperoleh selama berbulan-bulan dalam hitungan hari. Mereka mempelajari keterampilan baru karena mereka terpaksa melakukannya. Setelah Anda harus melakukannya ... Anda mempertahankan bagian-bagian yang bermanfaat. Ini bukanlah gangguan yang kami inginkan, tetapi justru gangguan yang kami butuhkan.

Secara definisi, pengadilan daring pada dasarnya melibatkan penggantian proses pengadilan dan litigasi fisik dengan alternatif daring. Menurut Susskind, pengadilan daring menghasilkan 'renegosiasi sosial' mengenai apakah pengadilan harus didefinisikan secara lebih luas sebagai

layanan, alih-alih tempat. Penulis lain berpendapat bahwa pengadilan daring mengikis 'fungsi simbolis gedung pengadilan sebagai rumah keadilan'²³ dan menimbulkan kekhawatiran yang sering kali terkait dengan isu akses keadilan yang pada gilirannya dapat dikaitkan dengan kesenjangan digital.

Susskind membedakan dua aspek pengadilan daring: (i) penjurian daring; dan (ii) 'pengadilan yang diperluas'. Yang pertama melibatkan 'penetapan perkara oleh hakim tetapi para pihak tidak berkumpul di ruang sidang fisik'. Yang terakhir melibatkan penggunaan teknologi untuk 'menyediakan layanan dengan kewenangan yang jauh lebih luas daripada pengadilan tradisional'. Baru-baru ini, Susskind mencatat bahwa beberapa pengadilan mungkin sebagian daring, setidaknya sejauh menyangkut sidang pengadilan. Artinya, beberapa peserta sidang pengadilan mungkin daring dan yang lainnya mungkin hadir di pengadilan secara langsung. Susskind mencatat bahwa pengaturan semacam itu dapat menimbulkan kekhawatiran khusus terkait keadilan. Susskind telah mengusulkan pengadilan daring tiga tingkat:

- Tingkat 1 berada pada lapisan 'penghindaran sengketa' dalam kerangka kerja. Tingkat ini menyediakan penilaian daring yang membantu pengguna mengkategorikan dan mengklasifikasikan permasalahan mereka serta memahami hukum yang berlaku dan pilihan serta penyelesaian yang tersedia;
- Tingkat 2 berada pada tingkat 'penahanan sengketa' dan melibatkan 'petugas kasus' yang memainkan peran sentral dengan bernegosiasi atau memediasi di seluruh platform daring; dan
- Tingkat 3 memungkinkan penentuan keputusan hakim yang berwenang. Meskipun generasi pertama layanan pada tingkat ini melibatkan hakim manusia (tetapi tidak di ruang sidang fisik tradisional), Susskind membayangkan generasi kedua di mana penentuan dibuat oleh suatu bentuk AI.

Susskind mencatat bahwa meskipun sistem AI hukum gelombang pertama berada di Tingkat 1 dan dapat memberi saran kepada pengguna tentang pilihan serta hak dan kewajiban hukum spesifik mereka, potensi terbesar AI terletak pada generasi kedua pengadilan daring, ketika sistem itu sendiri dapat membuat penentuan yang otoritatif. Dalam hal pengaturan Tingkat 1 dan Tingkat 2, banyak pengaturan ODR yang mungkin ada di dalam atau di luar pengadilan relevan.

Di beberapa yurisdiksi, contoh pengadilan daring sudah ada, dan di yurisdiksi lain pengembangannya telah dipertimbangkan secara serius. Selain CRT di Kanada yang dibahas di atas, beberapa negara telah dengan antusias mempertimbangkan dan mendirikan pengadilan daring. Misalnya, Mahkamah Agung Rakyat (SPC) di Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk meluncurkan sistem 'pengadilan pintar' di seluruh negeri dengan menanamkan berbagai teknologi yang mengandalkan penggunaan data besar dan AI. Namun, akademisi telah mengidentifikasi beberapa risiko, termasuk keamanan data, privasi pihak yang bersengketa, dan kemampuan yang tidak merata dalam hal mengadopsi teknologi, khususnya di antara pengadilan di wilayah yang menikmati berbagai tingkat sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya.

Secara umum, tampaknya ada minat yang lebih kuat di Tiongkok untuk pengadilan daring dan teknologi pendukung yang lebih spesifik kini telah diadopsi yang dapat membantu manajemen kasus dan juga digitalisasi (yang, pada gilirannya, dapat mendukung AI dan pengembangan pengadilan daring). Menulis terkait kunjungannya ke pengadilan setempat di Provinsi Zhejiang Tiongkok pada tahun 2017, Suskind melaporkan 'terkesan' dengan apa yang dilihatnya, termasuk 'robot statis di area resepsionis yang menawarkan bantuan hukum daring bagi pengguna pengadilan; fasilitas di tempat untuk pengarsipan dokumen secara elektronik; ruang sidang virtual khusus; dan pengenalan suara yang tidak bergantung pada pembicara'.

Memang, banyak pengadilan di Tiongkok yang tidak sepenuhnya daring memiliki berbagai teknologi pendukung yang ditujukan kepada publik dan pengguna pengadilan lainnya. Teknologi pendukung tersebut dapat: menawarkan informasi hukum umum tentang subjek tertentu; memungkinkan pengguna untuk membuat dokumen hukum; menyederhanakan proses hukum konvensional; dan membantu individu dengan penelitian hukum. Pendekatan ini diambil sebagian karena, seperti disebutkan di atas, SPC telah memimpin inisiatif 'pengadilan pintar' di seluruh Tiongkok dengan memperkenalkan teknologi yang lebih baru ke sektor peradilan sejak 2016. Pengadilan lokal di berbagai tingkatan telah diminta untuk mengembangkan platform dan aplikasi daring mereka sendiri dengan fokus untuk memungkinkan hakim, masyarakat umum dan pengacara untuk terlibat satu sama lain. Untuk pengguna umum, beberapa aplikasi ditujukan untuk tujuan pendidikan dan memberikan informasi tentang undang-undang melalui aplikasi *China Court Mobile TV*, sementara yang lain, seperti *Kompilasi Hukum Tiongkok (Zhong Guo Fa Lv Hui Bian)*, 'menawarkan kepada pengguna lebih dari 1.000 hukum Tiongkok yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk Konstitusi Tiongkok, hukum kontrak, dan hukum perkawinan'.

Perkembangan pengadilan daring di Tiongkok mengasumsikan bahwa banyak orang dapat mengakses pengadilan seluler melalui ponsel pintar atau perangkat lainnya. Misalnya, sebuah aplikasi bernama *Ning Bo Mobile Mini Court (Ning Bo Yi Dong Wei Fa Yuan)* resmi diluncurkan oleh Pengadilan Menengah Rakyat Ning Bo di Provinsi Zhejiang pada Januari 2018. Aplikasi ini memungkinkan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan seluruh proses litigasi secara digital, termasuk pengajuan perkara, penyampaian dokumen hukum, mediasi, pertukaran bukti, sidang pengadilan, dan penegakan hukum lanjutan. Berjalan di platform sosial *WeChat*, pengadilan mikro ini memungkinkan pengguna menggunakan ponsel pintar mereka untuk menjalani seluruh prosedur litigasi. Pengadilan juga telah meluncurkan hakim virtual yang menggunakan teknologi AI untuk menyediakan layanan konsultasi hukum daring. Sebagaimana dicatat oleh penulis bersama Meredith dan Li:

Hingga Agustus 2018, sekitar 70.000 kasus telah diajukan menggunakan aplikasi ini dan dilaporkan bahwa alat ini telah menghemat biaya peradilan dan meningkatkan kepuasan para pihak yang berperkara. Berkat keberhasilan aplikasi ini di wilayah Ning Bo, SPC terus mengembangkan versi nasional "Mobile Mini Court" (berbeda dengan versi regional di Ning Bo) dan mempromosikan versi baru ini ke wilayah lain di Tiongkok sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Ketua Mahkamah Agung Zhanguo Li, Presiden Pengadilan Tinggi Rakyat Zhejiang, mengamati bahwa "Mobile Mini Court" di Provinsi Zhejiang telah

Hakim, Teknologi dan Artificial Intelligence (AI)
Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

menangani lebih dari 1,36 juta kasus yang melibatkan sekitar 470.000 penggugat dan sekitar 90.000 pengacara.

Di Britania Raya, Dewan Keadilan Sipil merekomendasikan penerapan 'Pengadilan Online Yang Mulia' untuk sengketa perdata senilai £25.000. Lord Justice Briggs juga menyarankan agar model serupa diperkenalkan. Pada tahun 2016, Layanan Pengadilan dan Tribunal Yang Mulia ('HMCTS') menetapkan program reformasi yang bertujuan untuk memperkenalkan teknologi baru, memodernisasi sistem peradilan, dan mengurangi biaya. Pengurangan biaya akan diwujudkan melalui kombinasi pengurangan staf, jumlah perkara yang ditangani di ruang sidang fisik, pengurangan luas gedung pengadilan, serta penghematan efisiensi melalui reformasi proses administrasi.

Program reformasi HMCTS bertujuan untuk mengurangi permintaan terhadap pengadilan dengan memperluas penggunaan teknologi video, memperkenalkan proses daring yang menyeluruh (*end-to-end*), dan mempromosikan penggunaan negosiasi, mediasi, dan penyelesaian daring serta proses asinkron baru. Dalam hal ini, program ini bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan mengembangkan sistem pengadilan yang 'adil, proporsional, dan dapat diakses oleh semua orang'. Khususnya, dalam beberapa tahun terakhir, CEO HMCTS telah berkomentar secara terbuka tentang bagaimana proses reformasi ini 'memastikan masa depan' sistem pengadilan:

Pergeseran ke informasi yang mudah diakses dan real-time tentang cara kerja berbagai hal ditambah dengan cara kami merancang sistem kami, yang menggabungkan asumsi bahwa kami ingin mengubah dan memperbaikinya secara berkala di masa mendatang membantu menjadikan perubahan kami siap menghadapi masa depan dengan merancang peningkatan lebih lanjut.

Peluang

Pengadilan daring dapat menawarkan sejumlah manfaat penting bagi pengguna dan sistem peradilan yang lebih luas. Menurut Susskind, 'pengadilan daring menawarkan cara paling menjanjikan untuk meningkatkan akses keadilan secara radikal di seluruh dunia'. Di sini, Susskind mengajukan argumen moral untuk pengadilan daring, dengan menyatakan bahwa 'semua manusia

- apa pun kemampuan, status, kekayaan, dan di mana pun mereka tinggal dan bekerja
- berhak dan harus diberikan rasa hormat dan martabat yang sama'. Selain akses keadilan yang lebih baik dan lebih terjangkau, Lord Sales dari Mahkamah Agung Inggris telah menyoroti potensi pengadilan daring untuk menawarkan peningkatan efisiensi dalam sistem peradilan dan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu. Memang, dalam konteks inilah HMCTS telah menjanjikan penyampaian proses yang direformasi untuk 'mempertahankan atau meningkatkan akses keadilan'.

Kemampuan pengadilan daring untuk meningkatkan supremasi hukum juga telah diidentifikasi. Sebagaimana dicatat oleh Susskind:

Sistem peradilan yang kuno, terpisah, tidak terjangkau, lambat, atau tidak mudah dipahami, dapat melemahkan kepercayaan terhadap proses peradilan. Akibatnya, supremasi hukum dapat terdegradasi menjadi aspirasi yang samar dan tidak terwujud.

Susskind menyimpulkan:

Ketika hanya segelintir orang yang menikmati akses ke layanan pengadilan yang luar biasa, kredibilitas seluruh lembaga terancam, dan pada gilirannya, supremasi hukum pun terancam.

Manfaat lebih lanjut dari pengadilan daring adalah kemampuannya untuk menyediakan mesin atau platform yang dapat digunakan oleh hakim AI untuk beroperasi. Sebagaimana dicatat oleh penulis, program AI yang terintegrasi ke dalam struktur pengadilan daring yang dapat memperkirakan kemungkinan hasil dalam suatu kasus juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelesaian dan oleh karena itu mengurangi waktu peradilan yang dibutuhkan.

Tantangan

Pengadilan daring juga menimbulkan berbagai tantangan bagi pengguna terkait konsepsi keadilan tradisional. Misalnya, Margaret Beazley, mantan Presiden Pengadilan Banding New South Wales di Australia, berpendapat bahwa 'komoditisasi sistem peradilan tidak konsisten dengan supremasi hukum'. Oleh karena itu, disarankan agar setiap langkah untuk memahami pengadilan sebagai layanan, alih-alih tempat, harus ditolak. Secara khusus, Beazley mencatat bahwa tanpa adanya kontak manusia langsung di pengadilan daring, terdapat persepsi bahwa 'nilai dari apa yang sedang dilakukan berkurang'.

Telah disarankan bahwa hal ini berpotensi berdampak negatif dalam hal penghormatan terhadap supremasi hukum di masyarakat. Beazley juga mencatat bahwa pengadilan daring akan mengorbankan pihak yang berperkara untuk merasa seolah-olah mereka telah menjalani 'hari mereka di pengadilan', yang menunjukkan bahwa unsur pembenaran publik yang menyertai sidang di ruang sidang mungkin tidak terasa di ruang daring. Anna Katzmann, Hakim Pengadilan Federal Australia, berpendapat serupa bahwa setiap langkah untuk menghilangkan 'ruang sidang yang sebenarnya' harus ditolak. Hal ini karena:

Semakin informal komunikasi yang terjadi, semakin biasa komunikasi tersebut, semakin kecil dampaknya, dan semakin besar pula pengurangan otoritas pengadilan serta rasa hormat terhadap putusannya.

Pengamatan serupa telah disampaikan oleh para hakim yang menulis dengan gaya bahasa yang agak rumit. Hakim Robert Buchanan dari Pengadilan Federal Australia telah mengidentifikasi tiga manfaat dari mewajibkan saksi untuk memberikan kesaksian di ruang sidang (fisik): (i) hal ini meningkatkan 'kemungkinan bahwa saksi akan tetap sadar akan sifat dan kesungguhan acara serta kewajibannya'; (ii) hal ini memberikan kepastian kepada pemeriksa silang bahwa saksi memahami keseriusan dan urgensi situasi; dan (iii) hal ini memungkinkan pengadilan untuk menilai sifat, kualitas, dan keandalan saksi dengan lebih

baik. Terkait dengan poin terakhir ini, Margaret Beazley juga mengamati bahwa pengadilan daring bermasalah jika menyangkut masalah kredibilitas saksi.

Bukan hanya pejabat pengadilan yang telah mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan yang ditimbulkan oleh pengadilan daring. Size berpendapat bahwa terdapat kepentingan publik dalam memaksa para peserta untuk berinteraksi satu sama lain secara tatap muka. Menurut Size, jawaban atas pertanyaan Susskind tentang apakah pengadilan paling baik dikonseptualisasikan sebagai tempat atau layanan adalah: 'pengadilan adalah layanan, tetapi layanan yang diberikannya seringkali bergantung pada statusnya sebagai tempat'. Perlu dicatat bahwa argumen yang diajukan terkait saksi berlaku sama bagi pengadilan:

Tampil di ruang sidang, di hadapan hakim dan orang-orang yang terlibat dalam suatu kasus, meningkatkan kemungkinan bahwa seorang advokat akan tetap sadar akan hakikat dan kesungguhan tugasnya di pengadilan. Inilah sebabnya mengapa interaksi personal antarmanusia yang terjadi selama persidangan sangat penting bagi supremasi hukum. Selama beberapa tahun mendatang, seiring semakin banyaknya interaksi antarmanusia yang terjadi secara daring, interaksi personal ini akan menjadi semakin signifikan. Fisikitas persidangan, jika dibandingkan dengan pengalaman daring impersonal yang akan semakin mendominasi kehidupan sehari-hari, akan meningkatkan otoritas pengadilan. Kecuali jika teknologi berkembang ke titik di mana interaksi fisik dan interpersonal dalam sebuah sidang dapat direplikasi bukan hanya "ditiru" atau disimulasikan pengadilan harus menahan diri untuk tidak kembali ke dunia maya.

Menanggapi argumen-argumen seperti di atas, Susskind berpendapat bahwa gagasan tentang administrasi peradilan sebagai 'urusan yang secara intrinsik manusiawi' adalah 'klaim emosional dan psikologis, yang sebagian besar dikondisikan oleh pengalaman masa lalu', alih-alih klaim yang didasarkan pada prinsip keadilan apa pun, atau argumen yang didukung secara empiris atau hukum.

Mengingat perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, tampaknya banyak masalah terkait pengadilan daring telah diabaikan oleh hakim dan pihak-pihak di dalam pengadilan (setidaknya untuk sementara) untuk memastikan bahwa pengadilan di seluruh dunia dapat terus beroperasi selama pandemi. Meskipun terdapat beberapa bukti bahwa teknologi jarak jauh dapat bermanfaat di sejumlah lingkungan pengadilan yang berbeda, masih belum jelas bagaimana dan sejauh mana penggunaan teknologi jarak jauh akan dipertahankan. Meskipun beberapa pengadilan memiliki masalah yang signifikan dalam mengadopsi teknologi jarak jauh (terutama sejauh menyangkut persidangan juri), pengadilan lainnya belum mempertimbangkan sejauh mana perubahan daring akan berlanjut, dengan beberapa komentator berpendapat bahwa pengaturan semacam itu hanya cocok untuk kasus-kasus yang 'paling sederhana'.

Jelas, terdapat isu-isu signifikan yang muncul selama pandemi COVID-19 yang berdampak pada pengguna pengadilan. Banyak dari isu ini dapat dikaitkan dengan kesenjangan digital. Mengenai dampak dan fakta bahwa beberapa populasi mungkin lebih

rentan daripada yang lain, pada tahun 2019 Komite Kehakiman Parlemen Inggris menyatakan bahwa:

mengakui potensi besar yang dimiliki sistem elektronik untuk memberikan hasil yang lebih efisien dan efektif bagi mereka yang dapat mengaksesnya, dan bahwa modernisasi sangat dibutuhkan. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan keadilan bagi mereka yang mungkin tertinggal. Komite lintas partai justru mengatakan bahwa sudah saatnya gedung pengadilan yang tersisa diperbaiki dan dibanahi, terutama bagi pengguna pengadilan penyandang disabilitas, dan mencatat bahwa bahkan bagi mereka yang dapat menggunakannya, peralatan video dan WiFi tidak dapat diandalkan untuk mencapai tujuan keadilan.

4.3 ODR DAN PENGADILAN ONLINE

Penyelesaian Sengketa Online atau ODR sering dianggap sebagai fitur pengadilan online. ODR dapat berdiri sendiri dan terpisah dari pengadilan dan paling sering digunakan di luar pengadilan terkait sengketa konsumen dan, semakin meningkat, di bidang hukum keluarga di mana proses ADR didukung atau dilakukan melalui teknologi daring. Jika pengadilan daring dikembangkan, komponen ODR dapat berada di dalam dan di luar kerangka pengadilan daring dan rujukan ke proses penyelesaian sengketa alternatif (ADR) eksternal dapat dilakukan oleh teknologi tersebut dengan sedikit masukan manusia. Secara internasional, pada tahun 2020 terdapat perkembangan signifikan di bidang ODR yang terjadi di luar pengadilan. Beberapa perkembangan diterapkan pada sistem penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan dan menangani sejumlah besar sengketa. Perkembangan lainnya terkait dengan pertumbuhan 'aplikasi keadilan' yang dapat mendorong dan mendukung ODR.

Melalui definisi, ODR melibatkan penggunaan teknologi digital oleh para pihak dalam perselisihan dan/atau pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan. Seperti yang diuraikan oleh Legg, ini adalah istilah luas yang mencakup ADR yang dilakukan secara daring, dan sistem pengadilan daring. Lebih khusus lagi, penulis dengan Liyanage telah mencatat bahwa ODR dapat mencakup proses fasilitatif seperti mediasi daring, proses penasehat seperti penilaian kasus daring, dan proses determinatif seperti arbitrase atau adjudikasi daring. Penulis juga mengamati bahwa, dalam hal tingkat dampak teknologi terhadap penyelesaian perselisihan, mungkin tepat untuk lebih jauh menggambarkan ODR menggunakan tiga tingkat teknologi yang tertanam dalam sistem ini, termasuk teknologi pendukung, pengganti, dan disruptif. Banyak pengembangan ODR hingga saat ini telah terjadi pada dua tingkat pertama.

Beberapa ODR dapat lebih mengganggu dan ini khususnya terjadi di mana AI yang lebih canggih digunakan. Misalnya, ODR juga dapat mencakup proses yang dijalankan melalui program komputer atau AI lain yang tidak melibatkan praktisi 'manusia'. Proses otomatis semacam itu menggunakan logika atau algoritma berkode untuk membuat keputusan, bagian dari keputusan, atau rekomendasi. Sebagaimana diuraikan oleh Parasuraman dan Riley, proses otomatisasi 'dikarakterisasi oleh suatu kontinum level daripada sebagai konsep semua-atau-tidak'. Ini berarti keputusan dapat sepenuhnya atau sebagian diotomatisasi, dengan beberapa

memerlukan keterlibatan manusia pada tahap pengambilan keputusan, dan yang lainnya beroperasi secara otonom sebagai pengganti pembuat keputusan manusia. Otomatisasi juga dapat diintegrasikan pada berbagai tahap proses pengambilan keputusan dan melibatkan berbagai tingkat pengawasan dan verifikasi manusia.

Ketika ODR digunakan oleh pengadilan, sejumlah komentator telah membahas potensi manfaat dan beberapa pengadilan dan tribunal telah mengadopsi sistem ODR untuk mendukung manajemen dan penyelesaian sengketa berbasis pengadilan. Seringkali perkembangan tersebut dikaitkan dengan sistem otomatis yang menggunakan pendekatan AI dasar. Namun, beberapa perkembangan AI tidak dipertimbangkan dalam konteks reformasi ODR berbasis pengadilan. Misalnya, Hakim Perry dari Pengadilan Federal Australia telah mengidentifikasi 'manfaat besar' dari mekanisme otomatis sebagai kemampuannya untuk 'memproses data dalam jumlah besar dengan lebih cepat, lebih andal, dan lebih murah daripada rekan manusianya', alih-alih kapasitas untuk mendukung atau memperluas opsi ODR.

Literatur menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara cara pengadilan merangkul teknologi hukum dan ODR. Misalnya, beberapa pengadilan dianggap terbuka terhadap teknologi tetapi mungkin tidak menggabungkan opsi ODR. Misalnya, Pengadilan Federal Australia, termasuk Pengadilan Keluarga, telah menyiapkan Portal Pengadilan Persemakmuran ('CCP') yang memungkinkan pengacara untuk mengatur dan mengajukan dokumen secara elektronik, selain melihat berkas dan keputusan pengadilan. Namun, perkembangan ini belum tentu mendukung ODR, meskipun dapat dibayangkan bahwa mereka dapat melakukannya. Penulis mencatat bahwa, sementara Pengadilan Federal Australia adalah beberapa pengadilan pertama yang menawarkan jenis layanan e-filing ini, masalah dapat muncul karena pendekatan yang berbeda yang diambil oleh praktisi hukum, dan masalah tersebut juga dapat menyebabkan keengganan untuk menerima ODR di pengadilan.

Ada sejumlah contoh sistem berbasis pengadilan yang telah mengintegrasikan komponen ODR. Khususnya, Pengadilan Klaim Kecil Utah mengadopsi sistem ODR pada bulan September 2018 yang mampu menangani seluruh perselisihan secara daring. Menurut Hakim Agung Utah Deno Himonas, penerapan sistem ini didasarkan pada komitmen Mahkamah Agung terhadap akses keadilan. Namun, contoh reformasi ODR yang paling mencolok di pengadilan terdapat di Tiongkok.

Ada banyak contoh proses konsultasi dan penentuan ODR yang melampaui penyediaan informasi, melainkan mengambil peran proaktif dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Misalnya, di sektor energi, hasil survei menunjukkan dukungan yang 'mengejutkan' oleh perusahaan energi internasional terhadap ODR di mana teknologi konsultasi dan penawaran telah digunakan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sistem ODR PayPal dan eBay menangani sekitar 60 juta perkara per tahun.

ODR juga telah dianut dalam skala yang jauh lebih besar oleh Uni Eropa ('UE'). Peraturan Uni Eropa 524/2013 mendorong terciptanya alat ODR untuk membantu konsumen dan pengecer dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang berada di luar sistem pengadilan. Pemeriksaan yang lebih teliti terhadap alat ODR pada tahun 2017 mengungkapkan

bahwa 40 persen konsumen yang mengajukan klaim dihubungi langsung oleh pengecer untuk menyelesaikan sengketa tanpa memajukan pengaduan lebih lanjut di platform. Dengan demikian, meskipun alat ODR tidak digunakan sebagai mekanisme untuk memajukan sengketa hingga mencapai resolusi, alat tersebut tetap dapat memiliki 'efek pencegahan' dan mendorong penyelesaian yang lebih awal.

Sejak tahun 1999, komentator dan praktisi hukum menganggap bahwa teknologi hukum dapat digunakan untuk memfasilitasi sistem hukum yang mudah diakses, murah, dan efisien. Meskipun demikian, Bell mengamati bahwa ODR belum 'berkembang pesat' seperti yang diharapkan mengingat isu-isu biaya dan penundaan yang meluas, terutama dalam konteks litigasi hukum keluarga. Penulis bersama dengan Liyanage juga mencatat bahwa inisiatif ODR dalam sistem penyelesaian sengketa keluarga masih 'tidak merata' dan seringkali dilakukan sebagai percobaan.

Sifat pengembangan ODR yang tidak merata ini mungkin sebagian disebabkan oleh pertanyaan yang belum terjawab tentang bagaimana dan sejauh mana pengadilan harus menerapkan dan terlibat dalam proses ODR. Artinya, terdapat isu tentang apakah ODR harus menjadi bagian dari pengadilan (berada sebagai bagian dari sistem multi pintu), atau apakah harus ada secara terpisah (sebagai bagian dari sistem multi-opsi yang terkadang disebut sebagai sistem 'e justice') sehingga mendukung orang untuk menyelesaikan sengketa sebelum mempertimbangkan litigasi serta setelah litigasi dimulai. Sampai batas tertentu, isu-isu ini muncul dalam konteks persyaratan pra-tindakan (yang mungkin, misalnya, mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi atau menggunakan beberapa bentuk ADR sebelum memulai proses) dan dapat dikaitkan dengan kekurangan teknologi yang dirasakan di pengadilan serta pendekatan budaya yang berbeda terhadap litigasi dan penyelesaian sengketa.

Salah satu sistem ODR yang ada di luar pengadilan dan dikagumi oleh para penggunanya Sistem ODR yang ada di luar pengadilan dan sangat dihargai oleh pengguna adalah sistem *Rechtwijzer* alat ODR sebelumnya untuk pasangan yang berpisah di Belanda. Menurut The Hague Institute for Innovation of Law, salah satu alasan penghentian *Rechtwijzer* adalah kurangnya kesiapan dalam profesi hukum. Selain itu, mencapai 'kemitraan yang saling menguatkan dengan lembaga peradilan tradisional untuk meningkatkan platform seperti *Rechtwijzer*' digambarkan sebagai 'sulit'. Dijksterhuis telah menyarankan bahwa para praktisi hukum khawatir tentang 'ancaman persaingan, takut kehilangan pekerjaan, kehilangan cara kerja yang familiar dan otonomi mereka, digantikan oleh komputer setidaknya dalam sebagian pekerjaan mereka'.

Sekilas keengganan ini mengejutkan, dengan penelitian yang menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengacara, termasuk meningkatkan efisiensi kerja. Namun, analisis yang lebih dekat menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan dalam hal kemampuan profesi hukum untuk merangkul perubahan teknologi. Penulis, bersama dengan Li dan Burke, misalnya, telah menyoroti 'kesenjangan digital' atau 'ketidakmerataan' dalam profesi hukum terkait dengan inovasi teknologi. Sementara firma hukum papan atas dan besar dengan sumber daya anggaran yang signifikan

mampu berinvestasi dalam menggabungkan dan mengembangkan teknologi terbaru, inovasi teknologi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pengacara. teknologi, perusahaan yang lebih kecil mungkin mengalami kesulitan yang lebih besar dalam melakukannya.

Pemanfaatan ODR yang lebih luas dalam konteks hukum keluarga dapat memberikan sejumlah manfaat penting. Seperti yang diuraikan oleh Bell, ini termasuk penghematan waktu dan biaya, kontrol dan kepemilikan hasil, dan pelestarian hubungan. Di Belanda, evaluasi platform ODR berorientasi sengketa keluarga *Rechtwijzer* menemukan bahwa 82 persen pengguna yang disurvei merasa 'dihormati' atau 'sangat dihormati' oleh pengacara dan/atau mediator di platform tersebut, yang berupaya untuk 'memaksimalkan intervensi pengacara sedemikian rupa untuk membantu pengguna tetapi tidak menggantikan penilaian mereka'. Sehubungan dengan penghematan biaya, Tyler dan McPherson telah mencatat bahwa proses seputar pemisahan dan perceraian, terutama yang berkaitan dengan pihak-pihak yang secara geografis berjauhan, dapat melibatkan korespondensi dan litigasi yang mahal, dan biaya yang lebih besar dari biasanya dalam hal waktu, perjalanan, dan akomodasi. Mengingat bahwa di negara-negara seperti Australia, penyelesaian keuangan dalam perceraian berasal dari satu kumpulan aset, proses apa pun yang mengurangi biaya cenderung bermanfaat.

Menurut Bell, argumen yang menentang pilihan ODR canggih yang tersedia saat ini pada dasarnya sama dengan argumen yang diajukan tentang maraknya informasi swadaya daring. Meskipun demikian, terlepas dari banyaknya informasi yang tersedia, non-pengacara yang mencari informasi hukum keluarga di lingkungan daring dilaporkan merasa sulit untuk memahami kompleksitasnya dan mengevaluasi kredibilitas berbagai sumber. Sebagaimana dicatat oleh Bell, 'manfaat potensial dari penggunaan alat otomatis adalah untuk mengarahkan non-pengacara ke informasi yang relevan dengan lebih tepat'.

Sebagaimana dicatat Zeleznikow, sistem ODR yang benar-benar bermanfaat harus menyediakan enam fasilitas berikut: manajemen kasus; alat bantu konsultasi untuk uji realitas; alat komunikasi; alat pendukung keputusan; dan perangkat lunak perancangan. Namun, seperti yang telah disoroti oleh penulis dan Zeleznikow, analisis layanan ODR yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa banyak yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini:

Dengan warga dari banyak (jika tidak semua) komunitas yang terpaksa melakukan isolasi mandiri karena pembatasan COVID-19, para pihak yang berperkara tidak lagi bertemu langsung. Sistem peradilan perlu beroperasi dalam keadaan ini terutama dalam kasus sengketa keluarga dan permohonan jaminan. Namun, penulis mencatat bahwa sistem yang saat ini digunakan, seperti Immediation, MODRON, dan Our Family Wizard, hanya menawarkan dua dari enam fasilitas penting model ODR Zeleznikow, yaitu manajemen kasus dan komunikasi.

Terdapat beberapa kritik terhadap sistem ODR. Secara khusus, Condlin mempertanyakan apakah 'pemrosesan sengketa yang murah dan efisien merupakan bentuk penyerahan diri terhadap kondisi masyarakat modern, alih-alih sistem yang unggul dalam penegakan keadilan'.

Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa sistem ODR dapat membatasi kemampuan para pihak untuk mengemukakan substansi gugatan mereka:

Memisahkan sengketa dari substansinya dapat merusak keadilan hasil masing-masing perkara dan, jika meluas, mengancam legitimasi sistem penyelesaian sengketa itu sendiri.

4.4 REFORMASI SISTEM MANAJEMEN KASUS

Sebagaimana dibahas di atas, berbagai sistem manajemen kasus berada 'di belakang' aktivitas peradilan pengadilan. Artinya, teknologi manajemen kasus dalam bentuknya yang paling sederhana memungkinkan penyimpanan catatan terkait semua kegiatan pengadilan dan pengajuan perkara. Selain itu, penjadwalan seringkali dilakukan secara otomatis ketika batas waktu (sesuai aturan yang telah ditentukan sebelumnya) diberlakukan. Daftar dan acara pengadilan serta beberapa hasil dapat dicatat melalui sistem manajemen perkara, dan sistem yang lebih canggih juga menggabungkan pengarsipan elektronik, pencatatan, dan pelaporan yang ekstensif. Sistem manajemen perkara juga dapat menyoroti penundaan dan mendukung penyelesaian perkara perdata dan pidana dalam jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya (sehingga, misalnya, korespondensi otomatis dapat dikirim jika dokumen tidak diterima oleh pengadilan). Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan bab ini, IAALS telah menyarankan bahwa sistem manajemen perkara dapat melakukan lebih dari ini dan bahwa pendekatan 'modul' dapat mendukung pembentukan dan pengembangan pengadilan daring.

Seiring dengan peningkatan teknologi dan semakin murahnya biaya, reformasi sistem manajemen perkara telah menjadi fokus bagi banyak pengadilan. Namun, keputusan tentang adopsi sistem yang lebih baru seringkali mahal dan sulit karena sejumlah besar penyedia perangkat lunak sekarang menciptakan sistem manajemen kasus yang berbeda. Selain itu, sementara sebagian besar sistem berorientasi pada pengaturan aliran kasus, dan banyak yang mungkin juga relevan dalam hal penugasan kasus peradilan, hanya sedikit yang dikembangkan atau diadopsi dengan fokus pada pihak yang bersengketa ('berfokus secara eksternal'). Artinya, tujuan utama mereka diarahkan pada pengelolaan beban pengadilan, bukan untuk meningkatkan cara mereka yang berada di luar pengadilan dapat berinteraksi dengan pengadilan atau hakim. Ini mungkin berarti bahwa reformasi yang terjadi sebagai hasil dari teknologi yang lebih baru (misalnya, mengembangkan chatbot yang mendukung pihak yang bersengketa atau memungkinkan pengajuan atau kegiatan lain untuk dilakukan) tidak dapat diintegrasikan dan dihubungkan dengan sistem manajemen kasus yang ada. Intinya, ada masalah yang sedang berlangsung yang signifikan dalam hal interoperabilitas.

Dalam menilai aplikasi peradilan, penulis sebelumnya telah mengembangkan kerangka kerja untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi bagaimana aplikasi dapat dinilai dan dievaluasi. Perlu dicatat, tampaknya hanya terdapat sedikit panduan dalam hal evaluasi sistem manajemen kasus. Namun, penulis menyarankan agar kerangka kerja yang ada dapat digunakan ketika membuat keputusan tentang perancangan ulang sistem manajemen kasus agar hal ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan sistem manajemen kasus yang lebih

berfokus pada teknologi eksternal. Sebagai contoh, kerangka kerja aplikasi peradilan disajikan pada Tabel 4.1 dan telah diadaptasi pada halaman berikutnya untuk tujuan penilaian sistem manajemen kasus.

Penggunaan kerangka kerja semacam itu saat mengembangkan atau merevisi pendekatan manajemen kasus sejalan dengan panduan terbaru dari IAALS dan Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan (CEPEJ) dari Dewan Eropa. Pendekatan etis juga dapat mendukung analisis risiko dan pengambilan keputusan terkait inisiatif manajemen kasus. Pendekatan ini dapat memungkinkan pengembangan pendekatan pengadilan daring yang lebih bertahap dan responsif terhadap kondisi lokal.

Patut dicatat, beberapa isu yang muncul terkait pengembangan, modifikasi, dan perluasan sistem manajemen perkara sebagian terjadi karena manajemen sistem peradilan 'merupakan aktivitas yang kompleks dan multifaset'. Kompleksitas ini bersumber dari sifat pekerjaan peradilan, serta lingkungan kelembagaan pengadilan, dan persyaratan bagi pejabat peradilan untuk tetap independen di sebagian besar yurisdiksi.

Tabel 4.1 Mengevaluasi pendekatan manajemen kasus yang berfokus secara eksternal

Komponen Evaluasi		
Kriteria Evaluasi untuk Sistem yang Berfokus Eksternal	Kemudahan penggunaan	Sejauh mana pengguna terlibat dalam perancangan sistem dan sejauh mana sistem tersebut mendukung akses terhadap keadilan? Kemudahan penggunaan mencakup kriteria yang berkaitan dengan: (i) keterlibatan (termasuk kustomisasi, interaktivitas, dan kesesuaian dengan target audiens); (ii) fungsionalitas (termasuk kinerja, kemudahan penggunaan, dan navigasi); dan (iii) estetika.
	Efektivitas	Di sektor peradilan, efektivitas dapat bervariasi sesuai dengan sifat sistem yang dievaluasi. Misalnya, sistem yang berfokus pada penyediaan teknologi pendukung melalui jalur informasi dapat dievaluasi secara sangat berbeda dari sistem yang memiliki tujuan yang lebih spesifik berfokus pada triase sengketa, pengumpulan statistik, atau penyediaan nasihat ahli. Namun, secara umum, efektivitas mencakup sejumlah elemen yang mungkin relevan dan dapat mencakup sejauh mana sistem tersebut menyelesaikan atau membatasi sengketa; dianggap adil; dan mencapai hasil yang secara umum konsisten dengan kepentingan publik dan partai. Efektivitas di bidang peradilan juga mencakup gagasan bahwa sistem tersebut mempromosikan keadilan. Artinya, bahwa sistem tersebut mendukung perlakuan bermartabat

		terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan dan memastikan bahwa tinjauan manusia tersedia dan didukung sehingga kebutuhan keadilan substantif dapat terpenuhi (lihat pembahasan di Bab 6 yang berkaitan dengan makna 'keadilan').
	Pertimbangan privasi dan keamanan	Privasi dapat berkaitan dengan cara penyimpanan data serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan keamanan, termasuk, misalnya, izin dan pembagian data pihak ketiga. Sekali lagi, sejauh mana faktor-faktor tersebut relevan dapat bervariasi tergantung pada fokus sistem, kepentingan pengembang, dan faktor yurisdiksi domestik yang dapat memengaruhi pengaturan sistem. Namun, secara umum, pertimbangan tersebut mencakup memastikan bahwa informasi dijaga keamanan dan kerahasiaannya, adanya perlindungan data pribadi, dan pengaturan autentikasi yang mendukung penggunaan sistem.
	Interoperabilitas	Pertimbangan ini tidak hanya terkait dengan upaya memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik dan pada berbagai perangkat dengan beragam dukungan perangkat lunak, tetapi juga mencakup gagasan bahwa sistem berfungsi secara holistik dan dapat dihubungkan secara efektif dengan sistem lain. Hal ini mencakup, misalnya, dukungan untuk konferensi daring atau sistem dengan pendapat jika diperlukan, atau dukungan untuk penyampaian materi jika suatu hasil telah tercapai.

Selain itu, jika pendekatan tersebut sebagian ditentukan oleh persepsi tentang sikap peradilan terhadap manajemen perkara, proses yang kemudian diterapkan mungkin mencerminkan pemahaman yang terbatas tentang potensi sistem manajemen perkara untuk mendukung mereka yang berada di luar pengadilan. Dalam beberapa hal, hal ini mungkin juga terkait dengan pertimbangan tentang bagaimana hakim terlibat dalam perancangan ulang manajemen perkara dan sejauh mana hakim responsif terhadap perubahan budaya dan masyarakat.

Pendekatan manajemen perkara juga bergantung pada budaya peradilan. Dalam hal ini, perbedaan dapat ditarik antara manajemen peradilan pasif dan aktif. Yang terakhir dipandang oleh beberapa komentator sebagai ancaman terhadap model adversarial tradisional, yang didasarkan pada independensi dan imparsialitas peradilan. Resnik berpendapat bahwa 'batasan yang sebelumnya membatasi kewenangan peradilan secara mencolok tidak ada' ketika hakim secara aktif mengelola kasus. Penulis bersama Burstynner juga

mencatat bahwa sistem manajemen kasus yang lebih modern dapat dianggap sebagai 'intrusi terhadap hak seorang penggugat untuk melanjutkan kasus mereka sendiri sesuai yang mereka anggap sesuai'. Terlepas dari kekhawatiran ini, dan karena masalah yang berkaitan dengan penundaan dan biaya yang tidak wajar, sistem manajemen kasus telah diadopsi secara luas di seluruh dunia. Namun, sikap peradilan tentang peran hakim yang tepat dalam hal mengelola kasus juga dapat berdampak pada persepsi tentang peran hakim dalam merancang dan meningkatkan sistem manajemen kasus dalam hal perubahan teknologi. Artinya, beberapa hakim mungkin menganggap bahwa peran mereka lebih tepat dibatasi pada peran adjudikatif yang lebih pasif.

4.5 ALOKASI KERJA DAN MANAJEMEN KASUS KEHAKIMAN

Yang penting, sistem manajemen kasus juga dapat memainkan peran penting dalam alokasi pekerjaan kepada pejabat pengadilan. Misalnya, Fabri dan Langbroek mengamati bahwa alokasi beban kerja berdampak pada 'aspek-aspek penting dalam menegakkan keadilan: independensi dan imparialitas pengadilan, fleksibilitas dan efisiensi pengadilan'. Zalnieriute dan Bell juga mencatat bahwa teknologi yang menugaskan kasus secara acak dan memastikan bahwa hakim tidak 'dipilih-pilih' dapat memiliki kapasitas untuk mendukung independensi pengadilan. Khususnya, terkadang, pengembangan sistem manajemen kasus dapat dilakukan dengan masukan pengadilan yang terbatas atau, sebaliknya, dengan sedikit keterlibatan atau pertimbangan dari pemangku kepentingan eksternal.

Berbagai faktor berdampak pada beban kerja pejabat pengadilan yang dapat dikaitkan dengan pengoperasian sistem manajemen kasus. Pertama, jumlah dan kompleksitas permasalahan hukum yang mendasari suatu sengketa dapat memengaruhi waktu yang dibutuhkan pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Misalnya, sejumlah kecil kasus yang lebih panjang dan kompleks dapat menghabiskan sebagian besar beban kerja pengadilan. Oleh karena itu, penghitungan kasar kasus tidak memadai untuk menentukan distribusi kasus yang ideal di antara para hakim. Sebaliknya, pendekatan beban kasus tertimbang yang melibatkan pengkategorian kasus ke dalam berbagai jenis dan membuat penilaian terhadap biaya sumber daya tipikal atau waktu aktual yang dihabiskan oleh pengadilan untuk menyelesaikan setiap kasus dapat lebih informatif. Pendekatan 'studi waktu' yang melibatkan pengumpulan data dari petugas pengadilan yang mendokumentasikan waktu aktual yang dibutuhkan untuk setiap tindakan atau peristiwa yang mereka tangani telah diadopsi di Amerika Serikat.

Ketidaksepakatan di antara para hakim di pengadilan yang menangani perkara sebagai panel juga dapat memengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Berbagai faktor bawaan serta ketegasan dan kapasitas penalaran yang merupakan hasil dari pembelajaran dan pengalaman lain juga dapat memengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis materi dan pada akhirnya mencapai keputusan.

Alokasi perkara yang matang dan didukung oleh sistem manajemen perkara yang 'cerdas' dapat memberikan sejumlah manfaat penting. Pertama, sistem ini dapat berkontribusi

pada kualitas putusan dan hasil peradilan dengan membagi beban perkara yang menantang dan mengakomodasi kepentingan peradilan serta pengetahuan spesialis.

Kedua, ketika pekerjaan peradilan dialokasikan secara tidak efisien, penundaan dan biaya meningkat, dan sistem tersebut dituduh mengecewakan para pihak yang berperkara. Kleiman, Lee, dan Ostrom mencatat bahwa akuntabilitas keuangan dan sumber daya pengadilan sebagai lembaga yang didanai publik menciptakan insentif yang kuat untuk pengembangan metode alokasi pekerjaan peradilan yang kuat dan sistematis.

Ketiga, beban kerja yang besar dapat memperburuk tekanan pada pengambilan keputusan dan meningkatkan stres peradilan. Hakim juga perlu memandang beban kerja mereka adil, tidak hanya dari segi jumlah perkara, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk kompleksitas perkara, jenis, durasi, dan beban emosional. Wallace, Roach Anleu, dan Mack mencatat bahwa persepsi keadilan distribusi perkara dapat dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan di luar pengadilan.

Terakhir, telah diamati bahwa penugasan perkara secara acak dan otomatis kepada pejabat pengadilan dapat menjadi bagian dari supremasi hukum, dan berfungsi sebagai sarana untuk 'memperkuat kepercayaan publik terhadap imparialitas putusan pengadilan dengan memastikan bahwa hasil perkara tidak dapat dimanipulasi dengan menugaskan perkara kepada hakim tertentu'.

Saat ini hanya terdapat sedikit standar pelaporan atau kinerja yang memberikan informasi tentang beban kerja pengadilan, dengan statistik yang ada terutama berfokus pada jumlah putusan yang dijatuhkan dalam jangka waktu tertentu atau menangani jangka waktu umum terkait dengan 'penyelesaian' perkara. Selain itu, terdapat pula kelangkaan penelitian yang mengkaji proses alokasi perkara ke dalam putusan pengadilan. Sistem manajemen kasus berbasis teknologi yang lebih canggih yang menggabungkan berbagai pembobotan dan juga merespons preferensi peradilan individu dalam hal alokasi kasus dapat membantu meningkatkan cara pengadilan dan hakim beroperasi. Misalnya, sementara seorang hakim mungkin merasa puas dan produktif ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan satu bidang hukum tertentu, hakim lain mungkin lebih menyukai lebih banyak variasi. Demikian pula, untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan hakim, mungkin tepat untuk memodifikasi beban kerja agar hakim dapat menangani berbagai kasus. Saat ini, dalam banyak kasus, beban kerja dapat merupakan hasil dari alokasi acak atau manusia, yang mungkin tidak memungkinkan faktor-faktor tersebut dipertimbangkan.

Terutama, di Eropa telah terjadi beberapa perkembangan signifikan yang dapat mendukung penggunaan AI di masa mendatang untuk mendukung alokasi beban kerja peradilan. Pada tahun 2020, CEPEJ menerbitkan sebuah laporan yang mempertimbangkan sistem pembobotan yang digunakan oleh enam negara Eropa dan memasukkan alat perhitungan algoritmik jika tersedia. Laporan tersebut mencatat bahwa Sistem Pembobotan Kasus (CWS) merupakan sebuah area di mana pengumpulan data tambahan dapat memungkinkan pengembangan sistem yang lebih canggih.

Perkembangan tambahan dalam AI akan terus membantu dalam mengelola beban kerja peradilan dan dapat memprediksi dengan lebih pasti jumlah waktu yang dibutuhkan

hakim untuk menangani sengketa tertentu. Beberapa perkembangan yang menjanjikan telah terlihat. Misalnya, di Eropa dan Amerika Serikat, telah dilaporkan bahwa algoritma alokasi perkara dapat meningkatkan produktivitas dan juga memungkinkan spesialisasi mikro peradilan di pengadilan tata usaha negara. Di Amerika Serikat, telah dicatat bahwa:

Oleh karena itu, Dewan Banding mengembangkan algoritma pengelompokan untuk memungkinkan individu memproses perkara berdasarkan kesamaan substantif, yang memungkinkan para adjudicator untuk terbiasa dengan bagian yang sama dari pohon keputusan. Model kelas laten menggunakan informasi tingkat persidangan (misalnya, usia penggugat, gangguan fungsional, dan negara asal) untuk membuat kluster perkara yang sebanding. Karena kekhawatiran manajemen ketenagakerjaan, pengelompokan hanya mengatur ulang cara perkara diproses dalam berkas adjudicator, dan tidak mengubah komposisi perkara di antara para adjudicator. Dalam hal ini, pengelompokan memfasilitasi 'spesialisasi mikro', bukan spesialisasi makro di antara para adjudikator. Melalui uji coba awal, di mana kepala cabang dapat memilih untuk menggunakan hasil pengelompokan, Dewan Banding melaporkan peningkatan produktivitas sebesar 7% dan pengurangan kesalahan sebesar 12,5%.

Saat ini, di banyak pengadilan, ketidakmampuan untuk memprediksi lamanya waktu penyelesaian suatu perkara dapat mengakibatkan penundaan dan pencatatan masalah di seluruh pengadilan. Mengenai bagaimana pendekatan prediktif tersebut dapat dikembangkan, penulis mencatat bahwa beberapa studi sebelumnya telah mencoba untuk menentukan berbagai faktor relevan yang dapat digunakan dan bahwa sistem AI yang diinformasikan oleh para ahli dapat bermanfaat.

Sistem Dokumen dan Pekerjaan Peradilan

Rancangan sistem manajemen perkara yang disempurnakan secara teknologi untuk mendukung manajemen perkara yang lebih efektif biasanya didasarkan pada pendekatan yang ada yang digunakan untuk mengalokasikan perkara kepada hakim. Sistem ini, sebagaimana disebutkan di atas, dapat sangat bervariasi. Misalnya, sebagian besar pengadilan Negara Bagian dan Teritori di Australia menggunakan sistem kalender induk di mana perkara-perkara ditugaskan ke daftar umum setelah diajukan, sebelum dialokasikan ke daftar yang bergantung pada jenis perkara dan tahapan persidangan. Petugas pengadilan kemudian dialokasikan secara terpisah ke dalam daftar-daftar ini. Ketika sebuah perkara 'siap untuk diproses', perkara tersebut ditugaskan kepada hakim mana pun yang tersedia pada hari tersebut, baik sebagai bagian dari proses acak, maupun berdasarkan spesialisasi tertentu. Di antara jadwal sidang, perkara-perkara dikembalikan ke daftar umum. Pendekatan alokasi perkara ini 'dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu sidang hakim dan proses perkara'. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perkara yang dijadwalkan untuk disidangkan akan benar-benar disidangkan pada tanggal yang dijadwalkan. Pengadilan Keluarga adalah satu-satunya pengadilan di Australia yang telah mengadopsi metode canggih untuk menentukan beban perkara dalam sistem kalender induk. Meskipun Pengadilan Keluarga tidak menyebut

pendekatannya sebagai model beban kasus tertimbang, 'Model Perencanaan Sumber Daya'-nya mengikuti komponen-komponen utama pemodelan beban kasus tertimbang.

Namun, sistem kalender induk memiliki sejumlah kelemahan. Dinyatakan bahwa pendekatan alokasi kasus ini menghambat rasa tanggung jawab atau kepemilikan hakim atas masing-masing kasus, sehingga memberikan sedikit insentif bagi hakim untuk memproses perkara dengan cepat. Waktu yang dihabiskan untuk meninjau perkara juga kemungkinan meningkat karena perkara sela dalam kasus yang sama ditangani oleh hakim yang berbeda.

Pendekatan alternatif untuk alokasi perkara adalah sistem berkas perkara individual di mana setiap perkara baru secara otomatis dialokasikan kepada pejabat pengadilan berikutnya yang tersedia, yang kemudian mengelola perkara tersebut dari awal hingga penyelesaian. Perkara dialokasikan kepada pejabat pengadilan segera setelah proses awal diajukan. Pengadilan Federal Australia telah menggambarkan pendekatan ini dengan menekankan 'manajemen pengadilan yang aktif, termasuk pemantauan kepatuhan para pihak terhadap arahan dan menjaga kontak rutin dengan para pihak terkait perkembangan perkara'. Model alokasi perkara individual ini dapat dipandang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan sistem kalender induk. Secara khusus, sistem ini dapat dikatakan 'memungkinkan pengadilan untuk lebih memahami dan mengendalikan seluruh beban kerjanya dengan mengelola semua berkas sejak pertama kali didaftarkan'. Peningkatan pemahaman terhadap masing-masing perkara dapat menghasilkan penghematan waktu dan biaya, meningkatkan konsistensi dalam penanganan masing-masing perkara, dan mendukung identifikasi perkara yang mungkin sesuai untuk ADR.

Sistem berkas perkara individual juga memiliki kekurangan. Pendekatan ini mungkin kurang fleksibel dibandingkan pendekatan lain dalam alokasi perkara, mengingat setelah seorang hakim dialokasikan untuk suatu perkara tertentu, ia mungkin tidak tersedia untuk menangani perkara mendesak lainnya. Hal ini juga dapat menyebabkan 'perlakuan kasus yang bersifat idiosinkratik, bergantung pada gaya manajemen masing-masing hakim', yang berpotensi menciptakan inkonsistensi di seluruh pengadilan. Selain itu, sistem berkas perkara individual bergantung pada jumlah kasus yang cukup rendah yang dialokasikan kepada setiap hakim untuk dikelola. Beban perkara yang tinggi dan jumlah hakim yang relatif rendah di banyak pengadilan dapat membuat pendekatan semacam itu tidak efektif.

Kemungkinan besar, di beberapa pengadilan, pendekatan manajemen kasus yang lebih canggih yang mendukung pengaturan berkas perkara individual dan pendekatan kalender induk dapat dikembangkan dengan bantuan bentuk AI yang cukup mendasar yang beroperasi menggunakan pembobotan algoritmik. Pendekatan pembelajaran mesin yang lebih canggih juga dapat memastikan bahwa kasus dirujuk kepada hakim dengan cara yang memungkinkan kesejahteraan hakim terdukung.

4.6 KESIMPULAN

Tidak mengherankan jika penelitian mengungkapkan bahwa pengguna pengadilan mengharapkan pengadilan akan menggunakan berbagai teknologi untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa. Sebagaimana diutarakan oleh Greacen: 'dalam semua aspek

kehidupan sehari-hari, pelanggan terbiasa dan menuntut layanan yang tersedia bagi mereka melalui internet'. Kesulitan dalam mengakses pengadilan dan ketidaknyamanan serta keterlambatan dalam memproses perkara di pengadilan telah disorot dalam penelitian sebagai faktor kunci yang menentukan apakah para pihak yang bersengketa puas dengan sistem pengadilan dan apakah mereka menganggap sistem tersebut adil dan tepat. Hal ini tidak diragukan lagi menjadi salah satu alasan mengapa pengadilan daring dan peningkatan ODR telah menjadi area fokus di banyak yurisdiksi selama dekade terakhir. Namun, sejauh mana ODR terintegrasi dalam pengadilan daring bervariasi dan sebagian bergantung pada pandangan tentang peran pengadilan dalam sistem peradilan. Ke-18 'kemampuan' esensial IAALS untuk pengadilan generasi mendatang memberikan titik awal yang bermanfaat untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi yang ada (atau yang diadaptasi) dapat digunakan untuk meringankan proses pengadilan yang lamban dan memenuhi tuntutan pengguna. Khususnya, peningkatan tersebut dapat secara efektif mengarah pada pengembangan pengadilan daring melalui revisi manajemen kasus yang ekstensif. Namun, pendekatan yang diambil untuk pengembangan pengadilan daring, baik melalui reformasi manajemen kasus maupun proses reformasi yang lebih ekstensif, dapat didorong oleh pengadilan atau badan eksekutif pemerintah, dan dalam banyak kasus, pengembangan pengadilan daring didorong oleh inisiatif pemerintah. Misalnya, perubahan ekstensif di Tiongkok dan Inggris didorong oleh pergeseran kebijakan pemerintah.

Dalam hal pihak yang bersengketa yang mewakili diri sendiri, ada juga peluang yang dapat diperluas melalui pengoperasian pengadilan daring dan ODR (dan memang proposal IAALS akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak tersebut). Sementara pihak yang bersengketa yang mewakili diri sendiri sangat umum di beberapa pengadilan, mungkin ada persepsi bahwa mereka menimbulkan masalah bagi yang lain. Namun penulis mencatat bahwa ada informasi terbatas tentang pihak yang bersengketa ini dan interaksi mereka dengan sistem pengadilan di Australia dan luar negeri. Telah diamati bahwa representasi diri memiliki potensi untuk meningkatkan waktu dan biaya 'karena kebutuhan untuk lebih banyak proses pra-persidangan, identifikasi masalah yang buruk, lebih banyak waktu untuk menanggapi bukti yang tidak jelas dan tidak relevan dan lebih banyak waktu yang dihabiskan dalam persidangan'. Dalam hal ini, penggunaan aplikasi dan chatbot yang lebih besar dapat mendukung pihak yang bersengketa tersebut. Data yang dihasilkan dengan mengeksplorasi karakteristik kasus yang ada di pengadilan ('data pintar') juga dapat memberikan informasi yang berguna tentang siapa yang mengakses pengadilan. Informasi ini dapat digunakan untuk membantu mengelola beban kerja peradilan, termasuk dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang berkonflik tinggi dan mempertimbangkan cara yang lebih baik untuk mendukung pihak-pihak tersebut.

Selain itu, nasihat hukum yang terpisah, jalur, dan proses triase dapat mendukung baik pihak-pihak yang mewakili diri sendiri dalam berperkara, praktisi hukum, maupun hakim. Tentu saja, setiap proses ini dapat diintegrasikan ke dalam pengadilan daring, baik melalui perancangan ulang manajemen kasus yang cerdas dan berfokus ke luar maupun melalui pengembangan proses yang benar-benar baru. Dalam hal ini, Susskind telah mencoba membantah argumen lain yang sering dikemukakan oleh para penentang pengadilan daring:

bahwa pengadilan daring akan mengakibatkan eksklusi digital. Menurut Susskind, klaim apa pun bahwa beberapa orang tidak akan dapat mengakses teknologi yang dibutuhkan untuk pengadilan daring mengabaikan lebih banyak orang yang dikecualikan dari ruang sidang tradisional karena disabilitas fisik atau lainnya.

Secara umum, diskusi tentang pengadilan daring dan apakah mereka dapat dikembangkan melalui manajemen kasus atau reformasi yang lebih luas merupakan inti dari percakapan reformasi pengadilan yang terjadi secara global, dengan upaya yang diarahkan pada langkah-langkah reformasi 'inkremental' atau 'radikal'. Sejauh mana kedua pendekatan tersebut diadopsi sangat bergantung pada bagaimana hakim memandang peran mereka dan sejauh mana mereka menganggap mereka harus terlibat dalam percakapan reformasi yang lebih luas ini, dengan ketegangan yang ada antara hakim yang mengadopsi pendekatan formalis dan mereka yang memiliki gaya yang lebih responsif.

BAB 5

HAKIM VS. ROBOT ATAU HAKIM DAN COBOT?

5.1 PENDAHULUAN

Perkembangan pengadilan daring, digitalisasi seluruh catatan pengadilan, dan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat, atau membantu dalam pengambilan, keputusan di luar ruang sidang meningkatkan kemungkinan bahwa bentuk-bentuk AI juga akan digunakan untuk mendukung dan mungkin menggantikan beberapa pengambilan keputusan peradilan di masa mendatang. Meningkatnya penggunaan AI di luar pengadilan sebagian merupakan hasil dari evolusi bentuk-bentuk AI yang terkait dengan pengembangan pembelajaran mesin yang menggunakan algoritma yang meningkat secara otomatis melalui pengalaman. Pada dasarnya, algoritma dikembangkan yang kemudian dapat 'belajar' dan berkembang menggunakan data lama dan baru. Dalam bab ini, perkembangan ini dipertimbangkan dalam kaitannya dengan peran peradilan. Secara khusus, terdapat fokus pada 'AI Hakim yang suportif' dan sejauh mana hal ini dapat mengarah pada evolusi AI Hakim.

Digitalisasi catatan pengadilan menyediakan basis data yang kaya yang dapat digunakan dalam lingkungan pembelajaran mesin, dan karena alasan inilah perkembangan AI terkait pengadilan terkait erat dengan digitalisasi materi pengadilan. Diperkirakan bahwa perkembangan di bidang AI ini akan semakin luas di tahun-tahun mendatang, sebagian karena perkembangan di bidang pembelajaran mendalam yang memungkinkan fitur data tingkat tinggi dianalisis menggunakan jaringan saraf tiruan. Perkembangan tersebut berarti bahwa AI dapat meniru kecerdasan manusia secara lebih efektif dan bahkan dapat bekerja lebih efektif daripada manusia dalam mengambil keputusan karena data yang dapat dipertimbangkan dan 'dipelajari' sangat luas dan dapat mencakup putusan pengadilan sebelumnya serta materi berkas pengadilan lainnya.

Jenis dukungan yang dapat diberikan oleh bentuk-bentuk AI kepada hakim sangat bervariasi ('AI Hakim yang mendukung'). Misalnya, bentuk-bentuk AI yang menghasilkan keputusan templat yang kemudian dapat diadaptasi dan divariasikan oleh hakim dan digunakan sebagai dasar untuk mengungkapkan pendapat atau alasan penilaian sudah ada. Beberapa bentuk AI yang sangat mendasar sudah digunakan dengan cara ini. Selain itu, beberapa bentuk AI yang lebih canggih juga digunakan untuk 'mendorong' atau 'mengoreksi' pengambilan keputusan yudisial di negara-negara seperti Tiongkok. Di bidang pengambilan keputusan administratif, AI sudah digunakan untuk membuat beberapa keputusan. Di tingkat yang lebih rendah dari beberapa pengadilan, masalah pelanggaran lalu lintas serta perselisihan 'kecil' lainnya sudah dikelola kasusnya dan, dalam beberapa kasus, ditentukan melalui bentuk-bentuk AI. Di AS dan yurisdiksi lain, AI sudah mengubah pengambilan keputusan yudisial karena bentuk-bentuk AI diandalkan oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu, di sektor hukum, terdapat perangkat analitik prediktif yang dikembangkan dengan baik yang juga dapat digunakan oleh hakim untuk memungkinkan prediksi hasil litigasi. Sebagai akibat dari

perkembangan ini, muncul pertanyaan tentang sejauh mana bentuk-bentuk AI dapat menggantikan pengambilan keputusan peradilan tingkat rendah.

Penerapan teknologi baru oleh profesi hukum, termasuk meningkatnya penggunaan AI dalam bentuk pengodean prediktif, analitik prediktif, dan penggunaan pembelajaran mesin yang lebih luas, menggambarkan potensi kemajuan teknologi tambahan di pengadilan. Perkembangan lain di luar pengadilan juga menunjukkan bahwa AI dapat membentuk kembali dan mengubah cara pelaksanaan ODR dan bahkan persidangan juri, dengan yang terakhir berpotensi melibatkan adopsi teknologi blockchain yang tidak hanya membantu verifikasi dan pengambilan bukti, tetapi juga memungkinkan partisipasi jarak jauh (dan bahkan mungkin partisipasi juri yang lebih luas).

Namun, beberapa isu kritis muncul tentang bagaimana teknologi tersebut dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan pengadilan. Pengambilan keputusan pengadilan dapat digambarkan sebagai proses empat langkah. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi, analisis, pembuatan keputusan, dan kemudian komunikasi keputusan tersebut. Berbagai pendekatan AI dapat membantu hakim di setiap tahap proses, dan AI Hakim yang suportif lebih mungkin diadopsi dalam tahap 'pengumpulan informasi' dalam pengambilan keputusan pengadilan, dan itupun hanya dalam lingkup yang terbatas. Hal ini karena, saat ini terdapat isu-isu signifikan, kecuali jika pengumpulan informasi relatif sederhana dan hanya melibatkan materi digital (misalnya, dalam penentuan 'on the papers'). Namun, terdapat potensi perubahan signifikan di masa mendatang dalam tahap pengumpulan informasi seiring AI menggabungkan pembelajaran mesin yang lebih canggih, dipadukan dengan perkembangan dalam pemrosesan bahasa alami, sistem pakar, penglihatan, ucapan, perencanaan, dan bahkan robotika yang memungkinkan materi manusia interaktif tambahan untuk dipertimbangkan.

Perkembangan dalam pembelajaran mesin dapat berarti bahwa AI dapat mereplikasi atau bahkan bekerja lebih efektif daripada hakim dalam hal fungsi analitis setidaknya ketika tidak ada situasi baru atau tidak biasa yang disajikan. Perkembangan semacam itu lebih relevan ketika preseden pengadilan tidak dikembangkan. Selain itu, kemajuan dalam analitik prediktif dapat berarti bahwa proses pengambilan keputusan aktual yang dilakukan oleh hakim mungkin dilakukan oleh suatu bentuk AI.

Sehubungan dengan komunikasi dan penulisan alasan keputusan, kemajuan teknologi terkini mencakup pengembangan jurnalis AI yang membantu produksi berita serta figur media yang disintesis. Namun, terlepas dari perkembangan tersebut, komposisi aktual materi tertulis yang koheren dan canggih oleh bentuk-bentuk AI masih sulit dipahami. Memang, produksi alasan tertulis Hakim AI yang lebih canggih untuk putusan atau opini Hakim AI kemungkinan masih akan memakan waktu beberapa tahun lagi.

Dalam bab ini, perkembangan Hakim AI yang mendukung menjadi fokus utama dalam konteks tugas-tugas peradilan yang difokuskan secara khusus, seperti adjudikasi. Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, hakim melakukan lebih dari sekadar mengadili. Hingga batas tertentu, bab ini juga mempertimbangkan peningkatan penggunaan AI untuk menjalankan fungsi peradilan yang lebih kompleks. Misalnya, perkembangan terkini dalam

pemrosesan afektif dapat mengubah cara hakim dan bentuk-bentuk AI berhubungan dengan pihak yang bersengketa, pengacara, ahli, saksi, dan pihak lain di pengadilan. Selain itu, bab ini membahas bagaimana perubahan tersebut dapat mengarah pada Hakim AI yang mungkin menggantikan hakim.

5.2 HAKIM PENDUKUNG AI DAN HAKIM AI

Sejumlah komentator berpendapat bahwa Hakim AI yang suportif akan memainkan peran yang lebih penting di masa depan daripada Hakim AI yang sepenuhnya otomatis (bentuk AI yang dapat meniru dan sepenuhnya menggantikan hakim manusia). Pandangan ini sebagian terkait dengan keterbatasan kapasitas AI saat ini untuk melakukan aktivitas penghakiman manusia serta kebutuhan yang dirasakan untuk mempertahankan kehadiran hakim manusia guna meninjau, mempertanyakan, dan menentukan bagaimana manusia dan AI seharusnya beroperasi di dunia yang terus berubah. Pada satu sisi, retensi pengambilan keputusan manusia memastikan bahwa isu-isu etika dan isu-isu penting lainnya ditentukan oleh manusia, alih-alih oleh bentuk-bentuk AI. Dari perspektif ini, pengambilan keputusan peradilan manusia harus dilestarikan dan dilindungi karena hakim bertindak sebagai 'penjaga' masyarakat manusia yang adil dalam masyarakat yang semakin tertata dan diatur oleh bentuk-bentuk AI.

Dalam hal kapasitas pendekatan AI yang suportif, Surden berpendapat bahwa isu-isu yang terkait dengan penggantian total hakim manusia berarti fokusnya harus pada penggunaan teknologi untuk mendukung hakim manusia dan melengkapi pekerjaan manusia. Dalam konteks ini, sistem AI Hakim yang suportif dapat, misalnya, digunakan untuk menghasilkan rancangan putusan yang kemudian diperiksa oleh hakim manusia, sehingga 'memungkinkan pertimbangan diskresioner atau sosial dibuat yang mungkin berada di luar kapasitas program komputer'.

Demikian pula, dalam konteks hukum pidana, telah disarankan bahwa program AI dapat menghasilkan kalimat sebagai titik acuan, seperti putusan pedoman, yang kemudian dapat diselesaikan oleh hakim manusia. Juga telah disarankan bahwa AI Hakim yang suportif dapat digunakan untuk meninjau keputusan peradilan individu atau untuk menjalankan fungsi kontrol kualitas dengan mengidentifikasi bias yang tidak pantas dalam pengambilan keputusan. Misalnya, di Inggris, Law Society of England and Wales telah melaporkan bahwa dukungan keputusan algoritmik yang tepat dapat memastikan tingkat konsistensi minimal dan menangkal bias dari pembuat keputusan individu. Di AS, sudah ada contoh penggunaan AI untuk 'mendorong' hakim administratif agar kesalahan dapat dihindari.

Pendekatan ini telah diadopsi dan diperluas di Tiongkok. Informasi dan data yang diambil dari putusan di platform daring telah digunakan di beberapa sistem pengadilan yang menggabungkan teknologi AI yang dikembangkan oleh pengadilan setempat. Misalnya, Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing telah mengembangkan dan menerapkan sistem 'Hakim Bijaksana' (*Rui Fa Guan* dalam bahasa Mandarin). Sistem ini mengandalkan data putusan nasional yang diambil dari China Judgments Online, yang dapat diterapkan kepada hakim di wilayah Beijing yang terlibat dalam penyusunan putusan untuk memastikan bahwa 'kasus dengan fakta serupa menerima putusan serupa'. Demikian pula, di bidang pidana, Pengadilan

Tinggi Rakyat Shanghai telah mengembangkan 'Sistem Bantu Cerdas Penanganan Kasus Pidana' di mana data peradilan massal (termasuk yang dari China Judgments Online) dikumpulkan dan digunakan oleh hakim Shanghai untuk memastikan bahwa putusan dalam kasus 'serupa' sejalan dengan putusan yang dijatuhkan di wilayah lain di negara tersebut. Dalam mempromosikan sistem ini, mantan Presiden Pengadilan Tinggi Rakyat Shanghai, Hakim Yadong Cui, berkomentar bahwa:

Karena personel peradilan adalah individu yang berbeda dengan inisiatif subjektif, pasti akan ada beberapa perbedaan dalam menegakkan standar hukum yang seragam, yang akan mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan putusan yang berbeda dari kasus yang sama. Penerapan kecerdasan buatan dapat memberikan penalaran dan standar evaluasi peradilan yang relatif terpadu, memberikan hakim semua kasus, hukum, peraturan, dan interpretasi peradilan yang serupa dan sebagainya, sehingga hakim dapat secara ketat mengikuti aturan bukti dan prosedur, yang akan mengurangi kesewenang-wenangan peradilan dan secara efektif menjaga terhadap kasus-kasus yang tidak adil, salah dan keliru, mempromosikan keadilan peradilan.

Terdapat berbagai kekhawatiran terkait pendekatan ini yang dapat dipertimbangkan dalam konteks independensi peradilan. Tentu saja, pendekatan yang digunakan di Tiongkok dapat menimbulkan masalah tentang hubungan antara lembaga eksekutif dan yudikatif, terutama ketika eksekutif berperan dalam mengembangkan sistem AI. Beberapa komentator telah mengidentifikasi risiko Hakim AI yang suportif dapat mengorbankan independensi peradilan jika digunakan untuk mengarahkan atau 'mengoreksi' keputusan peradilan. Selain itu, terdapat isu-isu lain yang akan dibahas nanti dalam bab ini yang terkait dengan kualitas dan kuantitas data yang dapat digunakan untuk menentukan bagaimana dan atas dasar apa dorongan dan koreksi peradilan dilakukan.

Sehubungan dengan bagaimana AI dan teknologi secara umum dapat bekerja 'dengan' hakim, Levmore dan Fagan berpendapat bahwa 'kerja tim oleh manusia yang terampil dan mesin seringkali lebih unggul daripada apa yang dapat dilakukan sendiri oleh mesin dengan perlengkapan terbaik sekalipun'. Menurut Levmore dan Fagan, dua peran penting akan tetap ada bagi manusia di dunia Hakim AI. Pertama, dan mungkin agak idealis, manusia akan menentukan tujuan (misalnya, efisiensi dan distribusi kekayaan) dan memprogram mesin sesuai dengan itu. Kedua, manusia akan memiliki kemampuan untuk mengesampingkan mesin dalam hukum. Khususnya, Levmore dan Fagan berpendapat bahwa kerja sama tim antara manusia dan mesin ini tidak jauh berbeda dengan proses yang dilakukan hakim saat ini:

Tidak ada bedanya apakah hakim modern menggunakan wawasan yang ditawarkan oleh mesin modern, standar yang dibangun oleh pembuat undang-undang sebelumnya, atau bahkan preseden sebelumnya yang sekarang dapat diabaikan. Dalam semua kasus ini, rekan satu tim mungkin mengungkapkan atau tidak mengungkapkan 'alasan' untuk sarannya, dan hakim saat ini diberi wewenang untuk menggunakan pemikirannya untuk memutuskan seberapa besar ia akan bergantung pada rekan satu timnya.

5.3 MASALAH DENGAN AI HAKIM YANG SUPPORTIF

Beberapa penulis berpendapat bahwa sistem AI Hakim yang suportif akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada yang akan dipecahkannya. Wu, misalnya, berpendapat bahwa mungkin keliru jika menganggap sistem hibrida manusia-mesin menarik, mengingat versi terburuk dari hibrida semacam itu 'akan memadukan kebrutalan keadilan berbasis perangkat lunak yang tak terpikirkan dengan kehadiran manusia yang simbolis, yang dirancang untuk menenangkan manusia yang menjadi sasarannya'. Crootoof juga berpendapat bahwa manfaat sistem peradilan hibrida manusia-AI tidak boleh dilebih-lebihkan. Ia mencatat bahwa meskipun sistem semacam itu dapat memaksimalkan kekuatan kecerdasan manusia dan mesin, sistem tersebut juga dapat memperbesar kelemahan keduanya.

Lebih lanjut, Crootoof mencatat bahwa sistem hibrida semacam itu menimbulkan risiko 'kerja sama tim'. Pertama, terdapat risiko 'bias otomatisasi' jika manusia 'terlalu percaya' pada sistem dan mendukung kesimpulan algoritma meskipun terdapat bukti yang kontradiktif atau hasil yang jelas tidak adil. Lebih lanjut, terdapat risiko bahwa jika hakim manusia menghadapi lebih banyak pengawasan atau kritik jika mereka memutuskan untuk menentang rekomendasi algoritma, mereka secara sadar atau tidak sadar akan terdorong untuk menentangnya. Terkait dengan kekhawatiran ini adalah kemungkinan bahwa hakim yang sibuk mungkin cenderung menerima begitu saja materi AI Hakim yang mendukung dan pendekatan semacam itu dapat mengakibatkan 'bias penjangkaran'. Kedua, risiko sebaliknya 'kurang percaya' juga dapat terjadi jika pengambil keputusan manusia tidak mau menerima rekomendasi algoritma, yang dalam hal ini masyarakat akan berinvestasi berlebihan pada infrastruktur yang tidak berguna. Hasil akhirnya dapat menimbulkan lebih banyak ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan hakim manusia yang bertindak sendiri.

Selain itu, penulis mencatat bahwa dalam hal AI Hakim yang mendukung, mempromosikan dan mengembangkan 'kepercayaan' antara sistem AI dan manusia dikatakan penting dalam hal meningkatkan akurasi AI. Dalam hal ini, mungkin ada cara di mana 'kepercayaan' dapat dikembangkan antara hakim dan bentuk-bentuk AI. Asisten peradilan AI, bot obrolan, atau sistem andal yang melakukan lebih dari sekadar membuat keputusan templat dan dapat, misalnya, terlibat dalam 'percakapan' atau mengajukan pertanyaan, dapat membantu hakim dengan mendukung tahap analitis pengambilan keputusan. Selain itu, chatbot AI Hakim yang suportif juga dapat memberikan dukungan kepada mereka yang berada di luar pengadilan melalui penjadwalan dan pengambilan keputusan interlocutory yang lebih sederhana. Ini memiliki beberapa keuntungan yang jelas, termasuk bahwa chatbot dapat tersedia kapan saja dan melalui berbagai perangkat sehingga informasi dapat dikumpulkan dan dibagikan dengan lebih mudah. Namun, 'kepercayaan' seperti itu tidak mungkin ada jika seorang hakim tidak tertarik pada teknologi tersebut, tidak mau menggunakannya atau tidak terampil dalam penggunaan teknologi dasar lainnya.

Terkait pengambilan keputusan, perkembangan dalam AI Hakim suportif yang membantu dalam adjudikasi peradilan kemungkinan akan terus berlanjut pesat selama dekade berikutnya dan akan mencakup pembuatan draf putusan yang kemudian dapat diamandemen,

diubah, dan divariasikan oleh hakim manusia. Namun, sebagaimana dicatat oleh Levmore dan Fagan, temuan-temuan perkembangan ini memiliki risiko yang cukup besar. Meskipun pengaturan semacam itu mungkin tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya, risiko muncul dari situasi di mana ketergantungan pada otomatisasi menjadi norma dan di mana hanya ada sedikit fokus pada tindakan peradilan yang independen. Hal ini tampaknya jauh lebih mungkin terjadi di pengadilan yang sibuk dan kekurangan dana.

Dalam hal pengambilan keputusan yang lebih kompleks, risiko lain berkaitan dengan bukti apa yang dapat dipertimbangkan dalam sistem AI Hakim suportif. Dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu bentuk AI dapat menghasilkan keputusan templat berdasarkan isu hukum sehingga hakim dapat dengan mudah mencoret bagian-bagian yang tidak berlaku. Namun, AI Hakim suportif juga dapat mempertimbangkan bukti yang diberikan, baik tertulis maupun lisan (dikonversi ke teks) untuk menghasilkan draf putusan. Dalam mempertimbangkan bukti, kemungkinan besar AI, sebagai hasil pembelajaran mesin, telah membaca sekilas materi yang berkaitan dengan putusan dalam kasus serupa. Sifat dan luasnya data yang diandalkan serta penekanan yang diberikan pada beberapa materi dengan mengesampingkan materi lainnya, mungkin menjadi masalah, terutama jika pengawasan manusia dikurangi.

Ada juga cara lain di mana AI Hakim yang suportif dapat membantu hakim yang tidak terkait dengan pengembangan putusan atau keputusan akhir pengadilan. Misalnya, bentuk AI yang sudah ada memungkinkan informasi keuangan untuk dipetakan, disintesis, dan diinterpretasikan. Dari perspektif yudisial, ini mungkin berarti bahwa AI Hakim yang suportif dapat membantu hakim untuk lebih memahami apa yang mungkin tepat dalam hal pemberian kompensasi finansial atau memungkinkan hakim untuk lebih memahami kontribusi keuangan dalam sengketa perusahaan. Selain itu, sistem 'pakar' juga dapat membantu hakim untuk lebih memahami pengaturan potensial yang mungkin berdampak pada perintah perawatan yang memengaruhi anak-anak atau bahkan prognosis seseorang yang telah menderita cedera dan sedang mencari kompensasi. Intinya, pengembangan AI Hakim yang mendukung yang dapat digunakan oleh hakim dan pihak yang bersengketa dapat mengubah beberapa aspek aktivitas peradilan dan juga berdampak pada pengguna pengadilan.

5.4 EVOLUSI HAKIM ROBOT

Terlepas dari apakah Hakim AI yang suportif atau Hakim AI yang sesungguhnya dianggap ideal, penulis sebelumnya berpendapat bahwa pertanyaan yang lebih besar bukanlah apakah AI akan membentuk kembali fungsi peradilan, melainkan kapan. Dalam mempertimbangkan perkembangan di bidang pengambilan keputusan administratif, tampaknya beberapa bentuk Hakim AI pada awalnya akan digunakan sehubungan dengan pengambilan keputusan peradilan tingkat rendah.

Seperti halnya kendaraan otonom, sejauh mana manusia akan terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut akan bervariasi. Terkait kendaraan otonom, saat ini terdapat lima tingkat otomatisasi yang dilacak. Penulis mencatat bahwa tingkat otomatisasi serupa dapat diterapkan pada Hakim AI. Tingkat pertama tidak melibatkan bantuan signifikan dari AI;

tingkat kedua melibatkan operator yang mempertahankan kendali penuh tetapi memiliki sedikit bantuan; tingkat ketiga melibatkan otomatisasi parsial, namun operator tetap diharuskan untuk memantau lingkungan dan mengawasi bila diperlukan; tingkat keempat mencakup otomatisasi tingkat tinggi di mana operator pada dasarnya menjadi penumpang, meskipun ada keadaan di mana operator dapat melakukan intervensi; dan tingkat kelima adalah di mana tidak diperlukan interaksi oleh manusia.

Sehubungan dengan Hakim AI dan menggunakan pendekatan 'tingkat' yang sama, disarankan bahwa pengambilan keputusan peradilan tingkat yang lebih rendah kemungkinan besar akan diadopsi pada awalnya menggunakan tingkat satu, dua, dan tiga yang disebutkan di atas. Artinya, model Hakim AI yang lebih suportif yang memerlukan pengawasan dan pemantauan hakim manusia lebih mungkin di sebagian besar negara dalam jangka pendek.

Sejauh mana sistem otomatisasi tingkat empat dan lima dikembangkan akan bergantung pada faktor budaya, peradilan, dan politik 'di dalam negeri', serta kesiapan teknologi. Kesiapan tersebut mungkin membutuhkan waktu mengingat sistem lama yang beroperasi di banyak pengadilan. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa sistem pengadilan sudah dipersiapkan untuk pergeseran tersebut yang didukung oleh komentator berpengaruh. Misalnya, Susskind telah membahas tingkat ketiga pengadilan daring:

Tingkat 3 menyediakan penentuan keputusan yang berwenang oleh hakim. Meskipun generasi pertama layanan pada tingkat ini melibatkan hakim manusia (namun tidak di ruang sidang fisik tradisional), Susskind membayangkan generasi kedua di mana penentuan dilakukan oleh suatu bentuk AI.

Baik Hakim AI yang suportif maupun Hakim AI, terdapat faktor-faktor yang akan memengaruhi penerimaan yang tidak dapat diabaikan dan terkait dengan sejauh mana hakim dan pihak lain mungkin 'mempercayai' sistem AI yang sedang dikembangkan. Hal ini khususnya bermasalah karena AI dapat diperkirakan, setidaknya pada awalnya, membuat kesalahan dan mungkin memiliki tingkat akurasi yang rendah. Selain itu, dan sebagaimana dibahas lebih lanjut di bawah ini, terdapat pertanyaan yang lebih spesifik terkait bagaimana manusia dapat memercayai hakim AI. Hakim AI yang suportif dapat memungkinkan hakim manusia untuk mengoreksi hasil dan proses AI sehingga kesalahan berkurang dan kepercayaan meningkat.

Harvey telah menguraikan proses-proses yang mungkin digunakan oleh Hakim AI menggunakan contoh-contoh sistem AI prediktif saat ini, dan masing-masing dapat dianggap sebagai tahap terpisah dalam pengembangan Hakim AI yang suportif. Seorang Hakim AI yang suportif dapat, misalnya, mempertimbangkan basis data hukum dan data lainnya sambil menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk mencari materi yang relevan berdasarkan istilah pencarian. Selain itu, seorang Hakim AI yang suportif dapat mereduksi materi yang berpotensi relevan menjadi sampel yang dapat dikelola dan relevan, sebelum menerapkan materi tersebut ke kasus baru untuk mencapai suatu hasil. Harvey menjelaskan bahwa langkah terakhir ini memerlukan 'pengembangan algoritma yang diperlukan yang dapat melakukan analisis komparatif dan prediktif, bersama dengan bentuk analisis probabilitas untuk

menghasilkan hasil yang bermanfaat dan informatif'. Pada tahap inilah Hakim AI yang suportif dapat menjadi Hakim AI yang mandiri, berpotensi tanpa pengawasan manusia (seperti pada tingkat kelima mobil self-driving).

Perhatian utama dengan penggunaan AI pada tingkat ini (Hakim AI) dieksplorasi secara rinci. Namun, pada titik di mana hakim manusia menjadi kurang relevan, dan di mana AI mulai 'mengambil alih' ada beberapa komentar yang relevan. Misalnya, Volokh telah memberikan pertimbangan rinci tentang faktor-faktor yang harus memandu pemikiran tentang topik Hakim AI, mengidentifikasi empat prinsip utama. Ada masalah mengenai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut mengakui pekerjaan yang dilakukan hakim dalam hal pekerjaan non-adjudikatif, serta pekerjaan yang dilakukan ketika memimpin sidang untuk menguji dan mengumpulkan bukti. Selain itu, di negara-negara di mana hakim memainkan peran yang lebih aktif dalam pembentukan dan penafsiran aturan hukum, terdapat isu-isu penting yang dapat dikaitkan dengan kapasitas Hakim AI untuk bertindak secara 'manusiawi' saat mengadili dan untuk menjadi kreatif sejauh menyangkut situasi-situasi baru.

Sampai batas tertentu, pendekatan Volokh berpedoman pada pandangan bahwa pengambilan keputusan yudisial adalah suatu ilmu dan melibatkan komponen-komponen rasional, alih-alih intuisi atau mungkin belas kasih. Dalam hal ini, prinsip pertama Volokh tidak berkaitan dengan apakah metode yang digunakan oleh Hakim AI cerdas, melainkan apakah keluarannya cerdas. Penulis ingin menambahkan bahwa keputusan-keputusan tersebut juga harus memenuhi persyaratan etika dasar dan oleh karena itu keputusan-keputusan tersebut juga harus 'dapat diterima'.

Pendekatan terhadap pengambilan keputusan yudisial ini bertentangan dengan beberapa pemahaman yurisdiksional tentang bagaimana hakim membuat keputusan. Cara hakim membuat keputusan telah menjadi subjek perhatian akademis dan yudisial di masa lalu. Misalnya, di Australia, terdapat beberapa diskusi dalam kasus *R v Markarian* mengenai 'sintesis naluriyah' yang dilakukan oleh para hakim yang berarti bahwa para hakim tidak harus selalu memberikan alasan yang transparan atas keputusan mereka. Beberapa komentator berpendapat bahwa keputusan Pengadilan Tinggi dalam kasus *R v Markarian* berarti bahwa:

...dari perspektif neurobiologis, metode pengambilan keputusan hukuman yang dipilih pengadilan, yang dipertimbangkan dan diartikulasikan secara sadar, adalah metode yang paling mungkin menghasilkan putusan yang rasional dan beralasan, namun tetap manusiawi. Semua informasi awalnya disortir dan diprioritaskan pada tingkat bawah sadar, sebuah proses pemilahan yang bergantung pada pemberian signifikansi emosional pada informasi berdasarkan pengalaman hakim sebelumnya. Tanpa sistem pemeringkatan ini, otak akan dipenuhi dengan informasi yang sulit dibedakan. Namun, setelah prioritas ini dilakukan, hakim dapat mempertimbangkan kasus individual dalam konteks semua pertimbangan hukum, sosial, dan pribadi yang relevan. Hal-hal yang tidak relevan dapat disingkirkan dan perasaan serta reaksi emosional diteliti untuk kesesuaiannya.

Berlawanan dengan kekhawatiran bahwa AI tidak dapat melakukan pekerjaan intuitif seperti itu adalah potensi pengembangan sistem yang lebih canggih yang dapat membantu dalam hal tersebut. Sistem semacam itu dapat dikembangkan dengan mengakui nilai (dan biaya) yang dapat 'ditambahkan' oleh hakim manusia dalam mempertahankan kemanusiaan dalam pengambilan keputusan dan menjaga martabat manusia, sekaligus mengakui bahwa sains dan AI dapat keliru. Sampai batas tertentu, ini merupakan pertanyaan filosofis. Namun, secara keseluruhan, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga merupakan pertanyaan yang sangat kritis dan pragmatis yang melibatkan pertimbangan biaya dan manfaat dalam kerangka pengambilan keputusan berbasis nilai yang mendukung desain dan pengembangan pengadilan dan proses peradilan yang efektif di masa mendatang.

Kedua, Volokh menyarankan bahwa hasil yang dicapai oleh Hakim AI harus dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh para pengambil keputusan manusia. Komputer tidak perlu menyamai 'yang terbaik dari yang terbaik'; komputer hanya perlu menyamai kinerja rata-rata pengambil keputusan manusia. Di sini, Volokh berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa robot merupakan pengganti yang memadai bagi pengambil keputusan manusia, robot tersebut harus lulus kompetisi penulisan opini di mana robot tersebut harus berkinerja sebaik rata-rata pemain, sebagaimana ditentukan oleh panel juri manusia yang harus mengevaluasi kinerja tanpa mengetahui peserta mana yang merupakan komputer dan mana yang merupakan manusia. Elemen ini relevan sebagian karena beberapa komentator telah menyarankan bahwa sistem AI dapat dipegang pada standar akurasi yang mustahil dan tidak dapat dipenuhi. Artinya, mereka sering diharapkan untuk melakukan jauh lebih baik daripada manusia.

Ketiga, Volokh menyarankan bahwa kriteria perbandingan untuk kinerja juri manusia dan AI haruslah persuasi. Hakim AI harus dapat (i) 'membangun argumen persuasif yang mendukung berbagai kemungkinan hasil dalam kasus tersebut'; dan (ii) 'memilih dari semua argumen tersebut yang paling persuasif, dan dengan demikian hasil yang dapat didukung secara paling persuasif'. Volokh berpendapat bahwa keputusan yang meyakinkan lebih penting daripada keputusan yang adil, bijaksana, atau benar. Hal ini karena akan selalu ada perbedaan pendapat mengenai apa yang adil, bijaksana, atau benar dan, dalam litigasi biasa, 'pihak yang menang adalah pihak yang meyakinkan hakim, bahkan jika tidak ada cara logis untuk membuktikan bahwa jawaban yang menang itu benar'. Aspek argumen Volokh ini telah menuai kritik, termasuk dari Michaels, yang berpendapat bahwa Volokh mengabaikan fakta bahwa 'apa yang persuasif pada satu titik waktu belum tentu persuasif di kemudian hari, karena realitas faktual dan nilai-nilai moral masyarakat berubah'.

Akhirnya, Volokh berpendapat bahwa penulis draf pertama AI harus dipromosikan menjadi pengambil keputusan AI. Intinya, Volokh berpendapat bahwa jika penulis draf AI secara konsisten menghasilkan opini yang diadopsi oleh hakim, maka masuk akal untuk membiarkan AI membuat keputusan itu sendiri. Dengan demikian, ia menyarankan bahwa masalah yang terkait dengan bias dan prasangka manusia dapat dihindari. Pandangan yang agak kontroversial ini mungkin menyoroti apa yang mungkin terjadi bagi beberapa pengambil keputusan yudisial di dua area di mana Hakim AI lebih mungkin dibentuk, setidaknya pada

awalnya: masalah pidana sederhana (atau bagian dari pengambilan keputusan sehubungan dengan keputusan hukuman) dan klaim perdata sederhana. Yang penting, pandangan ini menunjukkan bahwa beberapa komentator menganggap bahwa evolusi Hakim AI yang mendukung akan mengarah pada pengembangan Hakim AI yang akan ada dengan sedikit pengawasan manusia yang berkelanjutan.

Di beberapa bagian dunia, langkah-langkah telah diambil untuk mengeluarkan hakim dari penentuan beberapa sengketa. Di Estonia, Kementerian Kehakiman telah mengumumkan rencana untuk hakim robot untuk gugatan kecil. Di Inggris, telah ada rencana untuk proses 'vonis daring otomatis' sejak 2017. Zalnieriute dan Bell berpendapat, bagaimanapun, bahwa langkah-langkah tersebut telah difokuskan pada pelanggaran atau sengketa di mana hakim memiliki sedikit diskresi yudisial. Misalnya, perlu dicatat bahwa proposal Inggris sebelumnya berlaku untuk tanggung jawab ketat dan pelanggaran ringkasan seperti penghindaran tarif.

Apakah langkah menuju Hakim AI bermanfaat atau tidak merupakan masalah yang kontroversial. Di satu sisi, Crotoft mengamati bahwa 'hakim manusia pada dasarnya adalah sumber daya yang mahal dan terbatas: Mereka harus mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, mereka membutuhkan waktu untuk memutuskan kasus, dan mereka pensiun. Akibatnya, berulang kali, keadilan yang tertunda menjadi keadilan yang ditolak'. Di sisi lain, komentator lain berpendapat bahwa gagasan bahwa penalaran yudisial 'dapat atau harus sepenuhnya direduksi menjadi model logis sederhana, atau ke sekelompok kecil kalkulus terkomputerisasi, jelas tidak dapat dipertahankan'. Namun, beberapa masalah signifikan dengan Hakim AI dapat dikaitkan dengan sejumlah masalah, termasuk: transparansi proses pengambilan keputusan; kapasitas AI untuk memahami dan mempertimbangkan dampak sosial dari pengambilan keputusan; sejauh mana Hakim AI dapat menjalankan otoritas hukum; penerimaan keputusan Hakim AI; kapasitas untuk menerjemahkan hukum ke dalam kode; kemampuan untuk membuat penilaian diskresioner; dan kapasitas untuk mencerminkan pemahaman sintaksis dan semantik yang lebih bernuansa.

Dalam konteks transparansi dalam hal pengambilan keputusan, banyak penulis menganggap bahwa Hakim AI bermasalah sebagian karena keputusan yang dibuat tidak dapat dijelaskan. Singkatnya, kurangnya 'keterangan' atau ketidakjelasan hasil AI dianggap dapat memengaruhi kualitas keputusan, kemampuan peninjauannya, serta sejauh mana keputusan tersebut dapat diterima. Gagasan keterangan dalam konteks AI dan pembelajaran mesin pada dasarnya merupakan konsep yang samar. Di satu sisi, literatur terbaru dari Bhatt dkk. menunjukkan bahwa istilah tersebut 'mengacu pada alat yang memberdayakan pemangku kepentingan untuk memahami dan, jika perlu, menggugat penalaran hasil model'. Di sisi lain, Engstrom dan Ho menekankan elemen transparansi dan pemahaman pengguna:

... tingkat transparansi apa yang diperlukan dalam cara kerja sistem algoritmik untuk mengukur kesetiaan sistem terhadap hukum. Ini berawal dari sepasang gagasan yang sudah mapan. Salah satunya adalah bahwa keluaran pembelajaran mesin tingkat lanjut "tidak dapat dipahami", dalam artian bahkan para insinyurnya sendiri pun belum tentu dapat memahami bagaimana model terancang sekalipun menghasilkan hasil tertentu.

Namun, jika seorang Hakim AI menghasilkan keputusan yang mengacu pada faktor-faktor hukum yang relevan, matriks faktual, dan didasarkan serta bergantung pada keputusan pengadilan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut dapat dijelaskan. Meskipun demikian, ketidakjelasan dan transparansi tetap menjadi masalah Hakim AI, terutama dalam kasus-kasus yang lebih kompleks di mana faktor-faktor yang dipertimbangkan dan interpretasi bukti memerlukan analisis yang lebih cermat. Terdapat juga isu-isu penting dan terkait dalam hal penyampaian keputusan AI pengadilan dan bagaimana dapat ditunjukkan bahwa preseden telah diikuti dan bahwa nuansa legislatif telah dipertimbangkan dalam konteks dampak sosial. Engstrom dan Ho mencatat bahwa:

Keluaran pembelajaran mesin juga seringkali “tidak intuitif” karena aturan yang mereka buat untuk membuat prediksi sangat kompleks dan multifaset sehingga menentang inspeksi praktis atau tidak sesuai dengan keyakinan praktis manusia tentang cara kerja dunia.

Dalam situasi Hakim AI yang suportif, isu-isu tersebut dapat dihindari (lihat kekhawatiran bias jangka yang telah dibahas sebelumnya) karena hakim manusia akan menentukan apakah mereka akan menerima, mengubah, atau menolak keputusan Hakim AI. Ada juga kemungkinan bahwa Hakim AI yang mendukung, daripada Hakim AI yang berdiri sendiri, akan menimbulkan lebih sedikit masalah tentang siapa yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Misalnya, dalam hal wewenang hukum dan sistem otomatis yang memberikan keputusan administratif, Hakim Perry dari Pengadilan Federal Australia telah mengajukan pertanyaan seperti siapa yang membuat keputusan dan siapa yang memiliki wewenang hukum untuk membuat keputusan tersebut. Apakah pemrogram komputer, pembuat kebijakan, pembuat keputusan manusia atau komputer atau sistem otomatis itu sendiri? Pengadilan saat ini bergulat dengan masalah-masalah seperti itu ketika mereka mempertimbangkan pengambilan keputusan administratif otomatis. Terkadang, dapat disarankan bahwa suatu keputusan tidak 'diotorisasi' atau tidak memiliki wewenang yang diperlukan sementara, di lain waktu, pengambilan keputusan AI dianggap tepat dan dilakukan dengan wewenang yang diperlukan.

Penerimaan pengambilan keputusan AI mungkin bermasalah terutama ketika ada kekhawatiran tentang tingkat pengawasan yudisial yang realistis. Di pengadilan tingkat bawah yang sibuk, mungkin tidak realistis untuk mengharapkan adanya pengawasan yudisial yang memadai. Selain itu, banyak orang mungkin merasa tidak nyaman menerima keputusan yang dihasilkan oleh suatu bentuk AI, meskipun keputusan tersebut telah 'diperiksa' oleh hakim manusia. Di sisi lain, dengan menggunakan analogi medis, tampaknya penerimaan dan kepercayaan terhadap hasil diagnostik medis telah berkembang seiring waktu dan pendekatan bertahap dan evolusioner terhadap Hakim AI (yang tampaknya lebih mungkin terjadi) akan mendukung penerimaan pengambilan keputusan Hakim AI. Mekanisme banding juga akan relevan, begitu pula penerimaan sosial umum terhadap penggunaan AI dalam pengambilan keputusan pemerintah. Jika terdapat kegagalan yang dipublikasikan secara luas dalam hal

penggunaan AI di tempat lain dalam masyarakat, seperti skema robodebt di Australia, mungkin masih ada keraguan publik tentang kemanjuran dan akurasi sistem AI yang pada gilirannya akan berdampak pada penerimaan Hakim AI.

Dalam hal kapasitas untuk menerjemahkan hukum ke dalam kode, perlu dibedakan antara perkembangan terbaru dalam pendekatan pembelajaran mesin yang canggih dan proses konversi algoritmik sebelumnya, di mana algoritma pada dasarnya dibuat berdasarkan pendekatan pohon keputusan (seringkali dengan masukan pakar). Dengan pendekatan yang terakhir, terdapat isu-isu yang sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

Para komentator telah mengangkat isu tentang bagaimana menerjemahkan hukum secara akurat ke dalam kode, perintah, dan fungsi yang dapat dipahami oleh program komputer. Bahasa hukum bersifat bernuansa dan seringkali membutuhkan pemahaman kontekstual... Pemrogram komputer dan profesional TI jarang memiliki kualifikasi atau pengalaman hukum, mereka juga bukan ahli kebijakan atau administrasi. Namun, para profesional inilah yang bertugas menerjemahkan undang-undang dan yurisprudensi ke dalam kode dan perintah komputer untuk memungkinkan proses otonom dalam mengambil keputusan. Sumber-sumber hukum ini meskipun kompleks juga beroperasi dalam konteks praduga hukum dan putusan diskresioner. Memastikan kerumitan ini dikodekan dengan benar ke dalam proses otonom merupakan tantangan tersendiri. Karena tantangan-tantangan ini, para komentator mencatat bahwa lebih banyak bidang hukum yang bersifat regulasi mungkin lebih cocok untuk diubah menjadi kode komputer.

Meskipun masalah serupa juga ada pada sistem pembelajaran mesin, dapat dikatakan bahwa masalah tersebut menjadi kurang relevan seiring waktu. Namun, 'kode' tetap perlu diperbarui secara konstan karena seringnya amandemen legislatif dan terdapatnya ketentuan transisi yang kompleks. Sistem otomatis juga membutuhkan kapasitas untuk menerapkan hukum dari berbagai titik waktu, untuk memastikan bahwa kasus-kasus diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku pada saat tindakan tersebut terjadi. Tantangan-tantangan ini berpotensi dapat diatasi dengan melibatkan pengacara dan pembuat kebijakan dalam pembuatan dan pembaruan program komputer ini.

Dengan pendekatan pembelajaran mesin yang lebih canggih, beberapa kekhawatiran lain yang disebutkan di atas masih relevan. Artinya, jika bentuk Hakim AI bergantung pada keputusan masa lalu dan jika hukum berubah (yang sering terjadi di banyak negara), terdapat risiko signifikan bahwa Hakim AI akan menghasilkan hasil yang tidak akurat. Selain itu, hasil Hakim AI dapat terhenti 'dalam waktu'. Artinya, hasil tersebut mungkin mencerminkan pengaturan sosial dan keuangan masa lalu, bukan pengaturan kontemporer. Misalnya, salah satu kritik terhadap pendekatan AI yang saat ini digunakan dalam asuransi kerusakan properti di Australia adalah bahwa jumlah kompensasi yang ditentukan oleh AI mencerminkan pemahaman masa lalu dan tidak meningkat (meskipun biaya perbaikan mungkin telah meningkat seiring waktu).

Demikian pula, sintaksis dan semantik serta pemahaman makna manusia bermasalah bagi banyak bentuk AI yang melampaui pengaturan transaksional dasar. Meskipun alat suara

ke teks sekarang relatif umum, kapasitas untuk memperoleh makna membutuhkan pemahaman kontekstual yang kompleks. Ini mungkin salah satu isu yang lebih signifikan dalam hal pengembangan Hakim AI. Akibatnya, jika Hakim AI juga bertanggung jawab untuk mempertimbangkan bukti dan bukti tersebut melampaui materi berbasis teks (seperti bukti lisan), makna dapat hilang atau rusak. Selain itu, jika bukti berbasis kertas, dapat terjadi lebih banyak masalah kesenjangan digital karena peserta pengadilan yang lebih kaya mungkin lebih mampu mengadvokasi 'di atas kertas' dalam bentuk Hakim AI yang lebih canggih. Hakim AI yang suportif dapat meringankan kekhawatiran tersebut, karena hakim manusia dapat menerjemahkan dan mempertimbangkan makna dan konteks.

Pengaturan Hakim AI yang suportif yang membahas masalah yang berkaitan dengan sintaksis dan semantik juga dapat berdampak pada penerimaan hasil AI terbantu serta kualitas pengambilan keputusan yang terjadi. Hal ini dapat menjadi masalah dalam pemahaman bukti serta penekanan yang diberikan pada bukti tersebut. Meskipun beberapa komentator mungkin berpendapat bahwa hal ini dapat mengakibatkan pengurangan bias, terdapat kekhawatiran bahwa jika materi ditafsirkan berdasarkan materi itu sendiri tanpa memperhatikan materi ekstrinsik, hal ini sendiri berarti hilangnya makna. Hakim AI yang suportif akan mengurangi risiko ini dan potensi risiko yang ditimbulkan oleh bias algoritmik. Ini mungkin berarti bahwa materi ekstrinsik dipertimbangkan sehingga 'pemikiran manusia' tercermin dalam hasilnya. Khususnya:

Sejalan dengan itu, penggunaan AI dalam hukum mungkin dihadapkan pada perbedaan filosofis antara sintaksis dan semantik. Searle terkenal karena mencatat bahwa program komputer memiliki sintaksis (struktur formal operasi), tetapi tidak memiliki semantik (makna di balik operasi ini). Teknologi digital memproses informasi dalam bentuk simbol abstrak, yaitu satu dan nol. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk memproses dan memanipulasi simbol-simbol ini, tetapi tidak memahami makna di balik proses-proses ini. Dengan kata lain, mesin tidak memahami informasi yang sedang diprosesnya. Hal ini dapat dibandingkan dengan pikiran manusia, yang dapat memahami informasi yang diprosesnya. Masalah ini berarti bahwa program komputer akan mampu mensimulasikan cara berpikir manusia, tetapi akan membutuhkan waktu sebelum mereka dapat benar-benar menduplikasi cara berpikir manusia.

5.5 CONTOH DATA, KASUS-KASUS YANG MENYIMPANG DAN SULIT

Data yang digunakan untuk menginformasikan pengembangan AI Hakim, baik yang suportif maupun mandiri, yang dimungkinkan melalui pembelajaran mesin, juga mungkin bermasalah. Penulis sebelumnya telah mencatat bahwa, secara umum, hanya sedikit yang diketahui tentang sengketa, pihak yang bersengketa, atau hasil dalam sistem pengadilan perdata. Artinya, meskipun terdapat pemahaman bahwa banyak kasus perdata diselesaikan atau ditarik kembali dan hanya sedikit kasus di sebagian besar yurisdiksi yang berlanjut ke sidang akhir, demografi atau keadaan mereka yang menggunakan pengadilan perdata mungkin tidak diketahui, begitu pula hasil yang dicapai. Hal ini karena di banyak pengadilan perdata,

lebih dari 90 persen kasus tidak berlanjut ke sidang, dan informasi tentang kelompok kasus yang signifikan ini tidak diketahui atau tidak terlacak di banyak sistem pengadilan.

Artinya, jika AI dikembangkan sedemikian rupa sehingga kasus-kasus yang diputuskan digunakan untuk menentukan hasil apa yang seharusnya berlaku, maka sampel data ini kemungkinan tidak lengkap dan berpotensi menyesatkan. Kumpulan data seperti itu, misalnya, mungkin hanya fokus pada kasus-kasus yang tidak lazim karena dapat dikatakan bahwa kasus-kasus yang berlanjut ke sidang penuh kemungkinan akan lebih sulit dalam hal tugas atau kompleksitas perilaku daripada yang mungkin telah diselesaikan. Untuk menggunakan analogi medis, jika sampel data seperti itu digunakan, hanya kasus-kasus outlier yang akan menginformasikan pengembangan sistem dengan cara yang sama seperti seorang dokter yang menggunakan sampel data terbatas seperti itu mungkin hanya menerima data tentang kasus-kasus medis di mana komplikasi yang signifikan terbukti.

Jika pendekatan pembelajaran mesin yang canggih akan diadopsi, penting bahwa sampel data yang digunakan, setidaknya pada awalnya, melampaui data kasus yang telah diputuskan. Khususnya, setelah sistem AI Hakim pembelajaran mesin yang kompeten tersedia dan dikembangkan dengan baik, hal ini mungkin menjadi kurang relevan karena data akan mencakup data yang diinformasikan oleh proses AI Hakim sebelumnya. Dalam hal sampel data, bahkan dengan digitalisasi catatan pengadilan, banyak pengadilan memiliki kumpulan data yang tidak lengkap yang mungkin mengecualikan materi yang relevan. Misalnya, ketika para pihak dalam perkara pengadilan perdata mencapai kesepakatan, sifat dan ketentuan perjanjian tersebut mungkin tidak diketahui oleh pengadilan.

Ini mungkin berarti bahwa pengambilan data awal perlu melampaui berkas pengadilan dan mencakup data lain seperti data berkas perkara pengacara. Bahkan, hal ini juga akan mengharuskan para pihak yang berperkara untuk memberikan materi yang jauh lebih banyak kepada pengadilan. Pendekatan semacam itu jauh lebih mudah jika proses memulai gugatan pengadilan disederhanakan sehingga pengambilan data terjadi selama proses pengadilan. Data tersebut juga dapat membantu pengadilan untuk lebih memahami di mana rujukan ke penyelesaian sengketa alternatif (ADR) atau penyelesaian sengketa daring (ODR) mungkin berguna dan juga dapat menghasilkan triase dan tindak lanjut otomatis.

Bell juga menyoroti masalah ini dalam konteks sengketa hukum keluarga. Di sini, Bell berpendapat bahwa setiap ketergantungan pada data yang hanya terdiri dari putusan akan mewakili kumpulan data 'outlier', mengingat bahwa sebagian besar perpisahan tidak berlanjut ke sidang dan putusan akhir. Komisi Reformasi Hukum Australia juga mencatat bahwa mereka yang mengajukan sengketa hukum keluarga hanya mewakili sebagian kecil dari semua orang yang mengalami perpisahan, dengan sekitar 70 persen orang menyelesaikan sengketa pengasuhan anak tanpa menggunakan sistem hukum keluarga, dan 40 persen menyelesaikan sengketa properti mereka melalui diskusi. Diproyeksikan bahwa tingkat ini lebih tinggi untuk pasangan yang berpisah tanpa anak. Dari perkara yang masuk ke dalam sistem, 'sebagian besar' diselesaikan.

Sehubungan dengan perkara pidana, di banyak pengadilan, sampel data jauh lebih luas dan informasi hasil serta demografi juga tersedia. Hal yang sama dapat dikatakan terkait

beberapa kategori sengketa administratif, meskipun terdapat masalah terkait penyalahgunaan data dan sejauh mana data (termasuk data pengawasan sosial) dapat digunakan untuk menginformasikan pembelajaran mesin dalam konteks Hakim AI.

Terkait bagaimana Hakim AI dapat menangani kasus-kasus yang lebih menyimpang atau sulit, telah dikemukakan bahwa para pengambil keputusan manusia mungkin lebih siap daripada hakim robot untuk menangani kasus-kasus semacam itu. Wu berpendapat bahwa hakim manusia memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan alternatif algoritmik mereka dalam kasus-kasus sulit. Hal ini karena: (i) perangkat lunak tidak memiliki kemampuan untuk memahami konteks atau nuansa; (ii) mereka membutuhkan penyeimbangan nilai-nilai yang bertentangan atau penghindaran konsekuensi yang absurd; atau (iii) taruhannya cukup tinggi sehingga memerlukan keterlibatan manusia. Secara khusus, perlu dicatat bahwa pengadilan manusia lebih disukai dalam kasus-kasus seperti itu di mana sangat penting untuk memastikan 'pencegahan kesalahan absurd, hasil yang jelas tidak adil, dan konsekuensi tidak adil lainnya dari kepatuhan buta terhadap aturan'.

Taruffo juga berpendapat bahwa meskipun faktor-faktor kesederhanaan, pengulangan, dan frekuensi dapat diidentifikasi dalam kasus-kasus serupa, hal ini jarang merupakan situasi yang paling sering atau 'normal'. Sebaliknya, 'kasus-kasus mudah' ini seringkali terlalu sulit untuk distandarisasi dalam model komputerisasi. Dengan demikian, standarisasi sangat sulit atau bahkan mustahil dicapai dalam kasus peradilan 'rata-rata', apalagi dalam kasus-kasus 'sulit'.

Isu-isu yang diidentifikasi oleh Taruffo (dapat dimengerti mengingat tanggal pengungkapannya) tampaknya tidak mempertimbangkan pendekatan pembelajaran mesin yang lebih canggih yang saat ini ada dan yang kemungkinan akan berkembang di masa mendatang. Pendekatan pembelajaran mesin semacam itu kemungkinan akan mendukung pengembangan Hakim AI dalam kasus-kasus yang lebih sederhana dan 'mudah'. Memang, AI berbasis pendekatan pembelajaran mesin sudah berkembang dengan baik di sektor asuransi (untuk menangani klaim) dan di bidang lain yang melibatkan transaksi konsumen. Kasus-kasus yang lebih sederhana tersebut dapat mencakup kasus-kasus yang melibatkan utang, denda, masalah konsumen, kasus kontraktual yang lebih sederhana, dan beberapa masalah cedera pribadi serta kategori kasus lain yang kemungkinan akan ditangani di tingkat sistem peradilan yang lebih rendah. Namun, pengalihan kasus-kasus sederhana ke Hakim AI memang menimbulkan banyak masalah. Secara khusus, terdapat pertanyaan seputar penerimaan AI untuk menangani kasus-kasus yang mungkin tampak 'sederhana' dari perspektif pengadilan, tetapi mungkin rumit dan mengubah hidup manusia yang terlibat dalam sengketa tersebut. Bagi sebagian orang, pengalaman Hakim AI mungkin tidak setara dengan 'hari di pengadilan', terutama jika terdapat keterbatasan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan dan kurangnya kehadiran manusia dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan. Di sisi lain, penghematan dalam hal pengurangan biaya dan penundaan serta pengenalan keadilan 24/7 dapat berarti bahwa, bagi banyak orang, Hakim AI merupakan peningkatan dari cara kerja sistem peradilan saat ini.

Berkaitan dengan pengalaman yang diperoleh orang-orang dari Hakim AI, terdapat banyak isu mengenai responsivitas. Artinya, hakim manusia yang responsif dan memimpin pengadilan yang mampu memecahkan masalah atau yang menggunakan pendekatan yurisprudensi terapeutik dalam persidangan pengadilan dapat membentuk kembali perilaku manusia dan memainkan peran penting dalam hal memajukan keadilan. Meskipun perkembangan dalam komputasi afektif dapat membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang ada di lingkungan pengadilan seperti itu, ada banyak masalah tentang sejauh mana bentuk AI dapat memodelkan interaksi peradilan yang lebih responsif.

Memang, beberapa komentator telah menyuarakan kekhawatiran bahwa, seiring menjamurnya Hakim AI di ranah peradilan, pelaksanaan tugas-tugas terpisah dan emosional yang biasanya dilakukan oleh hakim manusia untuk mendorong keterlibatan dengan proses hukum dan legitimasi normatifnya akan hilang. Re dan Solow-Niederman, misalnya, mencatat kekhawatiran bahwa Hakim AI kurang mampu menumbuhkan rasa 'hormat' di antara pihak yang kalah dalam perkara:

Misalnya, hakim manusia sering kali memenangkan rasa hormat dari pihak yang kalah dalam perkara dengan mengakui bahwa pandangan pihak yang kalah memiliki kekuatan tertentu, tetapi masih menjadi pertanyaan terbuka apakah efek psikologis itu akan tetap muncul ketika mesin terprogram berperilaku dengan cara yang serupa. Memang, seorang hakim robot dapat menunjukkan rasa hormat yang setara bagi kedua belah pihak tetapi akankah seorang pihak yang berperkara merasa dihormati ketika perangkat terprogram hanya melakukan apa yang diprogramkan untuk dilakukannya?’

5.6 KESIMPULAN

Peluang yang dihadirkan oleh Hakim AI menunjukkan bahwa serangkaian pendekatan akan muncul dalam jangka pendek yang dapat dijelaskan menggunakan pendekatan tahap suportif, substitusi, dan disrupsi dari pengembangan teknologi yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya, beberapa Hakim AI mungkin bersifat suportif dan memungkinkan hakim untuk mengelola beban kerja peradilan mereka dengan lebih baik seiring dengan pengembangan lebih lanjut pembuatan templat putusan dasar dan cobot yang membantu pekerjaan peradilan. Beberapa pengembangan suportif mungkin menimbulkan lebih banyak masalah daripada yang lain, terutama ketika pengembangan tersebut dapat 'mendorong' hakim atau 'mengoreksi' pengambilan keputusan peradilan.

Perkembangan lain mungkin lebih berfokus pada penggantian beberapa atau sebagian besar tugas peradilan yang menentukan dengan bentuk-bentuk AI. Dari perspektif ini, hakim dapat tetap terlibat dalam proses peradilan, dengan teknologi suportif dan substitusi yang dimungkinkan oleh pembelajaran mesin. Namun, peran peradilan mungkin terbatas dan dalam beberapa kasus bergeser ke fungsi pengawasan, pemantauan, dan peninjauan yang lebih luas dengan pengembangan Hakim AI yang suportif.

Ada beberapa perubahan yang lebih signifikan dan disruptif yang merupakan hasil dari penggunaan Hakim AI untuk sepenuhnya menggantikan hakim manusia. Perkembangan tersebut, kemungkinan besar awalnya terjadi di tingkat pengadilan yang lebih rendah dan

terkait dengan kategori kasus tertentu (misalnya, kasus asuransi 'sederhana') atau kasus serupa yang muncul di lingkungan pengadilan dengan volume tinggi. Perkembangan di bidang-bidang ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah yang paling kontroversial dan membutuhkan pemikiran yang mendalam serta artikulasi batasan etika dan pendekatan yang tepat. Pendekatan semacam itu juga kemungkinan akan terjadi seiring waktu sehingga teknologi yang awalnya suportif dan pengganti akan diadopsi dan diadaptasi oleh pengadilan.

Ada juga isu-isu khusus yang muncul di mana kasus-kasus baru atau solusi kreatif diperlukan. Sejauh mana hal ini relevan dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Namun, secara umum, yurisdiksi yang memiliki tradisi hukum umum dan bergantung pada penciptaan preseden mungkin memiliki kekhawatiran yang lebih besar tentang pengembangan Hakim AI yang, saat ini, kemungkinan akan terbatas pada fokus 'masa lalu' daripada 'masa depan'. Dalam hal ini: 'teknik pembelajaran mesin hanya berguna jika informasi yang dianalisis serupa dengan informasi baru yang disajikan kepada AI. Jika program AI disajikan dengan kasus baru tanpa preseden serupa, program tersebut mungkin tidak cocok untuk membuat prediksi atau mencapai suatu hasil'.

Jelas bahwa beberapa yurisdiksi telah memulai perjalanan mereka di sepanjang kontinum Hakim AI dan yang lainnya belum mempertimbangkan bagaimana peran peradilan akan berubah sebagai akibat dari evolusi Hakim AI. Namun, satu hal sangat jelas. Pengembangan Hakim AI mengharuskan catatan pengadilan didigitalkan agar pembelajaran mesin yang lebih canggih dapat dilakukan. Selain itu, model pengadilan daring memungkinkan pengembangan Hakim AI yang diidentifikasi Susskind sebagai perluasan dari proses pengadilan daring. Pada dasarnya, penggunaan kerangka kerja Hakim AI ini agak tak terelakkan; yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh hal ini akan meluas dan sejauh mana hakim didukung, alih-alih digantikan oleh perkembangan tersebut.

Ada gangguan lain yang sebelumnya mungkin dianggap hanya ada dalam literatur fiksi ilmiah yang patut dipertimbangkan dalam konteks Hakim, AI, dan teknologi. Perkembangan tersebut mencakup potensi hakim manusia untuk 'ditingkatkan' sehingga mereka lebih mampu menangani beban kasus yang kompleks, dan menunjukkan bahwa argumen yang mendukung atau menentang Hakim AI tidak hanya biner. Dalam hal ini, penulis mencatat bahwa perekrutan polisi di beberapa bagian dunia sudah melibatkan pemindaian otak untuk menentukan pelamar mana yang mungkin 'cocok', yaitu, mungkin lebih mampu menjalankan berbagai tugas kepolisian dengan sukses dan memiliki temperamen yang sesuai. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk merekrut hakim yang 'lebih baik' atau lebih 'efektif'.

Akhirnya, dalam ranah cara spekulatif di mana teknologi dapat membantu hakim, transhumanisme sedang dipertimbangkan oleh para futuris dalam berbagai konteks. Pada dasarnya, transhumanisme menunjukkan bahwa manusia dapat 'ditingkatkan' menggunakan pendekatan bioteknologi dan bahwa pendekatan semacam itu bermanfaat dan tak terelakkan. Mengingat banyaknya perkembangan ilmu kedokteran selama beberapa dekade terakhir, pertumbuhan minat terhadap gagasan ini tidaklah mengejutkan. Meskipun terdapat banyak kekhawatiran tentang potensi transhumanisme yang telah digambarkan sebagai 'pandangan

yang sepenuhnya materialis dan komputasional', beberapa orang mungkin menganggap bahwa Hakim AI mungkin melibatkan perubahan dan perekrutan hakim masa depan yang sangat berbeda dari hakim masa kini. Penulis sebelumnya telah mencatat bahwa transhumanisme:

... dapat memungkinkan hakim masa depan untuk mengintegrasikan sirkuit dan program komputer ke dalam tubuh mereka, atau memodifikasi susunan fisik atau genetik mereka, untuk meningkatkan kecerdasan dan daya ingat mereka, meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola dan memproses informasi, dan mengurangi terjadinya kelelahan.

BAB 6

AKSES KEADILAN YANG LEBIH BAIK?

6.1 PENDAHULUAN

Terdapat banyak komentar terkait makna 'keadilan' dan bagaimana teknologi dapat mendukung keadilan yang lebih berkualitas atau akses keadilan (atau keduanya). Terkadang, komentar tentang isu-isu ini dipengaruhi oleh perspektif komentator dan definisi keadilan yang mereka miliki. Misalnya, seorang hakim yang sedang menjabat mungkin menganggap pengadilan sebagai pusat sistem peradilan, sementara anggota masyarakat mungkin menganggap bahwa konsep tersebut berkaitan dengan hak individu atau hak asasi manusia, kepolisian, atau pengaturan hukum dan ketertiban. Mereka yang menjalankan proses Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) mungkin memandang keadilan secara luas dan mungkin menganggap gagasan keadilan partisipatif dan prosedural sama relevannya dalam pencapaian keadilan seperti halnya gagasan keadilan substantif (atau menganggap bahwa gagasan tersebut saling terkait). Hakim juga mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang apa itu keadilan, dan konsep penyelesaian masalah, keadilan restoratif, dan keadilan terapeutik mungkin lebih relevan bagi beberapa hakim maupun hakim lainnya di sektor peradilan. Keadilan, sebagaimana telah dicatat oleh penulis sebelumnya, ibarat keindahan dan oleh karena itu 'tergantung pada pandangan orang yang melihatnya'.

Terlepas dari perbedaan persepsi yang sangat besar tentang keadilan dan sejauh mana keadilan mengintegrasikan kegiatan non-pengadilan, beberapa konsensus di antara para hakim bahwa teknologi dapat membantu menegakkan prinsip-prinsip inti akses terhadap keadilan. Hakim di Australia, Inggris Raya dan Amerika Serikat, misalnya, semuanya telah merenungkan manfaat akses terhadap keadilan yang terkait dengan peningkatan penggunaan teknologi dan digitalisasi proses pengadilan. Namun, di luar digitalisasi dan pengembangan teknologi yang lebih mendukung yang dapat menginformasikan dan membantu masyarakat, terdapat beberapa pandangan yang sangat berbeda tentang kapasitas teknologi untuk mendukung hasil yang adil dan memfasilitasi akses terhadap keadilan.

Definisi 'keadilan' yang sulit dipahami juga menjadi masalah dalam hal makna 'akses terhadap keadilan'. Istilah 'akses terhadap keadilan' dikatakan samar dan 'bertahan dalam wacana politik dan hukum karena dapat memiliki makna yang berbeda bagi orang yang berbeda'. Dalam hal ini, terdapat perbedaan filosofis yang mendalam terkait di mana keadilan dipersepsikan berada. Misalnya, dalam 'Justice in Many Rooms', Galanter berpendapat bahwa gerakan akses terhadap keadilan secara historis mengadopsi pandangan keadilan yang ia sebut 'sentralisasi hukum'. Gerakan tersebut merupakan 'upaya untuk meningkatkan arus sengketa ke forum resmi yang tepat di mana mereka akan menemukan keadilan'. Galanter berpendapat bahwa sentralisme hukum menggambarkan 'gambaran di mana lembaga negara menempati pusat kehidupan hukum dan berdiri dalam hubungan "kendali hierarkis" dengan tatanan lain yang kurang normatif seperti keluarga, korporasi, jaringan bisnis'. Sementara Susskind

mengusulkan bahwa keadilan tidak memerlukan lokasi pengadilan fisik, ia, sampai batas tertentu, mengadopsi perspektif sentralis yang mengasumsikan bahwa pengadilan tetap menjadi episentrum sistem peradilan, meskipun mungkin virtual daripada fisik.

Menanggapi kekhawatiran signifikan tentang akses ke pengadilan, ada penekanan berkelanjutan pada digitalisasi proses pengadilan, serta fokus pada teknologi pendukung yang memungkinkan pengaturan telepon dan konferensi video (terutama di era COVID-19). Selain itu, ada fokus yang berkembang pada apa yang dilakukan orang sebelum mereka mungkin pergi ke pengadilan dan bagaimana hal ini sesuai dengan persamaan akses ke keadilan. Hal ini telah mengarah pada pengembangan definisi keadilan yang lebih luas yang mengidentifikasi pengadilan dan hakim sebagai komponen penting, tetapi bukan satu-satunya, dari sistem peradilan, dan dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi, sering dikaitkan dengan gagasan 'e-justice'. Selain itu, sejalan dengan definisi keadilan yang lebih luas, akses terhadap keadilan telah ditafsirkan ulang menjadi 'memberi pilihan kepada masyarakat dan menyediakan forum yang tepat untuk setiap sengketa, tetapi juga memfasilitasi budaya di mana lebih sedikit sengketa yang perlu diselesaikan'. Penafsiran ulang ini telah membuka jalan bagi pengembangan perangkat bantuan hukum dan penyelesaian sengketa daring (ODR) yang ada di luar pengadilan.

Memang, banyak yurisdiksi sekarang mencakup proses ODR seperti mediasi daring, penilaian kasus daring, dan arbitrase atau adjudikasi daring di luar sistem pengadilan. Dengan menggabungkan ini dan juga perkembangan ODR berbasis AI yang lebih baru, sistem peradilan 'bergerak ke arah mendukung penyelesaian melalui sarana teknologi' dan pada akhirnya memperkuat gagasan bahwa akses ke keadilan tidak bergantung pada lokasi fisik. Pengaturan ODR tersebut dapat digambarkan sebagai opsi e-justice, meskipun gagasan e-justice seringkali lebih luas dan terkait dengan pengembangan portal atau platform yang didukung oleh teknologi yang dapat membantu dalam penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Jelas bahwa peningkatan akses ke internet telah memungkinkan proses ODR untuk dianut oleh yurisdiksi dalam upaya untuk meningkatkan akses ke keadilan. Namun, ada literatur yang menunjukkan penyebaran keadilan melalui cara daring sebenarnya dapat menghambat akses ke keadilan bagi sebagian orang. Dalam hal ini, sering diasumsikan bahwa seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, individu akan dapat mengakses opsi penyelesaian sengketa secara daring. Namun, bagi banyak orang, ini tidak terjadi. Cashman dan Ginnivan menjelaskan bahwa efisiensi ODR 'bergantung pada pihak-pihak yang memiliki akses digital (akses ke koneksi internet yang berfungsi) dan kemampuan digital (kemampuan untuk menggunakan internet untuk menavigasi platform daring)'. Dalam hal ini, dan seperti yang dibahas nanti dalam bab ini, perlu dicatat bahwa 'kesenjangan digital' yang menyusut masih ada di banyak komunitas dengan sumber daya yang baik. Cabral dan rekan-rekan menjelaskan bahwa, karena kesenjangan digital ini, sistem ODR (dan, lebih jauh lagi, sistem pengadilan virtual) mungkin 'tidak mampu memberikan keadilan yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah'.

Sejumlah peneliti telah mengkaji manfaat akses terhadap keadilan yang terkait dengan penggunaan teknologi dan juga telah mengeksplorasi gagasan e-justice. Selain itu, para pembuat kebijakan telah mempertimbangkan bagaimana portal dapat dikembangkan yang memungkinkan pengembangan 'layanan terpadu' untuk mendukung pencapaian swadaya, penyelesaian sengketa, dukungan hukum, hak-hak hukum, dan, jika perlu, tindakan pengadilan.²² Sebelum mempertimbangkan manfaat sistem tersebut dan bagaimana teknologi dapat membantu, penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan jenis 'keadilan' apa yang dimaksud ketika mempertimbangkan akses terhadap keadilan dalam konteks perubahan teknologi.

6.2 MENDEFINISIKAN KEADILAN

Konsepsi keadilan, sebagaimana disebutkan di atas, sangat bervariasi dan akses terhadap keadilan dapat dipahami dengan mengacu pada proses dan mekanisme yang dapat digunakan untuk mencapai keadilan serta hasil yang dapat dicapai. Dalam hal ini, Susskind berpendapat bahwa konsep akses terhadap keadilan mencakup empat elemen berbeda:

- i. Penyelesaian sengketa;
- ii. Penahanan sengketa;
- iii. Penghindaran sengketa; dan
- iv. Promosi kesehatan hukum (yaitu, hukum dapat menjadi pemberi kekuatan dan menyediakan cara bagi kita untuk meningkatkan kesejahteraan umum kita).

Artikulasi ini relevan karena membantu mendefinisikan nilai dan tujuan apa yang mungkin mendasari perkembangan sektor peradilan di masa depan (termasuk yang terkait dengan perubahan teknologi). Selain itu, dalam mengevaluasi perubahan tersebut, tujuan yang jelas dapat membantu menentukan sejauh mana inisiatif harus dikembangkan lebih lanjut, diperluas, atau dihentikan. Pengembangan tujuan kesejahteraan oleh Susskind juga konsisten dengan tujuan yang mendasari kerangka etika. Khususnya, Susskind menyimpulkan bahwa berdasarkan elemen-elemen di atas, akses terhadap keadilan mengacu pada lebih dari sekadar penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih murah, dan kurang konfrontatif. Pada hakikatnya, ia menganggap bahwa hal tersebut mencakup teknik-teknik yang sangat memberdayakan seluruh anggota masyarakat.

Dalam mengadopsi pandangan yang lebih luas tentang keadilan dalam konteks perkembangan ADR, penulis sebelumnya telah mencatat bahwa:

... tidak perlu ada penolakan terhadap gagasan bahwa pengadilan, hakim, dan peran yang dimainkan oleh lembaga hukum dalam mendukung supremasi hukum sangat penting dalam menciptakan keadilan dan mengamankannya ... penting untuk mengakui bahwa peran sistem pengadilan yang independen dan peradilan yang imparsial sangat penting dalam menjalin tatanan sosial masyarakat yang beradab dan menciptakan keadilan sosial di mana kebebasan dan kesetaraan tetap menjadi nilai-nilai penting. Dalam keadaan inilah ADR yang efektif dan 'adil' dapat berkembang.

Penulis mencatat bahwa komentar serupa juga berlaku untuk teknologi dan keadilan. Artinya, sistem peradilan yang independen memungkinkan opsi peradilan berbasis teknologi yang mungkin ada di dalam dan di luar pengadilan dan 'adil' untuk berkembang. Dalam hal ini, gagasan tentang 'keadilan' penting, dan Susskind telah membedakan tujuh konsepsi keadilan menurut hukum:

- i. Keadilan substantif (putusan dan hasil yang adil);
- ii. Keadilan prosedural (termasuk 'kasus serupa harus diperlakukan sama' dan 'hakim harus jujur, tidak memihak, independen, dan bebas dari bias. Lebih lanjut, mereka harus bekerja dalam sistem peradilan yang independen dan didukung oleh proses dan prosedur yang seimbang dan bebas dari bias, termasuk metode yang digunakan untuk mengalokasikan hakim pada kasus-kasus tertentu, penunjukan hakim ...');
- iii. Keadilan yang terbuka dan transparan;
- iv. Keadilan distributif (sistem peradilan harus dapat diakses dan dipahami oleh semua orang);
- v. Keadilan proporsional (seimbang dengan tepat): 'biaya, kecepatan, kompleksitas, dan tingkat daya juang suatu perkara harus proporsional dengan substansi dan skala perkara tersebut';
- vi. Keadilan yang dapat ditegakkan; dan
- vii. Keadilan yang berkelanjutan: 'sulit untuk membayangkan sistem peradilan yang benar-benar berkelanjutan yang secara teknologi tidak selaras dengan masyarakat yang dilayaninya ... ketidaksesuaian ini akan mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan dan menciptakan inefisiensi yang diterima secara luas'.

Untuk masing-masing komponen ini, dapat dikemukakan bahwa, dalam beberapa keadaan, teknologi dapat mengurangi kualitas peradilan dan, dalam keadaan lain, dapat meningkatkan akses dan kualitas peradilan. Dampaknya tentu saja akan bergantung pada jenis teknologi yang digunakan, bagaimana teknologi tersebut digunakan, dan sejauh mana teknologi tersebut telah dinilai secara memadai. Beralih ke masing-masing komponen yang diidentifikasi oleh Susskind, jelas bahwa masalah dapat muncul terlepas dari apakah teknologi tersebut dapat digambarkan sebagai pendukung, pengganti, atau pengganggu (atau gabungan dari ketiganya). Selain itu, penulis mengusulkan agar beberapa perluasan dan artikulasi tambahan terkait makna tujuan-tujuan ini konsisten dengan pandangan bahwa keadilan juga dapat dicapai di luar pengadilan dan, bahwa di dalam pengadilan, beberapa tujuan dapat dibingkai lebih luas.

Keadilan substantif dapat dipengaruhi oleh 'kualitas representasi, sumber daya yang tersedia bagi pihak yang bersengketa, dan kualitas pengambilan keputusan serta kerangka kerja berbasis hak di sekitarnya'. Dalam hal ini, teknologi yang mendukung pihak yang bersengketa untuk membuat keputusan yang tepat tentang cara memajukan suatu perkara dan yang juga memungkinkan tersedianya nasihat hukum saat dibutuhkan (misalnya melalui obrolan hukum atau bot suara) dapat meningkatkan kemungkinan bahwa suatu hasil secara substantif adil atau tepat. Di sisi lain, isu 'kesenjangan digital' yang dibahas nanti dalam bab ini dapat mengakibatkan ketidakadilan atau kurangnya keadilan substantif. Telah dicatat juga bahwa 'bias algoritmik', yang mengacu pada situasi di mana satu kelompok atau individu

secara tidak adil difavoritkan atau didiskriminasi dalam hubungannya dengan yang lain, juga dapat menjadi hasil di mana teknologi digunakan dalam pengaturan peradilan. Khususnya, di Tiongkok, teknologi yang lebih disruptif telah digunakan dengan tujuan untuk mengoreksi bias yudisial, dan telah disarankan bahwa transparansi dan keputusan substantif dapat ditingkatkan karena 'sistem berbasis aturan dapat menjelaskan secara tepat bagaimana setiap variabel ditetapkan dan mengapa setiap kesimpulan dicapai'.

Seperti disebutkan, keadilan substantif mungkin menjadi tujuan yang lebih bermasalah di mana AI digunakan. Beberapa penulis, misalnya, telah menyoroti bagaimana algoritma yang seringkali sederhana dapat mereplikasi dan/atau memperburuk bias sosial sebagai akibat dari data yang mereka 'masukkan'. Di sisi lain, Završnik telah mempertimbangkan keadilan algoritmik dalam konteks proses hukum pidana, mengamati bahwa pengambilan keputusan manusia seringkali cacat karena argumen stereotip dan kriteria terlarang yang menyusup ke dalam putusan. Perlu dicatat bahwa algoritma juga dapat 'diberi' data yang tidak 'bersih' dari 'kondisi sosial, budaya, dan ekonomi'. Crotoft juga mencatat bahwa AI 'menggabungkan bias manusia dan menambahkan jenis lainnya'.

Terkait keadilan substantif dan AI, perbedaan dapat ditarik antara apa yang disebut Re dan Solow-Niederman sebagai 'keadilan terkodifikasi' dan 'keadilan yang adil':

Keadilan terkodifikasi bercita-cita untuk menetapkan keseluruhan variabel yang relevan secara hukum terlebih dahulu, sambil mengabaikan fakta dan keadaan lain yang dapat ditemukan dalam proses individual. Tujuan dasar dari standarisasi tersebut adalah untuk mengurangi ruang bagi diskresi manusia dalam adjudikasi, sehingga mengurangi peluang kesewenang-wenangan, bias, dan pemborosan, sekaligus meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan transparansi. Singkatnya, keadilan terkodifikasi melihat keburukan diskresi, sedangkan keadilan yang adil melihat kebajikannya.

Pembahasan di atas tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa keadilan substantif bukanlah tujuan yang tepat. Sebaliknya, disarankan bahwa makna tujuan ini memerlukan klarifikasi tambahan. Misalnya, 'keadilan', seperti halnya keadilan, dapat dipersepsikan secara berbeda di seluruh sektor peradilan. Di satu sisi, sebagaimana disebutkan di atas, terdapat 'keadilan' yang lebih besar ketika terdapat diskresi, dan di sisi lain, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa terdapat lebih banyak keadilan ketika tidak ada diskresi. Gagasan keadilan substantif juga mengasumsikan adanya kebenaran atau penilaian objektif tentang apa yang dianggap adil dalam situasi apa pun. Meskipun diasumsikan bahwa Susskind bermaksud merujuk pada 'keadilan' dalam konteks 'hukum', tidak diragukan lagi bahwa terkadang penerapan hukum yang ketat juga dapat mengakibatkan ketidakadilan. Selain itu, teknologi dan ODR akan semakin mendorong orang untuk menyelesaikan perbedaan mereka sebelum hak hukum atau isu substantif dapat diartikulasikan atau ditentukan. Dalam keadaan ini, mustahil untuk menguji apakah suatu hasil 'adil' secara substantif atau objektif meskipun pengaturan yang dibuat mungkin sah.

Di bawah keadaan seperti itu, keadilan mungkin lebih terkait dengan persepsi daripada 'kebenaran' objektif apa pun. Namun, perkembangan AI prediktif yang sudah digunakan dalam

sistem hukum dapat memungkinkan mereka yang mencapai kesepakatan untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang berbagai kemungkinan hasil dan dengan cara ini mendukung hasil yang lebih adil secara substantif. Di mana masalah belum diklarifikasi dan di mana pihak yang berselisih belum membentuk pandangan tentang kekuatan atau kelemahan 'kasus' lawan mereka, AI mungkin menawarkan beberapa dukungan. Namun, lagi-lagi, dipertanyakan apakah AI dapat memprediksi apa hasil yang 'adil' tanpa adanya materi yang relevan.

Meskipun demikian, yang terpenting, ada pertanyaan tentang bagaimana keadilan dapat didukung karena efisiensi dan keseragaman diidentifikasi sebagai 'kekuatan utama adjudikasi AI' dan 'dua ciri khas keadilan yang terkodifikasi'. Re dan Solow-Niederman berpendapat bahwa meningkatnya keadilan yang terkodifikasi dan menurunnya keadilan yang setara mengarah pada 'keterasingan' dan risiko bahwa 'aspek-aspek penting dari kehidupan sosial ditinggalkan tanpa partisipasi dan pengawasan publik yang memadai'. Hal ini, pada gilirannya, dapat dipertimbangkan dalam tujuan keadilan yang berkelanjutan. Selanjutnya, diperdebatkan bahwa berkurangnya keterlibatan manusia atau otomatisasi penuh dapat membuat operasi hukum 'terlihat jauh kurang menarik, relevan, dan tunduk pada kontrol dan perhatian orang-orang sehari-hari'.

Menanggapi kekhawatiran ini, Re dan Solow-Niederman menguraikan empat tanggapan terhadap penurunan keadilan yang adil yang mungkin diakibatkan oleh penggunaan AI, sehingga mendukung keadilan substantif. Salah satunya melibatkan pengintegrasian ukuran keadilan yang adil ke dalam adjudikasi AI dengan 'mengkodekan keadilan' ke dalam adjudicator AI itu sendiri. Untuk menghindari risiko 'mengunci definisi dasar keadilan yang "selaras" dengan nilai-nilai yang ada', mereka mencatat bahwa akan lebih baik untuk memperbarui pengkodean ini secara berkala. Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa 'mesin yang mampu menerapkan "keadilan AI" juga dapat memitigasi masalah datafikasi dengan menjadi lebih responsif daripada hakim manusia dalam hal nuansa faktual yang halus dalam suatu kasus atau perubahan nilai-nilai sosial'. Meskipun demikian, pada akhirnya disimpulkan bahwa:

Pengodean untuk keadilan bukanlah perbaikan yang mudah, baik secara teknis maupun normatif. Belum jelas apakah secara teknologi memungkinkan untuk mengodekan koreksi keadilan yang bernuansa.

Terkait dengan keadilan prosedural, perbedaan yang dicatat oleh Susskind di atas tidak selaras dengan beberapa definisi keadilan prosedural, dapat mencakup gagasan tentang keadilan partisipatif dan tingkat responsivitas yang mendukung martabat dan suara manusia. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dalam hasil kasus mereka atau penyelesaian masalah mereka. Ini adalah kebutuhan manusia untuk didengarkan'. Banyak penelitian di bidang keadilan prosedural juga menunjukkan bahwa prosedur, partisipasi, dan ketepatan waktu serta biaya pengaturan akan membantu dalam menentukan apakah suatu hasil adil dan tepat. Dalam hal ini, keadilan prosedural dapat menggabungkan referensi ke keadilan interpersonal yang

mengacu pada situasi di mana ‘orang diperlakukan dengan sopan, bermartabat, dan hormat oleh otoritas atau pihak ketiga yang terlibat dalam melaksanakan atau menentukan hasil’. Dalam konteks perubahan teknologi, mungkin ada kekhawatiran khusus yang berkaitan dengan partisipasi, penjelasan, pemahaman prosedural dan penggunaan proses yang sesuai secara budaya.

Berbicara terkait dengan pengenalan pengadilan daring, Lord Sales dari Mahkamah Agung Inggris juga telah mencatat pentingnya memastikan bahwa pengadilan daring ‘memberikan ruang bagi nilai-nilai prosedural yang merupakan inti dari sistem peradilan yang adil dan responsif’. Jelas ada masalah yang dapat diperbesar oleh kurangnya keadilan prosedural, bahkan ketika hal ini didefinisikan secara sederhana, jika perubahan teknologi diimplementasikan dan dikelola dengan buruk.

Misalnya, sebuah studi oleh Dewan Keadilan Sipil Inggris (‘CJC’) yang menilai pengaturan COVID-19 mencatat bahwa pengadilan di Inggris sedang menjalani periode reformasi yang pesat. Namun, terlepas dari reformasi tersebut, di tingkat Pengadilan Negeri, responden survei berkomentar bahwa kurangnya investasi dalam fasilitas, teknologi, dan staf, serta kurangnya ketersediaan platform konferensi video ‘telah memperparah kesulitan yang dialami oleh pengguna pengadilan’. Dalam hal ini, CJC mengutip satu tanggapan atas permintaan masukan yang menyatakan:

Pandemi COVID-19 telah mengungkapkan bahwa sistem pengadilan kurang siap menghadapi kebutuhan untuk melakukan sidang jarak jauh berskala besar. Namun, mengingat kurangnya investasi dalam layanan pengadilan dan tribunal selama sepuluh tahun terakhir, hal ini tidak sepenuhnya mengejutkan.

Mungkin juga terdapat masalah terkait sejauh mana keadilan yang didukung oleh teknologi bersifat ‘terbuka’ dan ‘transparan’. Pengurangan transparansi dapat dikaitkan dengan penggunaan teknologi yang lebih disruptif dan ketidakjelasan keputusan yang mungkin dibuat sebagai akibat dari bentuk-bentuk AI. Selain itu, bahkan penggunaan beberapa teknologi pendukung dapat mengakibatkan proses yang kurang transparan dan pengurangan akses publik ke sidang pengadilan. Dalam hal ini, platform berbasis web seperti Teams, Skype, Zoom, Google Hangouts dan WebEx dapat menyebabkan peningkatan sidang virtual dengan sedikit akses publik. Konferensi video dan sidang virtual menggunakan platform tersebut telah dianut oleh beberapa sistem pengadilan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Memang, Australia, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Peru dan Tiongkok semuanya telah menggunakan teknologi konferensi video untuk maju dari model kehadiran fisik keadilan tradisional dan sebagai gantinya melakukan sidang secara virtual. Namun, pendekatan yang digunakan sangat bervariasi di setiap yurisdiksi. Beberapa pengadilan tidak menyediakan akses publik ke sidang tersebut, sementara pengadilan lain telah mengunggah tautan YouTube atau tautan audio ke sidang secara langsung. Meskipun tanggapan yang diberikan beragam di setiap yurisdiksi, beberapa pengadilan menyediakan liputan televisi atau internet untuk sidang

tersebut, sementara pengadilan lain telah mengurangi peluang akses yang 'terbuka' dan 'transparan' ke pengadilan.

Misalnya, dalam studi Inggris yang disebutkan di atas terkait dampak pengaturan pandemi COVID-19, jurnalis dan reporter pengadilan memberikan komentar tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan terbuka telah dipengaruhi oleh langkah-langkah COVID-19. Mereka melaporkan 'sebagian besar dapat menghadiri sidang' dan beberapa mengindikasikan bahwa perpindahan ke sidang jarak jauh telah memiliki 'dampak positif' pada jumlah sidang yang dapat mereka liput. Namun, pembuat media lain seperti blogger hukum dan juga masyarakat umum menemukan akses ke pengadilan menjadi 'lebih bermasalah'. CJC juga melaporkan kekhawatiran tentang kesulitan dalam mengakses data kasus untuk memastikan pelaporan yang akurat. Dalam hal ini, 'kekurangan yang ada dalam pengaturan saat ini untuk mengakses informasi hukum utama (daftar, putusan, transkrip dan dokumen kasus jika diizinkan oleh pengadilan)' dicatat oleh CJC sebagai memperburuk krisis saat ini.

Pada saat yang sama, terkait dengan proses pengadilan terbuka, perlu dicatat bahwa selama pandemi COVID-19 CRT di Kanada mampu untuk tetap 'membuka pintunya' sementara banyak pengadilan dan tribunal lain tidak dapat beroperasi atau diharuskan untuk secara signifikan mengurangi layanan yang tersedia. Namun, pengaturan terbuka dalam sistem peradilan yang ditingkatkan secara teknologi mungkin mengorbankan privasi. Khususnya, dalam kerangka yang diusulkan oleh Susskind terdapat sedikit referensi untuk kerahasiaan dan privasi dan isu-isu di bidang ini mungkin sebelumnya tidak mendapatkan banyak perhatian eksplisit mengingat proses berbasis kertas yang sebelumnya beroperasi di sebagian besar pengadilan. Namun, isu-isu tersebut lebih mungkin menjadi relevan ketika perangkat teknologi dipertimbangkan. Misalnya, tinjauan materi yang berkaitan dengan perubahan COVID-19 mengungkapkan bahwa ada beberapa masalah signifikan dengan alat konferensi video seperti Zoom dan Skype yang bisa dibilang memprioritaskan keterbukaan dan kelayakan komersial daripada privasi dan keamanan.

Keadilan proporsional juga diangkat sebagai komponen keadilan penting oleh Susskind. Ada perdebatan di banyak pengadilan tentang bagaimana mendefinisikan istilah ini secara memadai, dan di beberapa yurisdiksi konsep proporsionalitas lebih relevan dan didefinisikan dengan lebih baik daripada di yurisdiksi lain. Bahasa Indonesia: Hal ini mengharuskan 'biaya hukum dan biaya lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan proses hukum diminimalkan dan proporsional dengan kompleksitas atau pentingnya masalah dan jumlah yang disengketakan'. Teknologi jelas dapat berperan dalam mengurangi biaya dan penundaan. Dalam hal ini, dalam litigasi skala besar, ada manfaat berbeda yang dapat diberikan teknologi khususnya dalam pengaturan e-discovery yang dapat membantu mengurangi biaya. Selain itu, aplikasi peradilan dan teknologi lainnya dapat membuat proses peradilan lebih efisien dan mengurangi biaya. Namun, proporsionalitas adalah sebuah konsep yang dieksplorasi lebih komprehensif dalam konteks pengadilan Inggris, dan khususnya tujuan reformasi yang dinyatakan oleh *HM Courts and Tribunals Service* (HMCTS) adalah untuk menciptakan sistem yang 'adil, proporsional, dan dapat diakses oleh semua orang'.

Pusat dari gagasan ini adalah bahwa waktu (dan oleh karena itu biaya) yang dihabiskan untuk suatu sengketa sebanding dengan kompleksitas sengketa tersebut. Penulis mencatat bahwa 'waktu yang dihabiskan' dapat menjadi fungsi dari serangkaian faktor kompleks yang dapat mencakup sikap dan perilaku pihak yang bersengketa dan perwakilan mereka. Pandangan Susskind yang cukup sentralistik juga terlihat jelas dalam artikulasi proporsionalitas. Artinya, ia menganggap pengadilan sebagai tempat di mana keadilan berlangsung dan tidak mempertimbangkan bahwa di banyak yurisdiksi, sengketa sering diselesaikan di luar pengadilan dan sebelum tindakan pengadilan dilakukan. Dalam hal ini, faktor struktural yang berdampak pada ketersediaan opsi penyelesaian sengketa juga akan berdampak pada sejauh mana tujuan proporsionalitas dapat dipenuhi. Bisa dibilang, teknologi yang dapat mendukung pengembangan jalur yang lebih jelas bagi para pihak yang bersengketa atau 'calon' pihak yang bersengketa dapat meningkatkan efisiensi publik dan swasta dan karenanya mendorong hasil yang lebih proporsional.

Namun, jika teknologi tidak berfungsi dengan baik, tidak efektif, tidak dapat dipercaya, atau tidak akurat, terdapat potensi pemborosan waktu dan peningkatan biaya. Dalam hal ini, manfaat yang dicapai oleh beberapa pihak tidak dapat diasumsikan akan dirasakan oleh semua pihak. Sebagai contoh, studi CJC yang disebutkan di atas mengungkapkan bahwa, bagi sebagian pihak, perubahan yang dilakukan akibat COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan waktu dan biaya. Hal ini mungkin bukan hanya disebabkan oleh teknologi yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, CJC mencatat bahwa pihak awam melaporkan kekhawatiran bahwa: 'kurangnya komunikasi dari staf pengadilan' dan 'penurunan jumlah dukungan administratif' secara tidak proporsional memengaruhi pihak awam; banyak pihak awam tidak dapat mengakses teknologi yang sesuai untuk berpartisipasi dalam sidang jarak jauh dan berkomunikasi secara efektif dengan pengacara mereka; dan 'akses terbatas ke nasihat hukum', bersama dengan kesulitan yang terkait dengan 'menavigasi teknologi yang tidak dikenal' memperburuk 'hambatan praktis dan emosional yang sudah ada sebelumnya terhadap partisipasi yang efektif'.

Penyertaan elemen 'keadilan yang dapat ditegakkan' oleh Susskind menarik sebagian karena begitu sedikit pekerjaan empiris yang telah dilakukan tentang sejauh mana orang mematuhi hasil pengadilan. Ketika bekerja di pengadilan pada awal 1990an, penulis ingat betapa terkejutnya dia setelah memeriksa dengan cermat sampel dari 12 bulan proses pengadilan niaga yang diselesaikan bahwa hanya sekitar 50 persen orang yang mematuhi putusan pengadilan. Mereka yang tidak patuh sering kali menghabiskan waktu merestrukturisasi bisnis dan urusan lainnya untuk menghindari atau menunda pembayaran. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hasil yang dimediasi, terutama jika orang-orang memiliki dukungan yang memadai, bisa jauh lebih tinggi (yang tidak mengherankan mengingat hasil tersebut didasarkan pada kesepakatan).

Di beberapa yurisdiksi, alih-alih 'dapat ditegakkan', fokusnya mungkin pada ada atau tidaknya 'kepatuhan' terhadap hasil. Hal ini mungkin memerlukan pertimbangan sejauh mana sistem peradilan telah mendorong perubahan perilaku dan pemahaman yang dapat dikaitkan

dengan sejauh mana orang-orang menerima dan mematuhi hasil yang dicapai dalam sistem peradilan.

Kepatuhan juga relevan dalam konteks gagasan keadilan berkelanjutan yang secara lebih luas dapat merujuk pada pendekatan restoratif dan terapeutik terhadap keadilan yang membutuhkan tingkat empati dan kasih sayang manusia. Meskipun karakteristik manusia ini dapat direplikasi oleh teknologi yang lebih baru (seiring berkembangnya teknologi yang lebih afektif), saat ini sebagian besar sistem teknologi, meskipun telah mengembangkan program analisis sentimen yang lebih berkualitas, tidak mampu melibatkan, memahami, atau merespons dengan empati (dan kemungkinan besar tidak akan mampu melakukannya untuk beberapa waktu). Oleh karena itu, keberlanjutan merupakan konsep yang lebih luas yang dapat berkaitan dengan kepatuhan, pengeluaran biaya publik dan swasta yang sesuai, dukungan dan pengembangan sistem peradilan yang berkelanjutan, dan kecukupan dukungan berkelanjutan untuk sistem tersebut. Selain itu, konsep ini juga dapat mencakup gagasan bahwa teknologi peradilan yang melibatkan AI harus mendukung kesejahteraan dan martabat manusia serta hak asasi manusia agar tujuan keadilan keberlanjutan manusia tercapai.

6.3 AKSES TERHADAP KEADILAN: POTENSI

Pengadilan Daring atau e-Keadilan?

Terdapat banyak bukti bahwa terdapat permasalahan yang luas dan mendunia terkait akses terhadap keadilan. Misalnya, pada tahun 2019 diperkirakan lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia tidak dapat mengakses sistem peradilan untuk membantu mereka menghadapi masalah hukum, dan seringkali mereka yang tidak dapat mengakses sistem peradilan tersebut merupakan anggota masyarakat yang paling terpinggirkan. Di berbagai negara di seluruh dunia, akses terhadap keadilan dianggap sebagai isu yang signifikan, dengan para komentator di Amerika Serikat menunjukkan bahwa:

Setiap tahun, lebih dari 30 juta warga Amerika menghadapi masalah hukum perdata tanpa bantuan pengacara. Banyak permasalahan yang dihadapi individu-individu ini, seperti penagihan utang, pengusuran, penyitaan, hak asuh anak, kebangkrutan, dan klaim disabilitas, dapat memiliki implikasi yang mendalam, bahkan mengubah hidup.

Namun, kemajuan teknologi di sektor peradilan tidak dapat dengan sendirinya memungkinkan akses terhadap keadilan bagi semua orang. Pada dasarnya, jika seseorang tidak melek teknologi, tidak memiliki akses ke perangkat, atau memiliki koneksi internet yang buruk, maka janji akses yang lebih besar terhadap keadilan sebagai hasil dari teknologi baru hanyalah ilusi. Namun, kesenjangan digital menyusut dengan cepat dan bagi sebagian besar orang di negara-negara maju, teknologi dapat memungkinkan akses yang lebih besar terhadap keadilan.

Dengan mengadopsi pandangan sentralis bahwa pengadilan terutama bertanggung jawab atas keadilan, Susskind berpendapat bahwa 'pengadilan daring menawarkan cara yang paling menjanjikan untuk secara radikal meningkatkan akses terhadap keadilan di seluruh dunia'. Di sini, Susskind juga mengajukan argumen moral untuk pengadilan daring, dengan

menyatakan bahwa 'semua manusia apa pun kemampuan, status, kekayaan, dan di mana pun mereka tinggal dan bekerja berhak dan harus diberikan rasa hormat dan martabat yang sama'.

Sebaliknya, komentator lain (termasuk penulis) telah mengadopsi pendekatan yang tidak berfokus pada pengadilan daring dan berpendapat bahwa mungkin ada lebih banyak manfaat dalam pengembangan sistem e-justice yang kohesif. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pendekatan e-justice yang melibatkan pengadilan dapat lebih efektif karena dapat mendukung penyediaan nasihat hukum, triase, ADR dan ODR, serta kapasitas untuk terlibat dengan aplikasi peradilan yang mungkin dapat membantu.

Sejumlah peneliti telah mengeksplorasi manfaat akses terhadap keadilan yang terkait dengan apa yang disebut sebagai 'e-justice'. Kiroogo dan Kitwayiki menjelaskan bahwa e-justice bertujuan untuk 'meningkatkan pemberian layanan dan kolaborasi antara semua pelaku peradilan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi'. Contoh pragmatis penggunaan e-justice diberikan oleh Uni Eropa ('UE'). Sebagaimana disebutkan di atas, UE telah mengembangkan portal e-justice yang dirancang sebagai 'layanan terpadu elektronik masa depan di bidang peradilan'. Sebagai langkah awal, portal ini bertujuan untuk membantu pengguna akhir dengan menyediakan informasi tentang sistem peradilan, termasuk materi penjelasan tentang hukum, sistem peradilan, profesi hukum, proses pengadilan, dan mediasi. Selain itu, portal ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan di seluruh Uni Eropa dengan menawarkan informasi ini dalam 23 bahasa yang berbeda.

Pertumbuhan penggunaan e-justice telah terjadi hampir di seluruh dunia dan seringkali opsi dan platform e-justice berada di luar pengadilan, termasuk opsi pengadilan. Tinjauan literatur mengungkapkan bahwa sejumlah yurisdiksi, termasuk Singapura, Australia, Uganda, Prancis, Brasil, Belgia, dan Portugal, semuanya telah mengadopsi bentuk-bentuk e-justice. Diskusi panel tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ('PBB') dan Unit Rule of Law secara khusus menyoroti manfaat e-justice, termasuk dampak positif dan hubungannya dengan sistem peradilan:

e-justice telah memberikan penghematan finansial dan waktu yang signifikan, sehingga meningkatkan efektivitas proses hukum dan penyampaian keadilan yang tepat waktu ... Pada saat yang sama, akses informasi yang lebih mudah dan dengan demikian transparansi sistem peradilan tidak hanya penting, tetapi juga meningkatkan kualitas peradilan. Akses untuk memantau perkembangan proses hukum, basis data hukum yang berkualitas, dan tersedianya versi publik putusan juga telah memberikan peluang bagi kesadaran dan pengawasan publik, yang meningkatkan akuntabilitas seluruh sistem peradilan. Hal ini telah menciptakan pergeseran ekspektasi publik, khususnya kaum muda.

Namun, penulis mencatat bahwa terdapat sejumlah tantangan terkait penggunaan e-justice. Salah satu kendala yang disoroti oleh PBB adalah kesulitan dalam memastikan validasi dan autentikasi informasi, serta keamanan data. Peningkatan keamanan data tampaknya akan melibatkan peningkatan jenis jaringan yang digunakan untuk mendukung sistem e-justice. Namun, Contini mencatat bahwa peningkatan kompleksitas neural sistem e-justice dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Kueri Contini yang menampilkan aplikasi e-justice

harus memiliki fitur-fitur yang diperlukan agar dapat secara efektif mendukung akses terhadap keadilan tanpa menjadi 'terlalu rumit untuk dikembangkan, terlalu interoperabel untuk dapat dikembangkan, dan terlalu mahal untuk berkelanjutan dalam jangka panjang'. Tantangan spesifik yang terkait dengan mekanisme akses terhadap keadilan dibahas lebih rinci di bawah ini.

Sehubungan dengan akses terhadap keadilan di luar pengadilan yang dapat dikaitkan dengan strategi e-justice, penulis mencatat bahwa salah satu opsi yang diajukan oleh Steven dkk. adalah mendorong donor untuk mendanai dan bermitra dengan 'perantara yang mendukung pengembangan dan penyebaran aplikasi dan platform sumber terbuka yang dapat dengan cepat digunakan oleh para pelaku masyarakat sipil'. Ini adalah proposisi menarik yang juga dapat dikaitkan dengan isu-isu seputar kesenjangan digital, yang akan dibahas lebih rinci nanti di bab ini.

Sejumlah penulis telah berfokus pada opsi keadilan yang ada di luar pengadilan, di mana, banyak aktivitas ODR saat ini berlangsung. Misalnya, Bellucci, Macfarlane dan Zeleznikow telah menyoroti keterjangkauan teknologi daring dibandingkan dengan biaya litigasi atau negosiasi yang berkepanjangan. Lebih khusus lagi, penulis mengamati bahwa ODR dapat menghemat waktu perjalanan dan pengeluaran, selain berkontribusi pada penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi tradisional dan beberapa bentuk ADR.

McGill, Bouclin dan Salyzyn telah mengidentifikasi dua peluang lain di luar mitigasi hambatan finansial yang relevan dengan akses terhadap keadilan: (i) mitigasi hambatan psikologis dan informasional; dan (ii) mitigasi hambatan fisik. Peningkatan akses terhadap keadilan dapat mencakup penghapusan hambatan yang mungkin menghalangi pihak yang dirugikan untuk mengakses proses penyelesaian sengketa.

Misalnya, dalam hal teknologi pendukung, peningkatan akses terhadap keadilan mengalir dari pihak yang 'lebih lemah' dalam sengketa yang dapat menerima informasi dan nasihat hukum yang tepat, sehingga mengatasi ketidakseimbangan kekuatan dan meningkatkan kemungkinan memperoleh penyelesaian yang 'adil' yang dapat terjadi di luar pengadilan. Secara lebih luas, telah diakui bahwa ODR yang berada di luar proses pengadilan dapat memberikan alternatif yang berguna bagi mereka yang dirugikan oleh fakta bahwa 'mekanisme penyelesaian sengketa tradisional menguntungkan orang-orang yang menarik secara fisik, pandai berbicara, berpendidikan tinggi, atau anggota kelompok etnis, ras, atau gender yang dominan'. Rogers juga mencatat bahwa ODR 'menyajikan kemungkinan yang menjanjikan untuk menegaskan kembali otonomi korban, meningkatkan keamanan korban, dan mengurangi dampak norma gender dan ras yang merugikan dalam proses peradilan'. Yang lain telah merujuk pada potensi ODR berkontribusi pada 'peningkatan pemberdayaan klien'.

Akses terhadap Keadilan dan Akses ke Pengadilan Daring

Meskipun pentingnya mempertimbangkan akses terhadap keadilan dalam konteks budaya dan mekanisme yang ada di luar pengadilan, sebagian besar diskusi akses terhadap keadilan di yurisdiksi seperti Inggris dan Amerika Serikat berfokus pada peralihan menuju pengadilan daring. Misalnya, selain akses terhadap keadilan yang lebih terjangkau, Lord Sales

dari Mahkamah Agung Inggris telah menyoroti potensi pengadilan daring untuk menawarkan peningkatan efisiensi dalam sistem peradilan, dan peningkatan pemahaman tentang hak-hak individu. Memang, dalam konteks inilah HMCTS telah menjanjikan penyediaan proses yang direformasi untuk 'mempertahankan atau meningkatkan akses terhadap keadilan'.

Bahkan jika definisi akses terhadap keadilan yang lebih sempit ini sebagai sinonim dengan akses ke pengadilan diterima, terdapat isu-isu mengenai apakah pengembangan pengadilan daring akan cukup untuk menyelesaikan masalah akses terhadap keadilan. Sebagaimana dicatat, Morison dan Harkens telah menyimpulkan bahwa 'aspek sosial' dari pengadilan dan peran yudisial berarti bahwa meskipun teknologi baru dapat mengganggu pola kerja saat ini, teknologi tersebut tidak dapat menghasilkan sistem peradilan jenis baru sendirian. Pada dasarnya disarankan bahwa mengubah pengadilan serta peran dan fungsi yudisial tidak akan, secara terpisah dari perubahan lain pada sektor peradilan dan budaya profesi hukum yang menyertainya, meningkatkan akses atau mendukung sistem peradilan yang lebih efektif atau mudah diakses.

Dalam argumen bahwa pengadilan daring sangat penting dalam hal akses terhadap keadilan, sebagaimana dicatat, Susskind berpendapat bahwa adopsi pengadilan daring memerlukan pemikiran baru dan bahwa gagasan tentang administrasi peradilan sebagai 'bisnis yang secara intrinsik manusiawi' adalah 'klaim emosional dan psikologis, yang sebagian besar dikondisikan oleh pengalaman masa lalu', alih-alih prinsip keadilan atau argumen empiris atau hukum apa pun. Pendekatan ini tampaknya mendukung perkembangan Hakim AI. Namun, penulis mencatat bahwa Hakim AI saat ini tidak dianggap sebagai komponen yang diperlukan dari formulasi akses terhadap keadilan yang berteknologi maju di sebagian besar negara.

Menurut Susskind, setiap keberatan moral terhadap pengadilan daring perlu diseimbangkan dengan manfaat akses terhadap keadilan, dengan keberatan moral yang pada akhirnya dikalahkan oleh 'ketidakadilan yang nyata karena tidak adanya jalan keluar apa pun kepada negara untuk penyelesaian masalah hukum'. Susskind juga menarik hubungan langsung antara akses terhadap keadilan dan supremasi hukum, dengan mencatat bahwa 'ketika hanya minoritas yang menikmati akses ke layanan pengadilan yang luar biasa, kredibilitas seluruh lembaga berisiko dan pada gilirannya, supremasi hukum'.

Sejumlah klaim signifikan tentang kapasitas AI atau sistem otomatis untuk meningkatkan akses terhadap keadilan terkait dengan bagaimana orang dapat terlibat dengan pengadilan, pengacara, dan aktor sistem peradilan lainnya. Misalnya, pejabat pengadilan telah mengakui bahwa teknologi dapat menciptakan jalur baru menuju keadilan, dengan mantan Ketua Mahkamah Agung Kanada, Beverley McLachlin, mendesak profesi hukum untuk menerima kenyataan bahwa beberapa tugas yang secara tradisional dilakukan oleh pengacara sekarang dapat dilaksanakan secara lebih efektif melalui sarana teknologi. Di Australia, Kehakiman Perry dari Pengadilan Federal telah mengamati bahwa sistem otomatis dapat membantu pemohon yang mewakili diri sendiri dalam mengakses keadilan. Di Amerika Serikat, Hakim Agung Utah Deno Himonas telah menyatakan bahwa pengenalan sistem ODR di Pengadilan Gugatan Kecil Utah didasarkan pada komitmen Pengadilan untuk akses terhadap keadilan. Di Inggris Raya, laporan Transformasi Sistem Peradilan kita dari Kementerian

Kehakiman mencatat bahwa digitalisasi proses hukum dimaksudkan untuk memainkan peran utama dalam memastikan bahwa sistem hukum Inggris dan Wales menyediakan 'keadilan yang cepat dan pasti' dengan cara yang 'menghemat waktu dan uang orang, dan mengecilkan dampak proses hukum terhadap kehidupan mereka'.

Sebagaimana juga dicatat, Hakim Perry dari Australia telah menguraikan 'manfaat besar' dari proses otomatis yang terkait dengan pengurangan biaya yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses terhadap keadilan: kemampuan untuk 'memproses data dalam jumlah besar lebih cepat, lebih andal, dan lebih murah daripada rekan manusia mereka'. Namun, bentuk 'akses yang ditingkatkan' ini sebagai hasilnya Penghematan biaya tidak terkait dengan pengembangan pengadilan daring domestik. Artinya, manfaat ini dapat dirasakan oleh para pihak yang berperkara dengan mengurangi jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk memahami permasalahan hukum dan mempersiapkan kasus. Hal ini penting mengingat fakta bahwa sengketa dapat melibatkan interaksi internasional, nasional, dan lokal.

6.4 AKSES TERHADAP KEADILAN: TANTANGAN

Terlepas dari manfaat akses terhadap keadilan yang telah dibahas di atas, beberapa akademisi mempertanyakan apakah perkembangan teknologi di sektor peradilan harus dipandang sebagai solusi mujarab untuk masalah akses terhadap keadilan. Sebagaimana dicatat oleh Bell, terdapat banyak alasan di luar keterjangkauan mengapa orang tidak mengakses pilihan peradilan. Alasan-alasan ini antara lain 'tidak mengetahui adanya masalah hukum, stres atau tekanan pribadi, ketidaknyamanan, ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, atau kurangnya keyakinan terhadap efektivitas sistem'. Bahkan, sebuah laporan Komite Kehakiman Inggris yang berkaitan dengan peralihan ke sidang daring di Inggris sebagai akibat dari pandemi COVID-19 telah menegaskan bahwa pendekatan sidang daring tidak cocok untuk semua orang dan bahwa perpindahan ke komunikasi daring dapat memperburuk kerugian yang dihadapi oleh 'pengguna yang rentan'. Sebagaimana dicatat oleh Komite Kehakiman:

Keterampilan digital yang buruk, akses terbatas ke teknologi, tingkat literasi yang rendah, dan kerugian pribadi yang dialami oleh kelompok tertentu menciptakan hambatan untuk mengakses layanan peradilan digital. HMCTS belum mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang rentan, terutama terkait dengan kurangnya nasihat dan dukungan hukum yang memadai.

Ada juga kekhawatiran bahwa ODR dapat memengaruhi perdebatan akses terhadap keadilan. Menurut McGill, Bouclin, dan Salyzyn, pengganti yang lebih murah dan mudah untuk representasi hukum layanan penuh dapat mengurangi rasa urgensi umum tentang krisis akses terhadap keadilan dan mengalihkan perhatian dari kebutuhan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas layanan hukum dan pengadilan secara langsung.

Mungkin yang paling signifikan, ada kekhawatiran bahwa fokus pada penyelesaian sengketa yang murah dan cepat akan mengorbankan hasil yang adil. Penulis bersama dengan Li dan Burke telah mencatat bahwa, meskipun persepsi keadilan dapat dikaitkan dengan penghematan biaya, fokus pada pengurangan biaya dan penghematan waktu dapat mengakibatkan sistem menjadi kurang 'adil', terutama ketika proses peradilan 'tidak manusiawi'. Sebagaimana dibahas, Condlin juga mempertanyakan apakah 'pemrosesan sengketa yang murah dan efisien merupakan penyerahan diri terhadap kondisi masyarakat modern, alih-alih sistem yang lebih unggul untuk menegakkan keadilan'. Dalam hal ini, juga telah disarankan bahwa sistem ODR yang lebih luas dapat membatasi kemampuan para pihak untuk memperdebatkan manfaat substantif dari Klaim:

Memisahkan sengketa dari substansinya dapat merusak keadilan hasil individual dan, jika meluas, mengancam legitimasi sistem penyelesaian sengketa itu sendiri.

Condlin lebih lanjut mencatat bahwa sistem ODR mungkin mengharuskan para pihak untuk menjelaskan klaim mereka dalam bagian-bagian yang tetap atau telah ditentukan sebelumnya. Akibatnya, terdapat risiko bahwa sistem ODR mungkin tidak mencakup semua dimensi klaim, dan orang-orang mungkin tidak dapat memperoleh kembali nilai klaim secara keseluruhan. Di sisi lain, penulis mencatat bahwa sistem dan proses ODR mungkin tidak hanya berfokus pada proses konsultatif atau determinatif dan bahwa pendekatan fasilitatif mungkin tidak memunculkan isu yang sama.

6.5 KESENJANGAN DIGITAL

Tantangan seputar keberadaan kesenjangan digital juga menjadi inti dari setiap diskusi tentang potensi teknologi baru untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Seiring dengan terus meningkatnya penggunaan internet, sering diasumsikan bahwa orang akan dapat mengakses opsi ODR melalui internet atau menggunakan teknologi pendukung atau teknologi lainnya untuk mengakses sistem peradilan. Namun, keberadaan 'kesenjangan digital' berarti hal ini tidak selalu terjadi. Kesenjangan digital dapat berkaitan dengan akses ke teknologi dan konektivitas internet serta kapasitas untuk menggunakan teknologi yang tersedia. Selain itu, isu kesenjangan digital dapat bervariasi sesuai dengan jenis sengketa atau masalah hukum. Artinya, dalam sengketa komersial, isu kesenjangan digital mungkin tidak signifikan karena para pihak cenderung memiliki pendanaan yang baik, koneksi internet yang baik, dan literasi digital. Namun, dalam sengketa perdata lainnya, isu-isu tersebut mungkin jauh lebih relevan.

Terdapat bukti bahwa kesenjangan digital dalam hal konektivitas internet menyusut seiring dengan meningkatnya akses ke teknologi. Bahkan, pada tahun 2020, ponsel menjadi sarana dominan bagi orang untuk mengakses internet di seluruh dunia. Konektivitas internet juga meningkat, dan Biro Statistik Australia (ABS) mencatat bahwa pada tahun 2016–2017, 87 persen penduduk adalah pengguna internet, dengan ponsel atau ponsel pintar digunakan oleh 91 persen rumah tangga yang terhubung. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 27 juta pelanggan telepon seluler di Australia.

Jumlah pelanggan telepon seluler, dan volume data yang mereka unduh, terus meningkat. Peningkatan konektivitas serupa juga terjadi di yurisdiksi lain. Tiongkok, misalnya, memperoleh akses internet pada tahun 1994. Sejak saat itu, jumlah pengguna internet di Tiongkok telah membengkak, dari 620.000 pada tahun 1997 menjadi 854 juta pada tanggal 30 Juni 2019. Ini adalah yang tertinggi di dunia. Secara global, diperkirakan bahwa 62,6 persen dari populasi dunia, atau 4,78 miliar orang, adalah pengguna ponsel pada tahun 2020. Penggunaan ponsel pintar untuk mengakses sistem peradilan juga dapat berarti bahwa cara sistem tersebut dipersepsikan dapat berubah. Misalnya, Dysart juga mengamati bahwa meskipun teknologi dan pengadilan dapat mengintimidasi klien, mereka sering kali berpengalaman dalam penggunaan ponsel pintar, dan peralihan ke ponsel pintar oleh karena itu dapat mengubah cara orang memandang e-justice atau pengadilan daring.

Namun, bahkan dengan akses yang lebih luas ke teknologi, banyak orang di negara maju dan berkembang dapat menghadapi kesulitan dalam menggunakan teknologi. Cabral dkk. Jelaskan bahwa kesenjangan digital ‘melembagakan sistem dua tingkat yang tidak mampu memberikan keadilan yang tepat kepada orang-orang berpendapatan rendah’. Namun, sebagaimana diuraikan oleh Toohey dan rekan-rekan, bukan hanya individu dari komunitas sosial ekonomi rendah yang mungkin mengalami kesulitan mengakses layanan digital. Misalnya, di negara-negara berbahasa Inggris, individu penyandang disabilitas, penduduk asli, dan mereka yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua juga dapat menghadapi kesulitan khusus dalam mengakses teknologi. Penulis bersama dengan Li dan Burke, juga telah mengidentifikasi kesiapan yang ‘tidak merata’ untuk mengadopsi teknologi baru yang dapat dikaitkan dengan lokasi geografis, usia, keadaan ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat dikaitkan dengan kerentanan. Oleh karena itu, setiap implementasi teknologi keadilan yang berarti memerlukan pertimbangan hambatan sosial ekonomi dan hambatan lainnya terhadap akses teknologi.

Masalah literasi digital juga menjadi tantangan ketika mempertimbangkan akses terhadap keadilan yang didorong oleh teknologi-teknologi baru. Di sini, pertanyaan dapat muncul, apakah individu lanjut usia merasa nyaman menggunakan teknologi, atau apakah penyelesaian sengketa yang ditingkatkan dengan teknologi lebih cocok untuk populasi yang lebih muda dan lebih melek teknologi. Misalnya, Giddings dan Robertson telah melaporkan bahwa mungkin terdapat masalah dan ekspektasi budaya seputar penggunaan jasa pengacara, sehingga lansia cenderung tidak memanfaatkan opsi-opsi swadaya. Dalam hal ini, masalah budaya, berbeda dengan masalah literasi digital, dapat mencegah lansia menggunakan teknologi untuk mengakses sistem peradilan.

Sebuah laporan tahun 2008 yang disusun untuk Law Foundation of Ontario menemukan bahwa ‘internet dan solusi berbasis teks lainnya memiliki kegunaan yang terbatas bagi orang-orang yang tidak memiliki keterampilan literasi untuk menggunakannya atau menggunakannya secara efektif’. Laporan tersebut memperingatkan bahwa ‘orang-orang yang rentan, karena mereka menghadapi hambatan bahasa, isolasi, kemiskinan, atau serangkaian kesulitan lain yang sering menyertai masalah hukum, idealnya perlu menerima layanan

langsung daripada bergantung pada swadaya [melalui sumber daya digital atau berbasis kertas]’.

Bailey, Burkell, dan Reynolds juga mencatat bahwa ada kebutuhan untuk menyesuaikan desain perangkat teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan guna memastikan bahwa perangkat tersebut tidak memperburuk kesenjangan akses terhadap keadilan bagi penerima manfaat yang dituju. Mereka menyarankan bahwa strategi desain tersebut dapat mencakup penggunaan bahasa yang sederhana, ketersediaan konten dalam berbagai format bahasa, dan fitur desain untuk mengakomodasi gangguan penglihatan dan gangguan fisik lainnya. Size juga mencatat bahwa seiring dengan semakin menjadinya teknologi sebagai fitur litigasi, pengadilan perlu untuk menyediakan perangkat bagi penggugat yang mewakili diri sendiri yang tidak mampu membayarnya sendiri, dan harus siap memberikan pelatihan dan bantuan. Dalam hal ini, kemungkinan besar layanan suara-ke-teks dan teks-ke-suara yang lebih efektif dapat lebih membantu berbagai populasi yang saat ini mungkin kurang terwakili atau tidak didukung dalam sistem peradilan.

Ada juga kekhawatiran bahwa otomatisasi dapat mengakibatkan sistem peradilan 'dua tingkat', karena mereka yang tidak mampu membayar pengacara 'asli' terpaksa 'bertahan' dengan opsi otomatis. Kekhawatiran ini mungkin juga memperluas risiko sebaliknya, bahwa orang tidak akan mampu membayar opsi otomatis (yang bisa lebih unggul daripada pengacara 'manusia') dan menyoroti fakta bahwa sebagian masyarakat mungkin tidak mampu membayar pengacara 'asli' atau alternatif otomatis. Isu terkait yang lebih relevan dalam konteks Hakim AI adalah bahwa penggugat yang lebih kaya dan firma hukum besar dengan dukungan teknologi yang lebih unggul mungkin dapat "memanipulasi" sistem dan diuntungkan dibandingkan penggugat lain dengan kapasitas lebih rendah untuk menyajikan materi yang mungkin memuaskan Hakim AI. Hal ini, pada kenyataannya, dapat memperlebar disparitas yang ada saat ini.

Ketika teknologi pendukung digunakan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa bukti mengenai dampak kesenjangan digital terkait pengaturan pandemi COVID-19 di Inggris. Jelas bahwa peralihan ke sidang jarak jauh telah mengubah konteks pelaksanaan pekerjaan di seluruh sistem peradilan sipil di Inggris secara signifikan. Kemampuan para pihak yang berperkara untuk mengajukan kasus mereka secara langsung telah dibatasi, demikian pula kapasitas orang-orang yang rentan untuk berpartisipasi dalam sidang pengadilan selama masa ini. Akibatnya, jenis kasus yang diproses melalui pengadilan sangat terdampak. Misalnya, dalam studi CJC, ketika responden survei pengacara ditanya tentang sidang jarak jauh terbaru yang mereka ikuti (total 480 sidang), data mengungkapkan bahwa 47,3 persen sidang jarak jauh memiliki nilai moneter £50.000,00 atau lebih. Hanya 2,9 persen yang terkait dengan masalah perumahan dan 1,2 persen berkaitan dengan utang. Selain itu, dari sedikit sidang yang melibatkan penggugat secara langsung (10,9 persen), lebih dari setengahnya terkait dengan kasus dengan nilai moneter kurang dari £10.000,00. Dalam hal ini, CJC mencatat bahwa:

Temuan ini menunjukkan bahwa proporsi orang-orang rentan dan penggugat secara langsung yang berpartisipasi dalam sidang jarak jauh mungkin ditekan secara artifisial oleh langkah-langkah COVID-19, dengan implikasi untuk temuan mengenai efektivitas sidang jarak jauh sidang.

Bailey, Burkell, dan Reynolds juga mencatat bahwa terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan desain perangkat teknologi yang bertujuan meningkatkan akses terhadap keadilan agar memastikan perangkat tersebut tidak memperburuk kesenjangan akses terhadap keadilan bagi penerima manfaat yang dituju. Dalam studi CJC, responden survei juga melaporkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan untuk membatasi penyebaran COVID-19 telah menyebabkan berkurangnya ketersediaan nasihat dan bantuan hukum. Hal ini khususnya terjadi bagi individu dengan status sosial ekonomi rendah. CJC mencatat bahwa hal ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan di antara responden bahwa, sebagai akibat dari dampak ekonomi pandemi, kebutuhan akan nasihat hukum akan meningkat secara substansial. Bahkan, tercatat bahwa kebutuhan ini akan terus berlanjut bahkan setelah dampak langsung COVID-19 mereda. CJC mencatat bahwa kekhawatiran ini menyebabkan responden "berulang kali menekankan" "urgensi" pembentukan kelompok kerja profesional untuk mengembangkan cara-cara mengatasi penumpukan perkara ini.

Urgensi situasi ini semakin ditekan oleh tanggapan pihak awam terhadap survei daring yang dilakukan oleh CJC. Konsistensi tematik dalam tanggapan pihak awam terkait dengan menurunnya kemampuan untuk mengakses layanan hukum dari jarak jauh. CJC juga mencatat bahwa pihak awam mengalami kesulitan terkait dengan 'menavigasi teknologi yang tidak familiar', yang memperburuk 'hambatan praktis dan emosional yang sudah ada sebelumnya terhadap partisipasi yang efektif'.

CJC lebih lanjut mencatat bahwa hampir separuh (44,7 persen) responden survei melaporkan mengalami kesulitan teknis selama sidang jarak jauh mereka. Dari kesulitan teknis tersebut, 30,4 persen responden melaporkan bahwa 'tidak ada yang memberikan dukungan teknis'. Selain itu, ketika pengacara diminta untuk membandingkan sidang audio dan video dengan sidang tatap muka, CJC mencatat bahwa responden cenderung menganggap sidang jarak jauh sebagai 'lebih buruk', 'kurang efektif', dan 'lebih melelahkan' daripada sidang tatap muka. Temuan ini menyoroti perlunya infrastruktur pendukung yang tersedia di tempat teknologi sedang dikembangkan, diuji coba, dan digunakan, dan juga menunjukkan bahwa opsi 'manusia' perlu dipertahankan. Namun, CJC menemukan bahwa mayoritas pengacara yang menyelesaikan survei 'puas dengan pengalaman mereka dalam sidang jarak jauh'. Sebanyak 71,5 persen menyatakan bahwa pengalaman mereka 'positif' atau 'sangat positif'. Lebih lanjut, 86,9 persen responden menyatakan bahwa mereka akan merekomendasikan partisipasi dalam sidang jarak jauh kepada rekan kerja dan klien mereka. CJC mengidentifikasi 'pendorong' kepuasan pengacara terhadap sidang jarak jauh meliputi:

Menyetujui hasil sidang; tidak mengalami kesulitan teknis; berpartisipasi dalam sidang video penuh (dibandingkan dengan sidang audio); memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam sidang jarak jauh; berpartisipasi dalam sidang di awal krisis; dan

berpartisipasi dalam sidang yang tidak melibatkan pihak yang berperkara secara langsung.

CJC juga menyarankan bahwa teknologi pendukung yang memungkinkan kehadiran jarak jauh di acara pengadilan mungkin lebih sesuai untuk beberapa jenis sidang pengadilan daripada yang lain. Misalnya, sidang biaya yang dilakukan melalui konferensi video lebih mungkin dipersepsikan secara positif oleh pengacara dibandingkan dengan sidang sela. Lebih lanjut, data tersebut mengungkapkan bahwa sidang penegakan hukum, banding, dan persidangan cenderung tidak dipersepsikan secara positif dibandingkan dengan sidang sela. Hasil tersebut mendorong CJC untuk merekomendasikan agar sidang jarak jauh dicadangkan 'untuk perkara-perkara yang hasilnya kemungkinan kecil akan digugat, di mana sidang tersebut bersifat sela, dan untuk sidang di mana kedua belah pihak diwakili'.

Pengalaman ini dapat dibandingkan dengan pengalaman di AS di mana di satu pengadilan telah dilakukan upaya ekstensif untuk mendukung para pihak yang berperkara:

Di Distrik Peradilan ke-4, yang merupakan bagian paling utara New York, pengadilan membangun kios virtual di dekat pintu masuk agar para pihak yang mewakili diri sendiri dapat berpartisipasi dalam sidang pengadilan virtual dan menerima bantuan konferensi video langsung dari pegawai pengadilan. 'Kios-kios ini menyediakan akses keadilan bagi para penggugat yang tidak memiliki peralatan komputer atau akses internet yang diperlukan, terutama di daerah pedesaan di negara bagian kami di mana layanan internet seringkali tidak tersedia,' kata Ketua Hakim DiFiore.

6.6 KESIMPULAN

Munculnya teknologi baru dan penggunaan kembali teknologi yang sudah ada dalam sektor peradilan jelas menciptakan peluang tambahan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Keuntungan ini muncul melalui pengurangan biaya dan penundaan serta penghapusan hambatan fisik, psikologis, dan informasional terhadap keadilan. Beberapa manfaat yang kurang terlihat antara lain pemberdayaan para pihak yang bersengketa, demystifikasi lembaga hukum, dan penyediaan bantuan yang lebih holistik kepada pihak yang bersengketa dan pihak lainnya. Pada saat yang sama, terdapat isu mengenai apakah teknologi dapat dipandang sebagai obat mujarab untuk masalah akses terhadap keadilan. Artinya, terdapat risiko signifikan bahwa fokus pada pengurangan biaya dan penghematan waktu, bersama dengan 'dehumanisasi' proses peradilan, dapat menyebabkan sistem peradilan menjadi kurang 'adil'.

Dalam hal disparitas teknologi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan digital telah berkurang seiring dengan berkembangnya teknologi yang lebih sederhana, peningkatan akses internet di seluruh komunitas, dan peningkatan kompetensi serta preferensi teknologi. Namun, meskipun kesenjangan digital tidak lagi menjadi isu yang signifikan seperti sebelumnya, masih terdapat isu-isu terkait penggunaan dan akses teknologi. Secara khusus, penelitian dari Inggris menunjukkan bahwa masalah kesenjangan digital dapat

mengakibatkan 'ketidakadilan', terutama jika tingkat dukungan manusia yang memadai tidak dipertahankan.

Terdapat pula manfaat akses keadilan yang lebih menyeluruh yang dapat dipertimbangkan terkait penggunaan teknologi. Secara internasional, telah diakui bahwa teknologi dapat menciptakan jalur baru menuju keadilan, dan terkait di mana dan bagaimana pengadilan dan hakim ditempatkan dalam sistem peradilan baru ini, terdapat beberapa isu menarik. Misalnya, teknologi melalui penciptaan portal e-justice dapat berarti bahwa pengadilan dan hakim tidak berada di pusat sistem ini (seperti yang dapat dikatakan sudah terjadi di banyak sistem peradilan). Munculnya aplikasi, platform, dan portal peradilan dapat semakin berarti bahwa pengadilan ditempatkan sebagai 'pilihan terakhir'. Hubungan antara pengadilan, hakim, dan bagian lain dari sistem akan memerlukan pemikiran ulang karena pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan terhadap keadilan memerlukan pendekatan kolaboratif terhadap desain sistem peradilan.

Selain itu, keunggulan e-justice atau peradilan yang didukung teknologi dapat berbeda-beda tergantung lokasinya. Misalnya, peningkatan penggunaan aplikasi peradilan dapat menghasilkan akses yang lebih mudah ke informasi, nasihat hukum, bimbingan dan dukungan. Demikian pula, peningkatan penggunaan konferensi video jarak jauh untuk mendukung ODR dapat menghasilkan penghematan biaya dan waktu. Bentuk-bentuk AI dapat membantu orang dalam lebih memahami dan menguraikan pengaturan keuangan dan teknologi prediktif dapat memungkinkan orang untuk menyelesaikan perselisihan dengan lebih memahami potensi hasil litigasi. Hakim AI dapat berarti bahwa masalah pengadilan yang lebih sederhana dapat ditangani secara proporsional. Namun, solusi teknologi bukanlah jawaban 'satu ukuran untuk semua' untuk meningkatkan akses ke keadilan. Risiko tetap ada yang dapat dikurangi dengan memastikan bahwa tujuan keadilan diartikulasikan dengan baik, desain sistem mencakup fokus manusia, dan ketentuan selalu dibuat untuk pengawasan, pemantauan, evaluasi dan revisi manusia.

Digitalisasi catatan pengadilan juga memberikan peluang untuk melacak dan memahami dengan lebih baik apa yang terjadi di dalam pengadilan. Hal ini sendiri merupakan manfaat yang signifikan karena ada potensi yang lebih besar untuk memahami siapa yang menggunakan sistem pengadilan, bagaimana sistem pengadilan digunakan dan mengapa. Informasi yang dapat diungkapkan oleh studi data dasar jika catatan pengadilan didigitalkan dengan tepat (semoga dengan kemudahan penggunaan pengarsipan yang disertakan) akan lebih mendukung pengadilan dan hakim di masa depan dalam perencanaan dan operasi umum. Jika, misalnya, sebuah studi data mengungkapkan bahwa sebagian dari populasi tidak mengakses pengadilan sipil, ini dapat menunjukkan masalah hilir dengan representasi atau informasi, atau bahkan masalah yang lebih luas terkait dengan kepercayaan pada pengadilan dan hakim.

BAB 7

HAKIM, TEKNOLOGI, DAN INDEPENDENSI PERADILAN

7.1 PENDAHULUAN

Beberapa isu yang muncul dalam konteks bagaimana hakim bekerja dengan teknologi yang lebih baru terkait dengan hubungan yang ada antara peradilan dan 'cabang' pemerintahan lainnya. Di sebagian besar negara demokrasi, konsep pemisahan kekuasaan (kadang-kadang disebut sistem Westminster di Inggris) dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada cabang pemerintahan yang menjadi terlalu kuat. Dalam sistem tersebut, peradilan adalah salah satu dari tiga cabang pemerintahan yang terdiri dari yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Cabang peradilan dimaksudkan untuk mendukung sistem pengawasan dan keseimbangan, untuk menegakkan persyaratan legislatif, dan juga untuk mendukung legalitas dan kepatutan pengambilan keputusan pemerintah. Meskipun beberapa orang mungkin mempertanyakan sejauh mana doktrin ini realistis, pengaturan konstitusional dapat mensyaratkan bahwa masing-masing dari ketiga 'lengan' pemerintahan memiliki peran yang berbeda dan berfungsi secara independen satu sama lain.

Dalam konteks inilah kekhawatiran mengenai Hakim AI mungkin muncul. Sebagian besar komentator berpendapat bahwa inti dari pembentukan dan pemeliharaan supremasi hukum adalah konsep bahwa peradilan tetap independen, dan sejauh mana lembaga peradilan 'independen' mungkin dipertanyakan, terutama jika lembaga pemerintahan lain terlibat dalam pembentukan Hakim AI. Prinsip utama independensi peradilan yang juga ditentang oleh Hakim AI berkaitan dengan bagaimana seorang Hakim AI benar-benar dapat dikatakan berfungsi sebagai 'pengawas' yang signifikan terhadap cabang eksekutif dan legislatif pemerintah. Misalnya, Zalnieriute dan Bell telah mengidentifikasi potensi otomatisasi untuk melemahkan independensi peradilan dari campur tangan atau perampasan oleh cabang pemerintahan lainnya. Menurut Michaels:

Argumen untuk hakim otomatis mengabaikan peran pemisahan kekuasaan peradilan yang dirancang secara konstitusional sebagai pengawas terhadap dua cabang lainnya. Artinya, argumen-argumen ini menyajikan pandangan yang sangat sempit tentang peran peradilan, seolah-olah berasumsi bahwa satu-satunya peran peradilan adalah menerapkan hukum secara robotik pada fakta-fakta. Meskipun otomatisasi mungkin lebih tepat dalam proses peradilan di tingkat lembaga atau aspek lain dari cabang eksekutif, peran pemisahan kekuasaan yudikatif membuat otomatisasi yang diusulkan menjadi sangat bermasalah.

Selain itu, 'pengadilan' daring yang dibentuk sebagai tribunal atau entitas terpisah juga dapat menimbulkan masalah independensi, terutama jika dikembangkan dan dikelola tanpa pengawasan atau pemantauan yudisial. Baik pengadilan daring maupun Hakim AI juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang sejauh mana independensi yudikatif didukung ketika

proses pengadilan tidak 'terbuka'. Dalam hal ini, independensi yudikatif, imparialitas, dan pengadilan 'terbuka' sering dianggap penting untuk menjaga supremasi hukum. Lebih lanjut, beberapa komentator menganggap bahwa pengembangan pengadilan daring yang melibatkan penyelesaian sengketa daring (ODR) merupakan potensi pelanggaran terhadap independensi yudikatif dengan membatasi perkara yang dapat diajukan ke hadapan hakim atau dengan cara lain memengaruhi kegiatan pengadilan dan oleh karena itu hakim.

Pengaturan AI untuk Hakim yang Mendukung juga dapat dianggap bermasalah di beberapa negara, terutama jika dukungan tersebut dianggap memiliki pengaruh yang 'tidak pantas' terhadap hakim. Misalnya, di Inggris telah dicatat bahwa:

Dalam menjalankan fungsi peradilanannya, mereka harus bebas dari pengaruh yang tidak pantas. Pengaruh tersebut dapat berasal dari berbagai sumber. Pengaruh tersebut dapat muncul dari tekanan yang tidak pantas oleh eksekutif atau legislatif, oleh masing-masing pihak yang berperkara, kelompok penekan tertentu, media, kepentingan pribadi, atau hakim lain, khususnya hakim yang lebih senior.

Misalnya, dapat dikatakan bahwa independensi peradilan terancam oleh sistem otomatisasi parsial jika sistem tersebut dianggap memberikan 'tekanan' kepada hakim. Tekanan semacam itu dapat muncul ketika putusan peradilan dipantau, diperiksa, atau ditinjau oleh sistem AI (seperti di Tiongkok). Namun, perlu dicatat bahwa sejumlah negara tidak memiliki pendekatan pemisahan kekuasaan yang jelas dan faktor ini saja dapat berarti bahwa perkembangan terkait pengadilan daring dan Hakim AI akan bervariasi sesuai dengan penekanan domestik yang diberikan pada independensi peradilan. Misalnya, sebelum reformasi konstitusi tahun 1982 dilakukan di Tiongkok, partai komunis diharapkan akan menyetujui semua putusan pengadilan. Reformasi tahun 1982 masih mensyaratkan adanya persetujuan partai atas putusan peradilan saat ini terkait dengan 'masalah politik dan sensitif'.

Di beberapa yurisdiksi, terdapat isu-isu yang berkelanjutan dan signifikan terkait independensi peradilan. Isu-isu ini seringkali terkait dengan cara hakim dapat menggugat keputusan eksekutif, tingkat keterlibatan politik peradilan, dan kecukupan pendanaan pengadilan, serta dapat mengakibatkan komentar media dan politik. Di Polandia, misalnya, isu independensi peradilan telah mendorong Uni Eropa untuk mengambil tindakan terkait ancaman terhadap independensi peradilan serta kampanye politik ekstensif yang menyasar para hakim. Isu-isu ini dapat berarti bahwa di beberapa yurisdiksi, upaya untuk mengganti hakim manusia dengan Hakim AI lebih mungkin terjadi.

World Justice Project, yang memeringkat negara-negara berdasarkan dukungan mereka terhadap supremasi hukum, memberikan banyak bukti untuk proposisi bahwa banyak negara mungkin tidak memiliki peradilan yang independen maupun imparial. Dalam keadaan seperti itu, Hakim AI mungkin merupakan pilihan yang jauh lebih mudah diterima, dan pengadilan daring yang dirancang dan dikelola oleh badan eksekutif pemerintah mungkin tidak menimbulkan masalah yang signifikan. Namun, perlu dicatat, Estonia yang sebagaimana

sedang membangun sistem peradilan AI menempati peringkat tinggi dalam Tabel Peringkat World Justice Project.

Variasi dalam hal penerimaan yurisdiksi atas independensi peradilan ini dapat berarti bahwa di beberapa negara akan ada pengembangan pengadilan daring dan Hakim AI yang lebih ekstensif. Hal ini menimbulkan risiko karena dapat diasumsikan bahwa reformasi di satu yurisdiksi dapat diterapkan ke yurisdiksi lain tanpa mempertimbangkan persyaratan yurisdiksi lokal.

7.2 PENGADILAN ONLINE DAN HAKIM AI

Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat pertanyaan yang muncul akibat pembentukan pengadilan daring dalam hal pemisahan kekuasaan. Namun, beberapa isu yang muncul akibat pengembangan pengadilan daring dan Hakim AI terkait dengan kekhawatiran terkait peran hakim dan sejauh mana mereka harus menjalankan tugas-tugas 'non-yudisial'. Isu-isu lain yang diangkat oleh aktivitas ODR mencakup apakah aktivitas pengadilan daring dapat mencakup aktivitas yang dapat dianggap non-yudisial atau, sebagai alternatif, aktivitas yang tidak diawasi atau dipantau secara memadai oleh lembaga peradilan.

Susskind, dalam mempertimbangkan perkembangan pengadilan daring, mencatat bahwa fungsi 'pengadilan yang diperluas' dalam model yang diusulkannya menyediakan layanan yang jauh melampaui peran tradisional pengadilan dalam pengambilan keputusan pengadilan. Susskind dengan jelas membedakan antara fungsi 'utama' dan 'sekunder' pengadilan daring: 'penyediaan keputusan pengadilan yang berwibawa, mengikat, dan tidak memihak harus dan akan tetap menjadi fungsi utama pengadilan', dan dibatasi pada Tingkat 3 pada model Susskind. Layanan yang diperluas dimaksudkan untuk disediakan oleh cabang eksekutif pemerintah dan disajikan sebagai ketentuan sekunder serta terbatas pada pengadilan Tingkat 1 dan 2. Dengan demikian, 'hakim sama sekali tidak terlibat dalam penyediaan layanan di pengadilan yang diperluas ... sehingga independensi dan pemisahan tetap terjaga'.

Sehubungan dengan kegiatan Tingkat 1 dan Tingkat 2 Susskind, masih terdapat pertanyaan tentang sejauh mana kegiatan tersebut diatur atau dapat diatur dan didukung oleh eksekutif, alih-alih yudikatif dan seberapa realistiskah untuk menganggap bahwa kegiatan tersebut dapat 'dipisahkan'. Jika pengaturan Tingkat 1 dan 2 difokuskan pada ODR, dan berlangsung tanpa pengawasan yudisial, kemungkinan besar pengaturan tersebut akan dianggap independen dari fungsi yudisial dan pengadilan.

Secara khusus, pengaturan Tingkat 1 dan Tingkat 2 yang direnungkan oleh Susskind yang dioperasikan oleh eksekutif menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang apa itu 'pengadilan' dan apakah 'pengadilan' memerlukan keterlibatan dan pengawasan yudisial. Penulis berpendapat bahwa pengaturan semacam itu mungkin tidak memenuhi definisi 'pengadilan' di beberapa yurisdiksi karena kurangnya pengawasan yudisial. Pendekatan Susskind juga berbeda dari pendekatan di banyak negara di mana pengadilan elektronik atau pengadilan daring merupakan bagian dari pengaturan pengadilan yang sudah ada yang diawasi dan dijalankan oleh hakim. Pengadilan daring ini dapat mencakup fungsi ODR yang

berlangsung di dalam pengadilan atau beberapa pengaturan ODR dapat dipisahkan secara lebih jelas dari pengadilan.

Terdapat perbedaan yurisdiksi lainnya. Misalnya, banyak tribunal di yurisdiksi seperti Australia saat ini menggabungkan pengaturan daring yang mencakup ODR. Namun, badan-badan tersebut tidak diakui sebagai 'pengadilan', sebagian karena mereka mungkin tidak menggabungkan manajemen entitas oleh pejabat pengadilan dan juga karena mereka mungkin dikelola oleh orang-orang yang ditunjuk melalui berbagai proses, dengan masa jabatan yang lebih pendek, yang mungkin tidak dianggap independen dan oleh karena itu tidak didefinisikan sebagai 'hakim'. Respons lain oleh pemerintah yang berfokus pada teknologi di sektor peradilan mencakup pembentukan Tribunal baru yang secara khusus berfokus pada penggunaan teknologi untuk mendukung peradilan (seperti CRT di Kanada) atau fokus pada proses pra-tindakan yang mewajibkan ODR sebelum proses pengadilan dapat dimulai.

Isu-isu yang diangkat oleh pergeseran Susskind menuju pengadilan daring yang tidak melibatkan manajemen atau pengawasan peradilan pada dua tingkat pertama dari model pengadilan yang diperluasnya sangat banyak. Misalnya, terdapat pertanyaan penting mengenai legitimasi, kewenangan, dan efektivitas pengadilan daring yang beroperasi tanpa hakim dan tanpa pengawasan yudisial. Perubahan ini juga berpotensi berdampak pada peran dan fungsi peradilan di masa mendatang, karena, sebagaimana ditunjukkan Susskind, hanya fungsi peradilan yang dipertahankan pada Tingkat 3 (dan itu pun hanya sebagai tahap awal sebelum Hakim AI dikembangkan dan mengarah pada penggantian peradilan).

Tidak diragukan lagi, pertimbangan pengaturan khusus di Inggris Raya, ditambah dengan persepsi hakim dan aktivitas peradilan, telah mendorong usulan pemisahan oleh Susskind. Kerangka kerja IAALS memang mengasumsikan bahwa ODR dan perluasan e-court dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan manajemen perkara yang telah direvisi dan dirumuskan ulang dalam kerangka kerja peradilan yang ada. Pengaturan semacam itu tampaknya tidak akan menimbulkan masalah terkait legitimasi dan kewenangan di sebagian besar yurisdiksi.

Pengaturan Tingkat 3 yang direncanakan oleh Susskind, yang pada akhirnya dimaksudkan untuk menggabungkan Hakim AI, menimbulkan masalah tambahan terkait pemisahan kekuasaan. Terkait dengan pengaturan yang berhubungan dengan 'penyediaan keputusan peradilan yang berwenang, mengikat, dan tidak memihak', Susskind mencatat bahwa meskipun generasi pertama layanan pada tingkat ini melibatkan hakim manusia (namun tidak di ruang sidang fisik tradisional), ia membayangkan generasi kedua di mana penentuan keputusan dilakukan oleh suatu bentuk AI.

Pada tingkat Tier 3 yang lebih maju inilah pertanyaan tentang bagaimana Hakim AI dikembangkan, sejauh mana hakim terlibat dalam pengembangan tersebut, dan kapasitas hakim manusia untuk memantau, mengevaluasi, dan meninjau keputusan menjadi lebih relevan. Intinya, jika sistem dirancang oleh eksekutif alih-alih hakim, dan pembelajaran mesin serta kumpulan data ditentukan oleh pihak di luar peradilan, terdapat isu substantif tentang apakah pemisahan kekuasaan telah dipertahankan atau tidak. Selain itu, ketika Hakim AI digunakan, bahkan jika cabang eksekutif pemerintah memiliki sedikit atau tidak ada dampak

pada pengembangan Hakim AI, apakah pengaturan semacam itu konsisten dengan persyaratan politik dan konstitusional yang ada terkait peradilan yang independen? Dapatkah seorang hakim AI dianggap sebagai bagian dari peradilan yang independen?

Meskipun perkembangan tersebut lebih berlaku untuk kegiatan peradilan daripada kegiatan lain yang dapat dilakukan di pengadilan daring, perkembangan tersebut menunjukkan potensi masalah konstitusional yang mungkin muncul di beberapa negara ketika kegiatan peradilan diubah, mungkin melalui cara otomatis atau ketika pengambilan keputusan diinformasikan oleh bentuk-bentuk AI. Dengan kata lain, dapatkah penggunaan bentuk AI yang lebih luas dianggap tidak sesuai dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman?

Beberapa isu serupa telah muncul dalam konteks penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yudisial, dengan berbagai yurisdiksi mengambil pendekatan yang berbeda-beda terhadap apa yang mungkin dianggap sebagai aktivitas peradilan yang dapat diterima, dan kemungkinan besar yurisdiksi yang berbeda akan menanggapi setiap pertanyaan ini secara berbeda. Misalnya, meskipun tidak sepenuhnya analog, perlakuan aktivitas peradilan dalam konteks ADR memang menyoroti variasi yurisdiksi yang signifikan. Dalam hal ini, aktivisme peradilan dalam proses penyelesaian tampaknya lebih dapat diterima di Amerika Serikat daripada di Australia. Di negara-negara seperti Jepang dan Tiongkok, hakim sering terlibat dalam aktivitas ADR yang dianggap sebagai bagian dari fungsi peradilan. Sebaliknya, di Australia, dalam kasus *Wardman v Macquarie Bank Limited* [2019] FCCA 939, Hakim Dowdy menolak untuk menunjuk dirinya sendiri, atau Hakim Sirkuit Federal lainnya, sebagai mediator meskipun memiliki wewenang untuk melakukannya berdasarkan Aturan 45.13B dari *Aturan Pengadilan Sirkuit Federal* 2001 (Cth). Yang Mulia berpendapat bahwa akan melanggar doktrin ketidaksesuaian konstitusional yang berlaku di Australia untuk membedakan hakikat mediasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Secara khusus, Yang Mulia menekankan bahwa bertemu dengan para pihak secara tertutup, menyampaikan pandangan sementara mengenai kekuatan argumen hukum para pihak dan terlibat dengan masalah-masalah non-hukum yang sering muncul selama mediasi, merupakan tindakan yang tidak dapat diterima bagi seorang pejabat peradilan Federal Australia.

Pendekatan yurisdiksi yang beragam terhadap penggunaan ADR oleh hakim menunjukkan bahwa akan ada juga variasi dalam respons yurisdiksi terhadap Hakim AI, dengan beberapa yurisdiksi mengadopsi pandangan bahwa Hakim AI atau bahkan mungkin Hakim AI yang mendukungnya 'tidak sesuai' dengan penggunaan kekuasaan kehakiman. Penulis mencatat bahwa ini tidak berarti bahwa pengadilan daring yang mendukung ODR akan bermasalah. Dengan menggunakan analogi ADR, penulis mencatat bahwa saat ini, di banyak pengadilan, di mana proses ADR digunakan, di yurisdiksi seperti Inggris dan Australia, hal ini kemungkinan akan dipisahkan dari fungsi peradilan. Namun, fungsi-fungsi ini mungkin masih 'diawasi' oleh pengadilan dan hakim, yang pada akhirnya bertanggung jawab atas kegiatan pengadilan.

Ada isu-isu lain yang terkait dengan independensi peradilan yang tidak terkait dengan potensi kendali atau campur tangan eksekutif. Misalnya, ada kekhawatiran mengenai jangkauan digital yang berlebihan karena banyak perusahaan digital mungkin tidak memahami

gagasan demokrasi maupun supremasi hukum dan dapat membentuk kembali kegiatan peradilan dengan cara yang tidak terduga. Misalnya, Paul Nemitz telah mencatat:

Klaim eksplisit maupun implisit [dari perusahaan digital, aktivis, dan pemrogram] bahwa anggota parlemen dan pemerintah tidak memahami internet dan teknologi baru seperti AI, sehingga tidak memiliki legitimasi untuk menetapkan aturan terkait hal tersebut, tidak diimbangi dengan refleksi diri tentang betapa minimnya pemahaman para teknolog tentang demokrasi dan fungsi supremasi hukum serta kebutuhan untuk melindungi hak-hak asasi manusia di dunia di mana teknologi semakin cenderung melemahkan ketiga pilar demokrasi konstitusional ini.

Jelas di banyak pengadilan di seluruh dunia, lembaga peradilanlah yang mendorong strategi digital untuk mereformasi pengadilan, namun menariknya di Inggris pada dasarnya terdapat usulan untuk menghapus fungsi reformis tersebut dari lingkup operasi yang dilakukan oleh lembaga peradilan pemerintah, dan hal ini juga berimplikasi pada independensi peradilan. Penulis mencatat bahwa jika hakim akan terlibat dalam tantangan teknologi yang akan terjadi di pengadilan dan untuk melaksanakan kebijakan penting serta pekerjaan reformasi yang membutuhkan komponen desain teknologi canggih, ada kebutuhan untuk menunjuk hakim dengan latar belakang yang mencakup pemahaman canggih tentang teknologi baru dan waktu serta kemampuan untuk merancang sistem yang responsif terhadap kebutuhan peradilan dan pengguna. Karena jika hakim tidak melakukan pekerjaan desain dan operasional yang penting ini, siapa lagi? Jika sepenuhnya menjadi tanggung jawab cabang eksekutif pemerintah, maka akan muncul masalah pemisahan kekuasaan dan independensi peradilan. Jika hakim menggunakan jasa konsultan tanpa pengawasan yang memadai atau pemahaman tentang fungsi atau pendekatan peradilan, maka akan muncul kekhawatiran lain tentang independensi peradilan yang dapat dikaitkan dengan ketergantungan yang berlebihan pada entitas teknologi.

7.3 AKTIVISME DAN RESPONSIVITAS PERADILAN

Dalam mempertimbangkan peran peradilan dalam konteks doktrin pemisahan kekuasaan, beberapa masalah aktivisme peradilan muncul. Dalam beberapa keadaan, aktivisme yudisial dianggap berbahaya dan tidak pantas jika mengakibatkan pelanggaran wewenang yudisial (yaitu ketika hakim 'membuat hukum' dan oleh karena itu dapat mengganggu kegiatan lembaga pemerintahan lainnya dalam masyarakat demokratis). Namun, aktivisme yudisial dapat diimbangi dengan komitmen yang kuat terhadap tugas dan, peran hakim dalam masyarakat demokratis dapat dianggap pada beberapa tingkatan sebagai penggabungan peran aktivis, terlepas dari pandangan yang bertentangan (meskipun penulis berpendapat bahwa mungkin lebih tepat untuk menyebut hakim semacam itu sebagai 'responsif').

Memang, perubahan teknologi yang diramalkan di tempat lain dalam buku ini mengharuskan hakim menjadi 'aktivis' dalam perlindungan sistem peradilan (fungsi 'penjaga' keadilan) sementara juga secara individu 'responsif' terhadap perubahan teknologi yang

terjadi dan kemungkinan akan terjadi selama dekade berikutnya. Misalnya, pada tingkat individu dan kolektif, skeptisisme tentang kegunaan Hakim AI dapat dikaitkan dengan penolakan formalisme hukum yang kuat dan perpindahan ke pemahaman yang lebih realistis tentang pengambilan keputusan peradilan, termasuk mengakui bahwa di banyak yurisdiksi, hakim dapat membuat hukum. Respons peradilan kolektif aktivis dapat memastikan bahwa rujukan yang tepat kepada Hakim AI terjadi (misalnya dalam kaitannya dengan kasus-kasus di mana terdapat diskresi 'lemah') sementara respons peradilan individu yang responsif mungkin mengharuskan hakim untuk menyuarakan kekhawatiran tentang kontak manusia sehingga penggugat yang lebih rentan tidak secara otomatis dirujuk ke Hakim AI (bahkan ketika suatu kasus melibatkan diskresi 'lemah').

Aktivisme peradilan kolektif mendukung keterlibatan peradilan yang berkelanjutan dengan isu-isu kebijakan penting yang berkaitan dengan teknologi yang dapat berdampak pada masa depan jangka panjang sistem peradilan. Misalnya, sementara beberapa ahli teori menganggap bahwa teknologi dapat meningkatkan pembuatan aturan dan mengarah pada pengembangan hukum yang lebih spesifik konteks, yang lain menganggap bahwa hal ini merupakan hasil yang tidak mungkin. Bahkan, beberapa mempertanyakan bagaimana hukum saat ini sedang dikembangkan dan mempertanyakan sejauh mana hukum tersebut telah mencerminkan kepentingan raksasa digital.

Pengaturan semacam itu dapat berpotensi berdampak pada pengaturan yurisdiksi domestik. Dalam hal ini, penulis mencatat bahwa beberapa pengaturan ODR swasta yang dikembangkan oleh raksasa digital telah mengurangi masukan yudisial di saat muncul kekhawatiran bahwa perusahaan digital besar mungkin berada 'di atas hukum'. Dalam konteks inilah, peradilan independen yang tidak didefinisikan oleh teknologi dan yang menggabungkan pendekatan aktivis atau responsif menjadi semakin penting. Sebagaimana dicatat Nemitz:

Melihat semua ini dalam konteksnya, faktor penentunya memang merupakan upaya untuk menghindari tanggung jawab, pertama pada tingkat pembuatan hukum, kedua pada tingkat penerapan hukum, dan ini dilakukan oleh sekelompok perusahaan yang memusatkan kekuasaan di tangan mereka tanpa preseden dalam sejarah. Penting untuk tidak mengabaikan sejarah kegagalan dalam menetapkan dan memikul tanggung jawab di era internet, baik oleh legislatif maupun perusahaan teknologi, yang berujung pada kegagalan internet, dalam bentuk penyebaran pengawasan massal, perekrutan untuk terorisme, hasutan untuk kebencian dan kekerasan rasial dan agama, serta berbagai bencana lainnya bagi demokrasi. Yang terbaru adalah skandal Cambridge Analytica dan kebangkitan kaum populis, yang seringkali menjadi penerima manfaat paling canggih dari bantuan Facebook, YouTube, Twitter, dan sebagainya, yang menggabungkan teknik periklanan dan jaringan periklanan bertarget yang dikembangkan untuk keuntungan dengan propaganda politik.

Dalam formulasi peran peradilan yang diperluas, hakim manusialah yang mendukung dan memelihara aspek-aspek penting masyarakat dan terus melestarikan dan, sampai batas tertentu, melindungi dari pendekatan populis yang mungkin terlalu menyederhanakan diskusi

dan mengikis supremasi hukum. Dalam hal ini, ketidakmampuan beberapa hakim untuk menggunakan teknologi secara tepat guna terlibat dalam diskusi di masyarakat merupakan hal yang bermasalah, dan penulis mencatat bahwa jika aktivisme (atau responsivitas) berada dalam ranah kerja peradilan, maka hal itu juga memerlukan pertimbangan tambahan tentang bagaimana pandangan peradilan dapat diungkapkan dalam masyarakat modern.

Memang, beberapa penulis berpendapat bahwa masyarakat modern memerlukan 'penataan ulang' peran dan fungsi peradilan yang mencakup pertimbangan terhadap tatanan struktural yang ada dan peran seorang hakim individu dalam peradilan kolektif. Penulis berpendapat bahwa pendekatan semacam itu mencerminkan sifat responsif yang lebih luas dari peran peradilan yang mencakup fungsi advokasi:

Hakim memiliki kebebasan bertindak dalam menerapkan hukum untuk mencapai tujuan sosial, yang menggambarkan apa yang kita anggap sebagai hakim responsif sebagai seseorang '... yang mencintai kreativitas, yang dapat tanpa gangguan menggabungkan pengambilan risiko dengan tanggung jawab, yang melihat dan merasakan lembaga sebagai sesuatu yang dibangun dan akan dibangun untuk melayani fungsi, dan yang memandang fungsi sebagai hal yang vital dan hukum sebagai alat untuk senantiasa berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan umum'.

Ada pula isu-isu yang berkaitan dengan penolakan pendekatan formalis dalam konteks kegiatan peradilan. Misalnya, sebagaimana dicatat oleh Michaels, gagasan bahwa hukum dapat direduksi menjadi ilmu komputer pada dasarnya bersifat formalis dan tampaknya menganggap hukum sebagai 'kemahadiran yang merenung di langit', alih-alih praktik sosial sebagaimana adanya. Michaels melanjutkan dengan menyatakan bahwa argumen yang mendukung Hakim AI mengabaikan ajaran realisme hukum, khususnya poin bahwa tidak setiap kasus memiliki jawaban yang 'terbaik secara hukum' atau 'benar'.

Dalam hal ini, beberapa peneliti telah menunjukkan peran hakim dalam konteks 'perlawanan'. Meskipun hal ini, sampai batas tertentu, dapat dikaitkan kembali dengan diskusi yang berkaitan dengan gagasan demokrasi yang berkaitan dengan doktrin pemisahan kekuasaan, di era digital terdapat implikasi tambahan dalam konteks raksasa digital (sebagaimana dibahas di atas). Artinya:

... kami berpendapat, pendekatan berbasis mesin tidak mampu mengakomodasi gagasan "perlawanan" yang mau tidak mau harus hadir dalam setiap pelaksanaan kekuasaan, termasuk kekuasaan yudikatif, sebagai akibat dari kenyataan yang tak terelakkan bahwa, sebagaimana Foucault ingatkan, 'di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan, namun, atau lebih tepatnya, perlawanan ini tidak pernah berada dalam posisi eksterioritas dalam kaitannya dengan kekuasaan'.

Demikian pula, Nemitz mempertanyakan kapasitas hukum untuk ditafsirkan melalui bentuk-bentuk AI, dengan mencatat bahwa hukum itu sendiri dikembangkan setelah kompromi manusia. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa mempertahankan hakim manusia bahkan lebih

penting daripada di masa lalu, justru karena konsentrasi kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari revolusi teknologi. Nemitz mencatat bahwa hukum dapat mengatur teknologi yang kompleks ketika ditafsirkan oleh hakim manusia yang memungkinkan pemahaman tentang kompleksitas dipertimbangkan:

Klaim bahwa hukum tidak cukup tepat untuk mengatur teknologi yang kompleks dan bahwa hukum yang berada di bawah detail, presisi, dan kemudahan penggunaan kode yang baik, bukanlah hukum yang baik dan karenanya tidak boleh diadopsi oleh pembuat undang-undang, adalah kekeliruan lain dari pandangan rekayasa dunia. Menurut definisi, hukum yang diadopsi dalam proses demokrasi membutuhkan kompromi ... Dan hukum kompromi ini, seperti hukum lainnya, tidak ditulis untuk diterapkan seperti kode oleh mesin dan otomatisasi. Hukum diproduksi untuk diterapkan oleh manusia yang dapat bernalar sendiri dan untuk ditafsirkan jika terjadi perselisihan oleh hakim yang berakal sehat. Proses keterbukaan hukum dan proses hukum terhadap interpretasi selanjutnya oleh hakim yang bijaksana (dengan bantuan akademisi) inilah yang memberikan fleksibilitas bagi hukum untuk mengadopsi persyaratan baru zaman tanpa harus ditulis ulang seperti kode, yang perlu direvisi secara terus-menerus sejak versi 1.0. Untuk lebih jelasnya: mensyaratkan hukum harus setepat kode atau ditulis ulang secepat kode diperbarui justru anti-demokrasi, karena hal ini mengabaikan perlunya musyawarah dan kompromi dalam demokrasi serta waktu yang dibutuhkan untuk proses hukum yang semestinya di bawah supremasi hukum.

7.4 HAKIM DAN DAMPAK MASYARAKAT

Ada faktor-faktor lain yang penting untuk dipertimbangkan dalam konteks Hakim AI yang sangat penting bagi penciptaan dan pemeliharaan masyarakat beradab. Argumen juga telah dikemukakan bahwa mereka yang mendukung Hakim AI mengabaikan dampak jangka panjang dari pergeseran tersebut. Michaels berpendapat:

Tanpa hakim manusia, pada akhirnya kita sebagian besar dapat kehilangan komunitas pakar hukum yang memperhatikan hukum. Artinya, kita akan menggantikan pemikiran hukum masyarakat dengan pemikiran hukum artifisial. Hal ini kemungkinan akan menghambat kemampuan kita untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan keadaan masyarakat. Hal ini juga akan membuat masyarakat secara keseluruhan kurang menyadari hukum, dan hanya akan tunduk pada otoritas mesin hukum kotak hitam. Tanpa adanya komunitas yang memperhatikan dan memikirkan hukum, hukum dapat menjadi semakin rentan untuk dikooptasi atau dirampas oleh kepentingan yang berkuasa.

Meskipun beberapa pihak telah mencatat bahwa mengadili merupakan aktivitas sosial yang penting, juga telah dicatat bahwa hanya ada sedikit informasi tentang apa yang sebenarnya dilakukan hakim. Dalam hal ini, peran hakim sebagai komentator sosial mungkin belum diakui dalam upaya untuk mempertimbangkan bagaimana AI dapat menggantikan hakim manusia. Morison dan Harkens, misalnya, telah mencatat bahwa peran ini mencakup perlawanan dan kontestasi:

Hukum, mungkin di atas semua bentuk interaksi sosial, harus tetap menjadi wadah perjuangan bagi nilai-nilai yang hakikatnya manusiawi. Dan dalam praktiknya, ia mempertahankan elemen sosial sentral yang tidak hanya menoleransi, tetapi juga menghasilkan, perlawanan dan kontestasi.

Juga telah diperdebatkan bahwa para pendukung Hakim AI terlalu menghargai konsistensi dan mengabaikan kemungkinan bahwa perselisihan hukum yang timbul dari putusan yang berbeda pendapat dapat bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dengan melibatkan komunitas hukum dalam debat tentang hukum dan kebijakan. Memang, peran hakim yang berbeda pendapat di pengadilan tinggi telah dianggap penting dalam hal pengembangan hukum di banyak negara karena mungkin memiliki 'potensi profetik' sekaligus menggambarkan kompleksitas penalaran hukum.

Terdapat banyak fungsi yang dijalankan oleh hakim di berbagai yurisdiksi yang bergantung pada status mereka sebagai arbiter yang independen dan tidak memihak. Misalnya, hakim di beberapa negara dapat melakukan 'penyelidikan yudisial' dan melakukannya karena status mereka, rasa hormat yang diperoleh dari jabatan mereka, dan juga karena mereka dianggap mampu menangani masalah politik tanpa bias. Namun, penulis mencatat bahwa pengaturan semacam itu (atau jenis pengaturan serupa) bukanlah fitur yang ada di semua yurisdiksi, dan umumnya mereka yang dipilih untuk melakukan pekerjaan tersebut berada di tingkat peradilan senior. Namun demikian, fungsi tambahan tersebut perlu dipertimbangkan dalam konteks pekerjaan apa yang dapat dilakukan oleh Hakim AI dan sejauh mana pengaturan Hakim AI yang didukung dapat membantu dalam pekerjaan ini. Di yurisdiksi dengan isu-isu sosial yang signifikan dan mungkin memiliki konsekuensi politik, penyelidikan peradilan yang independen dapat menjadi mekanisme penting untuk mendukung demokrasi yang berfungsi.

7.5 PENUTUPAN PENGADILAN FISIK DAN KEADILAN TERBUKA

Ada pula pertanyaan yang timbul akibat pengurangan pengadilan fisik dalam hal dampak sosial dan sejauh mana cabang yudikatif pemerintah diberikan status yang setara dengan dua cabang pemerintahan lainnya. Beberapa orang mungkin, misalnya, menganggap bahwa pengadilan daring dan ketiadaan gedung fisik dapat berdampak negatif pada status cabang yudikatif pemerintah. Intinya, ketika dua cabang pemerintahan lainnya tetap menempati lokasi fisik yang berstatus tinggi, dan ketika pengadilan tidak, kesimpulan dapat ditarik tentang pentingnya supremasi hukum dan status yang diberikan kepada hakim independen.

Diskusi tentang pengadilan fisik dan sejauh mana pengurangannya dapat berdampak pada status lembaga peradilan pemerintah sejauh ini agak teredam di sebagian besar yurisdiksi, dengan mayoritas diskusi di negara-negara seperti Inggris berfokus pada potensi dampak penutupan pengadilan terhadap akses terhadap keadilan. Namun, terdapat beberapa fokus pada potensi dampak di luar isu akses terhadap keadilan. Dalam Laporan Parlemen tahun 2019 di Inggris, tercatat bahwa:

Presiden Senior Tribunal, Sir Ernest Ryder, juga telah mencatat komitmennya untuk menjaga keadilan yang terbuka. Dalam pidatonya di tahun 2018, beliau mencatat jumlah sengketa yang 'mengejutkan diselesaikan secara daring oleh layanan penyelesaian sengketa swasta, seperti yang digunakan oleh eBay dan Amazon. Beliau melanjutkan dengan mengatakan:

Ketika keadilan lenyap dari pandangan ... prospek perilaku sewenang-wenang, tidak kompeten, atau melanggar hukum muncul. Sekali lagi, jika kita hanya menerima argumen bahwa penyelesaian sengketa daring secara privat adalah cara di mana sebagian besar sengketa, dan di beberapa area semua sengketa, dapat diselesaikan di masa mendatang, kita menerima hilangnya akuntabilitas ini; kita juga menerima semakin besarnya defisit demokrasi. Hal yang sama berlaku jika kita mengalihkan keadilan publik ke forum daring yang tidak dapat diamati. Pengadilan digital kita haruslah pengadilan terbuka.

Dalam laporan yang sama, tercatat bahwa 'Profesor Richard Susskind berpendapat bahwa keadilan terbuka bukanlah prinsip yang mutlak, melainkan salah satu dari tujuh aspek keadilan yang dapat menarik ke berbagai arah'. Laporan tersebut juga mencatat bahwa meskipun keadilan terbuka dipandang sebagai prioritas oleh HMCTS, bukti mereka menunjukkan bahwa 'program reformasi pengadilan digital tidak pernah secara jelas mengartikulasikan bagaimana prinsip-prinsip keadilan terbuka akan diterapkan ketika pengadilan fisik digantikan oleh proses daring dan virtual'. Dalam membuat serangkaian rekomendasi, terdapat kekhawatiran yang diungkapkan tentang anggapan bahwa pembentukan proses pengadilan daring oleh pemerintah (dan penggunaan situs web pemerintah untuk mengaksesnya) dapat berdampak negatif pada pemisahan kekuasaan dengan temuan umum dan rekomendasi khusus bahwa:

Modernisasi sistem pengadilan dan tribunal memiliki potensi implikasi konstitusional yang patut mendapat pengawasan dari Parlemen. Mengingat pentingnya menjaga dan mengomunikasikan independensi sistem peradilan dari Eksekutif, kami merekomendasikan agar akses yang ada terhadap proses peradilan daring yang hanya melalui situs web gov.uk dihentikan dan diganti tanpa penundaan.

Jelas bahwa penurunan ketersediaan pengadilan fisik menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pengadilan 'terbuka' dan kapasitas masyarakat dalam suatu komunitas untuk melihat dan menghadiri sidang pengadilan. Masalah-masalah tersebut muncul sehubungan dengan perubahan COVID-19 di mana banyak pengadilan telah melakukan pekerjaan melalui berbagai aplikasi konferensi video yang tidak 'terbuka' untuk umum. Namun, proses 'terbuka' belum dianggap sebagai prioritas di banyak yurisdiksi karena pengadilan telah berupaya menangani prioritas lain seperti pekerjaan yang terlibat dalam persidangan perkara.

Di satu sisi, perkembangan teknologi berpotensi membuat pengadilan lebih terbuka dengan menyediakan kesempatan bagi proses pengadilan untuk disiarkan langsung atau direkam dan dilaporkan secara lebih luas dibandingkan dengan pengadilan fisik. Di sisi lain,

seperti di Inggris, telah dicatat bahwa transformasi digital dan penutupan pengadilan telah menyebabkan proses pengadilan yang kurang terbuka, alih-alih 'membuka' pengadilan.

Di banyak yurisdiksi, konsep yang berkaitan dengan keadilan 'terbuka' dikaitkan dengan independensi dan imparsialitas yang disyaratkan oleh lembaga peradilan pemerintah. Misalnya, di Amerika Serikat, telah dikatakan bahwa:

Praduga keterbukaan proses peradilan diwujudkan dalam Amandemen Keenam Konstitusi AS, yang menjamin terdakwa dalam setiap kasus pidana hak untuk diadili secara terbuka. Dalam kata-kata Hakim Hugo Black, Amandemen Keenam adalah 'perlindungan terhadap segala upaya untuk menggunakan pengadilan kita sebagai instrumen penganiayaan.' Pengetahuan bahwa setiap persidangan pidana tunduk pada tinjauan kontemporer di forum opini publik merupakan pengekan yang efektif terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan teknologi dan berkurangnya jumlah pengadilan fisik dapat mengakibatkan berkurangnya akses ke pengadilan dan dampak negatif terhadap prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keadilan terbuka. Hal ini sebagian karena perkembangan tersebut dapat membatasi kesempatan bagi publik (dan media) untuk terlibat dalam masalah-masalah sela meskipun sidang akhir disiarkan langsung. Oleh karena itu, pendekatan teknologi terhadap pengadilan daring dan Hakim AI memerlukan pertimbangan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan akses terbuka terhadap keadilan.

Jelas, prinsip-prinsip tersebut akan lebih relevan di beberapa yurisdiksi dibandingkan yang lain, dan di banyak negara demokratis, dampak teknologi yang lebih baru terhadap supremasi hukum dan lembaga peradilan pemerintah saling terkait. Sebagaimana yang disampaikan mendiang Lord Bingham dalam pidatonya yang terkenal terkait supremasi hukum dan sidang terbuka:

Argumen umum yang mendukung sidang terbuka sudah lazim, dirangkum di sisi Atlantik ini oleh diktum bahwa keadilan harus secara nyata dan tidak diragukan lagi terlihat ditegakkan, dan di pihak Amerika oleh pengamatan bahwa 'Demokrasi mati di balik pintu tertutup'.

7.6 KESIMPULAN

Tampak jelas bahwa, di tahun-tahun mendatang, perkembangan teknologi akan berdampak pada peran hakim dalam masyarakat demokratis dan non-demokratis dalam hal retensi hakim manusia, fungsi hakim, definisi pengadilan, 'keterbukaan' keadilan, dan juga kemanusiaan sistem peradilan. Namun, dampak-dampak ini tidak harus negatif. Dalam banyak hal, teknologi dapat memungkinkan apresiasi dan pemahaman yang lebih baik tentang peran peradilan, dan hakim dapat memainkan peran sentral dalam perancangan ulang sistem peradilan untuk memastikan bahwa upaya reformasi teknologi mencerminkan fungsi peradilan saat ini dan potensi masa depan. Memastikan keterlibatan hakim dalam reformasi diperlukan bukan hanya karena isu-isu yang dapat muncul di negara-negara demokrasi terkait

doktrin pemisahan kekuasaan, tetapi juga karena hakim secara keseluruhan lebih mungkin mampu mengelola proses penyeimbangan yang harus dilakukan untuk memastikan prinsip-prinsip utama negara hukum yang melekat dalam perumusan keadilan dipertahankan dan didukung.

Ini berarti bahwa perancangan sistem peradilan di masa depan harus menggabungkan pemahaman yang bernuansa tentang peran hakim dalam masyarakat dan memungkinkan aktivisme yudisial dalam bentuk publik yang luas untuk membantu memandu proses perancangan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk dipahami bahwa hakim sebagai 'penjaga' sistem peradilan dapat memainkan peran penting dalam kaitannya dengan pengawasan, pemantauan, keterlibatan, dan pengembangan pengadilan daring oleh yudisial, serta dalam menciptakan batasan yang jelas terkait Hakim AI dengan pemahaman bahwa Hakim AI akan memiliki tahapan evolusi yang berbeda-beda.

Sebagaimana dibahas dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa isu mengenai sejauh mana Hakim AI dapat diperluas, terutama karena evolusinya kemungkinan akan melibatkan serangkaian tahapan, dengan Hakim AI awalnya digunakan untuk menangani kasus-kasus 'kecil'. Selain itu, tahapan pertama dapat mencakup pengujian Hakim AI sehingga para pihak yang berperkara dapat menerima 'nasihat' Hakim AI yang kemudian digunakan untuk membantu negosiasi para pihak. Namun, menurut Susskind, tahapan-tahapan tersebut dapat mencakup pencabutan hakim dari peran pengawasan di pengadilan (seperti pada tahapan Tingkat 1 dan Tingkat 2) dan perluasan Hakim AI sehingga pada akhirnya menggantikan hakim. Terdapat banyak kekhawatiran terkait pendekatan yang terakhir ini. Dalam bab ini, isu-isu tersebut telah dibahas dalam konteks pemisahan kekuasaan dan juga dalam konteks peran yudisial. Namun, mengingat pendekatan reformis ini, jika pengadilan tanpa hakim dianggap tidak layak atau tidak diinginkan (seperti yang disarankan penulis), maka hakim mungkin perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam mendefinisikan bagaimana pengadilan di masa depan dapat disusun dan dikembangkan.

Isu-isu lain juga menuntut keterlibatan peradilan yang aktif, khususnya terkait potensi batasan AI, bagaimana Hakim AI dikembangkan, dan sejauh mana ia 'independen'. Dalam hal ini, tentu saja ada sejumlah isu yang terkait dengan kapasitas AI untuk mereplikasi penilaian manusia (yang melampaui adjudikasi) dan juga keinginan akan pendekatan semacam itu. Dalam hal ini, penulis sebelumnya telah mencatat (bersama Richard Cornes) bahwa:

Kita mungkin bertanya, secara umum (apalagi terkait Hakim AI) apakah ada “atau seharusnya” ada batasan terhadap jangkauan AI. Harari (2015, 394) menulis:

Para akademisi di bidang ilmu hayati dan ilmu sosial harus bertanya pada diri sendiri apakah kita melewati sesuatu ketika kita memahami kehidupan sebagai pemrosesan data dan pengambilan keputusan. Mungkinkah ada sesuatu di alam semesta yang tidak dapat disederhanakan menjadi data? Bayangkan algoritma non-sadar pada akhirnya dapat mengungguli kecerdasan sadar dalam semua tugas pemrosesan data apa, jika ada, yang akan hilang jika kecerdasan sadar digantikan dengan algoritma non-sadar yang lebih unggul?

Jawaban kami adalah: kemanusiaan.

Pada akhirnya, muncul pertanyaan terkait bagaimana hakim dapat merespons perubahan teknologi dan sejauh mana hal tersebut dapat melibatkan advokasi serta aktivisme untuk menjaga independensi peradilan (jika ada) dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh pandangan reduksionis tentang pemisahan kekuasaan atau oleh para 'datais'.

Selama pandemi COVID-19, peran peradilan dan hubungannya dengan lembaga pemerintahan lainnya telah diuji. Aturan, regulasi, dan undang-undang baru seringkali membutuhkan pertimbangan yudisial dalam waktu singkat, dan publik mengandalkan pengadilan dan hakim untuk menafsirkan berbagai perubahan tersebut dengan pendekatan yang independen dan pragmatis. Dalam hal ini, sebagian besar pengadilan tidak mengecewakan. Hakim di seluruh dunia beradaptasi dengan proses jarak jauh jika memungkinkan, mendukung pengajuan dokumen secara elektronik, dan menguji pengaturan bagi pihak yang berperkara dan advokat, sembari juga mempertimbangkan proses baru hampir setiap hari, terkadang selama periode kerusuhan sipil. Jelas, tanpa akses ke teknologi, pergeseran ini dan kapasitas hakim untuk berpikir kreatif tentang bagaimana pengadilan dapat tetap beroperasi akan sangat terbatas.

Namun, operasional pengadilan dalam konteks pengaturan COVID-19 memungkinkan ditariknya beberapa wawasan yang terkait dengan doktrin pemisahan kekuasaan dan penggunaan teknologi di pengadilan di masa mendatang. Pada dasarnya, wawasan tersebut menunjukkan bahwa di banyak negara, pemeliharaan independensi peradilan dapat didukung dengan berbagai teknologi yang digunakan oleh pengadilan. Selain itu, banyak hakim menunjukkan bahwa mereka dapat beroperasi dengan cara yang meleak digital, mampu bereksperimen dengan teknologi arus utama yang siap pakai dan dapat digunakan oleh semua orang, dan oleh karena itu lebih mampu mempertimbangkan reformasi pengadilan dan peradilan di masa mendatang. Dalam hal ini, eksperimen lebih lanjut secara logis akan mencakup pertimbangan pengaturan pengadilan daring tambahan serta pengenalan AI dalam konteks pengurangan biaya dan penundaan, sekaligus memastikan bahwa keadilan (dan keterbukaan) tetap terjaga. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana reformasi di masa mendatang akan mencakup peradilan (yang akan mendukung independensi peradilan) atau apakah kendali eksekutif tambahan akan menjadi fitur yang lebih signifikan dari pengadilan di masa mendatang.

BAB 8

HAKIM AI

8.1 PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan, tampaknya dalam jangka pendek, proses semi-otomatis akan berdampak signifikan terhadap peran hakim di banyak sistem peradilan. Isu-isu yang muncul terkait proses semi-otomatis tersebut atau pengembangan Hakim AI yang suportif akan dibahas lebih rinci dalam bab tersebut. Namun, terdapat perkembangan internasional yang menunjukkan bahwa Hakim AI yang sepenuhnya otomatis akan diterapkan dalam jangka menengah hingga panjang, dan hal ini berpotensi untuk membentuk kembali sistem peradilan di seluruh dunia. Dalam hal rentang waktu, fakta bahwa beberapa pengadilan telah merambah Hakim AI menunjukkan bahwa dalam dekade berikutnya, Hakim AI kemungkinan akan menjadi lebih lazim. Hal ini kemungkinan merupakan hasil dari proses evolusi setelah pengembangan awal Hakim AI yang suportif.

Bab-bab sebelumnya telah mencatat berbagai isu terkait Hakim AI yang telah diidentifikasi oleh para komentator yudisial dan akademis. Ini meliputi: (i) hilangnya 'elemen manusia'; (ii) isu transparansi; (iii) isu-isu terkait transformasi dan perubahan sistem; (iv) tantangan pengkodean hukum; (v) isu-isu seputar Hakim AI dalam situasi inovatif dan baru; dan (vi) isu-isu terkait pembentukan hukum baru dalam sistem berbasis preseden. Dalam bab ini, masing-masing isu ini dieksplorasi dalam konteks Hakim AI, alih-alih dalam konteks umum penggunaan teknologi oleh hakim.

Penulis mencatat bahwa beberapa isu menyeluruh yang relevan mengenai Hakim AI dapat dikaitkan dengan peran hakim dalam masyarakat demokratis, dan isu-isu ini dibahas lebih rinci. Selain itu, sebagian besar fokus dalam bab ini adalah pada fungsi-fungsi adjudikatif hakim, dengan fokus pada putusan akhir, alih-alih pada peran dan fungsi hakim yang lebih luas atau perhatian yang lebih spesifik terhadap keadilan algoritmik.

Banyak isu yang berkaitan dengan pengembangan Hakim AI juga bergantung pada sejauh mana penggantian manusia terjadi dan tingkat masukan yudisial dan manusia dalam pengembangan Hakim AI. Selain itu, tampak jelas bahwa, setidaknya pada awalnya, pengembangan Hakim AI lebih mungkin dilakukan di tingkat pengadilan yang lebih rendah dengan beban perkara yang tinggi. Hal ini berimplikasi pada pembahasan dalam bab ini, misalnya, dapat dikatakan terdapat lebih sedikit peluang bagi kreativitas yudisial dalam hal 'membuat hukum' di tingkat pengadilan yang lebih rendah. Namun, juga lebih mungkin bahwa para pihak yang berperkara di tingkat pengadilan yang lebih rendah mungkin memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan karakteristik lain yang dapat memengaruhi kemampuan dan kapasitas mereka untuk menggunakan teknologi.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perkembangan tersebut sangat bergantung pada laju perubahan teknologi dan, dalam hal ini, terdapat banyak bukti 'gembargembor' teknologi yang mengharuskan kehati-hatian dalam mempertimbangkan potensi

perkembangan AI saat ini dan di masa mendatang. Namun demikian, laju perubahan teknologi yang pesat saat ini mengharuskan perkembangan potensial dipertimbangkan dari segi dampak yang mungkin maupun yang mungkin terjadi terhadap peran yudisial.

8.2 UNSUR MANUSIA

Berbagai komentator telah membahas manfaat dan kerugian pengambilan keputusan non-manusia. Di satu sisi, Alarie, Niblett, dan Yoon mencatat bahwa algoritma tidak lelah dan komputer tidak perlu istirahat. Volokh juga mencatat bahwa meskipun seorang Hakim AI mungkin tidak mampu menunjukkan belas kasihan atau belas kasihan, fokusnya perlu diberikan pada penilaian yang memiliki kualitas-kualitas ini, alih-alih pada para pengambil keputusan yang memilikinya. Jika ada fokus pada penilaian AI (alih-alih Hakim AI), ada kemungkinan bahwa, di masa mendatang, penilaian AI dapat menunjukkan belas kasihan, belas kasihan, dan kebijaksanaan, dan mungkin bahkan lebih efektif daripada yang mungkin dilakukan oleh hakim manusia. Namun, secara umum, kekhawatiran tentang penilaian AI dapat berkaitan dengan penilaian yang mungkin mengalir dari seorang Hakim AI serta fakta bahwa manusia mungkin tidak terlibat dalam proses penilaian. Faktor ini, yaitu tingkat keterlibatan manusia yang mungkin dikorbankan dalam proses Hakim AI, menunjukkan bahwa kemungkinan besar akan ada minat yang jauh lebih besar terhadap proses Hakim AI yang suportif di mana tingkat interaksi manusia dipertahankan.

Dalam hal ini, penulis mencatat bahwa beberapa model Hakim AI tidak berasumsi bahwa interaksi manusia akan berkurang karena perkembangan tersebut akan dikaitkan atau disertai dengan pergeseran ke arah penilaian yang dilakukan 'di atas kertas' (di mana interaksi manusia sudah berkurang). Pergeseran ini sudah terjadi di beberapa yurisdiksi dan mungkin sesuai untuk gugatan kecil karena dapat menawarkan keuntungan dalam hal penghematan waktu dan biaya. Iterasi awal dari proses ini yang belum melibatkan Hakim AI telah dijelaskan di Inggris sebagai berikut:

Tidak seperti sidang video atau audio, pengadilan daring adalah 'proses asinkron' yang tidak mengharuskan peserta hadir pada saat yang bersamaan.

'Sebenarnya tidak ada sidang sama sekali,' kata [Susskind]. Sebaliknya, idenya adalah bahwa para pihak 'cukup duduk di depan mesin mereka di dapur, menyampaikan tuntutan mereka dalam bahasa sehari-hari, dan keputusan akan datang [secara elektronik]'.

Proses suara ke teks yang lebih efektif akan memungkinkan jenis proses ini digunakan lebih luas, dan pada awalnya, meskipun hakim manusia akan terlibat, pembentukan proses tersebut akan membuka jalan bagi pengembangan AI Hakim. Meskipun perkembangan teknologi saat ini dan yang mungkin akan terjadi akan memungkinkan lebih banyak variasi dalam hal jangkauan dan jenis materi yang akan dipertimbangkan oleh hakim (visi Susskind tentang pekerjaan asinkron di meja dapur dapat melibatkan bot obrolan sederhana, bot suara, serta teknologi suara ke teks), dalam jangka panjang, diperkirakan bahwa proses otomatis atau Hakim AI akan melakukan pekerjaan ini.

Namun pendekatan pengambilan keputusan yang berdasarkan pada dokumen-dokumen resmi mungkin tidak tepat dalam banyak perselisihan karena berbagai alasan, termasuk masalah ekuitas (yang terkait dengan kesenjangan digital, tetapi juga literasi, kapasitas, dan kerentanan) dan ketidakmampuan untuk menguji bukti ketika pendekatan yang berdasarkan pada dokumen-dokumen resmi digunakan. Selain pendekatan 'on the papers', dalam hal risiko hilangnya unsur manusia yang mungkin dipicu oleh penilaian AI penuh, Plesničar dan Šugman Stubbs berpendapat bahwa 'hakim yang berempati' lebih disukai daripada 'mesin berdarah dingin'. Kerr dan Mathen telah mencatat ketidakpastian mereka tentang 'imajinasi dan kapasitas Hakim AI untuk memahami dasar-dasar moral komunitasnya'. Mereka berpendapat bahwa menjadi hakim 'memerlukan kemampuan untuk mengikuti aturan secara bermakna dan mengadopsi sudut pandang tertentu dari suatu sistem hukum', serta 'menjadi anggota komunitas, memahami sejarahnya, keyakinan moralnya, memiliki sudut pandang tentang karakternya saat ini, dan memiliki kepentingan dalam masa depannya'.

Demikian pula, penulis bersama dengan Cornes berpendapat bahwa ada risiko 'kemanusiaan hilang' ketika algoritma non-sadar menggantikan kecerdasan sadar. Dalam hal ini, ada juga masalah dalam hal legitimasi sosial peradilan yang mengalir dari fakta bahwa penghakiman diberikan oleh sesama manusia, dengan AI 'tidak mampu berinteraksi dengan orang-orang dengan belas kasih, emosi, atau respons yang gesit atau intuitif' atau 'memenuhi kebutuhan pihak di pengadilan untuk melihat pembuat keputusan "bergulat dengan sungguh-sungguh" dengan suatu keputusan'.

Zalnieriute dan Bell berpendapat serupa bahwa 'penghakiman adalah proses unik manusia yang seharusnya dipahami oleh manusia'. Mereka merujuk pada keputusan Pengadilan Federal Australia yang menyatakan bahwa surat yang dibuat secara otomatis dari Kantor Pajak Australia yang memberi tahu seseorang tentang utang pajaknya bukan merupakan 'keputusan' yang sah secara hukum, karena tidak ada 'proses mental' yang terlibat. Zalnieriute dan Bell berpendapat bahwa logika yang sama seharusnya berlaku untuk pengambilan keputusan pengadilan. Senada dengan itu, Michael Kirby mencatat bahwa 'hak untuk melihat seorang pengambil keputusan pengadilan bergulat dengan sungguh-sungguh, di depan umum, dengan detail suatu kasus merupakan ciri sistem peradilan yang tidak dapat diabaikan, setidaknya tanpa risiko terhadap penerimaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai bagian dari bentuk tata kelolanya'.

Sudah ada isu-isu terkait empati manusia yang relevan dalam konteks proses penghakiman manusia yang dibantu oleh teknologi. Misalnya, telah dicatat dalam konteks terapi bahwa percakapan dan, sampai batas tertentu, rasa hormat dan status dapat berkurang ketika seorang fasilitator muncul dalam konferensi video di dalam kotak seukuran 'perangko'. Selain itu, peluang untuk terlibat dapat berkurang secara signifikan, sebagian karena percakapan dapat menjadi kaku ketika tombol mute atau fungsi mengangkat tangan diperlukan. Proses asinkron yang diusulkan oleh Susskind dan diuji coba di Inggris tidak memungkinkan interaksi manusia secara langsung terjadi sama sekali (meskipun bisa dibilang bot obrolan yang dirancang dengan baik dapat menggantikan beberapa interaksi manusia). Namun, dapat dikatakan bahwa dalam klaim kecil, banyak orang mungkin memilih kecepatan

dan penghematan biaya daripada pengalaman manusia yang lebih interaktif. Dalam hal ini, *Online Civil Money Claims* (OCMC), sebuah layanan digital untuk klaim kecil yang didirikan di Inggris, tampaknya telah meraih kesuksesan yang cukup besar. Hingga Mei 2020, tercatat bahwa '137.157 klaim telah diajukan menggunakan layanan ini' dan bahwa:

Layanan daring ini tersedia 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dengan menggunakan validasi dan otomatisasi untuk menghilangkan proses administratif yang panjang, hanya dibutuhkan beberapa hari dari pengajuan klaim hingga perintah pengarahannya dibuat, dibandingkan dengan sekitar 20 minggu jika menggunakan proses manual, menurut HMCTS. Sebuah survei keluar untuk layanan digital OCMC menunjukkan 90% pengguna merasa 'puas' atau 'sangat puas'.

Hingga batas tertentu, beberapa isu yang berkaitan dengan pelestarian unsur manusia dalam proses penjurian dan pelaksanaan putusan mungkin berkaitan dengan keputusan tentang di mana penting untuk mempertahankan hakim manusia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tampaknya Hakim AI kemungkinan besar akan awalnya dibentuk di tingkat pengadilan rendah dengan jumlah hakim yang tinggi. Pendekatan ini menimbulkan beberapa isu karena mereka yang biasanya menggunakan tingkat pengadilan yang lebih rendah cenderung lebih rentan dan bisa dibilang lebih membutuhkan dukungan manusia. Namun, jika Hakim AI didukung oleh triase yang memadai, bersama dengan ODR yang tepat dan rujukan ADR manusia, lebih sedikit isu yang mungkin muncul. Hal ini karena apa yang hilang dalam hal unsur peradilan manusia dapat diperoleh melalui pengaturan dukungan manusia lain yang dipadukan dengan penghematan biaya dan waktu.

Satu pertanyaan yang dibahas lebih lanjut tetap relevan: dalam kasus pengadilan apa seorang hakim manusia yang 'langsung' harus dipertahankan? Hal ini sendiri memerlukan pemikiran yang cermat karena sebagian besar hakim memahami bahwa klaim kecil (dalam hal jumlah uang yang rendah) mungkin sangat penting bagi manusia yang terlibat dan kegagalan untuk menangani klaim tersebut dengan cara yang 'manusiawi' dapat mengakibatkan konflik yang belum terselesaikan yang memiliki dampak sosial lainnya. Demikian pula, pengambilan keputusan pengadilan atau tribunal administratif melibatkan peninjauan pengambilan keputusan pemerintah, dan pengenalan Hakim AI ke dalam bidang-bidang ini menimbulkan berbagai masalah, khususnya karena pengambilan keputusan otomatis oleh entitas pemerintah menjadi lebih umum.

Pendekatan untuk pengenalan Hakim AI akan membutuhkan pengembangan proses triase yang jauh lebih canggih yang dapat memungkinkan dan mendukung rujukan masalah kepada hakim manusia jika sesuai. Namun, ini juga disertai dengan risiko yang signifikan. Misalnya, sebagai hasil dari proses triase otomatis, ada kemungkinan kasus-kasus yang menyimpang (misalnya, kasus-kasus dengan tingkat kompleksitas tugas atau perilaku yang tinggi, atau keduanya) dapat dirujuk ke hakim manusia. Meskipun dapat dikatakan bahwa hal ini sudah terjadi di banyak pengadilan perdata tingkat tinggi karena banyak pihak yang berperkara rasional yang mampu menyelesaikan perbedaan mereka melakukannya untuk menghindari waktu tunggu yang lama dan biaya (atau sekadar 'menyerah' mengingat biaya

yang dikeluarkan), penulis menyarankan bahwa pendekatan triase yang lebih sensitif dapat melibatkan sistem pembobotan kasus yang bijaksana (dibantu oleh teknologi) yang memastikan bahwa rujukan hakim manusia yang tepat (eskalasi) atau rujukan ke manusia pendukung lainnya dimungkinkan bahkan dalam klaim yang lebih kecil.

Tentu saja ada masalah tambahan dan jauh lebih kompleks yang muncul dalam pengaturan peradilan pidana. Dalam pengaturan ini, di mana di banyak negara persidangan juri masih beroperasi dan di mana pengadilan restoratif, pemecahan masalah, dan pengadilan lainnya telah dikembangkan, ada alasan kuat untuk mempertahankan pendekatan penilaian manusia. Dalam situasi seperti itu, terdapat pula isu seputar penggunaan teknologi secara lebih umum dan sejauh mana pengadilan fisik harus dipertahankan. Argumen serupa juga relevan dalam situasi pengadilan keluarga di mana teknologi dapat mendukung hakim dan pihak yang bersengketa, tetapi di mana penilaian manusia mungkin perlu dipertahankan, terutama jika intervensi terapeutik diperlukan.

Penulis bersama Cornes sebelumnya telah mengidentifikasi sejumlah pertanyaan terkait kapasitas suatu bentuk AI untuk sepenuhnya menggantikan proses penilaian manusia:

Titik di mana suatu algoritma menyamai kemampuan, “dan yang tak kalah pentingnya, kelemahan, kebingungan, penyimpangan, keanehan, dan ketidakpastian”, dari pikiran manusia (misalnya, yang memungkinkan pemahaman dan penalaran empatik) adalah titik di mana kita telah berhasil mereplikasi pikiran tersebut, bukan meniru atau mendekatinya.

Dengan menerapkan wawasan dari pemikiran psikoanalitis, penulis bersama Cornes juga mempertimbangkan proses penalaran bawah sadar yang dimiliki hakim manusia, yang kemungkinan besar tidak dapat ditiru oleh Hakim AI. Hal ini, sampai batas tertentu, terkait dengan hal-hal yang diangkat di bawah ini terkait kapasitas masalah hukum untuk diterjemahkan ke dalam kode. Masalah hukum seringkali 'berantakan' karena mungkin memerlukan pertimbangan undang-undang dan yurisprudensi, serta dapat mencakup lebih dari satu penyebab tindakan. Alasan mengapa orang mencari bantuan hukum di pengadilan bisa rumit dan kekhawatiran yang mereka ajukan dapat memerlukan pemahaman dan analisis bukti yang saling bertentangan. Memperhatikan bahwa penalaran hukum hanya sebagian disadari, penulis bersama Cornes sebelumnya berpendapat bahwa:

Pemahaman psikoanalitis tentang pikiran yudisial menunjukkan bahwa fungsi yudisial pada intinya membutuhkan rumah organik dari “pikiran” manusia, yang di dalamnya kontradiksi, yang merupakan inti dari proses peradilan dan kehidupan manusia dikelola. Kontradiksi dan akomodasi yang rumit dan manusiawi ini merupakan bagian dari definisi 'hakim' itu sendiri, yang memungkinkan hakim untuk memahami hukum dan masyarakat yang kepadanya hukum tersebut diterapkan.

8.3 TRANSPARENSI

Transparansi peradilan 'komitmen terhadap keterbukaan dan kejujuran' adalah salah satu nilai peradilan yang paling diterima secara luas. Secara teori, sistem otomatis

menawarkan potensi untuk membuat banyak aspek pengambilan keputusan peradilan menjadi transparan. Susskind berpendapat bahwa sistem pengambilan keputusan otomatis, jika dirancang dengan benar, dapat membuat setiap langkah proses pengambilan keputusan menjadi transparan. Namun demikian, banyak komentator masih belum yakin mengenai transparansi alat otomatis.

Sebagaimana dicatat oleh Deeks, transparansi penting karena menjelaskan bagaimana suatu algoritma menghasilkan rekomendasi atau penentuannya dapat secara bersamaan memungkinkan pengamat untuk mengidentifikasi bias dan kesalahan dalam algoritma tersebut.²⁵ Surden juga mencatat bahwa transparansi dapat memengaruhi kemampuan untuk mengajukan banding atas suatu keputusan.

Salah satu isu utama yang muncul dalam konteks ini dikenal sebagai masalah 'kotak hitam'. Sebagaimana dicatat oleh Deeks, jika algoritma tetap tidak transparan, hal tersebut dapat memengaruhi rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat, terutama ketika digunakan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dalam ranah peradilan pidana, algoritma yang tidak transparan dapat melemahkan hak terdakwa untuk membela diri. Sebagaimana dijelaskan oleh Deeks:

Karena sistem pembelajaran mesin belajar sendiri dan menyesuaikan parameternya dengan cara yang tidak ditentukan secara spesifik oleh pemrogramnya, seringkali masih belum jelas bagaimana tepatnya sistem tersebut mencapai prediksi atau rekomendasinya. Hal ini khususnya berlaku untuk sistem 'pembelajaran mendalam' yang menggunakan 'jaringan saraf', yang dimaksudkan untuk mereplikasi proses saraf di otak manusia.

Di sisi lain, Huq meragukan adanya kesenjangan transparansi antara pengambilan keputusan manusia dan algoritmik. Ia berpendapat bahwa meskipun diperlukan alat khusus untuk menginterogasi hasil algoritmik, 'aturan pembuktian yang rumit yang telah dikembangkan pengadilan untuk mengevaluasi kesaksian manusia menunjukkan bahwa para ahli sama pentingnya dalam tugas memahami kesaksian manusia'.

Namun demikian, beberapa komentator mempertanyakan apakah AI dapat benar-benar dijelaskan. Burrell, misalnya, berpendapat bahwa karena manusia bernalar secara berbeda dengan mesin, mereka tidak selalu dapat memahami atau menafsirkan interaksi antara data dan algoritma, terlepas dari apakah mereka dilatih dengan tepat atau tidak. Salah satu alasannya adalah proses yang dilalui sistem pembelajaran mesin dalam menyempurnakan hasilnya dan menyesuaikan 'bobot' yang diberikan pada banyak variabel. Surden berpendapat bahwa sementara beberapa teknik pembelajaran mesin berdasarkan pendekatan pohon keputusan menghasilkan jawaban yang mudah dipahami dan diperiksa, pendekatan jaringan saraf dan pembelajaran mendalam bisa sangat sulit (jika bukan mustahil) dipahami manusia, termasuk bagi programmer yang menciptakannya. Deeks juga telah menyadari masalah ini, mencatat bahwa pendekatan AI yang dapat dijelaskan yang hanya mengungkapkan kode sumber untuk model pembelajaran mesin jarang akan memuaskan, karena kebanyakan orang tidak akan dapat memahami kode tersebut.

Baru-baru ini, beberapa kemajuan telah dibuat menuju pengembangan 'AI yang dapat dijelaskan'. Menurut Deeks, ini merujuk pada 'upaya untuk menjelaskan atau membantu manusia menafsirkan bagaimana suatu model pembelajaran mesin tertentu mencapai kesimpulannya'. Namun, peneliti lain telah menyadari bahwa terdapat sedikit konsensus mengenai definisi 'keterjelasan' dalam konteks AI dan pembelajaran mesin. Menyadari kebutuhan untuk 'membuka' kotak hitam, Bhatt dan rekan-rekan melakukan studi kelompok fokus ($n = 33$) yang bertujuan untuk mengembangkan bahasa bersama seputar keterjelasan AI dalam konteks pemangku kepentingan eksternal. Mereka menemukan bahwa:

Semua definisi keterjelasan mencakup gagasan konteks (skenario penerapan model), pemangku kepentingan (mereka yang terdampak oleh model dan mereka yang memiliki kepentingan dalam sifat penjelasan model), interaksi (tujuan yang dilayani oleh model dan penjelasannya), dan ringkasan (gagasan bahwa suatu penjelasan harus meringkas model menjadi potongan-potongan yang mudah dicerna). Oleh karena itu, keterjelasan secara umum mengacu pada alat yang memberdayakan pemangku kepentingan untuk memahami dan, jika perlu, menggugat penalaran hasil model.

Khusus untuk domain hukum, sejumlah organisasi profesional, akademisi, dan lainnya telah mencatat bahwa gagasan AI yang dapat dijelaskan tetap menjadi masalah penting dalam pengembangan AI dalam hukum. Misalnya, Resolusi 112 American Bar Association yang melibatkan AI dan Etika (2019) mendesak pengadilan dan pengacara untuk mengatasi masalah etika dan hukum yang muncul terkait dengan penggunaan AI dalam hukum, termasuk melalui kemampuan menjelaskan keputusan otomatis yang dibuat oleh AI. Seperti yang diuraikan oleh Deeks, AI yang dapat dijelaskan dapat 'menumbuhkan kepercayaan antara manusia dan sistem, mengidentifikasi kasus-kasus di mana sistem tampak bias atau tidak adil, dan memperkuat pengetahuan kita sendiri tentang cara kerja dunia'. Namun, pada saat yang sama, telah disarankan bahwa AI yang dapat dijelaskan dapat mahal untuk dibangun dan dapat menurunkan akurasi algoritmik.

Coglianesi dan Lehr juga menentang gagasan bahwa proses AI yang kompleks tidak akan pernah dapat dijelaskan sepenuhnya:

Analisis dapat, dan memang, memiliki pengetahuan penuh tentang cara kerja internal algoritma, dan mereka dapat menjelaskan secara matematis bagaimana algoritma ini mengoptimalkan fungsi objektifnya. Yang kurang dari mereka hanyalah kemampuan interpretatif untuk menggambarkan optimasi ini dalam istilah konvensional dan intuitif.

Dalam hal ini, Deeks telah menguraikan dua pendekatan alternatif untuk AI yang dapat dijelaskan: pendekatan yang berpusat pada model dan pendekatan yang berpusat pada subjek. Pendekatan yang pertama mencoba menjelaskan keseluruhan model melalui, misalnya, mengungkapkan maksud pembuat atau parameter yang ditentukan oleh pembuat. Pendekatan yang kedua berfokus pada kinerja model dalam kasus tertentu, dan mungkin, misalnya, memberikan informasi kepada subjek keputusan tentang karakteristik individu yang

menerima keputusan serupa. Tampaknya AI Hakim akan menjadi dapat dijelaskan menggunakan pendekatan yang berpusat pada subjek kedua ini. Namun, masih terdapat isu-isu mengenai bagaimana dan sejauh mana Hakim AI dapat menghasilkan 'alasan' untuk putusan atau 'pendapat'. Selain itu, meskipun pendekatan hakim sangat bervariasi di seluruh dunia, seringkali bentuk putusan tertulis dalam perkara perdata dapat melibatkan variasi hukum individual yang tambahan dan luas, dan variasi ini dapat berguna dalam konteks pembentukan hukum.

Misalnya, ada sejumlah hakim terkenal yang dianggap sebagai 'pendongeng' sebagian karena kemampuan mereka untuk menyampaikan dengan cara yang meyakinkan keadaan seputar orang-orang, perselisihan, dan kemanusiaan mereka. Sementara beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Hakim AI dapat mereplikasi pendekatan semacam itu di masa mendatang, yang lain akan mencatat bahwa kreativitas tersebut terbukti tidak hanya karena hasil yang dicapai tetapi juga karena cara analisis dan keputusan diungkapkan. Kreativitas inilah yang akan sulit direplikasi dan ditiru dalam hal perkembangan AI selama beberapa tahun. Penulis mencatat bahwa, bagaimanapun, kreativitas peradilan dan, dengan perluasan, responsivitas peradilan, mungkin tidak begitu dihargai di tingkat pengadilan rendah atau di beberapa yurisdiksi.

8.4 TRANSFORMASI DAN PERUBAHAN SISTEM

Adopsi sistem otomatis akan menantang pemahaman tradisional tentang keadilan dan kewajaran. Sebagaimana diuraikan oleh penulis, terdapat berbagai pemahaman filosofis seputar makna 'keadilan'. Pandangan tradisional, yang kemungkinan besar dianut oleh para pendukung litigasi, adalah bahwa keadilan hanya dapat terjadi di dalam pengadilan, di mana seorang hakim mampu mengartikulasikan pemahaman tentang supremasi hukum. Pandangan alternatif yang dianut oleh penulis adalah pandangan keadilan yang 'lebih luas', yang tidak terbatas pada peran yang dimainkan oleh lembaga peradilan dalam putusan publik atas sengketa perdata. Sebaliknya, keadilan juga dipandang ada 'dalam hubungan yang terjalin antara manusia dan dalam nilai-nilai etika mereka'.

Meskipun mengadopsi pandangan yang lebih luas yang tidak menempatkan pengadilan dan hakim sebagai pusat sistem peradilan, melainkan menempatkan keduanya sebagai komponen penting dan saling bergantung dalam sistem peradilan, tetap terdapat isu-isu signifikan yang dapat diangkat terkait Hakim AI (bahkan tanpa adanya perubahan teknologi lainnya). Isu-isu ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana peran hakim AI dapat mengubah sistem peradilan, apakah Penghakiman AI sesuai dengan tujuan keadilan, dan apakah masyarakat tanpa hakim manusia dapat dianggap 'adil'. Beberapa dampak potensial Hakim AI telah dieksplorasi secara lebih rinci dan dapat dikaitkan dengan dampak sosial yang lebih luas yang dimiliki hakim, serta dampaknya dalam sistem demokrasi.

Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perkembangan Hakim AI kemungkinan besar tidak akan mengakibatkan penggantian total hakim manusia di sebagian besar yurisdiksi. Pada awalnya, dampaknya kemungkinan hanya akan meluas ke sengketa perdata 'kecil' di tingkat pengadilan yang lebih rendah, dan di tingkat lain kemungkinan besar

akan menggabungkan pendekatan Hakim AI yang suportif. Terkait perubahan tersebut, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kemungkinan besar banyak yang akan mempertimbangkan bahwa 'kompromi' dalam hal penghematan biaya dan waktu (dan mungkin akurasi) mungkin lebih besar daripada potensi dampak negatif dari jumlah hakim dan pengadilan fisik yang jauh lebih sedikit, yang seharusnya dapat terhubung secara nyata dengan masyarakat setempat.

Namun, dampaknya akan bervariasi sesuai dengan pengaturan yurisdiksi yang ada. Misalnya, di beberapa yurisdiksi, banyak gugatan perdata kecil (dan, dalam beberapa kasus, 'besar') sudah ditangani oleh tribunal yang sudah memiliki proses yang mencakup ODR dan finalisasi dokumen yang 'cepat'. Di yurisdiksi lain, terdapat sedikit hakim yang menangani perkara perdata dan lebih sedikit undang-undang yang dapat mendukung gugatan perdata. Di yurisdiksi yang bergantung pada tribunal, Hakim AI dapat mengakibatkan pengurangan anggota tribunal dan, di tempat lain dengan jumlah hakim yang sangat rendah, Hakim AI dapat mengakibatkan pengembangan opsi keadilan yang mudah diakses yang sebelumnya tidak tersedia.

Dalam hal ini, penulis mencatat bahwa jumlah pejabat pengadilan per kepala populasi sangat bervariasi di seluruh dunia. Misalnya, beberapa data yang cukup tertanggal (2012) menunjukkan bahwa jumlah hakim profesional (daripada hakim awam) per 100.000 orang dapat bervariasi antar negara, dari lebih dari 180 hingga kurang dari 1 per 100.000 orang. Sementara beberapa perbedaan dapat dijelaskan oleh variasi dalam adopsi proses inkuisitorial daripada proses adversarial (dengan proses inkuisitorial cenderung melibatkan lebih banyak hakim), perbedaan lain dapat berhubungan dengan sejauh mana klaim perdata dan masalah kecil lainnya (termasuk denda dan hukuman) ditangani oleh pengadilan atau tribunal atau bentuk ADR yang berada di luar pengadilan dan dapat dikaitkan dengan persyaratan pra-pengajuan wajib.

Semua ini berarti bahwa transformasi sistem melalui Hakim AI klaim perdata yang lebih rendah akan menghasilkan dampak yang sangat berbeda dalam masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, pengembangan Hakim AI memerlukan pemindaian lingkungan lokal yang sensitif untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut tidak memiliki dampak sosial yang negatif. Tidaklah cukup untuk menyimpulkan bahwa dengan mereplikasi sistem Hakim AI yang berfungsi baik di satu yurisdiksi, manfaat serupa akan tercapai di yurisdiksi lain. Sebagaimana laporan lingkungan mungkin diperlukan sebelum pembangunan konstruksi besar dilakukan, laporan dampak sosial yang mencakup analisis menyeluruh tentang potensi manfaat dan dampak negatif Hakim AI harus dilakukan sebelum Hakim AI diintegrasikan atau diperluas ke dalam sistem peradilan apa pun. Selain itu, proses desain yang berpusat pada manusia, yang diarahkan untuk mencapai hasil yang berdampak positif jangka panjang, memerlukan pertimbangan unsur-unsur keadilan prosedural dan partisipatif.

8.5 PERMASALAHAN DALAM HUKUM 'PENKODEAN'

Salah satu permasalahan signifikan dengan Hakim AI yang bisa dibilang kurang relevan dalam konteks perkembangan pembelajaran mesin terkait dengan bagaimana hukum

dikodekan atau dipahami oleh berbagai bentuk AI. Penulis berpendapat bahwa permasalahan ini saat ini lebih signifikan dalam konteks Hakim AI yang berorientasi pada hal-hal ‘kecil’, sebagian karena setidaknya pada awalnya kemungkinan akan melibatkan fokus yang lebih besar pada pengkodean. Beberapa peneliti telah menyoroti tantangan yang terkait dengan penerjemahan hukum ke dalam kode. Hakim Perry dari Pengadilan Federal Australia telah merangkum beberapa kekhawatiran ini:

Pemrogram komputer secara efektif memikul tanggung jawab untuk membangun sistem pengambilan keputusan yang menerjemahkan kebijakan dan hukum ke dalam kode. Namun, pemrogram komputer bukanlah pakar kebijakan dan jarang memiliki pelatihan hukum. Bagaimana kita bisa yakin bahwa peraturan yang kompleks, bahkan berliku-liku, ditransposisikan secara akurat ke dalam kode biner? ... Kita harus berhati-hati terhadap kecenderungan manusia untuk mempercayai keandalan komputer.

Hal serupa juga disampaikan oleh penulis dan Cornes, yang mencatat bahwa meskipun programmer komputer dan profesional TI bukanlah ahli kebijakan atau administrasi dan jarang memiliki kualifikasi atau pengalaman hukum, mereka adalah orang-orang yang paling mungkin ditugaskan untuk menerjemahkan undang-undang dan hukum kasus ke dalam sistem AI. Meskipun demikian, tantangan semacam ini berpotensi diatasi dengan melibatkan pengacara dan pembuat kebijakan dalam pembuatan dan pemutakhiran program komputer ini. Meskipun hal ini mungkin padat karya dan mahal, prosesnya bersifat front-loaded. Akan tetapi, biayanya dapat bervariasi menurut jenis masalah yang sedang dipertimbangkan. Misalnya, dalam perkara pidana yang lebih kecil, proses pengkodean dan pembobotan dapat dilakukan dengan biaya yang cukup rendah.

Penulis sebelumnya telah mengidentifikasi tantangan lebih lanjut: fakta bahwa hukum seringkali dapat beroperasi dalam konteks praduga hukum dan putusan diskresioner. Hakim Perry dari Pengadilan Federal Australia, juga berpendapat bahwa pengoperasian praduga hukum, dan fakta bahwa makna dipengaruhi oleh konteks, berarti potensi kesalahan pengkodean atau distorsi makna adalah nyata. Lebih lanjut, Hakim Perry telah mencatat bahwa nuansa makna dapat hilang atau terdistorsi dalam setiap proses penerjemahan, dan ini menimbulkan masalah khusus mengingat masyarakat yang semakin beragam secara budaya. Juga dicatat bahwa hukum tidak statis, yang berarti sistem otomatis harus mampu menerapkan hukum sebagaimana adanya pada titik waktu sebelumnya untuk mendukung keputusan yang mungkin dipengaruhi oleh pengaturan transisi.

Komentator lain telah mengidentifikasi tantangan budaya dan kontekstual yang terkait dengan hukum pengkodean. Sebagaimana dicatat oleh Kaminski, ‘algoritma, sebagai pro-Entitas terprogram yang diberi tujuan dan kumpulan data oleh manusia yang lebih jauh dari suatu keputusan tertentu, seringkali atau bahkan secara inheren tidak lengkap secara budaya atau kontekstual. Meskipun keputusan manusia tentang cara memperlakukan konteks dapat dimasukkan ke dalam perancangan suatu algoritma, keputusan tersebut tidak ada pada titik akhir ketika suatu algoritma diterapkan pada kasus individu tertentu.

Demikian pula, Crootoof berpendapat bahwa 'meskipun kontekstualisasi manusia dapat dimasukkan selama perancangan atau pelatihan sistem AI, hal itu hampir tidak sama dengan kontekstualisasi manusia pada saat aturan algoritmik diterapkan, terutama karena penerapan tersebut dapat terjadi dalam konteks yang berbeda secara temporal, geografis, dan budaya'. Alarie, Niblett, dan Yoon telah mempertimbangkan sifat data hukum yang sangat kontekstual, termasuk opini yudisial. Mereka berpendapat:

Meskipun opini mengikuti bentuk umum pembacaan fakta, pembahasan yurisprudensi yang relevan, dan penerapan hukum terhadap fakta para hakim sangat individualistis dalam cara mereka menyajikan informasi ini. Gaya penulisan mereka sangat bervariasi, termasuk tata bahasa dan diksi. Ketika berbeda pendapat, mereka menggunakan preseden hukum yang berbeda untuk mendukung analisis mereka. Pendekatan pribadi hakim terhadap penulisan opini dapat menimbulkan hambatan bagi perangkat yang berupaya mengekstrak informasi relevan. Istilah pencarian dapat mengandung noise, menghasilkan hasil yang kurang atau terlalu inklusif. Penulisan yang sangat kontekstual dapat menyulitkan identifikasi pola di dalam dan di antara opini.

Saat ini, model komputasi penalaran hukum (CMLR) dapat memodelkan teknik penalaran hukum yang terlibat dalam yurisprudensi dan yurisprudensi serta menetapkan nilai untuk memprediksi dan membangun argumen hukum. Sebagaimana ditunjukkan oleh Morison dan Harkens: 'meskipun hingga saat ini CMLR ini belum secara langsung menangani teks hukum, terdapat perkembangan dalam analisis teks yang dapat mengubah hal ini, yang memungkinkan informasi konseptual diekstraksi secara otomatis dari berbagai sumber hukum dengan perangkat yang dikembangkan untuk memproses beberapa aspek semantik atau makna teks hukum'. Merujuk pada karya Ashley, mereka mencatat bahwa perkembangan tersebut secara logis akan mengarah pada 'pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan fungsi Tanya Jawab (QA) dan Ekstraksi Informasi (IE) dengan teknik penambangan argumen dan CMLR tertentu untuk menghasilkan perangkat baru bagi pengambilan informasi hukum konseptual, termasuk AR (pengambilan argumen)'. Namun, mereka mencatat bahwa terdapat isu-isu signifikan terkait inferensi konseptual yang mungkin 'terlalu tidak langsung atau memerlukan terlalu banyak konteks latar belakang'.

Sebagaimana dibahas juga telah dikemukakan bahwa penggunaan AI dalam hukum dihadapkan pada perbedaan filosofis antara sintaksis dan semantik. Searle menjelaskan bahwa program komputer memiliki sintaksis (struktur formal operasi), tetapi tidak memiliki semantik (makna di balik operasi ini). Dengan demikian, meskipun program komputer dapat mendekati pemikiran manusia, program tersebut tidak dapat menduplikasi pemikiran manusia. Menurut penulis dan Cornes, menangkap semantik pemikiran yudisial dalam bentuk AI merupakan isu yang paling menantang bagi Hakim AI.

Yang Terhormat Tom Bathurst, Ketua Mahkamah Agung New South Wales, Australia, telah mengangkat isu lebih lanjut: fakta bahwa manusia tidak rasional. Hal ini bermasalah karena 'sistem yang membutuhkan masukan yang pasti pasti akan gagal memprediksi atau menjawab permasalahan manusia secara akurat'. Mengingat kekhawatiran seperti yang

dibahas di atas, sejumlah komentator telah menegaskan bahwa sangat penting bagi hakim untuk tetap terlibat ketika Hakim AI dikembangkan, bahkan ketika teknologi yang sepenuhnya otomatis digunakan untuk membuat keputusan.

8.6 BIAS

Sebagaimana disebutkan juga bahwa bias implisit yang mungkin diabadikan oleh AI bermasalah ketika mempertimbangkan otomatisasi peran peradilan. Lord Hodge, Hakim Mahkamah Agung Inggris, telah menguraikan beberapa cara halus di mana bias dapat menyusup ke dalam sistem AI, termasuk: (i) dalam data yang digunakan untuk melatih sistem; (ii) dalam data yang diproses sistem selama operasinya; dan (iii) pada orang atau organisasi yang menciptakan data tersebut. Hakim lain telah mengidentifikasi potensi yang sangat nyata bagi pengodean untuk mencerminkan bias tak terucapkan dari para pengodanya, atau bagi algoritma untuk menggabungkan bias bawah sadar yang ada dalam keputusan-keputusan sebelumnya yang menjadi dasar algoritma tersebut. Yang penting, kekhawatiran juga muncul bahwa bias apa pun yang diabadikan oleh Hakim AI mungkin tidak dapat ditantang, terutama jika dibandingkan dengan hakim manusia yang dapat 'diinterogasi dan ditegur karena perilaku diskriminatif'.

Sebagaimana diuraikan oleh Cruz, bias implisit dalam AI dapat mendistorsi hasil sedemikian rupa sehingga berdampak negatif pada individu minoritas. Hal ini karena perancang program AI biasanya berasal dari latar belakang yang sangat mirip: mereka biasanya berpendidikan tinggi, laki-laki cisgender yang sebagian besar berkulit putih atau Asia dan pandangan mereka tidak mencerminkan keyakinan, pengalaman, dan preferensi komunitas yang terpinggirkan. Di Amerika Serikat, Morison dan Harkens telah membahas bagaimana alat penilaian risiko *COMPAS* mungkin telah membuat prediksi rasis yang menyatakan bahwa terdakwa berkulit hitam di Florida dua kali lebih mungkin salah diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi.

Di sisi lain, telah dikemukakan bahwa Hakim AI mungkin sebenarnya lebih kredibel dan kurang bias daripada hakim manusia. Sebagaimana diuraikan oleh Volokh, "para pihak yang bersengketa umumnya tidak perlu khawatir bahwa Hakim AI akan memutuskan melawan mereka karena ia berteman dengan pengacara pihak lain atau ingin terpilih kembali atau bias terhadap ras, jenis kelamin, atau agama pihak yang bersengketa". Lebih lanjut, Završnik mempertanyakan apakah de-biasing dimungkinkan atau bahkan diinginkan, mengingat hal ini akan melibatkan keputusan politik penting yang dibuat oleh ilmuwan komputer:

Konstitusi dan hukum acara pidana semuanya telah diadopsi melalui proses legislatif demokratis yang menyaring kepentingan, nilai-nilai, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat tertentu ... hal ini masih relatif terbuka untuk diteliti dibandingkan dengan proses de-biasing yang dilakukan secara tertutup oleh ilmuwan komputer di laboratorium. Intinya adalah bahwa de-biasing menyiratkan bahwa keputusan-keputusan yang secara inheren politis harus dibuat, misalnya tentang apa yang sekadar gender dan apa bahasa seksis yang perlu 'dibersihkan', atau apa itu ujaran kebencian yang menargetkan kaum minoritas dan perlakuan berbeda mana yang harus dianggap diskriminatif. Dalam utopia

berbasis mesin, keputusan-keputusan semacam itu dengan demikian akan diserahkan kepada para ahli elit ilmu komputer. Dalam hal ini, de-biasing bahkan tidak diinginkan.

Pandangan yang berlawanan dapat diungkapkan, yaitu bahwa, bergantung pada peran yang dimainkan oleh cabang eksekutif pemerintah dalam pengembangan Hakim AI, terdapat banyak potensi kekhawatiran yang muncul terkait rentang data yang mungkin dipertimbangkan oleh Hakim AI dan sejauh mana bias sistemik mungkin tertanam dalam sistem. Di beberapa negara terdapat beberapa masalah Hakim AI yang lebih spesifik yurisdiksi sebagai akibat dari ketergantungan pada informasi sistem kredit sosial yang dapat menimbulkan masalah terkait penindasan digital dan otoritarianisme, serta kekhawatiran terkait bias etnis.

Misalnya, di Tiongkok, sistem kredit sosial saat ini terkait erat dengan sistem hukum, sistem pengadilan, dan hakim. Oleh karena itu, kemungkinan besar sistem Hakim AI juga akan menggunakan data sistem kredit sosial untuk menentukan kredibilitas dan hasil. Sebagaimana dicatat Backer: 'hukum akan menjadi kerangka kerja yang di dalamnya metode baru regulasi sosial dapat dikembangkan ('sesuai dengan hukum')'. Sistem semacam itu tidaklah 'bebas nilai'. Selain itu, sejauh mana inferensi dapat ditarik dari data, dan data apa yang dapat diakses, dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan etika.

Selain bias, tantangan serius bagi Hakim AI juga disebabkan oleh gangguan yang tidak disengaja pada proses otomatis, dan terdapat potensi masalah bias yang dapat timbul akibat campur tangan yang disengaja oleh aktor jahat. Dalam hal ini, Hakim AI menimbulkan masalah tambahan terkait perlindungan keamanan dan terdapat potensi risiko terkait korupsi Hakim AI yang mungkin lebih signifikan daripada risiko apa pun yang ada pada hakim manusia.

8.7 DISKRESI YUDISIAL

Isu-isu juga muncul seputar pelaksanaan diskresi ketika mempertimbangkan sejauh mana hakim harus digantikan oleh AI. Condlin telah mencatat bahwa 'perangkat lunak bersifat logis, tidak masuk akal, dan putusan hukum seringkali membutuhkan kedua kualitas tersebut secara seimbang'. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan tentang pentingnya diskresi yudisial bervariasi dan penulis mencatat bahwa isu-isu yang berkaitan dengan kompleksitas kasus serta variasi dalam hal pendekatan yurisdiksi dapat menyebabkan diskresi yudisial jauh lebih relevan di beberapa negara dan pengadilan dibandingkan di negara dan pengadilan lain. Berbicara terkait pengambilan keputusan otomatis dalam konteks keputusan administratif, Hakim Perry dari Pengadilan Federal Australia, telah mengamati:

Sistem pengambilan keputusan otomatis didasarkan pada logika dan program berbasis aturan yang menerapkan kriteria kaku pada skenario faktual. Yang penting, sistem tersebut merespons informasi masukan yang dimasukkan oleh pengguna sesuai dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, banyak keputusan administratif memerlukan pelaksanaan diskresi atau pembuatan penilaian evaluatif. Ini adalah pertanyaan yang kompleks dan rumit yang tidak dapat ditranskripsikan menjadi kriteria atau aturan yang kaku dan, oleh karena itu, berada di luar kapasitas sistem otomatis untuk

menentukannya. Berbagai faktor mungkin perlu dipertimbangkan satu sama lain dan mungkin dapat diseimbangkan secara tepat. Jika sistem otomatis digunakan dalam kasus semacam ini, bukan hanya mungkin terjadi kegagalan konstruktif untuk menjalankan diskresi; berdasarkan sifatnya, sistem tersebut menerapkan hasil yang telah ditentukan sebelumnya, yang menimbulkan pertanyaan tentang pra-penilaian atau bias.

Sejumlah hakim dari negara-negara hukum umum yang lebih menekankan diskresi yudisial telah menyuarakan kekhawatiran serupa. Lord Sales dari Mahkamah Agung Inggris telah mencatat bahwa gagasan-gagasan bertekstur terbuka seperti keadilan dan kewajiban memberikan ruang bagi nilai-nilai yang lebih luas yang tidak secara eksplisit dirangkum dalam suatu algoritma. Dalam konteks hukum pidana, Hakim Martin dari Mahkamah Agung Queensland di Australia berpendapat bahwa putusan hukuman yang dibuat oleh hakim buatan perlu mengidentifikasi bobot yang diberikan kepada berbagai faktor seperti kesalahan, kerugian, dan sifat pelanggaran. Penulis mencatat bahwa sistem semacam itu telah dikembangkan.

Yang penting, perlu dicatat bahwa variabel-variabel ini tidak ada dalam ruang hampa. Sebaliknya, 'masing-masing merupakan kekuatan yang saling terkait yang mendorong dan menarik ke berbagai arah ... penjatuhan hukuman membutuhkan diskresi yudisial agar keadilan individual dapat tercapai'. Senada dengan itu, penulis sebelumnya telah mencatat bahwa kekakuan beberapa bentuk Hakim AI mungkin tidak sesuai dengan keputusan diskresioner yang 'mungkin perlu mempertimbangkan nilai-nilai komunitas, ciri-ciri subjektif para pihak, dan keadaan sekitar lainnya yang mungkin relevan'. Isu-isu ini mungkin khususnya relevan dalam konteks hukum keluarga. Sebagaimana diuraikan oleh Parkinson di Australia, keputusan hukum keluarga sangat bersifat diskresioner dan tidak ada prinsip kuantifikasi yang dapat memandu penyelesaian sengketa properti.

Terakhir, Taruffo telah membedakan antara diskresioner yang kuat dan yang lemah (atau diatur). Yang pertama ada 'ketika hakim sepenuhnya bebas untuk memilih keputusannya sendiri dalam rentang alternatif yang secara teoritis tidak terbatas'. Sebaliknya, yang terakhir muncul 'ketika hakim relatif bebas untuk memilih keputusannya sendiri tetapi pilihan tersebut harus dibuat baik dalam inventaris alternatif yang telah ditentukan sebelumnya, atau dalam rentang kemungkinan kuantitatif'. Diskresi yang diatur muncul 'ketika batasan, aturan, atau standar ini ditetapkan dan diberlakukan oleh hukum'. Menurut Taruffo, diskresi yang kuat tidak dapat dirasionalisasi dengan alat logika apa pun dan, paling banter, seorang hakim mungkin diharuskan untuk membenarkan pilihannya secara *ex post*. Namun, ketika diskresi yang lemah atau diatur terlibat, terdapat ruang yang lebih luas untuk rasionalisasi *ex ante* atas pilihan diskresi, dan terdapat standar serta kriteria yang telah ada sebelumnya yang menentukan batas-batas diskresi yudisial.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, model-model AI Hakim yang suportif kemungkinan besar akan digunakan oleh hakim di pengadilan tinggi di sebagian besar negara dalam waktu dekat, alih-alih model AI Hakim yang lebih otomatis sepenuhnya yang kemungkinan besar akan dikembangkan di tingkat pengadilan rendah dan pengambilan

keputusan administratif. Dalam hal pengambilan keputusan terkait pengembangan AI Hakim, perbedaan antara tingkat diskresioner mungkin tepat karena pengaturan diskresi yang lemah lebih memungkinkan penerapan AI Hakim.

8.8 SITUASI INOVATIF DAN BARU

AI Hakim juga menimbulkan masalah dalam situasi inovatif dan/atau baru. Menurut Surden, teknik pembelajaran mesin hanya berguna jika informasi baru yang disajikan kepada AI cukup mirip dengan informasi yang telah dianalisis:

Jika program AI disajikan dengan kasus baru tanpa preseden serupa, program tersebut mungkin tidak cocok untuk membuat prediksi atau mencapai suatu hasil. Masalah-masalah ini mungkin muncul dalam Hakim AI di mana ukuran sampel kasus-kasus sebelumnya tidak cukup besar bagi program komputer untuk menemukan pola dan membuat generalisasi yang efektif.

Surden juga mengidentifikasi risiko generalisasi berlebih yang dapat muncul ketika algoritma pembelajaran mesin terlalu peka terhadap idiosinkrasi atau bias dalam set pelatihan, sehingga tidak memadai untuk tugas memprediksi skenario baru di masa mendatang, dan menangani beragam kasus di masa mendatang yang mungkin muncul. Masalah-masalah tersebut lebih bermasalah di beberapa yurisdiksi dan sengketa dibandingkan di yurisdiksi dan sengketa lainnya. Misalnya, ketika pembentukan preseden lebih relevan dan doktrin hukum melibatkan gagasan yang dapat didefinisikan ulang dan dianalisis ulang, masalah-masalah tersebut menjadi lebih relevan.

Sebaliknya, di beberapa pengadilan yang lebih rendah dan di mana preseden dan interpretasi hukum umum kurang relevan, masalah-masalah tersebut jelas kurang bermasalah. Penulis, bersama dengan Cornes, juga telah mengidentifikasi tantangan kebaruan. Lebih lanjut, disarankan bahwa pelaksanaan diskresi yudisial yang terlibat dalam penerapan prinsip pada kasus-kasus baru 'akan selalu membutuhkan evaluasi baru atas keadaan-keadaan di luar kemampuan pembelajaran mesin'. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa batasan yang jelas pada Hakim AI, setidaknya saat ini, berkaitan dengan kasus-kasus baru. Namun, pada saat yang sama, penulis mencatat bahwa para peneliti AI telah berhasil menangani isu-isu semacam ini di luar bidang hukum. Misalnya, penulis dan Cornes mencatat bahwa 'ada banyak contoh di bidang medis di mana AI kini semakin banyak digunakan untuk tujuan diagnostik dan terkait dengan beberapa fungsi manusia'. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa 'analisis prediktif, bahkan ketika terdapat variasi signifikan dalam hal kebaruan, dapat "dipelajari" dan wawasan ini dapat diperluas ke dalam aplikasi Hakim AI'.

8.9 MENCIPTAKAN HUKUM 'BARU' – SISTEM BERBASIS PRESEDEN

Terakhir, pertimbangan juga perlu diberikan pada dampak teknologi dan AI terhadap penulisan putusan dan dengan demikian perkembangan hukum dalam sistem common law.

Kekhawatiran ini tidak hanya terkait dengan bagaimana kasus-kasus baru ditangani, tetapi juga dengan perkembangan hukum secara umum. Ada dua isu yang sangat relevan. Isu pertama telah dibahas sebelumnya dan berkaitan dengan kapasitas AI, bahkan dalam bentuk yang sangat maju, untuk melakukan lebih dari sekadar membuat keputusan atau terlibat dalam dialog apa pun dalam batasan tertentu. Dalam hal ini, masih terdapat isu-isu signifikan terkait kapasitas AI untuk menjelaskan bagaimana keputusan dibuat dan menjelaskannya dengan cara yang mungkin menyerupai alasan atau pendapat yang diartikulasikan oleh hakim manusia.

Sejumlah komentator telah menyatakan kekhawatiran tentang pengembangan AI Hakim mengingat kekurangan ini. Misalnya, Wisser telah mengidentifikasi perlunya sistem otomatis untuk menjelaskan keputusan mereka 'dalam opini tertulis, berlarut-larut, dan dipublikasikan'. Namun, beberapa perkembangan terbaru dalam AI menunjukkan bahwa bentuk-bentuk AI akan mampu menulis secara kreatif dalam dekade mendatang, terutama mengingat perangkat lunak GPT dan perkembangan terkait (di mana proses penulisan seperti manusia menjadi fokus), meskipun sebagian besar menganggap bahwa AI lebih mungkin digunakan untuk membantu manusia daripada menggantikannya dalam hal karya kreatif.

Di sisi lain, Volokh berpendapat bahwa Hakim AI diharapkan untuk menawarkan lebih banyak opini tertulis yang mendukung penilaian mereka daripada hakim manusia justru karena mereka mungkin kurang kreatif:

Bagi hakim manusia, kita umumnya harus memercayai pelaksanaan diskresi mereka, baik berdasarkan pengetahuan kita tentang karakter hakim, harapan kita bahwa hakim dengan terhormat mengikuti sumpah ketidakberpihakan mereka, atau pada akhirnya kebutuhan semata: beban kerja pengadilan yang padat tidak memungkinkan hakim menulis opini terperinci yang mendukung setiap keputusan pada setiap mosi. Namun, hakim AI tidak memiliki bonafiditas pribadi yang mungkin membuat kita memercayai mereka. Justifikasi tertulis mereka adalah satu-satunya yang dapat membuat kita menerima keputusan mereka.

Isu kedua berkaitan dengan penulisan putusan dan fakta bahwa bahkan satu putusan atau pendapat tunggal yang tidak bertentangan dapat mengarah pada pengembangan hukum, terutama jika melibatkan analisis hukum dari perspektif yang berbeda. Dalam hal ini, pemaparan alasan hakim merupakan ciri utama sistem hukum umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Sundares Menon, Ketua Mahkamah Agung Singapura: 'kasus adalah urat nadi hukum'.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dampak sosial yang lebih luas yang mungkin dimiliki hakim terhadap pengembangan hukum dapat sangat luas. Memang, dalam banyak sistem hukum umum, apa yang pada akhirnya dapat dikodifikasikan mungkin awalnya sering kali muncul dari fokus peradilan pada beberapa aspek interaksi sosial. Intinya, ada alasan kuat mengapa banyak orang menganggap bahwa seringkali orang-orang paling cerdas di masyarakatlah yang menjadi hakim. Sederhananya: mereka kemudian dapat memiliki kesempatan untuk membentuk hukum agar tetap relevan dan responsif, dan dalam banyak sistem peradilan mereka memainkan peran penting dalam hal tersebut.

8.10 KESIMPULAN

Pengembangan AI Hakim bergantung pada berbagai faktor. Pertama, teknologinya harus mampu mempertimbangkan dan menimbang bukti dalam konteks situasi dan hukum yang berlaku. Saat ini, hal ini berarti AI Hakim mengharuskan bukti tertulis (meskipun penulis mencatat bahwa konversi suara ke teks kemungkinan akan memiliki dampak yang lebih signifikan dalam jangka pendek). Namun, meskipun demikian, masih terdapat permasalahan tentang bagaimana inferensi dapat ditarik dan kesimpulan dibuat bahwa satu matriks faktual atau proposisi lebih meyakinkan daripada yang lain. Kedua, teknologinya harus mampu membuat keputusan dan menjelaskan keputusan tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, kemampuan menjelaskan tetap menjadi isu penting dalam AI Hakim, meskipun kemampuan menjelaskan yang sederhana sudah dimungkinkan. Ketiga, AI Hakim mengharuskan orang-orang memercayai hasil yang dicapai. Kepercayaan dalam hal ini kemungkinan besar terkait dengan pengembangan kepercayaan terhadap bentuk-bentuk AI yang ada di luar ranah hukum.

Namun, yang terpenting, pengembangan AI Hakim akan bergantung pada di mana dalam sistem peradilan AI akan diterapkan dan bagaimana caranya. Sebagaimana telah dibahas, terdapat permasalahan kesenjangan digital yang berkelanjutan yang menunjukkan bahwa kehati-hatian harus dilakukan dalam pengembangan Hakim AI terkait gugatan kecil yang kemungkinan melibatkan anggota masyarakat yang lebih rentan dengan beberapa kekurangan teknologi (baik dalam hal akses maupun kapasitas). Di banyak yurisdiksi, terdapat pula permasalahan yang terkait dengan peran hakim dalam hal pengembangan hukum dan pemeliharaan serta dukungan berkelanjutan terhadap sistem peradilan. Dalam hal ini, terdapat kekhawatiran yang berkelanjutan tentang bagaimana menjaga keberlanjutan pengembangan hukum tersebut. Terdapat pula kekhawatiran terkait apa yang mungkin hilang ketika Hakim AI dikembangkan lebih lanjut. Završnik, berbicara terkait prosedur peradilan pidana, berpendapat bahwa jika proses tersebut terkomputerisasi, akan muncul pertanyaan serius yang berkelanjutan tentang apa yang diabaikan.

Terlepas dari permasalahan ini, jelas bahwa di beberapa negara, Hakim AI sudah berada pada tahap pengembangan, yang berarti akan menjadi fitur di beberapa pengadilan dalam waktu dekat. Untuk mengembangkan Hakim AI, selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, perlu dikaji batasan-batasan yang seharusnya ada. Keputusan-keputusan tersebut dapat diinformasikan tidak hanya melalui pemahaman tentang tujuan-tujuan dalam sistem peradilan dan peradilan, tetapi juga melalui penggunaan kerangka kerja etika untuk menginformasikan pengambilan keputusan, yang dipadukan dengan proses desain yang berpusat pada manusia yang membutuhkan fokus berkelanjutan pada kesejahteraan dan martabat manusia.

BAB 9

ISU ETIKA DALAM KECERDASAN BUATAN HAKIM

9.1 PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan hakim, bersama dengan penggunaan teknologi yang lebih baru oleh hakim, dapat menimbulkan kekhawatiran etika. Isu-isu tersebut dapat bersifat kontekstual. Misalnya, penggunaan teknologi mungkin dianggap etis ketika digunakan oleh hakim dalam satu konteks tetapi tidak dalam konteks lain. Selain itu, perbedaan yurisdiksi berarti bahwa apa yang dianggap etis atau penggunaan teknologi yang tepat di satu yurisdiksi mungkin tidak dianggap demikian di yurisdiksi lain. Nilai-nilai dan tujuan yang mendasari sistem peradilan di setiap yurisdiksi dapat membantu menentukan apakah suatu tindakan etis atau tidak, dan keputusan tentang bagaimana menyusun dan menafsirkan pedoman etika nasional dan regional juga dapat relevan.

Perbedaan pandangan tentang apa yang 'adil' dan perbedaan pemahaman tentang tujuan dan nilai-nilai yang mendasari sistem peradilan berarti bahwa menciptakan kerangka etika yang sama bagi hakim dalam hal penggunaan teknologi merupakan tugas yang sulit. Namun, beberapa kerangka etika dasar yang dapat diperluas dan divariasikan di berbagai yurisdiksi dapat sangat berharga dalam menginformasikan respons peradilan individual, membantu pengembangan sistem peradilan di masa mendatang, dan memandu pengambilan keputusan pengadilan dan sistemik di berbagai yurisdiksi (misalnya, dalam mempertimbangkan kasus apa yang dapat dirujuk kepada Hakim AI).

Panduan etika umum terkait AI relevan dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi yang lebih spesifik di sektor peradilan. Dalam hal ini, terdapat banyak literatur dan sejumlah lembaga serta proyek penelitian yang berfokus pada etika dan AI. Dalam kebanyakan kasus, pendekatan etika diinformasikan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan nilai dan tujuan sebelum menggunakan kerangka etika yang mengacu pada prinsip-prinsip spesifik untuk menentukan respons apa yang mungkin benar atau salah. Secara umum, masalah etika tentang AI dan penggunaan teknologi dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori besar:

- Keadilan, Transparansi, dan Keterjelasan;
- Tanggung Jawab dan Akuntabilitas;
- Ketahanan dan Keandalan;
- Privasi dan Kepercayaan; dan
- Keselamatan dan Keamanan.

Masing-masing area perhatian etika ini juga relevan ketika mempertimbangkan hakim, teknologi, dan AI. Namun, di setiap area terdapat sub-faktor relevan yang berbeda dan, mengingat konteks sosial tempat hakim bekerja, terdapat kebutuhan untuk menggabungkan nilai-nilai dan tujuan keadilan yang menyeluruh.

Sehubungan dengan fokus pada teknologi, pengadilan, dan etika, pengaturan COVID-19 telah menyebabkan beberapa pemikiran ulang tentang pedoman umum yang mungkin

berlaku untuk penggunaan pengadilan dan teknologi. Misalnya, Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan (CEPEJ) Dewan Eropa mengumumkan deklarasi terkait pandemi COVID-19 yang mencakup hal-hal berikut:

Prinsip 5 (Keadilan Siber)

Penggunaan teknologi informasi menawarkan peluang bagi layanan publik peradilan untuk terus berfungsi selama krisis kesehatan. Namun, kemunculannya yang cepat dan penggunaan yang berlebihan juga dapat membawa konsekuensi negatif.

Solusi TI, seperti layanan daring, sidang jarak jauh, dan konferensi video, serta pengembangan peradilan digital di masa mendatang harus selalu menghormati hak-hak dasar dan prinsip-prinsip peradilan yang adil.

Untuk mengurangi risiko yang melekat dalam penerapan TI, penggunaan dan aksesibilitasnya bagi semua pengguna harus memiliki dasar hukum yang jelas. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok yang paling rentan dalam hal ini. Oleh karena itu, dampak penggunaan teknologi ini terhadap penyelenggaraan peradilan harus dievaluasi secara berkala dan langkah-langkah perbaikan harus diambil bila diperlukan. Memastikan keamanan siber dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas.

Khususnya, pedoman etika non-COVID yang lebih baru mendorong gagasan bahwa penggunaan AI dan teknologi di bidang peradilan harus diatur oleh tujuan-tujuan yang menyeluruh. Misalnya, tujuan 'bahwa penggunaan teknologi harus mendukung sistem peradilan yang berkelanjutan' dapat merujuk pada tujuan-tujuan terkait keberlanjutan dalam hal tata kelola dan pembangunan kepercayaan. Selain itu, sebagaimana dibahas di akhir bab ini, peningkatan kesejahteraan manusia juga dapat dianggap sebagai tujuan menyeluruh yang relevan, terutama di bidang-bidang aktivitas manusia yang ada dan dianggap memiliki dampak sosial yang luas.

Banyak pertanyaan telah diajukan terkait penggantian bentuk-bentuk penting pengambilan keputusan manusia dengan AI, meskipun beberapa materi yang berkaitan dengan AI secara umum mungkin kurang relevan dengan AI Hakim. Terkait panduan khusus terkait AI dan hakim, perkembangan di Eropa pada tahun 2018 telah mendorong beberapa pertimbangan internasional terkait isu-isu terkait AI, hakim, dan penggunaan teknologi. Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan (CEPEJ) Dewan Eropa, misalnya, telah menerbitkan materi yang diadopsi pada akhir 2018 berjudul 'Piagam Etika Eropa tentang penggunaan Kecerdasan Buatan dalam sistem peradilan dan lingkungannya' (Piagam AI Eropa) yang akan dibahas nanti dalam bab ini.

Materi CEPEJ menyoroti beberapa isu etika yang relevan dalam hal pengadilan dan teknologi serta pengembangan AI Hakim. Ini mencakup kekhawatiran terkait dampak terhadap masyarakat (terutama yang paling rentan) yang juga dapat dikaitkan dengan pertanyaan mengenai jenis kasus yang mungkin melibatkan bentuk AI yang lebih berkembang, bagaimana masalah privasi dan kerahasiaan ditangani, bagaimana hak-hak fundamental didukung, dan bagaimana keadilan dan transparansi dapat dipastikan.

Sehubungan dengan materi yang lebih terbatas terkait Hakim AI dan peran hakim, banyak diskusi etika tampaknya berasumsi bahwa peran hakim melibatkan (atau terutama melibatkan) penyajian 'data' yang mengarah pada pengambilan keputusan selanjutnya. Namun, peran hakim jauh lebih kompleks. Variasi yang luas dalam hal fungsi peradilan juga dapat menimbulkan pertanyaan terkait tujuan moral keadilan dan mungkin menyarankan bahwa referensi terhadap fungsi peradilan yang lebih luas harus dimasukkan ke dalam pedoman etika apa pun yang berkaitan dengan Hakim AI.

Terdapat isu-isu lain yang terkait dengan laju perubahan teknologi dan pengembangan pedoman etika. Sebagaimana diuraikan oleh Donoghue: 'pemahaman kita tentang pertanyaan etika dan moral terkait penggunaan TI tertinggal jauh di belakang kemajuan teknologi yang sedang berkembang pesat'. Donoghue berpendapat bahwa laju perubahan teknologi 'belum disertai dengan pengawasan yang memadai terhadap dampak teknologi terhadap partisipasi pengguna pengadilan atau hasil perkara atau bahkan analisis yang ketat terhadap konsekuensi normatif atau sosial dari serangkaian reformasi hukum yang semakin cepat diberlakukan ini'. Penulis mencatat bahwa isu-isu ini menjadi semakin relevan di era COVID-19 sebagai akibat dari perubahan cepat yang telah diperkenalkan untuk memungkinkan penyampaian layanan pengadilan jarak jauh.

Selain itu, sebagaimana telah dicatat oleh pihak lain, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa isu-isu etika ditangani 'secara proaktif'. Sebagaimana di bidang kesehatan, terdapat risiko yang signifikan ketika reformasi yang diperkenalkan tidak 'berwawasan etika'. Dalam keadaan seperti itu, peluang sosial dan biaya pengembangan mungkin signifikan karena kemajuan teknologi dibayangi oleh isu-isu terkait penolakan sosial dan legislasi yang menyimpang atau tidak tepat.

Beberapa tantangan khusus muncul ketika mendefinisikan tujuan moralitas sedemikian rupa sehingga memungkinkan Hakim AI untuk membuat penilaian moral substantif. Davis mencatat bahwa teknologi baru memberikan arti penting baru pada salah satu perbedaan pendapat paling mendasar dalam yurisprudensi: peran moralitas dalam menentukan apa hukum itu. Bagi positivis hukum, tidak diperlukan penilaian moral substantif untuk mengatakan apa hukum itu. Dalam pandangan ini, AI akan mampu menggantikan hakim manusia jika komputer dapat menjadi lebih baik dalam membuat penilaian yang murni positif tentang hukum daripada manusia. Namun, dalam pandangan keadilan alami atau responsif terhadap hukum dan moralitas, seorang pengambil keputusan AI juga harus mampu membuat dan bertindak sesuai dengan penilaian moral tentang isu-isu hukum.

Hal lain yang relevan berkaitan dengan kurangnya kejelasan baik secara teknis maupun filosofis dalam menentukan apa yang dimaksud dengan usulan bahwa etika dapat 'diintegrasikan' ke dalam AI. Dalam hal ini, sering diasumsikan bahwa ketika teknologi baru dibangun, pengembangannya dapat dipandu oleh prinsip-prinsip etika yang jelas. Pendekatan ini tentu saja dipertimbangkan oleh banyak raksasa teknologi. Misalnya, perusahaan teknologi besar mungkin memutuskan untuk tidak mendukung pengembangan pengenalan wajah kecuali persyaratan etika tertentu terpenuhi. Demikian pula, raksasa teknologi besar mungkin menganggap pengembangan perangkat 'pembunuhan yang dikendalikan dari jarak jauh' tidak

etis. Namun, 'membangun' pertimbangan etika bermasalah karena teknologi yang dikembangkan untuk satu tujuan (yang 'aman') dapat digunakan dengan cara lain yang tidak etis atau berbahaya. Ada juga kekhawatiran bahwa pengambilan keputusan etis berada di tangan raksasa teknologi yang mungkin memiliki berbagai insentif untuk mengembangkan teknologi yang tidak mendukung kebaikan sosial atau kesejahteraan manusia. Akibatnya, panduan etika yang semakin melibatkan pertimbangan lokasi penggunaan AI dan 'siklus hidup AI' sebagaimana dibahas nanti dalam bab ini.

Akhirnya, sebagaimana dicatat oleh Susskind, muncul masalah di mana orang mungkin berharap akan perbaikan teknis yang cepat untuk kekurangan AI, meskipun faktanya tugas semacam itu jauh lebih mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dalam keadaan di mana hasil yang cepat dicari, terdapat risiko bahwa pedoman etika tidak akan dipertimbangkan secara memadai baik selama tahap pengembangan maupun penggunaan berkelanjutan. Misalnya, dalam AI dan hukum, ada sejumlah peneliti yang mempertimbangkan bagaimana pengembangan teknologi hukum akan berdampak pada pengacara; namun, perluasan teknologi tersebut ke pengadilan dan hakim belum tentu dipertimbangkan. Hal ini menjadi masalah karena pengacara dapat menggunakan teknologi tersebut dan hakim mungkin perlu membuat keputusan berdasarkan interpretasi yang diberikan oleh teknologi yang digunakan oleh pengacara. Selain itu, hakim sendiri dapat menggunakan teknologi tersebut tanpa mempertimbangkan risiko etika tambahan yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi tersebut oleh pengadilan.

Dalam bab ini, sebagian besar fokusnya adalah pada Hakim AI dengan pembahasan awal tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan Hakim AI yang relevan dengan pendekatan etika yang lebih luas. Hal ini diikuti dengan pertimbangan tentang bagaimana dan sejauh mana tepat untuk mempertahankan penilaian manusia, jenis masalah apa yang dapat dirujuk ke Hakim AI, dan pertanyaan triase apa yang mungkin relevan sebelum mempertimbangkan secara khusus prinsip-prinsip etika. Di akhir bab ini, terdapat pembahasan yang lebih luas tentang hakim dan penggunaan teknologi. Di sini, materi disajikan dengan pedoman etika yang diusulkan yang menyoroti pertimbangan yang mungkin berlaku untuk penentuan etika kontekstual.

9.2 HAKIM AI DAN ETIKA

Sebagian besar kekhawatiran etika muncul dalam konteks Hakim AI di mana terdapat penggantian hakim secara menyeluruh dan, pada tingkat yang jauh lebih rendah, dalam pengembangan Hakim AI yang suportif. Memang, beberapa pemikir awal di bidang AI menganggap bahwa, dari semua kelompok dalam masyarakat, hakim tidak boleh digantikan oleh AI. Kekhawatiran ini sebagian terkait dengan kekhawatiran bahwa AI pada akhirnya mungkin 'mengambil alih' dunia dan bahwa manusia mungkin digantikan oleh bentuk-bentuk AI. Pandangan yang agak distopia ini dianut oleh banyak pemikir terkemuka di bidang AI seperti Elon Musk dan Bill Gates. Khususnya, profesor terkemuka Stephen Hawking menyatakan bahwa:

Pengembangan kecerdasan buatan yang lengkap dapat menandai akhir umat manusia. Begitu manusia mengembangkan kecerdasan buatan, ia akan lepas landas dengan sendirinya dan mendesain ulang dirinya sendiri dengan kecepatan yang terus meningkat. Manusia, yang dibatasi oleh evolusi biologis yang lambat, tidak dapat bersaing dan akan tergantikan.

Dalam formulasi cakupan potensial AI ini, hakim manusia dapat dianggap sebagai penjaga sistem peradilan dan bahkan mungkin penjaga gerbang atau pelindung umat manusia. Dalam hal ini, hakim dapat dianggap penting dalam memastikan pengurangan penggunaan AI yang tidak etis dan melanggar hukum. Pada dasarnya, mengganti hakim manusia dengan Hakim AI dapat berarti penjaga gerbang pengembangan AI adalah bentuk-bentuk AI lainnya. Kekhawatiran ini tidak terbatas pada kasus pengadilan bernilai tinggi. Misalnya, tindakan pengadilan bernilai rendah yang sering terjadi akibat bentuk AI yang bias atau tidak tepat dapat tetap tidak terdeteksi oleh Hakim AI. Jelas, kerugian sosial dan individu dapat diakibatkan oleh kurangnya deteksi ini. Sementara beberapa dari kekhawatiran ini terkait dengan pentingnya manusia tetap terlibat dalam pengembangan dan penerapan hukum, isu lain yang terkait dengan etika dan Hakim AI dapat dikaitkan dengan ketakutan tentang hilangnya empati, kebijaksanaan, dan kreativitas manusia karena penjaga masyarakat manusia yang adil menjadi bentuk AI.

Kekhawatiran lain tentang potensi hasil Hakim AI diilustrasikan dalam kisah berikut yang dituturkan oleh Nicolson:

Sebuah cerita pendek berjudul "Non Sub Homine", yang ditulis oleh seorang pengacara dengan nama samaran H.W. Whyte, menjadi bahan diskusi mengenai penerapan teknologi dalam proses peradilan. Kisah ini berlatar di masa depan di gedung pengadilan Foley Square 'lama' di New York. Sebuah komputer, yang disebut '2-10', yang dioperasikan oleh seorang pria bernama Cook dan asistennya Jane, telah menggantikan pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun banding. Meskipun komputer tersebut awalnya dimaksudkan sebagai pustaka keputusan hukum, pendapatnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah diputuskan segera diterima sebagai sesuatu yang tidak dapat dibatalkan.

.... [D]alam empat setengah tahun masa bakti penuh, 2-10 telah menumbuhkan rasa hormat baru terhadap hukum.... karena Cook tahu bahwa masyarakat merasa mereka tidak lagi tunduk pada keanehan peradilan yang inheren politis, keinginan yang tak masuk akal, dan fluktuatifnya penyakit ulkus. Dengan mengambil hukum dari tangan manusia, 2-10 telah menempatkannya di luar korupsi.

Namun kali ini, 2-10 tidak dapat mencapai keputusan. '[Sebuah] pertanyaan sederhana tentang pengalihan sewa di bawah kontrak yang ambigu' membekukan komputer. Komputer mencetak dua keputusan, satu yang menguntungkan penggugat dan satu untuk tergugat, tetapi tidak dapat memilih di antara keduanya karena 'tidak ada apa pun dalam [pendapat] yang tidak sepenuhnya dibenarkan.' "2-10 tidak mungkin salah," Cook mendapati dirinya berkata "Tidak dapat dibiarkan gagal."

Cook merobek pendapat yang menguntungkan tergugat dan memerintahkan Jane, atas protesnya, untuk mengajukan pendapat yang menguntungkan penggugat. Cook segera memprogram 2-10 untuk memilih pendapat secara acak ketika kasusnya seimbang. Namun, menyadari bahwa kepercayaan publik yang ditimbulkan oleh kemampuan 2-10 untuk menegakkan keadilan yang sempurna akan hancur jika publik mengetahui komputer tersebut gagal mengambil keputusan, Cook menyimpulkan bahwa Jane harus dibunuh untuk memastikan keamanan rahasianya.

Sehubungan dengan cerita di atas, sebuah opini oleh Richard Posner diberikan:

Hakim Richard A. Posner, dalam *Overcoming Law*, menyimpulkan bahwa *Non Sub Homine* 'tidak memiliki nilai sastra.' Meskipun demikian, ia mengakui bahwa

[p]ertama-tama, cerita tersebut membuat kita berpikir tentang unsur kreativitas yang tak terhapuskan dalam penilaian hukum. Komputer telah diprogram dengan semua kasus yang telah diputuskan. Komputer seharusnya memutuskan kasus-kasus baru dengan merujuk pada kasus-kasus tersebut. Namun, banyak dari kasus-kasus yang telah diputuskan tersebut (semua yang bukan sekadar pengulangan dari kasus-kasus sebelumnya) dulunya adalah kasus-kasus baru. Bagaimana sebuah kasus baru dapat diputuskan jika satu-satunya bahan untuk keputusan adalah kasus-kasus lama yang menurut definisi berbeda darinya?

Tentu saja, pertanyaan tentang penggunaan data dan ketersediaan data yang bermanfaat sangat penting dalam konteks Hakim AI. Bahasa Indonesia: Menggunakan data dari kasus yang diputuskan, misalnya, kemungkinan akan mengarah pada pengambilan keputusan yang salah sebagian karena banyak kasus perdata yang berakhir dengan putusan kemungkinan akan menyimpang dalam beberapa hal. Menggunakan data lain juga bermasalah dan ada kekhawatiran khusus yang muncul dalam konteks penggunaan data yang lebih luas. Ini termasuk, misalnya, penggunaan data pengawasan sosial.

Harvey memberikan deskripsi yang disederhanakan tentang proses yang harus diambil oleh Hakim AI. Namun, perlu dicatat bahwa pengambilan keputusan hakim manusia sebagian besar dipertahankan dalam model Harvey, dan harus dikatakan bahwa ini adalah kasus di sebagian besar model Hakim AI. Namun, semakin banyak eksperimen telah dilakukan menggunakan program komputer AI untuk memprediksi hasil kasus berdasarkan informasi tekstual (analisis prediktif) yang menunjukkan bahwa penggantian manusia akan mungkin dilakukan di tahun-tahun mendatang. Misalnya, selain perkembangan di Tiongkok, Aletras dan rekan-rekannya mengembangkan sebuah program yang menganalisis secara tekstual keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa untuk menemukan pola-pola dalam putusan-putusan. Program tersebut mempelajari pola-pola ini dan mampu memprediksi hasil dari kasus-kasus yang disajikan kepadanya dalam bentuk tekstual dengan akurasi rata-rata 79 persen. Ini adalah contoh pembelajaran mesin, di mana sistem komputer mampu 'menganalisis data masa lalu untuk mengembangkan aturan-aturan yang dapat digeneralisasikan untuk masa depan'.

Seperti yang telah disebutkan, pembelajaran mesin memungkinkan program-program komputer untuk mempelajari tugas-tugas kompleks melalui pengalaman, alih-alih melalui fungsi-fungsi komputer yang dibuat secara manual.

Surden dan yang lainnya mencatat bahwa pembelajaran mesin mungkin memiliki beberapa keterbatasan dalam pengembangan AI yang efektif yang dapat memprediksi hasil hukum. Sebagaimana disebutkan di atas, teknik pembelajaran mesin hanya berguna jika informasi yang dianalisis serupa dengan informasi baru yang disajikan kepada AI. Jika program AI disajikan dengan kasus baru yang tidak memiliki preseden serupa, program tersebut mungkin tidak cocok untuk membuat prediksi atau mencapai suatu hasil. Masalah-masalah ini juga dapat muncul jika ukuran sampel kasus sebelumnya tidak cukup besar bagi program komputer untuk menemukan pola dan membuat generalisasi yang efektif. Singkatnya, hilangnya manusialah yang mengakibatkan potensi kerugian dan menimbulkan risiko etika, terutama karena situasi baru tidak dapat ditangani secara memadai oleh bentuk-bentuk AI yang ada.

9.3 SEBERAPA BANYAK PENILAIAN MANUSIA AKAN DIPERTAHANKAN?

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penting untuk dicatat bahwa meskipun ada sensasi teknologi, Hakim AI, alih-alih Hakim AI yang mendukung, tidak mungkin memberi dampak signifikan di banyak yurisdiksi dalam jangka pendek. Akan tetapi, meskipun demikian, seiring Hakim AI mulai berkembang di pinggiran sistem peradilan, ada kebutuhan untuk panduan etika. Misalnya, mengingat berbagai masalah etika dan masalah lain yang muncul terkait Hakim AI, sejumlah komentator telah menegaskan bahwa sangat penting bagi pengacara dan hakim manusia untuk tetap terlibat dalam proses pengadilan, bahkan ketika teknologi yang sepenuhnya otomatis digunakan untuk membuat keputusan. Menurut Hakim Perry dari Pengadilan Federal Australia, 'mekanisme verifikasi dan audit yang tepat perlu diintegrasikan ke dalam sistem sejak awal, dan mekanisme yang tepat untuk peninjauan dalam kasus individual oleh manusia, harus diterapkan'.

Secara khusus, perlu dicatat bahwa otomatisasi yang mensyaratkan penerapan kriteria yang ketat, alih-alih pelaksanaan diskresi atau penilaian berbasis nilai, harus menjadi subjek pengawasan yang cermat untuk mencegah keputusan yang tidak adil atau sewenang-wenang. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara. Misalnya, dalam beberapa keadaan, Hakim AI dapat bersifat penasihat dan bukan determinatif. Dalam konteks ODR, di mana opsi penentu dan penasihat mungkin ada, Zeleznikow telah memperingatkan agar ODR tidak sepenuhnya diotomatisasi, menunjukkan bahwa sistem tersebut harus bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan daripada merebut fungsi ini. Seperti yang dirangkum oleh Feldman, jika warga negara biasa ingin memiliki kepercayaan pada kredibilitas AI, harus ada metode untuk menganalisis dan memvalidasi pilihan yang dibuat. Pengamatan ini didukung oleh evaluasi *Rechtswijzer* alat ODR sebelumnya untuk memisahkan pasangan di Belanda yang menemukan bahwa meskipun peserta puas dengan pengalaman mereka menggunakan program tersebut, mayoritas masih merasa perlu adanya pemeriksaan pihak ketiga atas perjanjian yang dibuat melalui sistem tersebut.

Hak untuk mengajukan banding atas keputusan Hakim AI juga telah ditekankan oleh sejumlah komentator. Menurut Zalnieriute, Bennett Moses, dan Williams, otomatisasi dapat membahayakan hak proses hukum individu dengan melemahkan kemampuan suatu pihak untuk menggugat keputusan yang memengaruhi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan proses otomatis tidak menghalangi para pihak untuk mengakses atau menilai informasi yang digunakan untuk membuat keputusan.

Hal ini juga telah dikaji oleh penulis bersama Li dan Burke, yang merujuk pada risiko bahwa proses yang digunakan untuk mencapai suatu hasil, terutama oleh teknologi yang lebih 'disruptif' yang melibatkan AI yang dikembangkan, mungkin kurang terlihat oleh para pihak. Penulis mencatat bahwa masalah transparansi dan keadilan alamiah dapat muncul sebagai akibat dari Hakim AI. Lord Sales dari Mahkamah Agung Inggris, misalnya, telah menekankan pentingnya memungkinkan 'tantangan ex post' terhadap keputusan sehingga memungkinkan 'koreksi kesalahan hukum dan injeksi ekuitas dan belas kasihan'. Lebih lanjut, di Estonia, di mana Kementerian Kehakiman sedang mengembangkan hakim robot untuk sengketa kontrak kecil, model tersebut menyediakan bahwa keputusan AI dapat diajukan banding ke hakim manusia.

Morison dan Harkens telah membedakan antara pendekatan manusia 'dalam-lingkaran' dan manusia 'pada-lingkaran'. Di Amerika Serikat, *COMPAS* sebuah alat pembuat keputusan otomatis adalah contoh alat '*in-the-loop*' manusia di mana manusia diharuskan untuk memilih dan memandu masukan. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung Wisconsin telah memutuskan bahwa mengandalkan alat ini dalam keputusan hukuman diperbolehkan, asalkan keputusan tersebut tidak sepenuhnya didelegasikan kepada keluaran perangkat lunak pembelajaran mesin. Sebaliknya, keterlibatan manusia dalam alat '*on-the-loop*' berada pada tahap eksekusi akhir. Dengan demikian, manusia mengambil peran sebagai pengawas atau korektor prediksi atau penentuan algoritmik.

Para komentator telah mengajukan sejumlah pembenaran untuk pendekatan yang mempertahankan beberapa tingkat penilaian manusia. Menurut Morison dan Harkens, setiap pertentangan antara apa yang dianggap sah dan adil oleh AI dan pengambil keputusan manusia seharusnya tidak dipandang sebagai inefisiensi, melainkan bermanfaat karena 'mempertahankan perdebatan mengenai nilai dan tujuan proses semacam itu penting, karena memungkinkan perdebatan yang sadar mengenai utilitas dan kesesuaian alat-alat tersebut'. Brennan-Marquez dan Henderson berpendapat bahwa mempertahankan pengawasan manusia dapat berarti bahwa pihak-pihak yang terdampak 'lebih mudah menghormati hasil yang sulit diterima ketika mereka tahu bahwa manusia ikut serta dalam proses pengambilan keputusan'. Alasan lain mengapa manusia harus tetap 'terlibat', meskipun hal itu mengurangi akurasi dan konsistensi, terkait dengan konsep 'reversibilitas peran' dalam pengambilan keputusan:

Mereka yang melakukan penilaian harus secara timbal balik rentan terhadap proses dan dampaknya.

Maka, yang penting bukanlah fakta kemanusiaan itu sendiri. Yang penting adalah apakah para pengambil keputusan berada dalam posisi yang memungkinkan mereka membayangkan diri mereka sebagai pihak yang terdampak, dan sebaliknya sehingga kedua belah pihak, dan dalam arti tertentu seluruh komunitas moral, dapat memahami penghakiman sebagai tindakan demokratis.

Dalam hal kepraktisan menjaga agar para pengambil keputusan manusia tetap terlibat dan terlibat, Re dan Solow-Niederman menguraikan dua opsi yang memungkinkan. Pertama, 'hakim manusia dan AI dapat berkolaborasi dengan beroperasi secara bersamaan pada tahap-tahap tertentu dalam proses peradilan'. Hal ini dapat terjadi dengan mempertahankan pengawasan dan keterlibatan manusia pada titik-titik tertentu atau menggabungkan pengawasan manusia di tahap awal atau akhir suatu keputusan hukum.

Opsi kedua adalah 'membagi jenis-jenis pengambilan keputusan peradilan yang berbeda kepada manusia, bukan aktor mekanis'. Pemisahan yang dihasilkan dapat didasarkan pada pokok bahasan, atau penentuan yang lebih rinci tentang bagian-bagian keputusan hukum yang menimbulkan masalah keadilan tertentu. Pembagian kerja ini mempertahankan 'peran tradisional manusia dalam sistem pengambilan keputusan AI, bahkan jika peran tersebut menimbulkan peluang yang lebih besar untuk bias, kesewenang-wenangan, kesalahan, dan biaya'. Namun, pada saat yang sama, diakui bahwa ada 'kesulitan pragmatis' yang dapat menghambat upaya untuk membagi tugas manusia dan AI dengan cara yang diinginkan untuk menjaga kebijaksanaan manusia, termasuk ketidakmampuan untuk mengetahui keseimbangan yang tepat antara aktivitas manusia dan AI sebelum eksperimen. Dengan demikian, ada risiko bahwa 'pengejaran kolaborasi manusia-AI ... dapat berakhir menjadi lebih seperti yang terburuk dari kedua dunia daripada yang terbaik jika pilihan kebijakan yang salah diambil'.

9.4 EMOSI DAN PENILAIAN

Pertanyaan muncul mengenai apakah suatu proses otomatis dapat memiliki otoritas rasional dan emosional untuk mengambil keputusan menggantikan hakim manusia. Pada tahun 2003, Michael Kirby, mantan Hakim Pengadilan Tinggi di Australia, menyatakan bahwa sulit membayangkan sebuah mesin yang memiliki kemauan untuk menegakkan keadilan. Hal ini penting karena Kirby mencatat bahwa pengadilan dinilai 'tidak hanya berdasarkan apa yang mereka lakukan, tetapi juga bagaimana mereka melakukannya'. Kirby melanjutkan, menyatakan bahwa pengadilan juga berperan dalam membantu manusia, 'termasuk dalam situasi yang penuh kecemasan, tekanan, dan ketidaknyamanan'. Yang penting:

Fungsi mereka tidak terbatas hanya pada efisiensi pemrosesan atau pengalihan beban kasus yang terus meningkat. Tugas mereka mencakup perwujudan komitmen tertinggi sebuah lembaga pemerintahan yang esensial terhadap tujuan ganda, yaitu penegakan hukum yang tertib, yang diimbangi oleh gagasan manusia tentang keadilan dan kewajiban.

Ketua Mahkamah Agung Allsop dari Pengadilan Federal Australia berpendapat bahwa 'pengadilan melibatkan penalaran dan emosi manusia, dan bahwa pengadilan bersifat manusiawi'. Penulis bersama Cornes juga berpendapat bahwa Hakim AI dapat 'mengurangi kapasitas proses peradilan untuk menangani orang-orang di pengadilan dengan bermartabat dan untuk merespons secara manusiawi (yang dapat menggabungkan emosi dan kasih sayang)'. Namun, pada saat yang sama, penulis dan Cornes mencatat bahwa 'di masa mendatang mungkin dapat dikembangkan aplikasi berkode yang mampu mengenali dan merespons emosi manusia dengan tepat'.

Sebaliknya, Ápeteta berpendapat bahwa: 'hakim ideal' adalah 'hakim impersonal yang menggunakan metode hukum objektif untuk menyelesaikan sengketa'; 'seseorang terpelajar yang mampu mengesampingkan "dirinya" dalam proses peradilan'; dan seseorang yang mampu meninggalkan nilai-nilai pribadi, ideologi, dan bias budayanya. Sebaliknya, 'konsep keadilan manusia tidak dapat dipisahkan dari keyakinan, pengalaman, dan emosi pribadi manusia konkret'. Secara signifikan, Ápeteta menyimpulkan bahwa keengganan untuk merangkul hakim robot mengungkapkan banyak hal tentang citra masyarakat tentang 'hakim yang baik'. Citra ini tidak sesuai dengan 'hakim ideal', melainkan 'adalah hakim yang akan menginvestasikan rasa keadilannya untuk mencapai solusi yang tepat'.

Pertanyaan tentang pentingnya 'emosi' yudisial, kemanusiaan, dan perannya dalam pengambilan keputusan moral dapat dikaitkan dengan pedoman etika yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan martabat manusia. Jika hakim memainkan peran substantif dalam tindakan pengadilan di mana faktor-faktor tersebut relevan, maka pedoman etika dapat mendukung Hakim AI, bukan Hakim AI.

9.5 KASUS APA SAJA?

Terdapat beberapa perdebatan mengenai jenis kasus di mana Hakim AI akan tepat untuk digunakan. Beberapa komentator berpendapat bahwa, mengingat tantangan yang terkait dengan penerjemahan hukum ke dalam kode, bidang hukum yang lebih bersifat regulasi lebih cocok untuk diotomatisasi. Yang lain berpendapat bahwa Hakim AI tingkat banding tidak akan pernah tepat, mengingat peran hakim, pada tingkat ini, seringkali untuk mengembangkan hukum dan mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Mungkin di luar kemampuan Hakim AI untuk memprediksi apakah suatu aturan hukum yang diusulkan akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, apakah aturan tersebut akan sulit diterapkan dalam kelas kasus tertentu di masa mendatang, bagaimana kemungkinan reaksi masyarakat terhadapnya, apakah aturan tersebut akan mengasingkan sebagian anggota masyarakat dari sistem hukum, dan apakah norma-norma sosial tertentu akan dirusak atau diperkuat oleh aturan baru tersebut.

Mungkin tidak mengherankan bahwa di dua bidang hukum tempat AI telah dikembangkan dan digunakan kasus keluarga dan pidana terdapat beberapa penolakan terhadap Hakim AI. Namun, bentuk-bentuk AI yang saat ini digunakan di sebagian besar yurisdiiksi (lihat pembahasan sebelumnya dalam buku ini terkait perkembangan di Tiongkok yang berbeda secara signifikan dari pendekatan di tempat lain) biasanya tidak berfokus untuk

menggantikan penentuan substantif dan final hakim. Misalnya, di banyak yurisdiksi di bidang pidana, bentuk-bentuk primitif AI dirancang untuk memandu jaksa, hakim, dan pihak lain saat membuat keputusan hukuman, jaminan, dan pembebasan bersyarat. Di sektor keluarga, aplikasi peradilan dapat menggabungkan AI sebagai bagian dari aplikasi ODR yang lebih luas (misalnya untuk memandu para pihak tentang apa yang mungkin dianggap 'adil' oleh pengadilan). Sebagaimana telah dicatat oleh sejumlah komentator, Hakim AI mungkin tidak tepat di kedua bidang tersebut (meskipun AI dapat diintegrasikan secara bermanfaat ke dalam pengaturan ODR bahkan di bidang pidana di mana tawar-menawar pembelaan dapat terjadi). Misalnya, dalam konteks peradilan pidana, McKay menyatakan:

...peradilan pidana adalah sebuah institusi manusia yang berfokus pada perilaku dan kerugian manusia dan, secara tradisional, telah menyelesaikan pelanggaran manusia secara komunal. Setidaknya keputusan hakim yang tidak sempurna dapat diuji dalam banding, sementara algoritma yang tidak sempurna dapat disembunyikan selamanya.

Plesničar dan Šugman Stubbs berpendapat bahwa, dalam sistem peradilan pidana, beberapa prosedur tidak boleh diotomatisasi karena 'dampaknya terlalu besar terhadap masyarakat dan hak asasi manusia individu sehingga mereka tidak dapat dipengaruhi oleh agensi manusia yang direduksi dan didelegasikan kepada mesin'. Zalnieriute dan Bell juga berpendapat bahwa otomatisasi tidaklah tepat dalam putusan hukuman pidana mengingat pengambilan keputusan di area ini melibatkan pembatasan kebebasan individu. Di sisi lain, telah dikemukakan bahwa karena fakta-fakta telah ditentukan dalam masalah hukuman, ini merupakan area yang ideal untuk penerapan sistem otomatis.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, terdapat juga alasan yang baik untuk mempertahankan hakim manusia di pengadilan restoratif dan terapeutik yang lebih berfokus pada keterlibatan manusia. Hal ini karena isu-isu kompleks yang seringkali mendasari masalah tersebut mungkin tidak terdeteksi atau dipahami oleh bentuk AI Hakim yang lebih maju. Terdapat isu-isu lain yang lebih luas terkait hilangnya pendekatan terapeutik peradilan yang manusiawi dan dampak negatif AI terhadap keluarga, korban, dan pelaku.

Pemanfaatan teknologi dan AI dalam konteks hukum keluarga juga telah dipertimbangkan secara rinci. Namun, hal ini belum dipertimbangkan dalam konteks Hakim AI karena fokusnya lebih pada penggunaan teknologi atau perangkat AI dalam pengaturan ODR. Misalnya, telah dicatat bahwa penggunaan AI dan teknologi pendukung dalam konteks hukum keluarga dapat memungkinkan orang untuk menghindari interaksi tatap muka dan 'perceraian jarak jauh', sebagian karena alat AI dapat memberikan hasil indikatif yang memungkinkan orang untuk mencapai kesepakatan. Ini khususnya berguna ketika ada tuduhan kekerasan atau pelecehan, atau ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan yang berarti bahwa bentuk penyelesaian sengketa tatap muka tradisional tidak tepat. Memang, penulis dan Liyanage sebelumnya telah menyarankan bahwa ODR yang didukung oleh bentuk-bentuk AI mungkin sangat cocok untuk sengketa hukum keluarga. Bell juga telah mengakui bahwa 'pemisahan fisik (dan mungkin temporal) yang lengkap dari para pihak khususnya cocok untuk mediasi keluarga

atau penyelesaian sengketa keluarga (FDR), terutama dalam kasus yang melibatkan tuduhan kekerasan'.

Pandangan ini juga telah dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Agung Allsop dari Pengadilan Federal Australia, yang telah mencatat bahwa, dalam masalah hukum keluarga di mana keselamatan menjadi perhatian, teknologi dapat memfasilitasi kehadiran para pihak yang aman dan jauh. Lebih lanjut, Bellucci, Venkatraman dan Stranieri menyoroti kemampuan teknologi untuk menyaring emosi negatif dari proses perselisihan, mencatat bahwa ini memberikan alasan lain proses ODR telah dianut dalam konteks hukum keluarga. Di sisi lain, Condlin berpendapat bahwa penghapusan interaksi tatap muka dapat 'menanggihkan, setidaknya sebagian, kewajiban yang dirasakan untuk bersosialisasi' yang berarti ODR, dalam 'ironisnya', 'mungkin membatalkan beberapa reformasi penting yang dihasilkan oleh gerakan ADR beberapa dekade terakhir'. Zalnieriute dan Bell juga telah mengidentifikasi tantangan lebih lanjut: ketidakmampuan alat otomatis saat ini untuk menentukan perselisihan faktual. Hal ini bermasalah karena, saat ini, otomatisasi pengambilan keputusan sengketa keluarga bergantung pada fakta yang disepakati atau diakui.

Jelas bahwa penggunaan teknologi dalam konteks hukum keluarga juga dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Tyler dan McPherson mencatat bahwa proses seputar perpisahan dan perceraian, terutama yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berjauhan secara geografis, dapat melibatkan korespondensi dan litigasi yang mahal, serta biaya yang lebih besar dari biasanya untuk waktu, perjalanan, dan akomodasi. Mengingat bahwa di banyak yurisdiksi, penyelesaian perceraian berasal dari satu kumpulan aset, proses apa pun yang mengurangi biaya kemungkinan besar akan bermanfaat.

Peningkatan akses terhadap keadilan juga merupakan pertimbangan utama. Akses terhadap keadilan dalam masalah hukum keluarga telah diidentifikasi sebagai masalah serius, dengan sistem yang terganggu oleh penundaan dan penumpukan. Seperti dicatat oleh Bell, hukum keluarga secara historis telah menjadi bidang yang akhirnya dilalui banyak orang dengan bantuan hukum yang terbatas. Ada masalah khusus karena mereka yang tidak mampu membayar biaya untuk menyewa pengacara mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan hukum apa pun. Higgins menyebut ini sebagai 'bagian tengah yang hilang' dari pasar jasa hukum. 'Bagian tengah yang hilang' inilah yang merupakan penerima manfaat yang diharapkan atau yang dituju dari penggunaan sistem yang didukung teknologi dalam konteks hukum keluarga.

Sehubungan dengan Hakim AI, satu alasan penting untuk mempertahankan beberapa keterlibatan manusia dalam proses penghakiman di area keluarga telah dibahas dan diidentifikasi sebelumnya oleh Bell: fakta bahwa ketergantungan pada data yang hanya terdiri dari putusan dapat mewakili kumpulan data 'outlier'. Hal ini khususnya terjadi dalam proses hukum keluarga, di mana mayoritas perpisahan tidak berlanjut ke sidang akhir dan putusan. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa manfaat menggunakan pengacara 'asli' adalah pengalaman mereka dalam kasus-kasus yang diselesaikan maupun yang disidangkan.

Secara umum, pembahasan terbatas terkait kasus keluarga dan Hakim AI menunjukkan bahwa, asalkan Hakim AI yang efektif dapat dibangun, terdapat ruang untuk Hakim AI yang

bersifat penasihat yang misalnya dapat menjadi penentu setelah jangka waktu tertentu berlalu (misalnya, setelah tujuh hari jika tidak ada pihak yang keberatan, pendapat Hakim AI dapat diubah menjadi putusan). Hakim AI yang bersifat penasihat tersebut dapat beroperasi dalam keadaan tertentu (seperti dalam pengaturan properti dan pemeliharaan anak) dan akan kurang diinginkan ketika fokusnya adalah pada isu-isu anak yang terkait dengan hak asuh dan pengasuhan. Dalam keadaan terakhir ini, ODR yang diinformasikan oleh AI dapat membantu. Hal ini sebagian karena potensi dampaknya pada mereka yang paling rentan, tetapi juga karena perlu mempertimbangkan pentingnya komunikasi yang difasilitasi ketika para pihak memiliki hubungan pengasuhan yang berkelanjutan.

9.6 TRIASE DAN HAKIM AI

Sehubungan dengan kategori sengketa lainnya, disarankan bahwa Hakim AI akan memiliki manfaat khusus dalam perkara perdata dan komersial kecil, dan terdapat risiko khusus terkait perkara administratif. Berdasarkan literatur, terdapat pertanyaan-pertanyaan bermanfaat yang dapat membantu dalam triase sengketa ke dalam bentuk Hakim AI. Yaitu, jika Hakim AI akan digunakan, haruskah semua perkara dengan jenis tertentu dialirkan ke Hakim AI? Atau haruskah kerangka kerja etika dan proses triase digunakan untuk hanya mengalirkan beberapa perkara ke Hakim AI, dengan penasihat AI tetap memainkan peran penting?

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, triase sensitif dapat, misalnya, melibatkan pertimbangan pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam Tabel 9.1 untuk menentukan di mana Hakim AI mungkin tidak tepat (lihat juga kerangka kerja etika di bawah).

Tabel 9.1 Pertanyaan triase terkait penggunaan hakim AI

Faktor AI yang perlu dipertimbangkan		
Hakim AI Triage	Apakah suatu bentuk AI telah mengakibatkan pengambilan keputusan terjadi sebelum suatu kasus diajukan ke pengadilan (atau pada tahap tertentu di pengadilan yang lebih rendah)?	Ketika suatu bentuk AI telah membuat keputusan yang berdampak pada manusia, mungkin ada manfaatnya mempertahankan mekanisme peninjauan manusia, alih-alih AI. Misalnya, dalam masalah asuransi dan kompensasi pekerja, AI mungkin sudah 'membuat keputusan' dan menentukan kewajiban. Setiap pengambilan keputusan AI pra-tindakan merupakan faktor penting dalam menentukan apakah rujukan hakim manusia lebih tepat.
	Dapatkah satu pihak atau lebih dianggap rentan?	Ini adalah konsep multidimensi yang dapat mencakup karakteristik individu para pihak serta faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kerentanan.

		Misalnya, seseorang mungkin rentan dalam waktu singkat, dan kesehatan yang buruk, kehilangan pekerjaan, kesedihan, dan faktor-faktor lain (termasuk tingkat stres yang tinggi dan kurangnya 'pengetahuan' teknologi, literasi dan kapasitas digital) dapat memengaruhi kerentanan dan berarti Hakim AI tidak tepat.
	Apakah ada hubungan yang berkelanjutan antara pihak yang berselisih?	Faktor ini sering dianggap relevan ketika merekomendasikan rujukan ke bentuk-bentuk ADR yang fasilitatif. Hal ini sebagian karena mungkin terdapat opsi-opsi tambahan dan kreatif yang dapat dihasilkan untuk menyelesaikan sengketa jika hubungan yang berkelanjutan telah terjalin (misalnya, kontrak baru dapat dikembangkan). Hakim manusia mungkin lebih mampu mendorong hasil yang lebih kreatif dalam situasi seperti itu dan mungkin dapat lebih baik dalam membina komunikasi yang diperlukan untuk mendukung hubungan yang berkelanjutan.
	Apakah hakim manusia terikat oleh pengaturan diskresioner yang 'lemah' atau 'kuat'?	Jika hakim manusia memiliki lebih banyak kebijaksanaan (kebijaksanaan yang kuat), dapat dikatakan bahwa Hakim AI kurang mampu meniru penilaian manusia yang lebih kreatif dan pengembangan hukum mungkin terhambat jika Hakim AI digunakan.
	Apakah ada tingkat kerumitan atau kebaruan yang tinggi?	Hakim AI, setidaknya dalam hal iterasi pengembangan awalnya, mungkin tidak mampu menangani masalah multipihak yang kompleks secara memadai dan, seperti yang dibahas dalam Bab 8 dan 4, mungkin tidak mampu menangani situasi 'baru' secara efektif.
	Seberapa tinggi tingkat emosi yang ada?	Penulis mencatat bahwa pada iterasi awal kuesioner penerimaan CRT, hal ini disarankan sebagai faktor relevan yang mungkin mengarah pada rujukan ke manusia. Tingkat emosi perselisihan

		yang tinggi mungkin tidak berarti bahwa Hakim AI tidak boleh digunakan. Namun, faktor ini, bersama dengan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, dapat menunjukkan bahwa hingga Hakim AI menjadi lebih "mirip manusia", terdapat manfaat dalam memastikan bahwa hakim manusia terus menangani kasus-kasus yang kompleks secara perilaku.
	Seberapa nyaman para pihak yang berperkara dengan proses Hakim AI?	Ada banyak alasan mengapa para pihak yang berperkara mungkin merasa tidak nyaman dengan proses Hakim AI, yang dapat dikaitkan dengan kekhawatiran terkait kerahasiaan dan sensitivitas komersial. Kekhawatiran ini dapat muncul selama proses sidang AI (yang dapat melibatkan pertukaran dokumen melalui layanan berbasis cloud) dan mungkin juga terkait dengan ketidakpercayaan terhadap teknologi. ⁱⁱ Penulis mencatat bahwa prinsip-prinsip CEPEJ (lihat bagian selanjutnya dalam bab ini) memberikan hak akses kepada hakim manusia.

9.7 KERANGKA ETIKA

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam bab ini, panduan dalam hal pengembangan prinsip-prinsip etika yang berkaitan dengan AI dan hakim, serta penggunaan teknologi oleh hakim, dapat diinformasikan oleh literatur yang ada terkait AI dan, lebih spesifik lagi, Hakim AI. Literatur yang dibahas di atas mengungkapkan pandangan yang berbeda tentang kegunaan proses AI dan sejauh mana manusia harus tetap terlibat dalam penghakiman. Namun, mengingat perluasan AI ke sebagian besar bidang kehidupan dan potensi risiko dalam sistem peradilan, penting untuk mengadopsi pendekatan proaktif dalam hal kerangka etika untuk Hakim AI. Selain itu, dalam pengambilan keputusan tentang AI atau penggunaan teknologi di bidang peradilan yang dapat dipandu oleh kerangka etika, pendekatan berbasis nilai harus diintegrasikan ke dalam kerangka tersebut. Pada gilirannya, hal ini harus mencerminkan nilai-nilai yang mendasari sistem peradilan dalam yurisdiksi tertentu. Misalnya, di banyak yurisdiksi, nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia akan menjadi fitur dominan dari kerangka etika.

Di yurisdiksi lain, nilai-nilai tersebut mungkin tidak ditekankan dengan cara yang sama. Dalam pembahasan di bawah ini, kerangka kerja yang dikembangkan untuk penggunaan AI (baik dalam pengertian umum maupun medis) serta kerangka kerja CEPEJ yang lebih spesifik

berkaitan dengan Hakim AI telah dianalisis. Proses ini dilakukan untuk membuat tabel 'nilai etika dan keadilan' pada Tabel 9.2.

Tabel 9.2 dirancang untuk menggabungkan prinsip-prinsip utama yang relevan dengan etika, teknologi, dan penjurian. Sebagaimana juga disebutkan di awal bab ini, titik-titik pengambilan keputusan etis terkait penggunaan teknologi dan AI dapat bervariasi. Artinya, pada tahap desain dan pengembangan, keputusan etis mungkin perlu dibuat dan, pada tahap penerapan dan implementasi, titik-titik keputusan tambahan akan muncul. Misalnya, keputusan untuk menggunakan Hakim AI mungkin mencakup pertimbangan ulang atas keputusan tersebut jika kemungkinan prosesnya dapat membahayakan individu atau kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Fitur ini sering disebut sebagai pertimbangan dalam hal siklus hidup AI.

Rekomendasi OECD dari Dewan Kecerdasan Buatan pada bulan Mei 2019 merekomendasikan penerapan prinsip-prinsip berbasis nilai 'untuk pengelolaan AI yang bertanggung jawab dan tepercaya'. Nilai-nilai tersebut dicatat di bawah ini dan diartikulasikan dalam konteks pernyataan bahwa tujuan AI adalah untuk mendukung 'hasil yang bermanfaat bagi manusia dan planet ini, seperti meningkatkan kemampuan manusia dan meningkatkan kreativitas, memajukan inklusi populasi yang kurang terwakili, mengurangi ketimpangan ekonomi, sosial, gender, dan lainnya, serta melindungi lingkungan alam, sehingga menyegarkan pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan'.

Area nilai inti menguraikan secara rinci tujuan menyeluruh ini dan secara khusus membahas beberapa fitur sistem dan proses yang relevan dengan peran peradilan:

1.2. Nilai-nilai yang berpusat pada manusia dan keadilan

- a) Para pelaku AI harus menghormati supremasi hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi, di seluruh siklus hidup sistem AI. Ini mencakup kebebasan, martabat dan otonomi, privasi dan perlindungan data, non-diskriminasi dan kesetaraan, keberagaman, keadilan, keadilan sosial, dan hak-hak buruh yang diakui secara internasional.
- b) Untuk tujuan ini, para pelaku AI harus menerapkan mekanisme dan perlindungan, seperti kapasitas untuk penentuan nasib sendiri, yang sesuai dengan konteks dan konsisten dengan perkembangan terkini.

1.3. Transparansi dan Keterjelasan

Para pelaku AI harus berkomitmen pada transparansi dan pengungkapan yang bertanggung jawab terkait sistem AI. Untuk tujuan ini, mereka harus memberikan informasi yang bermakna, sesuai dengan konteks, dan konsisten dengan perkembangan terkini:

- i. Untuk menumbuhkan pemahaman umum tentang sistem AI;
- ii. Untuk menyadarkan para pemangku kepentingan tentang interaksi mereka dengan sistem AI, termasuk di tempat kerja;
- iii. Agar mereka yang terdampak oleh sistem AI dapat memahami hasilnya; dan
- iv. Agar mereka yang terdampak negatif oleh sistem AI dapat menggugat hasilnya berdasarkan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai faktor-faktornya, serta logika yang menjadi dasar prediksi, rekomendasi, atau keputusan tersebut.

1.4. Ketahanan, Keamanan, dan Keselamatan

- a) Sistem AI harus tangguh, aman, dan terlindungi di seluruh siklus hidupnya sehingga, dalam kondisi penggunaan normal, penggunaan atau penyalahgunaan yang dapat diperkirakan, atau kondisi merugikan lainnya, sistem tersebut berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan risiko keselamatan yang tidak wajar.
- b) Untuk tujuan ini, para pelaku AI harus memastikan ketertelusuran, termasuk yang berkaitan dengan kumpulan data, proses, dan keputusan yang dibuat selama siklus hidup sistem AI, untuk memungkinkan analisis hasil dan respons sistem AI terhadap pertanyaan, yang sesuai dengan konteks dan konsisten dengan perkembangan terkini.
- c) Para pelaku AI harus, berdasarkan peran, konteks, dan kemampuan mereka untuk bertindak, menerapkan pendekatan manajemen risiko sistematis pada setiap fase siklus hidup sistem AI secara berkelanjutan untuk mengatasi risiko yang terkait dengan sistem AI, termasuk privasi, keamanan digital, keselamatan, dan bias.

1.5. Akuntabilitas

Para pelaku AI harus bertanggung jawab atas berfungsinya sistem AI dengan baik dan atas penghormatan terhadap prinsip-prinsip di atas, berdasarkan peran, konteks, dan konsisten dengan perkembangan terkini.

Tampaknya jelas bahwa mempertahankan penentuan nasib manusia, setidaknya menurut OECD, dianggap penting dalam kaitannya dengan perluasan penggunaan AI. Prinsip ini tampaknya mendukung gagasan bahwa hakim manusia dapat memainkan peran penting 'dalam lingkaran' dalam hal penjagaan gerbang atau pengawasan perkembangan AI. Selain itu, terdapat penekanan oleh OECD pada martabat manusia yang dapat dikaitkan dengan akses ke sistem peradilan, gagasan tentang keadilan prosedural, serta konsep dan nilai keadilan partisipatif.

Terkait tujuan menyeluruh, OECD secara khusus juga menyebutkan 'kesejahteraan'. Kesejahteraan semakin dianggap relevan dalam hal tujuan dan maksud sistem peradilan, serta kerangka etika terkait AI. Terdapat literatur yang berkembang terkait makna 'kesejahteraan', dan lebih spesifik lagi dalam konteks kebijakan pemerintah. Literatur tersebut menunjukkan bahwa meskipun kesejahteraan merupakan hal subjektif, kesejahteraan mencakup faktor-faktor sikap positif, kepuasan hidup dan kesehatan, kepercayaan diri dan rasa keadilan, dan juga dapat merujuk pada keberlanjutan. Sebaliknya, kesejahteraan ekonomi dan finansial dianggap sebagai bagian dari 'kesejahteraan' dan terkait dengan efektivitas finansial dan pengeluaran kekayaan. Misalnya, sebagaimana dicatat oleh Komisi Produktivitas Australia dalam Laporan 2014 tentang Pengaturan Akses terhadap Keadilan, keputusan kebijakan tentang keadilan memerlukan pertimbangan tujuan utama sistem peradilan, yaitu 'meningkatkan kesejahteraan masyarakat'.

Sejumlah penulis telah mencatat bahwa 'kesejahteraan' adalah konsep multidimensi dan penggunaan istilah tersebut oleh banyak pemerintah menunjukkan perubahan cara berpikir di mana '... kesejahteraan warga negara, bukan kesejahteraan rekening bank mereka, dianggap sebagai tujuan akhir pemerintah'. Sebagai akibat dari beragamnya penekanan di

berbagai negara terhadap kesejahteraan, mungkin tidak mengherankan bahwa, dalam beberapa kerangka etika AI, konsep-konsep tersebut lebih ditekankan.

Misalnya, di Australia, setelah proses konsultasi yang panjang dengan CSIRO, prinsip-prinsip utama AI dan etika diumumkan oleh Departemen Perindustrian, Sains, Energi, dan Sumber Daya Pemerintah Australia. Prinsip-prinsip menyeluruh memiliki penekanan yang lebih besar pada kesejahteraan di seluruh 'siklus hidup AI' dan dicatat di bawah ini:

- Kesejahteraan manusia, sosial, dan lingkungan: Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI harus memberi manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.
- Nilai-nilai yang berpusat pada manusia: Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI harus menghormati hak asasi manusia, keberagaman, dan otonomi individu.
- Keadilan: Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI harus inklusif dan mudah diakses, serta tidak boleh melibatkan atau mengakibatkan diskriminasi yang tidak adil terhadap individu, komunitas, atau kelompok.
- Perlindungan dan keamanan privasi: Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI harus menghormati dan menjunjung tinggi hak privasi dan perlindungan data, serta memastikan keamanan data.
- Keandalan dan keamanan: Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI harus beroperasi dengan andal sesuai dengan tujuannya.
- Transparansi dan kemudahan dijelaskan: Harus ada transparansi dan pengungkapan yang bertanggung jawab untuk memastikan orang-orang tahu kapan mereka terdampak secara signifikan oleh sistem AI, dan dapat mengetahui kapan sistem AI berinteraksi dengan mereka.
- Ketertandingan: Ketika sistem AI berdampak signifikan terhadap seseorang, komunitas, kelompok, atau lingkungan, harus ada proses yang tepat waktu untuk memungkinkan orang-orang menggugat penggunaan atau keluaran sistem AI.
- Akuntabilitas: Mereka yang bertanggung jawab atas berbagai fase siklus hidup sistem AI harus dapat diidentifikasi dan bertanggung jawab atas hasil sistem AI, dan pengawasan manusia terhadap sistem AI harus dimungkinkan.

Mungkin salah satu dokumen paling relevan terkait Hakim AI dirumuskan pada bulan Desember 2018 oleh CEPEJ. CEPEJ mengembangkan 'Piagam Etika Eropa tentang penggunaan Kecerdasan Buatan dalam sistem peradilan dan lingkungannya'. Lima prinsip utama yang diadopsi oleh CEPEJ sebagian besar berfokus pada hal-hal yang diuraikan di atas terkait dengan prinsip-prinsip etika yang lebih umum:

1. **Prinsip penghormatan terhadap hak asasi:** memastikan bahwa desain dan implementasi perangkat dan layanan kecerdasan buatan sesuai dengan hak asasi.
2. **Prinsip non-diskriminasi:** secara khusus mencegah perkembangan atau intensifikasi diskriminasi apa pun antara individu atau kelompok individu.
3. **Prinsip kualitas dan keamanan:** berkenaan dengan pemrosesan putusan dan data peradilan, gunakan sumber tersertifikasi dan data tak berwujud dengan model yang diuraikan secara multidisiplin, dalam lingkungan teknologi yang aman.

4. **Prinsip transparansi, imparialitas, dan keadilan:** menjadikan metode pemrosesan data dapat diakses dan dipahami, serta mengizinkan audit eksternal.
5. **Prinsip 'di bawah kendali pengguna':** hindari pendekatan preskriptif dan pastikan bahwa pengguna adalah aktor yang terinformasi dan memegang kendali atas pilihan yang dibuat.

Setiap prinsip didukung oleh pernyataan yang berkaitan dengan interpretasinya dalam lingkungan peradilan. Misalnya, terkait Prinsip Satu, perlu dicatat bahwa:

... Ketika perangkat kecerdasan buatan digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan peradilan atau untuk memberikan panduan kepada publik, penting untuk memastikan bahwa perangkat tersebut tidak merusak jaminan “hak akses kepada hakim dan hak atas pengadilan yang adil” (kesetaraan senjata dan penghormatan terhadap proses adversarial).

Perangkat tersebut juga harus digunakan dengan menghormati prinsip-prinsip supremasi hukum dan independensi hakim dalam proses pengambilan keputusan mereka.

Oleh karena itu, prioritas harus diberikan kepada pendekatan yang dirancang secara etis atau yang dirancang secara hak asasi manusia. Artinya, sejak tahap perancangan dan pembelajaran, aturan-aturan yang melarang pelanggaran langsung maupun tidak langsung terhadap nilai-nilai fundamental yang dilindungi oleh konvensi-konvensi terintegrasi sepenuhnya.

Karena Piagam ini dirancang di Eropa, tidak mengherankan jika Piagam ini memuat banyak referensi tentang hak asasi manusia dan sistem nilai yang mendasarinya yang berlaku di Eropa. Hal yang menarik adalah materi yang dicatat terkait Prinsip 4 yang menyatakan bahwa Uni Eropa dapat mendukung skema 'sertifikasi'. Potensi keterlibatan yudisial dalam skema semacam itu (yang tentu saja dapat berbeda tergantung pada 'lokasi' kegiatan) dibahas:

Keseimbangan harus dicapai antara hak kekayaan intelektual dari metode pemrosesan tertentu dan kebutuhan akan transparansi (akses ke proses perancangan), imparialitas (tidak adanya bias), keadilan, dan integritas intelektual (mengutamakan kepentingan keadilan) ketika perangkat yang digunakan dapat memiliki konsekuensi hukum atau dapat secara signifikan memengaruhi kehidupan masyarakat. Perlu diperjelas bahwa langkah-langkah ini berlaku untuk seluruh rantai perancangan dan operasional karena proses seleksi serta kualitas dan organisasi data secara langsung memengaruhi tahap pembelajaran.

Opsi pertama adalah transparansi teknis yang menyeluruh (misalnya, kode sumber terbuka dan dokumentasinya), yang terkadang dibatasi oleh perlindungan rahasia dagang. Sistem ini juga dapat dijelaskan dengan bahasa yang jelas dan familiar (untuk menjelaskan bagaimana hasil dihasilkan) dengan mengomunikasikan, misalnya, sifat layanan yang ditawarkan, perangkat yang telah dikembangkan, kinerja, dan risiko kesalahan. Otoritas atau pakar independen dapat ditugaskan untuk mensertifikasi dan mengaudit metode pemrosesan atau memberikan saran sebelumnya. Otoritas publik dapat memberikan sertifikasi, yang akan ditinjau secara berkala.

Pada Tabel 9.2, pendekatan etika potensial disarankan berdasarkan pembahasan di atas. Pada Tabel 9.3, pendekatan etika situasional disarankan, untuk memungkinkan pertimbangan isu-isu etika yang mungkin muncul seiring dengan semakin banyaknya perangkat AI yang dikembangkan dan berdampak langsung pada peran peradilan. Hal ini dapat dipertimbangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip etika yang relevan di setiap yurisdiksi, yang dapat menggabungkan tujuan keadilan yang selanjutnya dapat diubah dan diperluas sesuai dengan perbedaan yurisdiksi.

Tabel 9.2 Prinsip Etika bagi Hakim AI

Aplikasi untuk Menilai AI		
Prinsip Etika	Kesejahteraan manusia, sosial, lingkungan, dan keberlanjutan	Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI Hakim harus memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Sistem ini harus meningkatkan kesejahteraan, mendukung tujuan sistem peradilan, dan keberlanjutan sistem peradilan.
	Nilai-nilai yang berpusat pada manusia	Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI Hakim harus menghormati hak asasi manusia, keberagaman, serta martabat dan otonomi individu. Sistem ini juga harus mendorong kepercayaan dan independensi sistem peradilan.
	Keadilan	Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI Hakim harus inklusif dan dapat diakses, dan tidak boleh melibatkan atau mengakibatkan diskriminasi yang tidak adil terhadap individu, komunitas, atau kelompok.
	Perlindungan dan keamanan privasi	Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI Hakim harus menghormati dan menjunjung tinggi hak privasi dan perlindungan data, serta memastikan keamanan data.
	Keandalan dan keamanan	Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI Hakim harus beroperasi dengan andal sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan
	Transparansi dan kemudahan penjelasan	Harus ada transparansi dan pengungkapan yang bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat mengetahui kapan

		mereka terdampak secara signifikan oleh sistem Judge AI, dan agar mereka dapat mengetahui cara berinteraksi dengan sistem Judge AI. Keputusan yang dihasilkan sebagai hasil dari Judge AI harus menjelaskan tidak hanya bagaimana keputusan tersebut dicapai berdasarkan bukti dan hukum, tetapi juga bagaimana sistem AI mengembangkan keputusan tersebut.
	Kontestabilitas	Ketika sistem AI berdampak signifikan terhadap seseorang, komunitas, kelompok, atau lingkungan, harus ada proses yang tepat waktu agar orang-orang dapat mengajukan keberatan atas penggunaan atau keluaran sistem AI Hakim. Hal ini mengharuskan pengembangan proses peninjauan yang sederhana sehingga keputusan AI Hakim tidak mengikat jika ada yang keberatan dalam jangka waktu tertentu, dan agar rujukan ke hakim manusia dapat dilakukan.
	Akuntabilitas	Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas berbagai fase siklus hidup sistem AI Hakim harus dapat diidentifikasi dan bertanggung jawab atas hasil sistem AI Hakim. Pengawasan peradilan manusia terhadap sistem harus diaktifkan dan didukung.

Sebagai contoh, keadilan prosedural mungkin memiliki makna yang jauh lebih luas daripada definisi yang diajukan oleh Susskind dan dapat menggabungkan gagasan keadilan partisipatif di beberapa yurisdiksi. Demikian pula, penegakan hukum dapat diperluas hingga mencakup gagasan kepatuhan di banyak yurisdiksi. Dalam hal perumusan kerangka etika bagi hakim, materi CEPEJ memberikan panduan yang bermanfaat. Namun, penulis menyarankan bahwa prinsip-prinsip berikut yang merupakan gabungan dari materi yang dibahas di atas dan dalam literatur mungkin bermanfaat.

Di bidang medis, telah banyak diskusi dan tindakan terkait pengembangan prinsip-prinsip etika tentang penggunaan AI. Ada juga beberapa diskusi tentang apakah AI dapat

mendukung pengambilan keputusan moral. Bidang literatur yang berkembang di bidang medis yang berfokus pada etika dan AI mencakup tinjauan literatur terbaru yang mengorganisasikan materi ini ke dalam tema-tema (mirip dengan yang dicatat di atas oleh OECD) dan juga berdasarkan tingkat abstraksi. Pertimbangan isu-isu etika dalam hal tingkat abstraksi (LoA) dimaksudkan untuk mengundang tinjauan oleh semua pihak yang mungkin terdampak oleh AI di sektor perawatan kesehatan pada tingkat individu, interpersonal, kelompok, kelembagaan, sektoral, dan masyarakat.

Tabel 9.3 menunjukkan area tematik dan LoA yang dapat digunakan di sektor peradilan dan diadaptasi dari pendekatan yang digunakan di bidang AI medis. Artinya, isu-isu etika terkait penggunaan AI oleh peradilan perlu dipertimbangkan dari berbagai perspektif. Pendekatan ini juga relevan dalam konteks pendekatan desain yang berpusat pada manusia.

Disarankan bahwa pendekatan ini dapat membantu dalam pengembangan kerangka kerja etika spesifik yurisdiksi untuk memandu penggunaan AI oleh Hakim dan teknologi peradilan. Kerangka kerja etika menyeluruh yang disarankan yang tercantum dalam Tabel 9.2 didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang menyeluruh, sementara prinsip-prinsip etika yang lebih spesifik yang telah dikembangkan terkait dengan AI oleh Hakim dieksplorasi dari berbagai perspektif dalam Tabel 9.3.

Tabel 9.3 Abstraksi Etika Penggunaan AI Hakim dan Teknologi Peradilan

		Tingkat Abstraksi					
		Individu	Interpersonal	Kelompok	Institusional	Sektoral	Sektoral
Pertimbangan dan Kekhawatiran Etis Tematik	Kekhawatiran Teknis	Penilaian (atau keputusan hukum lainnya, seperti keputusan administratif) yang keliru atau tidak tepat bisa terjadi.	Mungkin ada hilangnya kepercayaan dalam hubungan hakim/pihak berperkara atau hakim/advokat dan sistem peradilan secara lebih luas; dehumanisasi dari proses keadilan. ⁱ	Mungkin ada penerapan preseden yang keliru atau tidak tepat pada sekelompok orang, kasus-kasus, atau bidang hukum tertentu. ⁱⁱ	Mungkin ada penggunaan dana yang tidak tepat atau keadaan di mana sumber daya tidak diarahkan ke pengadilan dan organisasi yang didirikan untuk membantu orang-orang dalam menggunakan hak-hak mereka. Ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan dampak negatif pada kelompok yang paling rentan. ⁱⁱⁱ	Hakim AI dan alat-alat AI dapat digunakan di bidang-bidang hukum di mana terdapat kekhawatiran yang diungkapkan secara jelas ^{iv} atau di mana preseden diperlukan.	Penyediaan layanan keadilan yang lebih buruk di seluruh masyarakat dan baik pembesaran penundaan dan tunggakan yang mengganggu banyak sistem ^v hukum atau penurunan kepercayaan pada pemerintah dan pengaturan keadilan.
	Proses, Hasil dan Tujuan (gagasan tentang keadilan, privasi dan keamanan, transparansi dan kejelasan, serta keberatan dan akuntabilitas)	Individu mungkin tidak dapat mengakses atau menilai informasi yang digunakan oleh Hakim AI untuk membuat keputusan, ^{vi} dan kemampuan mereka untuk mengajukan banding atas suatu keputusan bisa hilang atau menjadi lebih sulit. ^{vii}	Mungkin ada ketergantungan yang berlebihan pada sistem AI dan kemampuannya untuk membuat keputusan yang 'benar', yang mengarah pada perampasan peran yudisial. ^{viii}	Sepanjang siklus hidupnya, sistem AI mungkin tidak dibangun agar inklusif atau dapat diakses dan bisa melibatkan (atau mengakibatkan) diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. ^{ix}	Pelaku AI mungkin tidak memberikan informasi yang berarti untuk mengizinkan audit eksternal atau memastikan para pemangku kepentingan menyadari 'interaksi' mereka dengan alat-alat AI, termasuk di tempat kerja. ^x	Data pribadi (seperti data pengawasan sosial) ^{xi} dapat digunakan dalam pembuatan keputusan yudisial. ^{xiii} Perlindungan data mungkin tidak memadai atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keadilan 'terbuka' mungkin tidak dipertahankan.	Ketidaksetaraan sosial dalam proses, hasil, dan tujuan. ^{xiv}
		Tingkat Abstraksi					
		Individu	Interpersonal	Kelompok	Institusional	Sektoral	Sektoral

		Individu	Interpersonal	Kelompok	Institusional	Sektoral	Sektoral
Pertimbangan dan Kekhawatiran Etis Tematik	Kekhawatiran Berpusat pada Manusia (kesejahteraan dan nilai-nilai yang berpusat pada manusia)	Desain dan implementasi alat AI dan Hakim AI dapat secara fundamental tidak sesuai dengan hak asasi manusia (seperti hak atas proses hukum yang adil atau hak untuk mengajukan banding atas suatu keputusan). ^{xv} Selain itu, alat-alat tersebut mungkin tidak mendukung kesejahteraan dan martabat manusia.	Preferensi mungkin tidak diberikan pada 'pendekatan hak asasi manusia sejak dalam perancangan'. Dengan demikian, 'aturan' yang melarang diskriminasi langsung atau tidak langsung antara individu, kelompok, atau sektor masyarakat mungkin tidak 'terintegrasi sepenuhnya'. ^{xvi}	Sistem-sistem tersebut dapat mendorong ketidakadilan. Ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan hilangnya martabat manusia dan penurunan kesejahteraan sosial.	Otonomi, penghormatan, dan kemandirian institusi skala besar termasuk pengadilan dapat hilang seiring dengan dampak pengembangan alat Hakim AI terhadap peran dan fungsi yudisial. ^{xvii}	Sistem-sistem tersebut dapat direplikasi di seluruh sektor dengan sedikit pertimbangan untuk dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan manusia.	Rasa hormat masyarakat terhadap proses peradilan, nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan independensi hakim dalam proses pengambilan keputusan (yaitu penggunaan diskresi) ^{xviii} dapat hilang. ^{xix}

9.8 KESIMPULAN

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam bab ini, pengembangan kerangka kerja etika untuk memandu keputusan umum tentang penggunaan Hakim AI dan juga untuk mendukung pertimbangan yudisial atas AI dalam perkara-perkara individual merupakan tugas yang kompleks. Di satu sisi, kompleksitas muncul karena perbedaan yurisdiksi akan tercermin dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip etika inti dan nilai-nilai yang mendasarinya. Namun, di sisi lain, banyak kerangka kerja etika AI umum dapat memberikan beberapa panduan dalam hal penggunaan Hakim AI dan dapat diadaptasi jika diperlukan.

Ada juga pertanyaan menyeluruh tentang apakah Hakim AI yang sepenuhnya otomatis akan pernah tepat. Sebagaimana dibahas dalam bab-bab sebelumnya, kemungkinan bentuk-bentuk pendukung AI yang meningkatkan pengambilan keputusan yudisial akan diperkenalkan sebelum Hakim AI yang sepenuhnya otomatis diadopsi. Namun, terdapat contoh-contoh yang dibahas di atas di mana sistem Hakim AI yang sepenuhnya otomatis sedang dikembangkan dan diuji coba. Meskipun sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan awal, mengingat perkembangan AI yang pesat selama lima tahun terakhir, logis untuk berasumsi bahwa Hakim AI akan terus dikembangkan dan diperluas di beberapa yurisdiksi.

Dalam konteks sistem Hakim AI tersebut, perlu dipertimbangkan bagaimana peninjauan dan pengambilan keputusan peradilan oleh manusia akan dipertahankan, dan jenis kasus apa yang mungkin sesuai untuk Hakim AI. Misalnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masalah regulasi sederhana mungkin dapat ditangani dengan tepat oleh Hakim AI. Namun, jika keputusan awal dibuat oleh suatu bentuk AI dan permasalahannya berkaitan dengan peninjauan atas keputusan tersebut, maka mungkin lebih tepat untuk memastikan keterlibatan hakim manusia dalam peninjauan tersebut (mungkin dengan menggunakan Hakim AI yang suportif). Literatur menunjukkan beberapa batasan yang jelas. Misalnya, telah dikemukakan bahwa dalam pengambilan keputusan hukum pidana dan hukum keluarga substantif, Hakim AI tidak akan sesuai karena diperlukan hakim manusia. Ini tidak berarti bahwa Hakim AI mungkin tidak berguna dalam kasus-kasus seperti itu. Namun, disarankan bahwa proses penghakiman yang sebenarnya akan membutuhkan manusia.

Dalam masalah kontrak dan utang, mungkin ada argumen yang lebih kuat untuk pengembangan Hakim AI. Namun, pengembangan tersebut perlu tunduk pada proses peninjauan peradilan yang jelas dan dapat diakses dan mungkin memerlukan pertimbangan

tentang bagaimana orang dapat didukung dalam hal akses ke hakim manusia. Terkait sengketa ini dan sengketa lainnya, keputusan yang diambil jelas perlu diambil setelah mempertimbangkan secara cermat kerangka etika dan prinsip-prinsip utama, serta dampaknya dalam konteks yang disebut dalam literatur etika kedokteran sebagai 'tingkat abstraksi' (lihat Tabel 9.3). Untuk melakukan hal ini, penulis mencatat bahwa langkah awal yang mungkin dilakukan adalah memahami lebih baik siapa yang menggunakan sistem pengadilan, dan hal ini memerlukan pengumpulan data tentang pihak yang berperkara serta mereka yang kurang terwakili dalam sistem pengadilan.

Terkait penggunaan AI dalam sistem peradilan secara lebih umum, terdapat pula isu mengenai sejauh mana hakim dapat berperan dalam mengembangkan dan memelihara sistem peradilan yang sehat. Misalnya, muncul pertanyaan apakah masukan yudisial perlu diwajibkan atau lebih diutamakan ketika perangkat algoritmik sedang dikembangkan yang memungkinkan orang untuk melewati sistem peradilan yang lebih formal dan teregulasi dengan mengakses aplikasi atau basis data daring. Tidak seperti sistem medis, tampaknya pandangan yudisial tidak akan diminta, setidaknya pada tahap perancangan. Namun, ketika perangkat tersebut menjadi subjek perhatian yudisial sebagai hasil dari suatu kasus pengadilan, hakim niscaya akan berperan. Pertanyaan kritisnya adalah apakah hal ini tepat dan kerugian apa yang mungkin ditimbulkan jika hakim memiliki fungsi yang begitu terbatas. Proses sertifikasi Uni Eropa jelas dirancang untuk mengurangi kerugian dan mungkin memungkinkan hakim untuk memainkan peran yang lebih signifikan. Potensi peran hakim dalam perancangan sistem peradilan di masa depan akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB 10

KEADILAN MASA DEPAN

10.1 PENDAHULUAN

Sebagaimana dibahas di seluruh buku ini, perubahan teknologi berpotensi mengubah peran peradilan secara signifikan di tahun-tahun mendatang dan juga secara fundamental mengubah cara pengadilan beroperasi. Perubahan ini akan menjadi hasil dari pergeseran teknologi serta perubahan sosial dan politik yang akan menyertai pergeseran tersebut. Beberapa perubahan akan mendorong perubahan struktural dan sudah ada isu-isu yang muncul tentang peran pengadilan dan apakah pengadilan daring, atau sebagian dari pengadilan daring, harus dikelola oleh hakim atau badan eksekutif pemerintah. Selain itu, terdapat isu-isu terkait independensi dan imparialitas peradilan yang muncul dari pertimbangan tentang bagaimana data digunakan dan bagaimana kasus pengadilan berkembang, bersama dengan isu-isu penting yang terkait dengan cara hakim bekerja dengan (atau berpotensi digantikan oleh) sistem AI yang lebih baru. Beberapa perubahan pada sistem peradilan akan terjadi dengan cepat dan yang lainnya lebih lambat, tergantung apakah perubahan tersebut didorong oleh mereka yang mungkin mengadopsi pendekatan 'inkremental' atau lebih 'radikal' terhadap reformasi peradilan.

Terdapat potensi yang cukup besar dalam hal bagaimana teknologi yang lebih baru akan mendukung reformasi sistem peradilan. Misalnya, terdapat bukti kuat bahwa teknologi yang lebih baru dapat membantu mengurangi biaya dan penundaan, serta dapat membantu menjamin hasil yang 'adil'. Kemungkinan tercapainya hasil tersebut bergantung pada banyak faktor, termasuk memastikan bahwa risiko dikelola dengan tepat dan perubahan dipertimbangkan dari perspektif pengguna manusia. Dalam hal ini, di banyak yurisdiksi dan mungkin di kalangan peradilan itu sendiri, terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana hakim akan dilibatkan dalam reformasi sistem peradilan yang signifikan dan sejauh mana kepemimpinan peradilan yang reformis dan responsif akan berperan dalam reformasi tersebut.

Terdapat pula perbedaan yang terus-menerus muncul di dalam dan antar yurisdiksi terkait persepsi tentang cakupan sistem peradilan dan peran hakim serta pengadilan di dalamnya. Beberapa yurisdiksi, misalnya, mendukung Penyelesaian Sengketa Eksternal (EDR) dan pengaturan e-justice yang ekstensif, sementara yurisdiksi lain lebih berfokus pada bagaimana pengadilan dapat mewujudkan sistem peradilan di masa depan. Saat ini, semakin banyak aplikasi dan bot yang dikembangkan di sektor peradilan dan yang 'berada di luar' pengadilan tradisional. Namun, hal ini tidak terjadi di semua yurisdiksi. Di beberapa negara seperti Tiongkok, perangkat semacam itu sebagian besar telah dikembangkan di dalam infrastruktur pengadilan yang sudah ada. Aplikasi dan bot peradilan dapat memberikan dukungan, dapat menyebabkan perubahan pengaturan profesional dan peradilan (sebagian melalui potensi penyelesaian sengketa perdata yang lebih awal) dan sebagai akibat dari

dampaknya yang luas, dapat secara signifikan mengganggu aktivitas dalam sistem peradilan perdata.

Secara internasional, sebagian besar pengembangan aplikasi dan bot di sektor peradilan saat ini terjadi di sektor swasta dan tidak diatur. Banyak asosiasi hukum profesional sedang mempertimbangkan bagaimana perkembangan tersebut akan berkaitan dengan layanan hukum profesional yang ada, dengan fokus berkelanjutan pada 'pemisahan' pasar layanan hukum. Dalam hal regulasi di masa mendatang, CEPEJ telah mencatat bahwa mungkin ada ruang untuk sertifikasi dan regulasi jenis alat pendukung ini. Namun, jika teknologi yang lebih baru ada di luar pengadilan, mungkin ada masalah tentang bagaimana pendekatan regulasi apa pun dapat bekerja, dan juga kekhawatiran tentang potensi dampak negatif (dalam hal menghambat inovasi) yang mungkin mengikuti pengenalan pendekatan regulasi yang terlalu berat.

Ada isu-isu terkait yang menyangkut bagaimana hakim dapat terlibat dalam perkembangan teknologi yang berorientasi pada pengacara dan lainnya yang terjadi di luar pengadilan. Banyak hakim mungkin menyimpulkan bahwa perkembangan ini beroperasi di area pra-litigasi atau pra-pengajuan, atau berhubungan dengan nasihat hukum (atau lainnya) dan karenanya tidak berada dalam lingkup peradilan. Namun, hakim lain mungkin ingin mempertimbangkan apakah mereka, sebagai pemangku kepentingan penting dalam sektor peradilan, dapat berkontribusi dalam mendefinisikan atau menyempurnakan kriteria evaluasi yang mungkin berlaku untuk penggunaan teknologi baru ini, atau, dapat berdiskusi tentang sejauh mana pengaturan regulasi mungkin sesuai.

Tampaknya hakim di beberapa yurisdiksi lebih aktif atau prihatin dengan perkembangan teknologi yang muncul 'di luar' pengadilan. Misalnya, Hakim di Prancis telah menyuarakan keprihatinan tentang pengembangan perangkat analisis yudisial dan telah berperan dalam pengenalan rezim regulasi tahun 2019 yang dimaksudkan untuk 'mematikan keran data dengan melarang penggunaan informasi publik untuk "menilai, menganalisis, membandingkan, atau memprediksi" bagaimana hakim membuat keputusan'. Sebaliknya, di yurisdiksi lain seperti Amerika Serikat di mana perangkat analisis yudisial telah berkembang dengan baik, mungkin terdapat penerimaan yang jauh lebih luas terhadap perkembangan ini.

Perkembangan teknologi 'pendukung' lainnya di luar pengadilan memiliki kapasitas untuk meningkatkan legislasi dengan menyoroti di mana reformasi dapat dilakukan, mendukung penelitian yang dapat menginformasikan hakim tentang apa yang dialami oleh para pihak yang berperkara dan pihak lain, dan menunjukkan bagaimana dan sejauh mana intervensi terapeutik dan intervensi yudisial lainnya dapat efektif. Setiap perkembangan ini dapat berdampak pada pekerjaan yang dilakukan hakim, serta cara pekerjaan tersebut dilakukan.

Bab ini difokuskan pada eksplorasi bagaimana hakim dapat terlibat dalam perancangan sistem peradilan di masa depan dan sejauh mana beberapa reformasi mungkin hanya melibatkan sedikit perhatian yudisial sementara yang lain mungkin memerlukan masukan dan kepemimpinan yang jauh lebih spesifik. Hal ini melibatkan pertimbangan beberapa perkembangan yang muncul 'di luar' pengadilan serta yang terjadi di dalam pengadilan dan

lebih terkait langsung dengan peran dan fungsi yudisial. Selain itu, pertanyaan tentang adaptasi yudisial dalam konteks bagaimana reformasi dapat dilakukan dan panduan etika apa yang dibutuhkan, dipertimbangkan, dengan fokus pada keterlibatan yudisial aktif.

10.2 PENDEKATAN TERHADAP REFORMASI PENGADILAN DI MASA DEPAN

Sehubungan dengan pengaturan di dalam pengadilan, bab-bab sebelumnya telah membahas bagaimana perubahan teknologi dapat memengaruhi pekerjaan yang dilakukan oleh pengadilan. Saat ini terdapat empat jenis pengaturan 'pengadilan daring' yang relevan dan melibatkan berbagai tingkat keterlibatan peradilan:

1. Pengadilan daring mungkin bukan pengadilan sama sekali, tetapi terdiri dari 'tribunal' eksternal atau skema EDR, pengaturan ODR, atau komisi. Pendekatan ini dirancang untuk mengalihkan kasus dari pengadilan dan mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa. Contoh pengaturan tersebut antara lain Pengadilan Resolusi Sipil (CRT) di Kanada, yang telah dibahas sebelumnya dalam buku ini, serta berbagai skema EDR yang beroperasi di Australia. Inisiatif-inisiatif ini dapat didukung oleh pengaturan e-justice yang telah berkembang di banyak yurisdiksi. Pengaturan semacam itu tidak menghalangi pengembangan reformasi 'di pengadilan' yang lebih spesifik dan didukung oleh teknologi dan dapat mendukung inovasi.
2. 'Pengadilan' daring dapat dikembangkan tanpa melibatkan hakim sama sekali. Di sebagian besar yurisdiksi, pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang apa itu pengadilan dan apakah hakim harus mengawasi dan mengelola pengadilan agar entitas tersebut dapat disebut 'pengadilan'. Pendekatan ini diusulkan oleh Susskind di mana pengaturan pengadilan Tingkat Satu dan Tingkat Dua dikelola oleh eksekutif, alih-alih yudikatif. Dalam model ini, terdapat risiko bahwa pengembangan dapat dilakukan oleh cabang eksekutif pemerintah, raksasa teknologi, atau pengembang berorientasi komersial lainnya dengan fokus yang lebih besar pada pengurangan biaya dan waktu daripada keadilan, dan terdapat juga potensi dampak pada fungsi yudikatif.
3. Pengadilan daring dapat dikembangkan melalui proses yang lebih bertahap dan berulang yang terkait dengan reformasi manajemen perkara. Pendekatan ini pada dasarnya adalah pendekatan yang diadopsi oleh IAALS dan dibahas secara rinci di Bab 4. Pengembangan berulang yang dihasilkan oleh peradilan lokal dapat menghasilkan inovasi dan eksperimen yang lebih luas. Namun, kurangnya pendekatan terpusat juga dapat berarti bahwa biaya pengembangan dapat meningkat dan terdapat risiko ketidakpastian dan kebingungan yang lebih besar karena setiap yurisdiksi menciptakan sistem dan aturannya sendiri. Selain itu, seperti yang dikemukakan Susskind, pendekatan 'inkremental' mungkin tidak memungkinkan pengadilan direformasi sehingga memenuhi kebutuhan populasi yang semakin melek teknologi dan bergantung pada teknologi.
4. Pengadilan daring dapat dikembangkan dengan hakim yang ada mengelola dan mengembangkan pengadilan bersama dengan aplikasi dan bot yang dikembangkan terkait dengan proses pengadilan. Pekerjaan semacam itu dapat dipimpin oleh

lembaga peradilan di tingkat terpusat. Sampai batas tertentu, inilah yang sudah terjadi dalam sistem 'pengadilan pintar' Tiongkok, meskipun dapat dikatakan bahwa sebenarnya cabang eksekutif pemerintah yang tertanam dalam infrastruktur pengadilanlah yang memimpin perkembangan tersebut. Namun, di pengadilan lain, terdapat perkembangan yang menunjukkan bahwa lembaga peradilan dapat mengambil peran yang lebih substantif dalam pembentukan pengadilan daring.

Terkait masing-masing pengaturan ini, terdapat perbedaan peran yang dapat dimainkan oleh hakim. Dalam dua model pertama, hakim kemungkinan besar akan memainkan peran yang sangat terbatas dan bahkan mungkin tidak memiliki keterlibatan atau keterlibatan apa pun dalam reformasi tersebut. Pendekatan ini menyerupai persyaratan ADR pra-tindakan wajib yang juga dapat diperkenalkan dengan sedikit masukan yudisial (yang dapat dianggap tepat jika, misalnya, persyaratan tersebut merupakan hasil dukungan pemerintah terhadap ketentuan kontraktual antara para pihak yang bersengketa yang mengharuskan dilakukannya langkah-langkah pra-tindakan tertentu).

Pendekatan pengadilan daring ketiga dan keempat yang disebutkan di atas membutuhkan masukan yudisial yang ekstensif dan hakim yang melek teknologi perlu dilibatkan dalam pengembangan sistem dan reformasi yang dilakukan. Hal ini, pada gilirannya, mungkin mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan proses desain teknologi modern dan prinsip-prinsip desain yang berpusat pada manusia. Pendekatan-pendekatan ini akan dibahas nanti dalam bab ini.

Proses teknologi juga akan mengubah peran yudisial dengan cara lain. Selain perkembangan pengadilan daring, penggunaan teknologi untuk memungkinkan sidang jarak jauh melalui, misalnya, Teams atau Zoom, telah berdampak pada hakim di era COVID-19. Dalam hal ini, terdapat pertanyaan tentang apakah pendekatan semacam itu harus dipantau atau dievaluasi oleh lembaga peradilan atau oleh lembaga lain.

Ada juga pertanyaan terkait apa yang harus dipertahankan di era pasca COVID-19, dan pekerjaan lebih lanjut apa yang diperlukan untuk memodernisasi pengadilan. Dalam hal ini, perubahan tambahan dapat dipertimbangkan yang memungkinkan orang untuk mengajukan materi melalui portal yang mudah digunakan menggunakan teknologi 'nudging' yang dapat membantu orang mengisi formulir dan mengembangkan materi untuk digunakan di pengadilan. Terdapat pula potensi proses pengadilan asinkron yang masih memungkinkan orang untuk menyampaikan pandangan mereka secara lisan. Semua perkembangan ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan bukti tentang apa yang berhasil di era COVID-19, apa yang tidak, dan apa yang dapat dipertahankan atau ditingkatkan (yang mungkin mengharuskan hakim untuk menugaskan atau mendukung penelitian yang sedang berlangsung tentang pengaturan pengadilan saat ini dan di masa mendatang).

Ada juga masalah tentang keputusan yang lebih mendesak dalam hal reformasi manajemen kasus. Dalam hal ini, ada banyak contoh sistem manajemen kasus yang menggunakan teknologi pendukung dan pengganti. Namun, untuk memodernisasi pengadilan, lebih banyak lagi yang akan dibutuhkan di beberapa pengadilan agar data pengguna tambahan tersedia untuk memungkinkan pengadilan lebih memahami pengguna

mereka dan bagaimana mereka mengalami proses dan hasil pengadilan. Data pengguna tambahan juga akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana orang dapat dirujuk ke layanan profesional manusia lainnya atau didukung oleh aplikasi dan bot jika diperlukan sehingga proses manajemen kasus yang berhubungan dengan pihak eksternal dapat dikembangkan. Di banyak bidang, termasuk sektor perjalanan, ritel, dan pemerintahan, sudah ada contoh aplikasi dan bot pendukung yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman pengguna dan juga memungkinkan pengumpulan data. Jenis data ini, jika digunakan oleh pengadilan, dapat memberikan informasi bermanfaat tentang kesulitan yang mungkin dihadapi oleh orang-orang yang lebih rentan dalam sistem peradilan. Di sektor peradilan, sudah ada sejumlah aplikasi dan bot yang membantu masyarakat, namun, saat ini, sebagian besar pengadilan belum menggunakan teknologi tersebut.

Terdapat masalah dengan pengadilan dan hakim yang mengembangkan sistem teknologi yang hanya mereplikasi pendekatan berbasis kertas yang mungkin telah ada selama beberapa dekade. Misalnya, bahkan pada tingkat yang paling sederhana sekalipun, manfaat yang mungkin diperoleh dari penggunaan teknologi canggih akan sangat terbatas jika tidak ada adopsi pendekatan reformasi yang mudah dipahami yang memungkinkan orang untuk mengisi formulir daring atau memahami apa yang diperlukan setelah proses pengadilan dimulai. Sekali lagi, perubahan tersebut membutuhkan masukan dari hakim dan perhatian yang cermat terhadap cara-cara desain yang lebih baru yang mengeksplorasi apa yang bermanfaat bagi hakim dan pihak yang berperkara dalam hal mendefinisikan dan mengeksplorasi suatu isu hukum. Reformasi semacam itu dapat membutuhkan kerja keras dalam hal uji coba, pengujian, dan pengembangan pendekatan baru, dan mungkin ada banyak manfaat dalam hal konsistensi yurisdiksi yang lebih besar jika perkembangan tersebut terjadi di tingkat nasional.

Tentu saja, masih terdapat permasalahan kesenjangan digital. Meskipun sebagian besar penduduk telah terhubung secara daring, hal ini tidak serta merta menjamin literasi digital, dan evaluasi terhadap beberapa pengaturan terkait COVID-19 menunjukkan bahwa terdapat sebagian penduduk yang membutuhkan dukungan manusia tambahan untuk memulai proses hukum, membela diri, dan melanjutkan proses hukum. Terdapat pula pertanyaan terkait tentang peran pengadilan fisik. Pada dasarnya, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa mungkin terdapat alasan kuat untuk mempertahankan beberapa pengadilan fisik, termasuk memastikan status peradilan sebagai lengan ketiga pemerintahan di banyak negara tetap dipertahankan dan didukung. Pada saat yang sama, penulis mencatat bahwa baik Susskind maupun Genn telah menyatakan bahwa pengadilan fisik di Inggris saat ini mungkin 'jauh dari kata megah' dan berada dalam 'kondisi yang memprihatinkan', yang menunjukkan bahwa, di beberapa yurisdiksi, tidak ada lagi pilihan untuk 'tidak melakukan apa-apa'.

Namun demikian, dan terlepas dari kekhawatiran terkait kesenjangan digital, sekarang ada banyak bukti bahwa banyak orang lebih suka menggunakan layanan daring untuk menangani masalah hukum dan juga untuk mengakses pengadilan dan hakim. Dalam hal bagaimana akses tersebut terjadi, penulis mencatat bahwa pada tahun 2019 ada 204 miliar unduhan aplikasi seluler. Beberapa survei menunjukkan bahwa orang sekarang menghabiskan

lebih banyak waktu di aplikasi daripada bentuk media lainnya. Sebuah survei konsumen Amerika tahun 2017 menemukan bahwa 50 persen dari semua waktu media digital dihabiskan untuk aplikasi, dibandingkan dengan hanya 34 persen di desktop. Rata-rata, konsumen menghabiskan 2,3 jam sehari di aplikasi, dengan usia 18–24 tahun menjadi pengguna yang paling sering. Memang ada wacana baru-baru ini yang menunjukkan bahwa dampak COVID-19 telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam unduhan dan penggunaan aplikasi seluler. Hasil tersebut menghasilkan kesimpulan yang tak terelakkan bahwa pengadilan, agar tetap relevan, harus mempertimbangkan bagaimana aplikasi dapat dikembangkan yang memungkinkan orang untuk terlibat dengannya. Di banyak tempat, terdapat industri baru yang berkembang pesat yang berfokus pada pengembangan aplikasi dan bot peradilan. Industri ini berorientasi pada: penyediaan nasihat hukum yang lebih murah dan lebih cepat; penyelesaian sengketa melalui ODR; penyusunan dan pengajuan dokumen pengadilan; pemberian nasihat terkait potensi hasil pengadilan; penafsiran catatan keuangan; dan bahkan pengaturan sehari-hari terkait bagaimana dan di mana anak-anak dapat berhubungan dengan orang tua. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa masalah kesenjangan digital masih jauh lebih signifikan di negara-negara berkembang, dan pendekatan yang diambil perlu bergantung pada kondisi lokal dan pemahaman yang matang tentang kebutuhan masyarakat setempat.

Pengadilan di masa depan yang akan mengandalkan teknologi yang lebih baru menimbulkan kekhawatiran privasi dan keamanan khusus yang berbeda dari pengaturan yang berlaku untuk pengadilan berbasis kertas di masa lalu. Dalam hal ini, terdapat banyak risiko terkait informasi pengadilan yang bersifat rahasia dan sensitif. Pengaturan penanganan dokumen yang ada mungkin sudah kekurangan perlindungan keamanan yang memadai, dan memastikan bahwa materi pengadilan daring dan privasi pribadi terlindungi akan melibatkan langkah-langkah keamanan tambahan. Mencegah akses yang tidak semestinya terhadap data sangat penting untuk memastikan dukungan terhadap sistem peradilan di masa depan dan untuk memastikan adanya kepercayaan terhadap sistem peradilan yang lebih baru. Kekhawatiran ini terkait dengan ancaman keamanan siber yang signifikan dari entitas asing maupun domestik, dan langkah-langkah privasi dan keamanan yang efektif sangat penting dalam melindungi mereka yang terlibat dalam tindakan pengadilan sekaligus meningkatkan reputasi pengadilan.

Terdapat pula isu-isu terkait bagaimana pengadilan dapat mempertimbangkan data lain seperti materi pengawasan sosial dan peringkat kredit sosial. Misalnya, sistem kredit sosial di Tiongkok mungkin diawasi oleh pengadilan dan pengadilan diharapkan menyumbangkan data mereka untuk menjalankan sistem tersebut. Di negara lain, pertanyaan mungkin lebih mungkin muncul terkait bagaimana pengadilan menafsirkan materi yang dihasilkan sebagai hasil perkembangan teknologi.

Perkembangan yang dibahas di atas menunjukkan bahwa baik hakim maupun pengadilan perlu mempertimbangkan pendekatan mereka terhadap reformasi dan penggunaan teknologi dengan menggunakan kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Isu-isu dapat muncul di tingkat peradilan individu dalam menanggapi isu-isu kasus tertentu, maupun di tingkat peradilan kolektif ketika mempertimbangkan respons menyeluruh terhadap

reformasi. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan peradilan terkait pendekatan teknologi serta kerangka kerja pengambilan keputusan etis yang lebih jelas diperlukan dalam konteks isu-isu yang mungkin muncul dalam penjurian daring dan AI Hakim. Isu-isu ini akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

10.3 REFORMASI DAN HAKIM ONLINE

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak pengadilan mengadopsi pendekatan daring, setidaknya terkait beberapa sidang, dan juga menerapkan (dan dalam beberapa kasus mengembangkan lebih lanjut) perangkat manajemen perkara dan pengajuan daring. Perkembangan di masa mendatang kemungkinan akan mencakup pergeseran manajemen perkara yang mendukung alokasi pekerjaan peradilan dan juga mempertahankan beberapa pendekatan yang diperkenalkan untuk pertama kalinya sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Misalnya, beberapa hakim telah mengindikasikan bahwa persidangan non-juri dan juri mungkin berlangsung secara berbeda di masa mendatang, bahwa beberapa sidang pengadilan virtual akan dipertahankan, dan bahwa proses interlocutory mungkin bergeser untuk memanfaatkan pendekatan konferensi video dan juga pengaturan daftar berbasis email yang lebih sederhana.

Selain itu, bagi beberapa hakim dan pengadilan, perubahan pengaturan ini berarti bahwa proses pengadilan menjadi lebih 'terbuka'. Dalam beberapa kasus, sidang pengadilan dan proses putusan telah disiarkan langsung atau rekaman audio telah disediakan. Pendekatan-pendekatan ini mungkin telah menghasilkan lebih banyak minat publik terhadap aktivitas hakim dan pengadilan dan sejalan dengan tujuan peradilan terkait transparansi dan keadilan terbuka. Dalam kasus lain, kurangnya ruang sidang terbuka secara fisik mengakibatkan proses persidangan dilakukan tanpa keterbukaan publik dan hal ini menyebabkan 'penutupan' beberapa pengadilan dalam hal akses publik. Hal ini tetap menjadi isu serius terkait bagaimana pengadilan dan hakim dapat beroperasi dari jarak jauh.

Penulis mencatat bahwa ada risiko dalam menayangkan proses pengadilan melalui televisi yang telah dipertimbangkan oleh berbagai komentator selama lebih dari tiga dekade. Ada juga beberapa permusuhan peradilan terhadap perkembangan di area ini. Meskipun demikian, beberapa yurisdiksi telah menerapkan TV pengadilan dan pengaturan daring dan, di yurisdiksi lain, hakim telah mempertimbangkan sidang terbatas yang disiarkan televisi (meskipun pertimbangan tersebut sering kali difokuskan pada akses ke proses pengadilan yang disiarkan televisi oleh media daripada publik). Perkembangan ini berarti bahwa di beberapa yurisdiksi, hakim telah mencapai status seperti 'bintang film' dengan beberapa komentator menyarankan bahwa pergeseran tersebut telah mendukung peran pengadilan dan supremasi hukum dalam demokrasi, sementara yang lain menyarankan bahwa pertengkaran peradilan yang disiarkan televisi dan perkembangan 'kultus kepribadian' telah berdampak negatif pada peradilan. Penulis mencatat bahwa sementara beberapa pengadilan telah beralih ke pendekatan streaming langsung, mengunggah materi di YouTube, atau menambahkan audio situs web atau fasilitas audio langsung, saat ini tidak ada keseragaman dalam hal pengadilan pendekatan.

Meskipun ada diskusi hingga saat ini tentang penyiaran atau streaming sidang pengadilan, pengaturan COVID-19 yang telah diperkenalkan sebagian besar bergantung pada platform konferensi video komersial. Hal ini berarti bahwa banyak pengadilan tertutup untuk pengawasan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sidang pengadilan dapat 'terbuka' di era teknologi modern. Mungkin ada beberapa manfaat di semua pengadilan dalam suatu yurisdiksi untuk menciptakan layanan khusus untuk memastikan bahwa akses publik ke pengadilan melalui internet tetap tersedia. Penulis mencatat bahwa, di beberapa pengadilan, alih-alih materi visual, materi audio (saja) disediakan di situs web pengadilan dan materi ini seringkali hanya tersedia untuk jangka waktu terbatas.

Penjurian daring juga mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan pengaturan yang meliputi konferensi video dan sidang jarak jauh. Hal ini mungkin memerlukan pertimbangan latar belakang virtual yang mungkin digunakan dan juga dampaknya terhadap mereka yang mungkin hadir atau yang mungkin mengamati sidang. Misalnya, di Inggris telah muncul kekhawatiran bahwa anak-anak mungkin secara tidak sengaja terpapar konflik orang tua sementara orang dewasa memberikan kesaksian dalam proses pengadilan. Idealnya, protokol dapat dikembangkan secara nasional untuk memastikan adanya konsistensi antarpengadilan. Terdapat juga isu-isu terkait kasus pengadilan mana yang tidak boleh menjadi subjek proses konferensi video dan memerlukan perhatian yudisial tatap muka atau akses yang lebih luas yang dimodifikasi ke pengaturan publik. Pengaturan pendukung bagi pengguna pengadilan, mengingat masalah kesenjangan digital, juga memerlukan perhatian dan penulis mencatat bahwa beberapa pengadilan telah berinvestasi dalam mekanisme dukungan alternatif.

10.4 MENGEMBANGKAN HAKIM AI

Perkembangan terkini dalam AI akan terus berdampak pada hakim dan proses peradilan di masa mendatang. Oleh karena itu, masyarakat dan hakim harus mempertimbangkan kembali peran hakim dan memiliki strategi untuk menangani isu-isu etika dan isu-isu lain yang diangkat oleh Hakim AI. Saat ini, sebagian besar diskusi berasumsi bahwa satu-satunya peran hakim dalam masyarakat adalah menyelesaikan sengketa. Asumsi ini bermasalah, bukan hanya karena secara keliru gagal mengenali peran yudisial dalam hal mempersiapkan kasus untuk disidangkan, tetapi juga karena didasarkan pada kurangnya pemahaman mengenai berbagai makna keadilan dan peran penting hakim yang responsif di pengadilan individual dan dalam konteks sosial yang lebih luas. Hakim tidak hanya mendidik dan membantu mengembangkan struktur dan norma sosial, tetapi juga memainkan peran penting dalam kaitannya dengan pengaturan tata kelola di sebagian besar negara.

Namun, masih ada pertanyaan mengenai apakah dan kapan beberapa hakim akan sepenuhnya digantikan oleh teknologi dan, jika demikian, apakah hal ini akan diterima sebagai semacam keniscayaan sosial. Sebagaimana telah dicatat oleh penulis sebelumnya, kecil kemungkinan penggantian hakim secara menyeluruh akan terjadi di banyak pengadilan dalam waktu dekat mengingat banyaknya faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan pengadilan. Kemungkinan besar juga akan dibutuhkan kerja keras dan biaya terkait yang besar

bagi sistem AI untuk tidak hanya membuat keputusan yang mungkin dibuat oleh hakim, tetapi juga untuk menjelaskan pengambilan keputusan tersebut. Namun, meskipun pada awalnya akan ada penggantian hakim secara terbatas (sebagaimana dibahas di bawah), sebagian besar, selama dekade berikutnya, AI hanya akan mendukung pengambilan keputusan dengan, misalnya, menghasilkan draf atau templat putusan yang kemudian dapat dipertimbangkan oleh hakim manusia (Hakim AI yang suportif). Di sisi lain, penulis telah mencatat bahwa sejumlah ahli teori tidak setuju dengan perspektif ini, yang menunjukkan bahwa penggantian hakim secara menyeluruh dimungkinkan dan jangka waktunya mungkin jauh lebih singkat. Huq, misalnya, berpendapat bahwa, di masa depan, tidak akan ada lagi hak atas keputusan manusia. Pihak lain berpendapat bahwa 'hak atas keputusan mesin yang terkalibrasi dengan baik' yang bersifat imbalan pada akhirnya lebih beralasan secara normatif. Perkembangan di beberapa yurisdiksi seperti Tiongkok dan Estonia juga menunjukkan bahwa Hakim AI kemungkinan akan beroperasi dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Mengenai apakah masyarakat cenderung menerima langkah menuju Hakim AI, Volokh berpendapat bahwa penerimaan tersebut akan terjadi mengingat kekurangan sistem hukum saat ini:

Terdapat banyak sekali permusuhan publik terhadap sistem hukum saat ini karena dianggap terlalu mahal bagi warga biasa yang tidak mampu menyewa pengacara terbaik, atau bahkan pengacara sama sekali. Oleh karena itu, sistem ini dianggap bias dan memihak orang kaya dan lembaga. Sistem ini juga dianggap sangat lambat. Jika penilaian AI memecahkan masalah-masalah ini, hal itu akan memberikan keuntungan besar, baik dalam kenyataan maupun di benak banyak pengamat dan saya menduga bahwa keuntungan di dunia nyata ini akan mengatasi segala kegelisahan konseptual yang mungkin dirasakan orang-orang terhadap sistem semacam itu.

Para komentator juga telah membahas karakteristik utama sistem peradilan dengan hakim AI dan telah banyak dicatat bahwa keadilan semacam ini di masa depan dapat lebih konsisten. Sebagaimana dicatat oleh McKay, publik, media, dan akademisi sering kali mengungkapkan rasa frustrasi terhadap inkonsistensi atau keringanan hukuman dalam putusan. Brennan-Marquez dan Henderson juga mencatat bahwa mesin 'sangat konsisten' dan dalam dunia 'penghakiman manusia yang terdesentralisasi', idealisme 'kasus yang sama harus diperlakukan sama' akhirnya dapat dibenarkan.

Bertentangan dengan perspektif ini, terdapat contoh-contoh yang sudah umum diketahui di mana AI telah menghasilkan hasil yang bias. Seiring pendekatan AI bergeser dari penalaran berbasis aturan (preskriptif), yang melibatkan penerapan seperangkat aturan (atau pola) yang telah ditentukan sebelumnya dengan suatu algoritma, ke penalaran berbasis kasus, yang membutuhkan analisis pengalaman sebelumnya untuk memastikan solusi atas masalah baru, dan akhirnya ke bentuk AI yang melibatkan pembelajaran mesin di mana algoritma yang belajar melalui pengalaman dan mampu memprediksi hasil dengan cepat dan lebih akurat, kekhawatiran realistis tentang bias mungkin muncul. Sebagaimana dibahas dalam Bab 3 dan ditunjukkan oleh hasil yang tidak menguntungkan terkait bot Microsoft Tay, hasil yang dicapai

hanya sama bermanfaatnya dengan data yang dimasukkan ke AI. Karena banyak sistem peradilan dianggap mencapai hasil yang tidak 'buta warna', atau yang dikritik karena bias, dapat diduga bahwa AI Hakim yang dikembangkan oleh sistem semacam itu juga akan cacat hanya karena sistem AI telah belajar dari sistem yang sudah bias.

Keadilan di masa depan juga kemungkinan akan berbeda karena AI semakin terlibat dalam pengambilan keputusan peradilan. Sebagaimana diuraikan oleh Susskind, 'kekeliruan AI' mengacu pada asumsi bahwa satu-satunya cara bagi mesin untuk melakukan pekerjaan manusia adalah dengan meniru manusia. Namun, 'pemikiran hasil' 'mendesak kita untuk berfokus pada keluaran dan manfaat, alih-alih pada bagaimana suatu hasil dicapai'. Dengan kata lain, fokusnya bukan pada apakah seorang hakim AI dapat mereplikasi pemikiran manusia, melainkan pada bagaimana ia menggunakan kemampuannya yang unik.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat sejumlah alasan yang meyakinkan mengapa peralihan menuju Hakim AI akan disambut baik. Alasan-alasan ini telah dibahas secara lebih rinci dalam bab-bab sebelumnya dalam buku ini. Pertama dan terpenting, Hakim AI berpotensi meningkatkan akses terhadap keadilan. Lebih lanjut, Hakim AI juga berpotensi memberikan kualitas keadilan yang lebih tinggi, dan meningkatkan supremasi hukum. Otomatisasi dapat membuat pengambilan keputusan lebih akurat, efisien, dan adil, serta berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Namun, bagi setiap pendukung Hakim AI di kalangan akademis atau yudisial, terdapat pula pengamat yang lebih berhati-hati yang menyoroti tantangan dan potensi kerugian yang kemungkinan akan timbul dari otomatisasi pengambilan keputusan yudisial. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, kemungkinan besar kekurangan sistem saat ini pada akhirnya akan mendorong beberapa masyarakat untuk mengadopsi bentuk-bentuk Hakim AI. Dorongan untuk merangkul manfaat yang dapat dihadirkan AI bagi sistem peradilan ini, sampai batas tertentu, telah dipimpin oleh beberapa anggota peradilan, yang telah mendesak pertimbangan peluang-peluang baru yang mungkin dihadirkan oleh perubahan tersebut, meskipun hal ini dapat lebih diarahkan pada profesi daripada peradilan atau disertai dengan 'keraguan yang serius'.

Dalam hal penerapan Hakim AI, kemungkinan besar upaya awal akan berkaitan dengan kategori-kategori perkara yang terbatas. Banyak pembahasan tentang Hakim AI menunjukkan bahwa hal ini kemungkinan akan terbatas pada perkara-perkara sederhana dan bernilai rendah di mana biaya dan kemudahan akan menjadi faktor penentu. Kasus-kasus bernilai rendah tersebut dapat mencakup sengketa yang, di beberapa negara, sudah ditangani oleh tribunal, seperti: sengketa tuan tanah/penyewa, denda dan penalti, perkara utang, kerusakan properti sederhana, dan sengketa cedera pribadi tingkat rendah. Awalnya, Hakim AI pada tingkat tersebut diharapkan akan 'diawasi' oleh hakim hingga AI menggantikan mereka sepenuhnya. Hakim AI kemungkinan besar tidak akan berhenti di situ. Setelah menguji dan menguji coba metode tersebut, perluasan Hakim AI ke area sengketa lainnya tampaknya memungkinkan. Dalam hal ini, potensi penggunaan Hakim AI memerlukan penggunaan alat pengambilan keputusan yang etis serta pertimbangan sistem triase yang mungkin tidak hanya bergantung pada pertimbangan biaya dan waktu. Sebagaimana disebutkan di atas, jika Hakim AI tidak

menggantikan hakim atau anggota tribunal, ia akan digunakan untuk 'membantu' atau membantu hakim dalam hal pengambilan keputusan mereka. Kekhawatiran terkait masing-masing area pengembangan yang mungkin terjadi ini beragam, sebagian karena memunculkan kekhawatiran tentang dehumanisasi sistem peradilan dan juga karena bahkan jika 'pengawasan' yudisial dilakukan, hal itu mungkin tidak efektif.

Agar AI Hakim dapat dikembangkan dengan cara yang menghargai masukan manusia dan mengurangi kontrol yang tidak semestinya oleh raksasa teknologi atau eksekutif, hakim tidak hanya perlu responsif tetapi juga proaktif dalam hal perlindungan mereka terhadap sistem peradilan. Hakim sebagai penjaga sistem peradilan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses 'manusia dalam lingkaran' serta 'manusia di dalam lingkaran' dipertahankan dan diperkuat dalam sistem peradilan masa depan. Selain itu, artikulasi area yang jelas di mana keterlibatan manusia, pengawasan, dan pengambilan keputusan sangat penting, membutuhkan kepemimpinan dan kolaborasi peradilan.

10.5 ADAPTABILITAS PERADILAN DAN DESAIN YANG BERPUSAT PADA MANUSIA

Sebagaimana dicatat oleh Marilyn Warren (mantan Ketua Mahkamah Agung di Victoria, Australia), hakim akan kehilangan relevansi di masyarakat jika mereka tidak beradaptasi dengan perubahan teknologi. Namun, saat ini belum jelas apa tepatnya yang akan terjadi dalam adaptasi tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, tampaknya tidak mungkin, setidaknya pada awalnya, bahwa di sebagian besar yurisdiksi, hakim manusia akan sepenuhnya dihapuskan dari sebagian besar proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, kemungkinan besar beberapa peran pembuat keputusan peradilan manusia akan dipertahankan, meskipun dalam jangka pendek, hakim mungkin perlu bekerja sebagai bagian dari tim dengan mesin seiring berkembang dan meluasnya Hakim AI yang mendukung. Awalnya, perubahan ini mungkin tidak sepenuhnya dihapus dari apa yang dilakukan hakim saat ini ketika mereka mengandalkan preseden sebelumnya yang dapat mereka batalkan jika perlu. Ketika pendekatan tim diadopsi, hakim manusia mungkin diminta untuk memainkan peran yang lebih dominan dalam kasus-kasus 'sulit' atau 'menyimpang' di mana rekan tim AI mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami konteks atau nuansa, berjuang untuk menyeimbangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan benar, atau tidak dapat menemukan pola karena ukuran sampel kasus yang tidak memadai. Adaptasi juga dapat melibatkan hakim yang 'menyerahkan' jenis kasus tertentu, seperti klaim kecil, sepenuhnya kepada Hakim AI.

Sebagian besar pengadilan telah menunjukkan bahwa mereka umumnya bersedia merangkul inovasi dan perubahan teknologi. Namun, sistem peradilan masa depan membutuhkan lebih dari sekadar penerimaan inovasi teknologi. Hal ini membutuhkan kepemimpinan dan jika hakim gagal bersikap proaktif, ada risiko bahwa cabang pemerintah lain mungkin turun tangan dan semakin mempersempit area di mana hakim dapat beroperasi, atau bahwa rasa hormat publik terhadap peradilan dapat berkurang karena hakim dianggap 'kurang relevan'. Anggaran pengadilan yang menurun yang kemungkinan akan mengikuti pergolakan ekonomi di era pasca-COVID dapat berarti bahwa pengadilan dan hakim akan sangat rentan terhadap perubahan yang mungkin tidak dipikirkan dengan baik di tahun-tahun

mendatang. Selain itu, ada juga kenyataan bahwa, di beberapa negara, hakim memiliki latar belakang sebagai advokat dan, di negara lain, sebagai hakim karier. Ini berarti bahwa mereka mungkin tidak selaras dengan keterlibatan desain kolaboratif atau tertarik pada inovasi, dan mungkin juga lebih cenderung untuk melestarikan sistem yang telah mereka kembangkan dan benamkan, meskipun faktanya sistem tersebut mungkin tidak lagi berfungsi dengan baik.

‘Desain yang berpusat pada pengguna’ atau ‘desain hukum yang berpusat pada manusia’ adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk mereformasi sistem peradilan. Pendekatan desain tersebut dapat dipandu oleh prinsip-prinsip etika dengan menggunakan pendekatan ‘tingkat abstraksi’. Selain itu, mengartikulasikan nilai-nilai inti dan tujuan sistem peradilan di setiap yurisdiksi penting karena hal ini harus mendasari setiap pendekatan desain yang etis. Penulis mencatat bahwa desain yang berpusat pada pengguna yang didasarkan pada pendekatan etis akan membutuhkan adaptasi peradilan yang signifikan dan pergeseran peran peradilan. Sebagai contoh, telah dinyatakan bahwa:

... salah satu ciri penting teori Desain Hukum adalah bahwa hal itu tidak dapat dimulai tanpa mempertimbangkan pengguna akhir. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pengguna akhir, dengan menekankan pada praktisi yang membenamkan diri dalam dunia pengguna tersebut sehingga mereka dapat merancang intervensi berdasarkan perspektif pengguna akhir, alih-alih berdasarkan solusi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada dasarnya, pendekatan jenis ini mengharuskan hakim untuk berinteraksi dengan pihak yang berperkara dan pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana pengadilan dan pendekatan peradilan dapat direformasi dan ditingkatkan. Meskipun terdapat beberapa masalah dalam hal bagaimana hal ini dapat dicapai, termasuk kurangnya informasi umum tentang siapa yang saat ini menggunakan pengadilan, teknologi yang lebih baru dapat mendukung pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengadilan dan hakim dapat direformasi agar dapat bekerja lebih efektif. Mengenai pendekatan ini, beberapa komentator telah mencatat:

Tidak terpikirkan untuk merancang objek utilitarian seperti kursi tanpa mempertimbangkan konsumen, pengguna akhir yang memang ditakdirkan untuk menjadikan objek tersebut bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Jika kursi tersebut dimaksudkan sebagai teknologi bantu untuk membantu orang yang lemah secara fisik agar dapat berdiri dan duduk dengan lebih mudah, tetapi kursi tersebut sebenarnya lebih rumit digunakan daripada kursi biasa, maka hal itu akan dianggap sebagai kegagalan yang keterlaluan. Bagi mereka yang memandang dunia dari perspektif desain, litigasi perdata harus dianggap sebagai kegagalan yang keterlaluan meskipun tujuannya yang diungkapkan adalah untuk memungkinkan orang biasa memperjuangkan hak-hak mereka, sistem ini dirancang untuk digunakan terutama oleh para ahli berkeahlian tinggi yang layanannya berada di luar jangkauan penerima manfaat yang dituju dari sistem tersebut. Oleh karena itu, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan sipil didesain ulang dengan mempertimbangkan pengguna akhir.

Oleh karena itu, perancangan ulang sistem peradilan dengan pendekatan yang berpusat pada manusia mengharuskan hakim di setiap tahap reformasi untuk mempertimbangkan perspektif litigasi. Hal ini juga mengharuskan pengadilan dan hakim untuk adaptif dan mengevaluasi perubahan dari perspektif litigasi agar sistem peradilan 'sesuai dengan tujuannya'. Namun, perspektif litigasi saja tidak cukup, karena peran dan fungsi hakim, sebagaimana dibahas di seluruh buku ini, memiliki implikasi yang melampaui individu-individu litigasi. Oleh karena itu, di sektor peradilan, 'pendekatan tingkat abstraksi' diperlukan. Hal ini mengharuskan reformasi dikembangkan dan dievaluasi dari perspektif individu (berpusat pada pengguna), interpersonal, kelompok, kelembagaan, sektoral, dan kemasyarakatan. Pendekatan ini memastikan bahwa berbagai perspektif yang dibahas di seluruh buku ini dapat dipertimbangkan dan dipertimbangkan secara memadai.

10.6 MEMBAYANGKAN KEADILAN MASA DEPAN

Meskipun pandemi COVID-19 telah mengakibatkan 'perubahan yang signifikan dan cepat dalam operasional sistem peradilan sipil', di banyak negara, pandemi ini juga menyoroti bagaimana beberapa pengadilan dan hakim kesulitan mengadopsi teknologi baru seringkali di tempat yang sebelumnya tidak memiliki infrastruktur pengadilan yang ada dan pemahaman peradilan yang canggih tentang teknologi. Selain itu, banyak pengacara dan pakar lain di sektor ini bergulat dengan potensi perubahan sistem peradilan karena mereka terus menggunakan metode kerja yang sudah ketinggalan zaman, yang seringkali sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Seiring dengan perubahan teknologi dalam cara kerja pengacara dan perangkat AI, bot, dan aplikasi yang mengalihkan klien ke berbagai layanan, pengadilan dan hakim pun harus berubah. Perubahan teknologi akan terus menimbulkan pertanyaan terkait akses yang adil ke pengadilan dan hakim, kebutuhan akan pengadilan fisik dan bagaimana hakim menjalankan tugasnya, serta bagaimana sistem peradilan dapat ditingkatkan.

Di banyak pengadilan spesialis, peran dan fungsi peradilan telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun bukan sebagai respons terhadap teknologi melainkan sebagai respons terhadap kebutuhan sosial. Perubahan-perubahan tersebut telah menghasilkan pembentukan banyak pengadilan pemecahan masalah di mana para hakim dapat bekerja sama dengan spesialis non-yudisial. Sebagian besar sepakat bahwa perkembangan ini memiliki dampak positif dalam mengurangi kontak pengadilan di masa depan serta manfaat pengembalian investasi yang signifikan yang mencakup pengurangan biaya publik (kepolisian, kesehatan, dan lainnya) dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengadilan sebagai hasil dari fokus yang lebih besar pada keadilan prosedural dan martabat manusia. Jelas, beberapa hakim mungkin lebih 'responsif' daripada yang lain, dan yang lain mungkin menunjukkan lebih banyak emosi dan kasih sayang atau berorientasi pada intervensi keadilan terapeutik yang berfokus pada keadilan prosedural yang menekankan 'suara' dan 'rasa hormat'. Sampai batas tertentu, pengadilan dan hakim yang mengadopsi pendekatan semacam itu jauh lebih kecil kemungkinannya untuk digantikan oleh Hakim AI

(meskipun pengembangan alat teknologi lainnya tetap relevan) sebagian karena AI, saat ini, tidak dapat mereplikasi keterampilan sosial dan empati manusia secara memadai.

Namun, banyak perubahan yang muncul dalam sistem peradilan di masa depan akan menjadi hasil dari perkembangan AI yang dapat dianggap sebagai pendukung, pengganti atau mengganggu. Dalam hal ini, karena AI semakin banyak digunakan untuk memungkinkan penilaian dibuat tentang berbagai situasi, demikian juga akan ada harapan bahwa AI akan digunakan di beberapa bagian sistem peradilan. Dari mobil otomatis yang menentukan apakah akan mengorbankan penumpang atau pejalan kaki dalam situasi tabrakan, hingga AI yang digunakan dalam kompetisi olahraga seperti senam di mana kinerja diubah menjadi hasil numerik, AI digunakan untuk menilai situasi yang melibatkan manusia. Mengenai pengambilan keputusan sumber daya manusia, kinerja dan bidang rekrutmen, penerimaan AI sudah maju dengan baik. Mengingat keadaan ini, ada kemungkinan yang lebih besar bahwa Hakim AI akan didukung dalam banyak yurisdiksi dan ada berbagai kesulitan etika yang kompleks dan masalah filosofis yang berakar pada pengembangan Hakim AI dalam hal nilai-nilai keadilan yang dianggap penting oleh masyarakat.

Pergeseran ke arah peningkatan penggunaan AI dalam bentuk pengodean prediktif, analitik prediktif, dan pembelajaran mesin, menunjukkan bahwa penggunaan AI oleh firma hukum telah mengubah cara materi disajikan kepada hakim dan cara risiko klien dinilai. Terlepas dari pergeseran ini yang sebagian besar terkait dengan apa yang disajikan kepada hakim, ada perubahan yang berkaitan dengan penggunaan AI sebagai pelengkap pengambilan keputusan dan juga indikasi bahwa beberapa pengambilan keputusan yudisial akan digantikan oleh AI. Juga jelas bahwa beberapa hakim akan menolak pendekatan ini di tengah kekhawatiran bahwa perkembangan di sektor peradilan mungkin kurang memperhatikan kebaikan masyarakat atau implikasi yang lebih mendalam dari inovasi AI.

Namun, apakah realistis bahwa AI akan menggantikan apa pun selain pengambilan keputusan yudisial yang sederhana? Jawaban saya adalah ya, meskipun mungkin butuh waktu dan banyak rintangan yang harus diatasi, lalu muncul juga pertanyaan tentang mengapa kita ingin melakukannya. Saat ini, AI jelas dapat mendukung pengambilan keputusan (misalnya, dengan memungkinkan identifikasi hasil potensial yang lebih akurat oleh peserta), memainkan peran yang semakin besar dalam beberapa bentuk penyelesaian sengketa (terutama di ranah keluarga), dan mendukung proses peradilan serta pengambilan keputusan. Perubahan tersebut menimbulkan isu tentang peran pengadilan dan hakim di masa mendatang serta mengangkat isu-isu menantang tentang bagaimana data dikelola dan dikategorikan, serta di mana dan bagaimana fungsi eksekutif dan yudisial dijalankan dan dipisahkan. Selain itu, seperti yang terjadi di AS, terdapat isu tentang kekayaan intelektual dan siapa yang mungkin memiliki kendali dan masukan atas AI Hakim yang dialihdayakan serta bagaimana algoritma transparan digunakan dan dikembangkan, serta isu-isu kritis yang muncul di yurisdiksi lain yang terkait dengan keamanan data, kerahasiaan, dan privasi.

Terdapat pula isu terkait gambar-gambar teknologi yang mana beberapa teknologi mungkin menganggap AI sudah dapat menggantikan manusia, dan kenyataannya mungkin belum memenuhi janji tersebut (setidaknya belum). Misalnya, penulis bereksperimen dengan

satu program penulis AI pada Agustus 2020 untuk mengevaluasi bagaimana alat tulis AI komersial sederhana dapat mengeksplorasi topik 'Hakim, AI, dan Teknologi'. Hasilnya tercantum dalam Kata Pengantar buku ini. Tampak jelas bahwa, meskipun beberapa konsep diungkapkan, banyak yang tidak, dan hasil pembacaan apa pun dapat dianggap cacat. AI Hakim, bahkan ketika dilatih dengan keputusan dan opini pengadilan, dapat menghasilkan hasil yang sama mengecewakannya (meskipun sebagian besar berpendapat bahwa hal ini akan ditingkatkan seiring waktu). Namun, diantisipasi bahwa beberapa peningkatan di area ini akan relatif cepat, dengan perkembangan signifikan pada tahun 2020 terkait proses GPT yang dikembangkan oleh Open AI menghasilkan respons tertulis yang jauh lebih mirip manusia.

Masalah lain yang terkait dengan Hakim AI yang lebih berkembang sepenuhnya menyangkut masalah etika, moral dan politik yang terkait dengan pertimbangan tentang apa itu 'hakim' atau 'pengadilan' dalam suatu masyarakat, serta pertanyaan yang berkaitan dengan penggantian bentuk-bentuk penting pengambilan keputusan manusia oleh AI. Hingga saat ini, telah ada beberapa eksplorasi masalah ini, terutama di Eropa dalam konteks hakim dan pengadilan. Di sini, panduan etika sehubungan dengan AI yang lebih umum relevan, dan dalam hal ini ada banyak literatur dan lembaga yang berfokus pada etika dan AI. Dalam hal ini, pengembangan pedoman khusus nasional dan yurisdiksi tentang AI juga akan terus relevan. Pedoman etika yang lebih baru yang mempromosikan gagasan bahwa AI harus berkelanjutan dan mencatat bahwa keberlanjutan dapat memunculkan referensi ke tata kelola dan pembangunan kepercayaan, bersama dengan pedoman yang mempertimbangkan prinsip-prinsip desain etika dan keadilan dari berbagai perspektif akan membantu mendukung sistem yang 'adil'. Namun, ada kebutuhan untuk mengembangkan materi etika yang lebih relevan dan spesifik bagi hakim tentang hakim, teknologi, dan AI yang dapat membantu hakim untuk menanggapi isu-isu yang muncul dalam keadaan kasus tertentu serta dalam konteks desain keadilan di masa mendatang (pedoman yang tercantum dalam Tabel 9.2 dimaksudkan untuk mencerminkan wacana akademis dan peradilan hingga saat ini tentang isu-isu ini).

Terkait isu-isu politik, pemeliharaan dan dukungan terhadap lembaga peradilan yang independen dan berfungsi dengan baik sangat penting di negara-negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hakim manusia jelas dapat berperan dalam membentuk dan menafsirkan pengambilan keputusan politik, mengoreksi tindakan pemerintah, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat isu-isu signifikan terkait kemampuan Hakim AI untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, terutama jika dikembangkan di negara-negara yang mungkin kurang memperhatikan pentingnya independensi lengan ketiga pemerintahan. Perlu dicatat, pengembangan Hakim AI mungkin perlu melibatkan penerimaan pandangan bahwa hakim memainkan peran terbatas dalam pengembangan hukum, karena hal ini membutuhkan adopsi pendekatan 'formalis' terhadap peran peradilan, alih-alih pendekatan responsif terhadap hukum.

Meskipun dampak Hakim AI relatif kecil dalam hal penerapannya (setidaknya pada awalnya di sebagian besar negara), perkembangan AI akan mengubah cara hakim menyidangkan kasus dan membuat keputusan, serta akan memiliki dampak lain yang lebih signifikan terhadap peran peradilan. Telah dikatakan bahwa:

Kecerdasan buatan akan membentuk masa depan kita lebih kuat daripada inovasi lainnya di abad ini. Siapa pun yang tidak memahaminya akan segera merasa tertinggal, terbangun di dunia yang penuh dengan teknologi yang semakin terasa seperti sihir.

Perkembangan ini berarti bahwa para hakim tidak hanya harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman dasar tentang AI, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan implikasi penggunaannya terhadap sistem peradilan dan badan peradilan. Oleh karena itu, para hakim harus memiliki strategi untuk menangani isu-isu etika dan isu-isu lain yang diangkat oleh Hakim AI. Secara khusus, mereka harus mempertimbangkan kembali peran mereka dan sejauh mana AI memasukkan aktivisme yang lebih luas dalam perancangan sistem peradilan di masa depan, sambil mengingat, dalam hal reformasi teknologi dan sistem peradilan, bahwa hanya karena kita dapat melakukan sesuatu, bukan berarti kita harus melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agudo, U., Liberal, K. G., Arrese, M., & Matute, H. (2024). The impact of AI errors in a human-in-the-loop process. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 9(1), 1.
- Barysè, D., & Sarel, R. (2024). Algorithms in the court: does it matter which part of the judicial decision-making is automated?. *Artificial intelligence and law*, 32(1), 117-146.
- Chulliev, S. (2024). Transforming judicial competencies: a framework for judge training and qualification in ai-enhanced court systems. *Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal*, 2(3).
- Constantinides, M., & Quercia, D. (2022). Good intentions, bad inventions: How employees judge pervasive technologies in the workplace. *IEEE Pervasive Computing*, 22(1), 69-76.
- Dixon Jr, J. H. B. (2025). I Am a Judge. Should I Use AI to Do My Job? Which AI Tools Should I Use?. *Judges Journal*, 64(1).
- Du, S., Li, L., Wang, Y., Liu, Y., & Pan, Y. (2023). Application of HPV-16 in Liquid-Based Thin Layer Cytology of Host Genetic Lesions Based on AI Diagnostic Technology Presentation of Liquid. *Journal of Theory and Practice of Engineering Science*, 3(12), 1-6.
- Elsie, I. C. (2024). Judges, Technology and Artificial Intelligence: The Artificial Judge.
- Ermakova, E. P., & Frolova, E. E. (2021). Using artificial intelligence in dispute resolution. In *Smart technologies for the digitisation of industry: Entrepreneurial environment* (pp. 131-142). Singapore: Springer Singapore.
- Fan, D., Zhang, T., Li, F., Wu, W., Yu, Y., & Yu, G. (2024, December). Research on Multidimensional Evaluation Technology of Teachers' Digital Literacy for LLM as a Judge. In *BenchCouncil International Symposium on Intelligent Computers, Algorithms, and Applications* (pp. 95-106). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Ferreira, D. B., & Gromova, E. A. (2023). Hyperrealistic jurisprudence: The digital age and the (un) certainty of judge analytics. *International Journal for the Semiotics of Law-Revue internationale de Sémiotique juridique*, 36(6), 2261-2281.
- Grossman, M. R., Grimm, P. W., & Brown, D. G. (2023). Is disclosure and certification of the use of generative AI really necessary?. *Judicature*, 107, 68.
- Grossman, M. R., Grimm, P. W., Brown, D. G., & Xu, M. (2023). The GPTJudge: Justice in a generative AI world. *Duke L. & Tech. Rev.*, 23, 1.

- Guan, X., Qin, T., & Qi, T. (2022). Precision medicine in lung cancer theranostics: paving the way from traditional technology to advance era.
- Herbert, J. (2024). By Senior Judge Stephanie Domitrovich and Judge Herbert B. Dixon Jr. *Judges Journal*, 63(1).
- Ho, M. T. (2023). Hidalgo César A, Orghian Diana, Albo-Canals Jordi, De Almeida Filipa & Martin Natalia (2021) How Humans Judge Machines. *Science & Technology Studies*, 36(2), 81-83.
- Ho, M. T., Mantello, P., & Ho, M. T. (2023). An analytical framework for studying attitude towards emotional AI: The three-pronged approach. *MethodsX*, 10, 102149.
- Hunt, W., Sarkar, S., & Warhurst, C. (2022). Measuring the impact of AI on jobs at the organization level: Lessons from a survey of UK business leaders. *Research Policy*, 51(2), 104425.
- Hussain, M. A., Labanieh, M. F., Mahdzir, N., Sulaiman, N., & Bawazir, O. S. A. (2023). The potential prospect of Artificial Intelligence (AI) in arbitration from the international, national and Islamic perspectives. *Journal of International Studies (JIS)*, 19(1), 95-122.
- Ifenthaler, D., Majumdar, R., Gorissen, P., Judge, M., Mishra, S., Raffaghelli, J., & Shimada, A. (2024). Artificial intelligence in education: Implications for policymakers, researchers, and practitioners. *Technology, Knowledge and Learning*, 29(4), 1693-1710.
- Judge, K., Grant, C., Stratton, L., Moreno, M., & Fazio, S. (2024). THE EMPOWERED CAREGIVER: A SCALABLE AND PRAGMATIC EVIDENCE-BASED PROGRAM FOR DEMENTIA CAREGIVERS. *Innovation in Aging*, 8(Supplement_1), 580-580.
- Kabir, M. S., & Alam, M. N. (2023). The role of AI technology for legal research and decision making. *Title of the Journal*.
- Kasap, G. H. (2021). Can Artificial Intelligence ("AI") replace human arbitrators? Technological concerns and legal implications. *J. Disp. Resol.*, 209.
- Khan, M. R. (2024). Judging the Artificial Judge. Available at SSRN 4805942.
- Kim, T., & Peng, W. (2025). Do we want AI judges? The acceptance of AI judges' judicial decision-making on moral foundations. *AI & SOCIETY*, 40(5), 3683-3696.
- Kozlov, Y., Shutova, M., & Bajwa, T. (2025). Automated Judge is Not a Task For LegalTech But For DeepTech. Available at SSRN 5151862.
- Kristofik, A. (2025). Bias in AI (Supported) Decision Making: Old Problems, New Technologies. In *IJCA* (Vol. 16, p. 1).

- Lee, B. C., & Kim, B. Y. (2021). Development of an AI-based interview system for remote hiring. *International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)*, 12(3), 654-663.
- Lee, J., & Kim, S. H. (2024). A Study on Generative AI-Based Feedback Techniques for Tutoring Beginners' Error Codes on Online Judge Platforms. *Journal of The Korea Society of Computer and Information*, 29(8), 191-200.
- Luong, H. Q. (2025). Offline open-source RAG-based AI chatbot for Finnish-language software documentation on low-end hardware: modular model-agnostic framework and AI judge for multilingual use.
- Marriott, H. R., & Pitardi, V. (2024). One is the loneliest number... Two can be as bad as one. The influence of AI Friendship Apps on users' well-being and addiction. *Psychology & marketing*, 41(1), 86-101.
- Martinho, A. (2025). Surveying Judges about artificial intelligence: profession, judicial adjudication, and legal principles. *AI & SOCIETY*, 40(2), 569-584.
- Murimi, R. (2021). When humans judge other humans using machines. MIT Computational Law Report.
- Nahi, H. A., Fadhil, N. H., Saeed, M. M., & Salman, R. A. (2025). A Novel Blockchain-Based System for Developing a Virtual Judge. *Journal of Computer Science*, 21(2), 380-387.
- Nowotko, P. M. (2021). AI in judicial application of law and the right to a court. *Procedia computer science*, 192, 2220-2228.
- Parikh, P. M., Shah, D. M., & Parikh, K. P. (2023). Judge juan manuel padilla garcia, ChatGPT, and a controversial medicolegal milestone. *Indian Journal of Medical Sciences*, 75(1), 3-8.
- Pinski, M., & Benlian, A. (2023). AI literacy-towards measuring human competency in artificial intelligence.
- Rahbari, E., & Shabanpoor, A. (2023). The Challenges in Employing of AI Judge in Civil Proceedings. *Legal Research Quarterly*, 25(Special Issue of Law & Technology), 419-444.
- Rangan, K., & Yin, Y. (2024). A fine-tuning enhanced RAG system with quantized influence measure as AI judge. *Scientific Reports*, 14(1), 27446.
- Rodriguez, X. (2023, September). Artificial Intelligence (AI) and the Practice of Law. In *SEDONA CONF. J.* (Vol. 24, p. 783).

- Shope, M. L. (2021). Lawyer and judicial competency in the era of artificial intelligence: Ethical requirements for documenting datasets and machine learning models. *Geo. J. Legal Ethics*, 34, 191.
- Sourdin, T. (2021). *Judges, technology and artificial intelligence: The artificial judge*. Edward Elgar Publishing.
- Sourdin, T. (2024). Replacing, supporting or enhancing judges?: Judge AI considerations for the future. *AUSTRALIAN LAW JOURNAL*, 98(9), 696-707.
- Tao, F. (2022). A new harmonisation of art and technology: Philosophic interpretations of artificial intelligence art. *Critical Arts*, 36(1-2), 110-125.
- Teixeira da Silva, J. A., Carboch, J., & Deutscher, C. (2024). A debate on the use of artificial intelligence, as an electronic line judge, for line calls in tennis. *Sport in Society*, 27(3), 459-465.
- Tsuzuki, R. (2022). Development of automation and artificial intelligence technology for welding and inspection process in aircraft industry. *Welding in the World*, 66(1), 105-116.
- Von Eschenbach, W. J. (2021). Transparency and the black box problem: Why we do not trust AI. *Philosophy & technology*, 34(4), 1607-1622.
- Wang, N., & Tian, M. Y. (2023). "Intelligent Justice": human-centered considerations in China's legal AI transformation. *AI and Ethics*, 3(2), 349-354.
- Wang, X., & Qiu, X. (2024). The positive effect of artificial intelligence technology transparency on digital endorsers: Based on the theory of mind perception. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 78, 103777.
- Watamura, E., Ioku, T., Mukai, T., & Yamamoto, M. (2024). Empathetic robot judge, we trust you. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40(18), 5192-5201.
- Wilson, A., Stefanik, C., & Shank, D. B. (2022). How do people judge the immorality of artificial intelligence versus humans committing moral wrongs in real-world situations?. *Computers in Human Behavior Reports*, 8, 100229.
- Wu, H., Wang, Y., & Wang, Y. (2024). "To Use or Not to Use?" A mixed-methods study on the determinants of EFL college learners' behavioral intention to use AI in the distributed learning context. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 25(3), 158-178.

- Xie, C., Fu, T., Yang, C., Chang, E. C., & Zhao, M. (2024). Not a good judge of talent: the influence of subjective socioeconomic status on AI aversion. *Marketing Letters*, 35(3), 381-393.
- Xu, N., & Wang, K. J. (2021). Adopting robot lawyer? The extending artificial intelligence robot lawyer technology acceptance model for legal industry by an exploratory study. *Journal of Management & Organization*, 27(5), 867-885.
- Xu, Z. (2022). Human judges in the era of artificial intelligence: challenges and opportunities. *Applied Artificial Intelligence*, 36(1), 2013652.
- Yalcin, G., Themeli, E., Stamhuis, E., Philipsen, S., & Puntoni, S. (2023). Perceptions of justice by algorithms. *Artificial intelligence and Law*, 31(2), 269-292.

Hakim, Teknologi dan Artificial Intelligence (AI)

Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-32-4 (PDF)



9

786347

227324